



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

STRENGTH TO GO BEYOND



DISCLAIMER

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini dapat dibaca secara bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai komitmen, pendekatan, dan pelaksanaan program keberlanjutan. Dalam Laporan ini, setiap penyebutan “Perseroan” atau “Perusahaan” merujuk pada PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, sedangkan “Grup SMN” atau “Grup” merujuk pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk selaku entitas induk beserta entitas anaknya, termasuk Perseroan.

This Annual Report may be read together with the Sustainability Report to provide a more comprehensive understanding of the sustainability commitments, approach, and program implementation. In this Report, any reference to the “Company” refers to PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, while the “SMN Group” or “Group” refers to PT Sarana Menara Nusantara Tbk as the parent entity together with its subsidiaries, including the Company.



IBST memasuki fase baru pembaruan dan pertumbuhan dengan semangat yang semakin kuat, arah yang semakin jelas, dan tujuan yang semakin terfokus. Didukung oleh sinergi dalam SMN Group, Perseroan membangun kembali fondasinya secara lebih kokoh untuk memperkuat kesiapan operasional, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jaringan fiber secara bertahap dan terukur. Perjalanan ini mencerminkan transformasi yang tidak hanya menandai pemulihan, tetapi juga penegasan kembali atas kapasitas Perseroan untuk melangkah lebih jauh.

IBST entered a new phase of renewal and growth with stronger momentum, clearer direction, and a more focused purpose. Strengthened by synergy within the SMN Group, the Company rebuilt its foundation to reinforce operational readiness, improve efficiency, and gradually expand its fiber network in a measured manner. This journey reflects a transformation that represents not only recovery, but also a renewed affirmation of the Company's capacity to move further ahead.

Setiap kemajuan yang dicapai IBST sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa kekuatan yang dibangun dari proses pembaruan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Dengan mengedepankan disiplin pelaksanaan, kejelasan strategi, dan kolaborasi yang kuat, Perseroan terus mengubah momentum pemulihan menjadi akselerasi kinerja dan penciptaan nilai jangka panjang. Melalui langkah tersebut, IBST menegaskan komitmennya untuk tumbuh melampaui capaian saat ini dan menghadirkan kemajuan yang memberi dampak lebih luas di masa depan.

Each milestone achieved by IBST throughout 2025 demonstrates that strength built through renewal can become the basis for more sustainable growth. By emphasizing disciplined execution, strategic clarity, and strong collaboration, the Company continues to turn recovery momentum into performance acceleration and long-term value creation. Through these efforts, IBST reaffirms its commitment to growing beyond current achievements and delivering broader progress for the future.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

Disclamer
Disclamer

Penjelasan Tema Theme Explanation	1
Daftar Isi Table of Contents	2

Ikhtisar Utama 04

Main Highlights

Ringkasan Kinerja 2025 Performance Summary 2025	6
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	7
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	8
Kinerja Saham Stock Performance	9
Aksi Korporasi Corporate Actions	10
Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Supension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>) Information on the Temporary Suspension and/or Delisting	10
Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi Bonds, Sukuk or Conversion Bonds Highlights	11
Peristiwa Penting Event Highlights	11

Laporan Manajemen 12

Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	14
Laporan Direksi Board of Directors Report	24
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Statement Letter of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the Annual Report for Fiscal Year 2025 of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	34

Profil Perusahaan 36

Company Profile

Identitas Perusahaan Company Identity	38
Visi, Misi, Budaya Perusahaan, dan Nilai-Nilai Utama Perusahaan Vision, Mission, Corporate Culture, and Core Values	40
Jejak Langkah Milestones	42
Riwayat Singkat Perusahaan Company at a Glance	46
Perubahan Nama Change of the Company Name	48
Kegiatan Usaha Business Activities	49
Produk & Layanan Kami Our Products & Services	50
Wilayah Operasional Operational Areas	52
Struktur Organisasi Organization Structure	54
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	56
Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition	57
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	58
Komposisi Direksi Board of Directors Composition	61
Profil Direksi Board of Directors Profile	62
Demografi Karyawan Employee Demography	66
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	68
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholders	71
Struktur Pemegang Saham Shareholders Structure	72
Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates and Joint Ventures	74
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	74
Kronologi Pencatatan Obligasi dan/atau Efek Lainnya Bonds and/or Other Securities Listing Chronology	75
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm	75
Lembaga dan Profesional Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professions and Institutions	75
Penghargaan & Sertifikasi Awards & Certifications	76
Informasi pada Website Perusahaan Corporate Website Information	77





Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

78

Tinjauan Makroekonomi dan Industri Macroeconomics and Industry Review	80
Strategi Perusahaan Corporate Strategy	84
Aspek Pemasaran Marketing Aspects	90
Prospek Usaha Tahun 2026 Business Outlook for 2026	91
Tinjauan Operasional Segmen Usaha Business Segment Operational Review	92
Tinjauan Keuangan Financial Review	94
Sumber Daya Manusia Human Resources	106
Teknologi Informasi Information Technology	115

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

126

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment to Corporate Governance Practices	128
Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Legal Basis for Corporate Governance Practices	130
Penerapan Prinsip GCG Implementation of GCG Principles	131
Kebijakan dan Implementasi GCG GCG Policy and Implementation	132
Penilaian Penerapan GCG GCG Assessments	134
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	138
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	140
Dewan Komisaris Board of Commissioners	159
Direksi Board of Directors	174
Komite Audit Audit Committee	187
Fungsi Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Function	196
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	198
Audit Internal Internal Audit	201
Akuntan Publik Public Accountant	205
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	206
Manajemen Risiko Risk Management	208

Permasalahan Hukum Litigation	213
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	213
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Corporate Information and Data	214
Kebijakan Privasi Data dan Informasi Data and Information Privacy Policy	215
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	216
Kode Etik Code of Conduct	218
Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditur Company's Policy on Creditor's Rights	220
Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy	221
Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi untuk Keterbukaan Informasi Policy on the Utilization of Information Technology for Information Transparency	222
Kebijakan Transaksi Efek Bagi Orang Dalam Insider Trading Transaction Policy	223
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen Employee and/or Management Shares Option Programs	224
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	224
Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Asean Corporate Governance Scorecard Conformity of The Implementation of Corporate Governance Towards The Asean Corporate Governance Scorecard	226
Referensi SEOJK No. 16/POJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Emiten atau Perusahaan Publik Reference to OJK Circular Letter No. 16/POJK.04/2021 Regarding The Form and Content of Reports of Issuers or Public Companies	244

Laporan Keuangan

Financial Statements

263

Laporan Keuangan Financial Statements	264







Ikhtisar Utama

Main Highlights

FROM REVIVAL TO STRENGTH, FROM STRENGTH TO GROWTH

Tahun 2025 menjadi titik balik bagi IBST. Melalui eksekusi yang bijaksana, fokus strategis, dan sinergi dalam Grup SMN, Perseroan mengubah tantangan menjadi kekuatan, membangun kembali momentum kinerja yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

2025 was a transformative year for IBST. Through prudent execution, strategic focus and synergy within the SMN Group, the Company turned challenges into strength, rebuilding momentum and restoring sustainable growth.



RINGKASAN KINERJA 2025

PERFORMANCE SUMMARY 2025



Pendapatan Revenues

Rp871,89 miliar
billion

Perseroan membukukan pendapatan senilai Rp871,89 miliar di tahun 2025.

The Company record a revenues of Rp871.89 billion in 2025.



Aset Assets

Rp3,95 triliun
trillion

Perseroan membukukan aset sebesar Rp3,95 triliun di tahun 2025.

The Company's was able to record assets Rp3.95 trillion in 2025.



Ekuitas Equity

Rp2,58 triliun
trillion

Ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp2,58 triliun.

The Company's equity increased to Rp2.58 trillion.



Laba Bruto Gross Profit

Rp628,95 miliar
billion

Laba bruto mencapai Rp628,95 miliar di tahun 2025.

Gross profit reached Rp628.95 billion in 2025.



Laba Usaha Operating Profit

Rp609,96 miliar
billion

Laba usaha mencapai Rp609,96 miliar di tahun 2025.

Operating profit reached Rp609.96 billion in 2025.



Laba Tahun Berjalan Profit for The Year

Rp411,44 miliar
billion

Laba tahun berjalan mencapai Rp411,44 miliar di tahun 2025.

Profit for the year reached Rp411.44 billion in 2025.



Liabilitas Liabilities

Rp1,37 triliun
trillion

Liabilitas mencapai Rp1,37 triliun di tahun 2025.

Liabilities reached Rp1.37 trillion in 2025.



IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In Million Rupiah, unless stated otherwise

Uraian	2023	2024	2025	Description
Aset Lancar	1.935.900	661.353	400.603	Current Assets
Aset Tidak Lancar	5.689.417	3.758.148	3.544.965	Non-current Assets
Jumlah Aset	7.625.317	4.419.501	3.945.568	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	1.065.383	1.702.413	972.823	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	2.546.666	548.701	392.917	Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas	3.612.049	2.251.114	1.365.740	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	4.013.268	2.168.387	2.579.828	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.625.317	4.419.501	3.945.568	Total Liabilities and Equity

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In Million Rupiah, unless stated otherwise

Uraian	2023	2024	2025	Description
Pendapatan	1.109.756	862.466	871.892	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(516.842)	(497.664)	(242.946)	Cost of Revenues
Laba Bruto	592.914	364.802	628.946	Gross Profit
Beban Administrasi	(171.785)	(160.749)	(18.983)	Administrative Expenses
Pendapatan Keuangan	19.780	16.364	121	Finance Income
Beban Keuangan	(282.197)	(237.172)	(118.717)	Financing Costs
Pajak Penghasilan Final	(71.689)	(61.865)	(111.765)	Final Income Tax
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(10.552)	(4.430)	-	Loss on Impairment of Receivables
Keuntungan (Kerugian) Penurunan Nilai Aset Tetap	(8.842)	(113.564)	2.020	Gain (Loss) on Impairment of Fixed Assets
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Neto	4.445	(1.654.222)	29.819	Other Gains (Losses) - Net
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	72.074	(1.850.836)	411.441	Profit (Loss) for the Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Tahun Berjalan	68.838	(1.844.881)	411.441	Total Other Comprehensive Income - For The Year
Jumlah Saham Beredar *)	1.350.904.927	1.350.904.927	1.350.904.927	Outstanding Shares *)
Laba/(Rugi) per Saham Dasar *)	53	(1.370)	305	Basic Earnings/(Loss) per Share *)
EBITDA	824.066	579.215	791.212	EBITDA

Keterangan | Remarks : *) Disajikan dalam angka penuh. | Presented in full amount.

RASIO KEUANGAN PENTING

KEY RATIOS

RASIO PERTUMBUHAN	2023	2024	2025	GROWTH RATIO
Pendapatan Usaha	2	(22,3)	1,1	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(0,4)	(3,7)	(51,2)	Cost of Revenues
Laba Kotor	4	(38,5)	72,4	Gross Profit
Beban Administrasi	(0,4)	(6,4)	(88,2)	Administrative Expenses
Total Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	175	(2.797,3)	(122,3)	Total Other Comprehensive Income For The Year
Aset	5	(42,0)	(10,7)	Assets
Liabilitas	3	(37,7)	(39,3)	Liabilities
Ekuitas	7	(46,0)	19,0	Equity

RASIO USAHA	2023	2024	2025	OPERATING RATIO
EBITDA/Pendapatan	74,26	67,16	90,75	EBITDA/Revenues
Laba Kotor/Pendapatan	53,43	42,30	72,14	Gross Profit/Revenues
Total Penghasilan Komprehensif/ Pendapatan	6,20	(215,29)	47,19	Total Comprehensive Income/Revenues
Total Penghasilan Komprehensif/ Rata-Rata Ekuitas	1,73	(60,07)	17,33	Total Comprehensive Income/Average Equity
Total Penghasilan Komprehensif/ Rata-Rata Aset	0,91	(30,83)	9,84	Total Comprehensive Income/Average Assets

RASIO KEUANGAN	2023	2024	2025	FINANCIAL RATIO
Rasio Lancar	1,82	0,39	0,41	Current Ratio
Liabilitas/Aset	0,47	0,51	0,35	Liability to Assets
Liabilitas/Ekuitas	0,90	1,04	0,53	Liability to Equity
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (%)	0,01	(0,42)	0,10	Return on Total Assets (%)
Rasio Laba terhadap Ekuitas (%)	0,02	(0,85)	0,16	Return on Equity (%)
Rasio Laba Terhadap Pendapatan (%)	0,06	(2,15)	0,47	Profitability Ratio (%)

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Uraian	Satuan Unit	2023	2024	2025	Description
Jumlah Penyewa Menara	Unit	5.885	3.879	5.756	Total Tenants
Jumlah Menara	Unit	3.234	3.245	3.204	Total Towers
Rasio Kolokasi	(%)	1,82	1,20	1,80	Tenancy Ratio
Jumlah Jaringan Fiber Optik Aset (termasuk FTTT, FTTH, dan Connectivity)	Km	17.239	17.730	19.458	Number of Optic Fiber Assets Network (including FTTT, FTTH, dan Connectivity)



KINERJA SAHAM

STOCK PERFORMANCE

INFORMASI KINERJA SAHAM

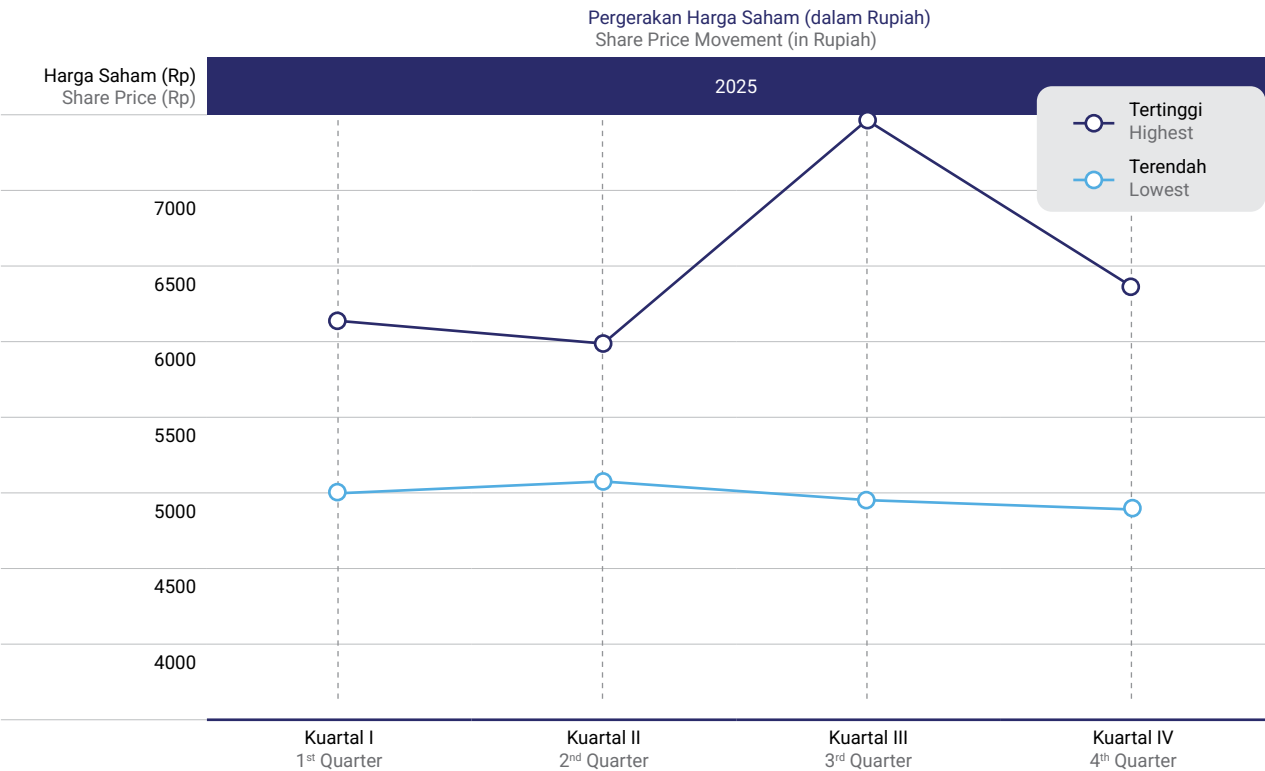
Hingga 31 Desember 2025, jumlah saham yang beredar dari Perseroan tercatat sebanyak 1.350.904.927 lembar. Sepanjang tahun, saham Perseroan mencatatkan harga tertinggi sebesar Rp7.350 pada bulan September 2025 dan harga terendah sebesar Rp4.740 pada bulan November 2025. Informasi mengenai saham Perseroan disajikan sebagai berikut:

SHARE PERFORMANCE INFORMATION

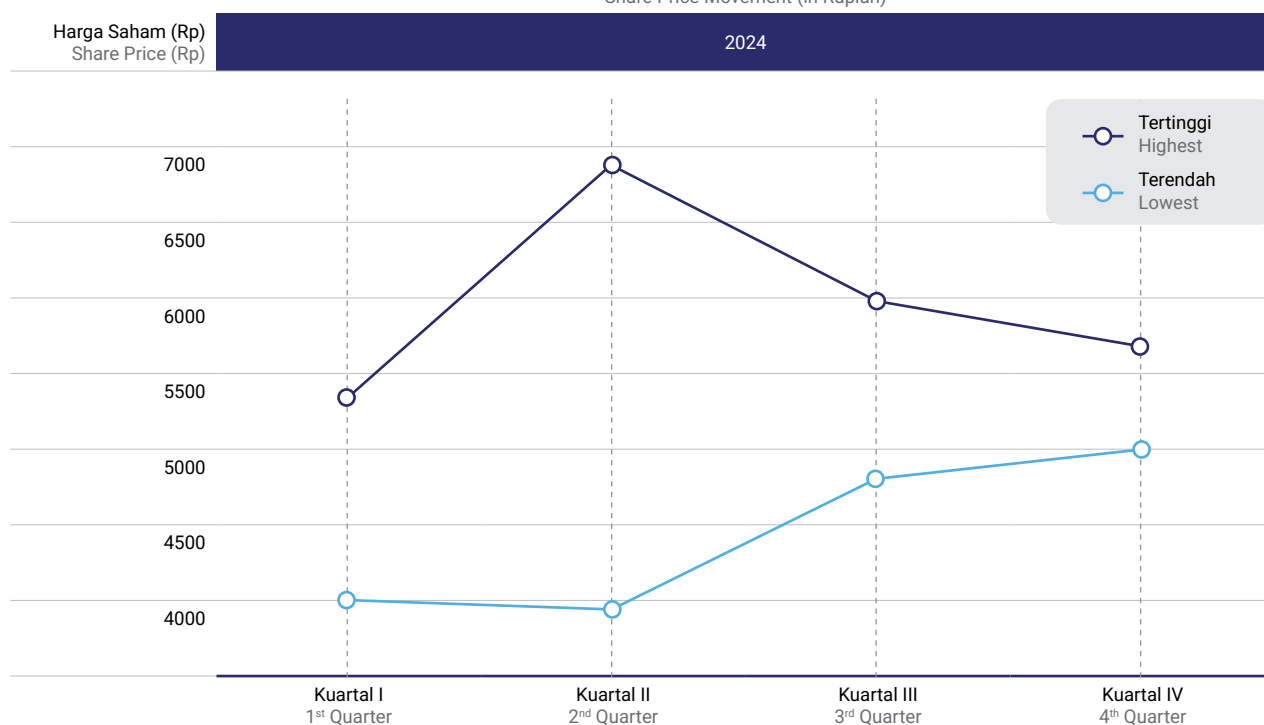
As of December 31, 2025, the total number of the Company's outstanding shares was recorded at 1,350,904,927 shares. Throughout the year, the Company's shares reached the highest price of Rp7,350 in September 2025 and the lowest price of Rp4,740 in November 2025. The following presents the Company's share information:

2025						
Kuartal Quarter	Tertinggi Highest (Rp)	Terendah Lowest (Rp)	Penutupan Closing (Rp)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	Volume Perdagangan Transaction Volume	Nilai Perdagangan Transaction Value (Rp)
I	6.000	4.850	4.940	6.673.470.339.380	0	13.972.000
II	5.900	4.900	4.900	6.619.434.142.300	0	9.020.000
III	7.350	4.770	5.600	7.565.067.591.200	0	191.467.500
IV	6.250	4.740	5.200	7.024.705.620.400	332.000	67.053.000

2024						
Kuartal Quarter	Tertinggi Highest (Rp)	Terendah Lowest (Rp)	Penutupan Closing (Rp)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	Volume Perdagangan Transaction Volume	Nilai Perdagangan Transaction Value (Rp)
I	5.375	4.000	4.000	5.403.619.708.000	3.111.251	30.000.000
II	6.900	4.000	5.525	7.463.749.721.675	-	75.676.500
III	6.150	4.900	5.500	7.429.977.098.500	1.217.297.423	243,163,500
IV	5.825	5.000	5.025	6.788.297.258.175	133.292.672	11.755.000



Pergerakan Harga Saham (dalam Rupiah)
Share Price Movement (in Rupiah)



AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi apa pun yang berdampak pada perubahan struktur saham, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock split*), pembagian dividen saham, penerbitan saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, maupun penambahan atau pengurangan modal.

As of the end of 2025, the Company did not carry out any corporate actions that affected its share structure, including stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus share issuances, changes in share par value, issuance of convertible securities, or capital increases or reductions.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

INFORMATION ON THE TEMPORARY SUSPENSION AND/OR DELISTING

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat suspensi maupun penghapusan pencatatan saham Perseroan oleh otoritas yang berwenang.

As of 31 December 2025, there were no suspensions or delistings of the Company's shares imposed by the relevant authorities.

Berdasarkan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. Peng-PP-00001/BEI.LPP/06-2023 perihal Pindah Papan tanggal 9 Juni 2023, sejak 12 Juni 2023, Perusahaan tercatat di Papan Pemantauan Khusus dan ditetapkan berada pada kriteria "7" yang digambarkan memiliki likuiditas rendah yaitu rata-rata nilai transaksi harian saham kurang dari Rp5 juta dan rata-rata volume transaksi harian saham kurang dari 10.000 lembar saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/ atau Pasar Reguler *Periodic Call Auction*.

Based on announcement of the Indonesian Stock Exchange's ("IDX") No. Peng-PP-00001/BEI.LPP/06-2023 on Board Movement dated 9 June 2023, since 12 June 2023, the Company has been listed on Watchlist Board and designated to be under criteria "7" which is described as having low liquidity i.e. average daily transactions value of less than Rp5 million and average daily volume transaction of less than 10,000 shares for the last 6 months on the Regular Market and/or Periodic Call Auction Regular Market.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

BONDS, SUKUK OR CONVERSION BONDS HIGHLIGHTS

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan maupun mencatatkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, atau instrumen efek lainnya di bursa efek mana pun.

As of the end of 2025, the Company had not issued or listed any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on any stock exchange.

PERISTIWA PENTING

EVENT HIGHLIGHTS



23 April 2025
April 23, 2025

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan *Public Expose* Tahunan.

The Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Annual Public Expose



20 Mei 2025
May 20, 2025

Penandatanganan Perubahan Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Varnion Technology Semesta, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Iforte Payment Infrastructure dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Signing of the First Amendment to the Amendment and Restatement of the Facility Agreement between PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Varnion Technology Semesta, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Iforte Payment Infrastructure, and PT Bank SMBC Indonesia Tbk



15 September 2025
September 15, 2025

Pada tanggal 15 September 2025, Perseroan kembali meraih 2 (dua) penghargaan tata kelola perusahaan, yaitu untuk kategori TOP 50 *Mid Capitalization Public Listed Company* dan *Best Responsibility of the Board* dari *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang *The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award*.

On September 15, 2025, the Company once again received two corporate governance awards, namely in the categories of TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company and Best Responsibility of the Board from The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award.





DRIVING RESILIENT GROWTH THROUGH STRATEGIC EXECUTION

Perseroan telah menjalankan strategi yang tepat melalui ekspansi infrastruktur menara, penguatan sinergi Grup SMN, optimalisasi aset, peningkatan efisiensi operasional, serta pembangunan komunikasi yang intensif dengan entitas hasil konsolidasi industri. Pasca konsolidasi industri, Perseroan tetap memiliki posisi pasar yang kuat, didukung oleh kontrak jangka panjang dengan pelanggan serta dukungan dari Grup sebagai penyedia infrastruktur digital terkemuka. Perseroan juga dinilai memiliki fundamental yang kokoh dalam menopang strategi ekspansi yang dijalankan.

The Company has implemented appropriate strategies, including the expansion of tower infrastructure, the strengthening of synergies with SMN Group, asset optimization, enhanced operational efficiency, and establishment of intensive communication with post-consolidation entity. Following industry consolidation, the Company continues to maintain a strong market position, supported by long-term contracts with customers and the backing of a leading digital infrastructure group. The Company is also assessed to have a solid fundamental foundation to support its expansion strategy.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONER REPORT



Adam Gifari

Komisaris Utama

President Commissioner



IBST telah menunjukkan ketahanan serta disiplin dalam pelaksanaan strategi sepanjang tahun 2025 di tengah dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang. Melalui fungsi pengawasan yang berkesinambungan, Dewan Komisaris memastikan bahwa berbagai inisiatif strategis Perseroan dilaksanakan selaras dengan visi jangka panjang Perseroan. Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk mengarahkan Perseroan dalam menjaga tata kelola yang baik, manajemen risiko yang prudent, serta pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur digital yang andal bagi transformasi digital Indonesia.

IBST has demonstrated resilience and disciplined execution throughout 2025 amid the evolving dynamics of the telecommunications industry. Through continuous oversight, the Board ensures that the Company's strategic initiatives are implemented in alignment with the Company's long-term vision. The Board of Commissioners remains committed to guiding the Company in upholding sound governance, prudent risk management, and sustainable growth, while continuing to support the development of reliable digital infrastructure that underpins Indonesia's digital transformation.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan ketahanan di tengah dinamika dan konsolidasi industri telekomunikasi. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perseroan" atau "IBST") mampu menjaga posisi yang solid di pasar melalui pelaksanaan strategi bisnis yang terarah, antara lain melalui optimalisasi aset infrastruktur, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan sinergi dengan perusahaan induk sebagai penyedia infrastruktur digital yang terpercaya. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah strategis tersebut telah memberikan dasar yang kuat bagi Perseroan dalam menjaga keberlanjutan kinerja serta memperkuat fundamental usaha di tengah perubahan lanskap industri.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi serta kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Proses pengawasan tersebut dilaksanakan melalui penelaahan laporan Direksi, rapat koordinasi secara berkala, serta pemberian arahan strategis guna memastikan bahwa

Dear Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the Company's performance throughout 2025, which remained resilient amid the dynamics and consolidation of the telecommunications industry. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("the Company" or "IBST") maintained a solid market position through the implementation of well-directed business strategies, including the optimization of infrastructure assets, improvements in operational efficiency, and strengthened synergies with its holding company as a trusted digital infrastructure provider. The Board of Commissioners considers that these strategic initiatives have provided a strong foundation for sustaining performance while reinforcing the Company's business fundamentals amid the evolving industry landscape.

In carrying out its oversight function, the Board of Commissioners consistently monitored and evaluated the implementation of strategies as well as the Company's operational and financial performance. This oversight process was conducted through the review of the Board of Directors' reports, regular coordination meetings, and provision of strategic guidance to ensure policies and

kebijakan dan langkah yang diambil oleh Direksi tetap selaras dengan visi jangka panjang Perseroan. Sejalan dengan peran tersebut, Dewan Komisaris juga mencermati perkembangan kondisi makroekonomi dan industri sepanjang tahun 2025 yang menjadi faktor penting dalam memengaruhi kinerja dan prospek usaha Perseroan.

FAKTOR MAKROEKONOMI TAHUN 2025

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk kondisi makroekonomi global dan nasional, dinamika industri telekomunikasi, perubahan regulasi, serta kapabilitas organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pada tingkat global, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, terutama sebagai dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik. Konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, serta eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, telah menimbulkan gangguan terhadap rantai pasok global dan menghambat aktivitas perdagangan internasional. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kebijakan proteksionisme perdagangan, termasuk penerapan tarif impor atau tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang kemudian direspons oleh Tiongkok melalui kenaikan tarif impor terhadap produk asal Amerika Serikat. Hubungan perdagangan global yang kurang kondusif ini menambah tekanan terhadap proses pemulihan ekonomi dunia.

Perlambatan ekonomi global tersebut disertai dengan meningkatnya fragmentasi antarnegara serta ketidakpastian di pasar keuangan global akibat volatilitas yang relatif tinggi. Dalam merespons tekanan inflasi dan menjaga stabilitas pasar tenaga kerja, Federal Funds Rate sebagai suku bunga acuan global bergerak menurun. Pasar saham global secara umum mencatatkan penguatan, meskipun tetap dibayangi oleh kekhawatiran terhadap potensi pembentukan gelembung pada saham sektor teknologi.

Di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global, perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja yang relatif solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan pada 2025. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah. Secara sektoral, hampir seluruh sektor usaha mencatatkan pertumbuhan, kecuali sektor

actions taken by the Board of Directors remained aligned with the Company's long-term vision. In line with this role, the Board also closely observed macroeconomic and industry developments throughout 2025, which served as important factors influencing the Company's performance and business prospects.

MACROECONOMIC FACTORS IN 2025

The Company's performance in 2025 was influenced by a combination of external and internal factors, including global and domestic macroeconomic conditions, developments in the telco industry, regulatory changes, and the organization's internal capabilities in managing and optimizing its resources.

At the global level, economic growth moderated, driven primarily by heightened geopolitical tensions. The ongoing conflict between Russia and Ukraine, as well as the escalation of tensions in the Middle East, disrupted global supply chains and constrained international trade activities. These conditions were further compounded by the strengthening of global trade protectionism, including the implementation of import or reciprocal trade tariffs by the United States, which were met with retaliatory tariff increases by China on U.S. goods. The less favorable global trade environment added pressure to the pace of global economic recovery.

The global economic slowdown was accompanied by increasing geopolitical fragmentation and heightened uncertainty in global financial markets amid elevated volatility. In response to inflationary pressures and in an effort to maintain labor market stability, the Federal Funds Rate, as the global benchmark interest rate, moved downward. Global equity markets generally recorded gains, although concerns regarding potential valuation bubbles in technology stocks persisted.

Amid rising global risks and uncertainty, Indonesia's domestic economy continued to demonstrate relative resilience. Based on data from Statistics Indonesia, the national economy grew by 5.11% year-on-year in September 2025. This growth was primarily supported by household consumption, investment, and government spending. On a sectoral basis, most business sectors recorded growth, with the exception of the mining sector,

pertambangan yang mengalami kontraksi. Sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,35% pada 2025, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan keuangan digital serta pemerataan jaringan konektivitas.

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut berlangsung dengan laju inflasi yang terkendali, yang tercatat sebesar 2,92% pada Desember 2025. Pada saat yang sama, nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 3,46% terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup pada level Rp16.690 per dolar AS per 31 Desember 2025. Depresiasi ini terutama dipengaruhi oleh penguatan dolar AS serta meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Upaya stabilisasi nilai tukar dilakukan melalui kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), yang sepanjang tahun 2025 turun sebesar 100 basis poin dari 5,75% di awal tahun menjadi 4,75% pada akhir tahun.

Dalam konteks industri telekomunikasi, pemerintah berupaya mendorong terciptanya industri yang lebih sehat dan efisien melalui persetujuan atas konsolidasi tiga perusahaan operator telekomunikasi besar. Konsolidasi tersebut dinilai dapat memperkuat struktur industri dalam mendukung percepatan transformasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meskipun di sisi lain turut memengaruhi tingkat utilisasi aset infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas pemerataan konektivitas hingga ke wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan regulasi dan peluncuran infrastruktur Satelit Nusantara 5 (N5). Penguatan konektivitas ini diyakini membuka peluang ekonomi baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Industri telekomunikasi juga berada pada tahap kesiapan untuk mengadopsi pengembangan jaringan 5G guna meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan dan *internet of things*, telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas di industri.

PANDANGAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam lingkungan makroekonomi dan industri yang dinamis tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan strategi yang tepat melalui ekspansi infrastruktur menara, penguatan sinergi dengan Grup PT

which experienced contraction. The information and communication sector grew by 8.35% in 2025, in line with increased digital economic and financial activities and the broader expansion of connectivity infrastructure.

National economic growth was accompanied by controlled inflation, which stood at 2.92% in December 2025. During the same period, the Rupiah depreciated by 3.46% against the U.S. dollar and closed at Rp16,690 per U.S. dollar as of December 31, 2025. The depreciation was primarily driven by the strengthening of the U.S. dollar and heightened uncertainty in global financial markets. Exchange rate stabilization efforts were undertaken through monetary policy measures, including a reduction in Bank Indonesia's benchmark interest rate (BI Rate), which declined by a total of 100 basis points from 5.75% at the beginning of the year to 4.75% at year-end 2025.

Within the telecommunications industry, the government sought to foster a healthier and more efficient industry structure by approving the consolidation of three major telecommunications operators. The consolidation is expected to strengthen the industry's capacity to support accelerated digital transformation and high-quality economic growth, while also affecting infrastructure asset utilization levels. In addition, the government continued to promote broader connectivity coverage, including in remote areas, and improve service quality through regulatory enhancements and the launch of the Nusantara 5 (N5) Satellite infrastructure. Strengthened connectivity is expected to create new economic opportunities and contribute to improved public welfare.

The telecommunications industry is also preparing to adopt the further development of 5G networks to enhance service quality. Moreover, the application of advanced digital technologies, including artificial intelligence and the Internet of Things, has contributed to improved operational efficiency and productivity across the industry.

VIEW ON THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

Against this dynamic macroeconomic and industry backdrop, the Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors has implemented appropriate strategies, including the expansion of tower infrastructure,

Sarana Menara Nusantara Tbk ("SMN"), optimalisasi aset, peningkatan efisiensi operasional, serta pembangunan komunikasi yang intensif dengan entitas hasil konsolidasi industri.

Pasca konsolidasi industri, Perseroan tetap memiliki posisi pasar yang kuat, didukung oleh kontrak jangka panjang dengan pelanggan serta dukungan dari Grup sebagai penyedia infrastruktur digital terkemuka. Perseroan juga dinilai memiliki fundamental yang kokoh dalam menopang strategi ekspansi yang dijalankan.

Pertumbuhan pembangunan menara baru berada pada tingkat yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan pelanggan operator telekomunikasi. Dewan Komisaris menilai bahwa strategi ekspansi tersebut dijalankan secara terukur dan didukung oleh penguatan fundamental keuangan, dengan fokus pada penurunan liabilitas serta efisiensi biaya untuk meningkatkan profitabilitas.

Strategi pelunasan utang (*deleveraging*) Perseroan dinilai berjalan secara efektif dalam menciptakan ruang yang lebih luas untuk mendukung ekspansi usaha, dengan tetap menjaga tingkat kesehatan keuangan. Dukungan dari entitas induk turut memperkuat struktur permodalan Perseroan sepanjang tahun 2025.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan transformasi digital secara berkesinambungan. Pada tahun 2025, inisiatif transformasi digital difokuskan pada percepatan automasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta penguatan keamanan siber untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan Perseroan.

Pada aspek kinerja keuangan, pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp871,89 miliar pada 2025, naik sebesar 1,09% *year-to-date* dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp862,47 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari bisnis sewa menara dengan basis pelanggan yang terdiversifikasi.

Penerapan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan *internet of things* dalam pemantauan kondisi menara, berdampak pada penurunan signifikan beban usaha sebesar 88,19% menjadi Rp18,98 miliar pada 2025, dibandingkan Rp160,75 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan biaya ini turut menopang peningkatan profitabilitas Perseroan.

the strengthening of synergies with PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("SMN") Group, asset optimization, enhanced operational efficiency, and establishment of intensive communication with post-consolidation entity.

Following industry consolidation, the Company continues to maintain a strong market position, supported by long-term contracts with customers and the backing of a leading digital infrastructure group. The Company is also assessed to have a solid fundamental foundation to support its expansion strategy.

The growth in the construction of new towers remained at a competitive level to meet the requirements of telecommunications operator customers. The Board of Commissioners notes that the expansion strategy was executed in a measured manner and supported by strengthened financial fundamentals, with a focus on liability reduction and cost efficiency to enhance profitability.

The Company's deleveraging strategy is assessed to have been implemented effectively, providing greater financial flexibility to support expansion while maintaining financial soundness. Support from the parent entity further strengthened the Company's capital structure throughout 2025.

In addition, the Company continued to implement its digital transformation initiatives on an ongoing basis. In 2025, digital transformation efforts focused on accelerating automation to enhance efficiency and competitiveness, as well as strengthening cybersecurity to reinforce customer confidence in the Company's services.

On financial performance, revenue reached Rp871.89 billion in 2025, a year-to-date increase of 1.09% compared to Rp862.47 billion in the same period of 2024. Revenue was derived from the tower leasing business with a diversified customer base.

Operational efficiency initiatives, including the adoption of digital technologies such as artificial intelligence and internet of things for tower condition monitoring, resulted in a significant reduction in operating expenses by 88.19% to Rp18.98 billion in 2025, compared to Rp160.75 billion in the corresponding period of the previous year. The decline in costs contributed to improved profitability.

Laba usaha tercatat sebesar Rp609,96 miliar pada 2025, meningkat sebesar 198,92% dibandingkan Rp204,05 miliar pada tahun 2024. Laba tahun berjalan mencapai Rp411,44 miliar pada 2025, berbalik dari kondisi rugi bersih sebesar Rp1,85 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Struktur keuangan Perseroan semakin solid, dengan total aset mencapai Rp3,95 triliun dan liabilitas yang menurun sebesar 39,33% *year-to-date* menjadi Rp1,37 triliun pada 2025. Penurunan liabilitas tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi *deleveraging* oleh Direksi. Sejalan dengan hal tersebut, ekuitas meningkat sebesar 18,97% *year-to-date* menjadi Rp2,58 triliun.

Berdasarkan pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola Perseroan secara optimal dengan penerapan manajemen risiko yang memadai. Kinerja yang solid tersebut juga diiringi dengan komitmen yang konsisten dalam pelaksanaan aspek keberlanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas perumusan strategi yang diajukan oleh Direksi setelah melalui proses penelaahan yang memadai. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi bisnis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direksi selaras dengan visi jangka panjang Perseroan, berorientasi pada perlindungan kepentingan pemegang saham, penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, serta penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam tahap implementasi strategi, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan melalui rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi. Agenda rapat tersebut mencakup pembahasan mengenai perkembangan kondisi makroekonomi dan industri, berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan, capaian kinerja operasional dan keuangan, serta penyampaian arahan strategis dalam merespons dinamika lingkungan usaha.

Sejalan dengan peran pengawasan tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran dan nasihat kepada Direksi agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-

Operating profit reached Rp609.96 billion in 2025, an increase of 198.92% compared to Rp204.05 billion in 2024. Profit for the year amounted to Rp411.44 billion in 2025, compared to a net loss of Rp1.85 trillion recorded in the same period of the prior year.

The Company's financial structure strengthened further, with total assets reaching Rp3.95 trillion and liabilities declining by 39.33% year-to-date to Rp1.37 trillion in 2025. The reduction in liabilities reflects the effectiveness of the deleveraging process implemented by the Directors. Equity also increased by 18.97% year-to-date to Rp2.58 trillion.

Based on the above performance, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has managed the Company effectively, supported by sound risk management practices. The solid performance was accompanied by a strong commitment to sustainability, encompassing environmental, social, and governance aspects.

OVERSIGHT BY THE BOARD OF COMMISSIONERS IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners has approved the formulation of strategies proposed by the Board of Directors following appropriate review. In this regard, the Board of Commissioners ensures that the business strategies implemented by the Board of Directors are aligned with the Company's long-term vision, safeguard shareholders' interests, deliver value to other stakeholders, and are conducted in accordance with good corporate governance practices.

During the implementation phase, the Board of Commissioners performs its oversight function on an ongoing basis through internal meetings of the Board of Commissioners as well as joint meetings with the Board of Directors. Meeting agendas include discussions on macroeconomic and industry developments, key challenges faced by the Company, operational and financial performance achievements, and the provision of strategic direction in response to a dynamic business environment.

In carrying out its oversight role, the Board of Commissioners provides advice and recommendations to the Board of Directors to consistently apply the

hatian, manajemen risiko yang efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas kebijakan strategis Perseroan, termasuk optimalisasi aset, pengembangan infrastruktur digital, diversifikasi layanan berbasis teknologi, serta penggunaan fasilitas pinjaman.

Sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan strategis, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memastikan bahwa adopsi perkembangan teknologi, termasuk jaringan 5G, komputasi awan (*cloud computing*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dilakukan secara terukur dan efektif. Selain itu, Dewan Komisaris juga menekankan keberlanjutan pemanfaatan teknologi digital guna mendukung efisiensi biaya dan menjaga daya saing Perseroan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan tetap didukung oleh perkembangan industri telekomunikasi yang terus bertumbuh dan menjadi fondasi bagi perluasan ekonomi digital. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan digital di berbagai sektor, kebutuhan terhadap infrastruktur konektivitas yang andal dan berkelanjutan diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini memberikan ruang bagi penyedia infrastruktur digital untuk berperan lebih strategis dalam mendukung ekosistem konektivitas nasional.

Dalam mendukung arah pengembangan tersebut, Dewan Komisaris memandang pentingnya kontribusi Perseroan terhadap upaya peningkatan konektivitas nasional, termasuk pada wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur digital. Salah satu inisiatif yang dinilai strategis adalah pengembangan jaringan serat optik bawah laut di kawasan Indonesia bagian timur, yang diharapkan dapat memperkuat integrasi jaringan komunikasi serta membuka peluang ekonomi baru bagi daerah.

Dengan mempertimbangkan posisi Perseroan di industri serta kapasitas infrastruktur yang dimiliki, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa mendatang. Prospek tersebut juga sejalan dengan

principles of prudence and effective risk management, as well as to ensure compliance with prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners also oversees the Company's strategic policies, including asset optimization, the development of digital infrastructure, technology-based service diversification, and the utilization of loan facilities.

As part of strengthening strategic oversight, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to ensure that the adoption of technological developments, including 5G networks, cloud computing, and artificial intelligence, is implemented in an effective and measured manner. In addition, the Board of Commissioners emphasizes the continued use of digital technologies to support cost efficiency and maintain the Company's competitiveness in an increasingly dynamic industry environment.

BUSINESS OUTLOOK

The Board of Commissioners believes that the Company's business outlook continues to be supported by the ongoing development of the telecommunications industry, which serves as a foundation for the expansion of digital economy. As digital services are increasingly adopted across various sectors, demand for reliable and sustainable connectivity infrastructure is expected to grow further. This environment provides opportunities for digital infrastructure providers to play a more strategic role in supporting the national connectivity ecosystem.

In supporting this direction, the Board of Commissioners recognizes the importance of the Company's contribution to expanding national connectivity, particularly in regions where digital infrastructure access remains limited. One of the strategic initiatives includes the development of submarine fiber optic networks in Eastern Indonesia, which is expected to strengthen communication network integration while creating new economic opportunities for regional communities.

Taking into account the Company's position within the industry and its infrastructure capabilities, the Board of Commissioners believes that the Company is well placed to capture future growth opportunities. This outlook is also supported by the broader adoption of

semakin luasnya penerapan teknologi jaringan generasi baru, termasuk perkembangan komersialisasi jaringan 5G, serta potensi pengembangan layanan digital bagi segmen korporasi yang terus berkembang.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, selain sebagai pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan aspek fundamental dalam mendukung keberlanjutan usaha dan daya saing Perseroan di tengah industri telekomunikasi yang semakin terkonsolidasi. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan praktik terbaik tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris memandang bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Direksi telah disusun dan dijalankan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Direksi dinilai telah melaksanakan fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko secara memadai dalam mendukung pengelolaan usaha Perseroan.

Sejalan dengan peran pengawasan, Dewan Komisaris memberikan arahan strategis kepada Direksi untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas kebijakan kepatuhan, efektivitas sistem pelaporan, serta penguatan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi. Internalisasi budaya kepatuhan secara kolektif dipandang sebagai fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dewan Komisaris juga menekankan perlunya peningkatan berkelanjutan atas efektivitas fungsi audit internal serta penerapan kebijakan anti-korupsi dan anti-suap oleh Direksi.

Upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas tata kelola mencerminkan komitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, Perseroan tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

next-generation network technologies, including the ongoing commercialization of 5G networks, as well as the growing potential for digital service development within the corporate segment.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of good corporate governance by the Company, in addition to compliance with prevailing laws and regulations, represents a fundamental aspect in supporting business sustainability and maintaining competitiveness amid the increasingly consolidated telecommunications industry. In this regard, the Board of Commissioners ensures that the Company maintains a strong commitment to the application of corporate governance best practices.

The Board of Commissioners considers that the policies and procedures implemented by the Board of Directors have been established and carried out in line with regulatory standards, while also taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. In addition, the Board of Directors has implemented internal control and risk management functions adequately in supporting the Company's business operations.

In line with its oversight role, the Board of Commissioners provides strategic direction to the Directors to continuously evaluate compliance policies, effectiveness of whistleblowing system, and strengthening of a culture of compliance across all levels of organization. The collective internalization of a compliance culture is regarded as an essential foundation for supporting sustainable business growth. The Board also emphasizes the need for continuous enhancement of effectiveness of internal audit function, as well as implementation of anti-corruption and anti-bribery policies by the Board of Directors.

The Company's ongoing efforts to enhance the quality of its corporate governance reflect its commitment to conducting responsible business practices. Through the consistent application of sustainable corporate governance, the Company seeks not only to support economic value creation, but also to deliver balanced benefits to all stakeholders.

APRESIASI

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direksi atas pengelolaan bisnis Perseroan yang menghasilkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan terhadap pengembangan usaha Perseroan.

Kami turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam mendukung kelangsungan dan kinerja operasional Perseroan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra strategis, pelanggan, pemasok, serta masyarakat atas kepercayaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan.

Sejalan dengan prospek usaha Perseroan, Dewan Komisaris berharap sinergi yang telah terjalin dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga dan ditingkatkan dalam mendukung transformasi digital nasional serta pemerataan layanan konektivitas secara berkelanjutan.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our appreciation and gratitude to the Board of Directors for managing the Company's business and delivering solid performance throughout 2025. We also extend our sincere gratitude to the shareholders for their continued support of the Company's business development.

Our appreciation is also conveyed to the management team and all employees for their dedication, professionalism, and hard work in supporting the Company's operations and performance. We further extend our gratitude to strategic partners, customers, suppliers, and the broader community for their trust, cooperation, and support, which have contributed to the seamless conduct of the Company's operations.

In line with the Company's business outlook, the Board of Commissioners expects that the established synergies with all stakeholders can be maintained and further strengthened in support of national digital transformation and the sustainable expansion of connectivity services.

Jakarta, 30 April 2026 | April 30, 2026
Atas Nama Dewan Komisaris | On behalf of the Board of Commissioners



Adam Gifari
Komisaris Utama

President Commissioner

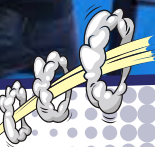
DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS



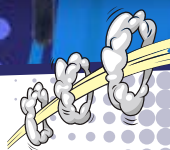
Rinaldy Santosa

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Adam Gifari

Komisaris Utama
President Commissioner



Haryo Dewanto

Komisaris
Commissioner

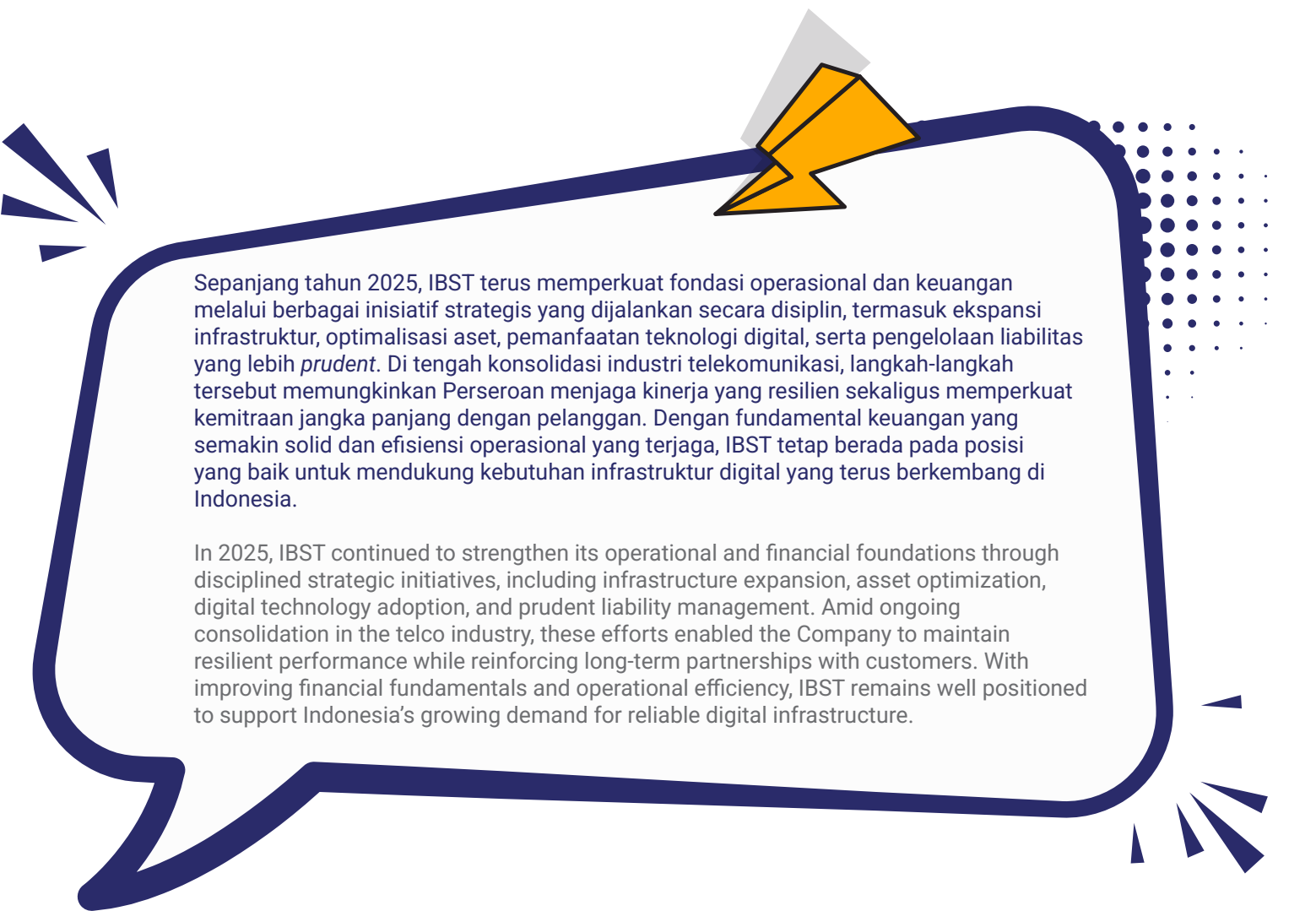


LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT



Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur Utama
President Director



Sepanjang tahun 2025, IBST terus memperkuat fondasi operasional dan keuangan melalui berbagai inisiatif strategis yang dijalankan secara disiplin, termasuk ekspansi infrastruktur, optimalisasi aset, pemanfaatan teknologi digital, serta pengelolaan liabilitas yang lebih *prudent*. Di tengah konsolidasi industri telekomunikasi, langkah-langkah tersebut memungkinkan Perseroan menjaga kinerja yang resilien sekaligus memperkuat kemitraan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan fundamental keuangan yang semakin solid dan efisiensi operasional yang terjaga, IBST tetap berada pada posisi yang baik untuk mendukung kebutuhan infrastruktur digital yang terus berkembang di Indonesia.

In 2025, IBST continued to strengthen its operational and financial foundations through disciplined strategic initiatives, including infrastructure expansion, asset optimization, digital technology adoption, and prudent liability management. Amid ongoing consolidation in the telco industry, these efforts enabled the Company to maintain resilient performance while reinforcing long-term partnerships with customers. With improving financial fundamentals and operational efficiency, IBST remains well positioned to support Indonesia's growing demand for reliable digital infrastructure.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sepanjang tahun 2025, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (**"Perseroan"** atau **"IBST"**) secara konsisten melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan fondasi operasional dan keuangan. Upaya tersebut mencakup perluasan infrastruktur, optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan efisiensi operasional melalui percepatan peta jalan pengembangan teknologi digital, pengelolaan liabilitas secara lebih disiplin, serta penguatan sinergi dengan Grup PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Pada saat yang sama, Perseroan tetap menjaga hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dengan pelanggan utama.

Pelaksanaan strategi yang terarah dan terkoordinasi tersebut telah menopang pencapaian kinerja Perseroan yang tetap tumbuh positif dan solid di tengah berlangsungnya konsolidasi industri telekomunikasi. Dengan dukungan induk perusahaan, Perseroan berada dalam posisi yang kokoh di sektor infrastruktur digital, sekaligus memiliki kesiapan yang memadai untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2025, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (**"the Company"** or **"IBST"**) consistently implemented strategic initiatives aimed at strengthening its operational and financial foundations. These efforts included infrastructure expansion, optimization of asset utilization, enhancement of operational efficiency through acceleration of digital technology development roadmap, disciplined liability management, and reinforcement of synergies within PT Sarana Menara Nusantara Tbk Group. In parallel, the Company continued to maintain constructive and long-term relationships with its key customers.

The disciplined and well-coordinated execution of these strategies supported the Company's ability to deliver positive and resilient performance amid ongoing consolidation in the telecommunications industry. With the support of its parent company, the Company remains well positioned within the digital infrastructure sector and is adequately prepared to optimize available opportunities in support of sustainable growth.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan perekonomian global mengalami perlambatan, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta penerapan tarif perdagangan resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara mitra dagangnya. Pemberlakuan kenaikan tarif impor tersebut turut menahan aktivitas perdagangan global dan menambah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Perlambatan global tersebut berlangsung seiring dengan meningkatnya fragmentasi antarnegara. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Amerika Serikat menunjukkan pemulihan yang ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga, penurunan impor, serta peningkatan investasi yang terkait dengan pengembangan kecerdasan buatan. Pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inflasi yang mulai melandai turut mendukung kinerja ekonomi negara tersebut.

Sebaliknya, perekonomian Tiongkok mencatat perlambatan yang terutama dipengaruhi oleh kontraksi di sektor properti dan manufaktur, serta meningkatnya risiko deflasi utang. Di kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi berlangsung secara moderat. Pada negara-negara utama zona Euro, sektor jasa tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan dibandingkan sektor industri.

Di pasar keuangan global, volatilitas relatif tinggi masih mewarnai pergerakan sepanjang tahun 2025. Dolar Amerika Serikat menunjukkan tren penguatan terhadap sebagian besar mata uang global. Sementara itu, pasar saham global secara umum mencatatkan penguatan, meskipun disertai dengan kewaspadaan terhadap potensi pembentukan gelembung pada saham-saham teknologi berkapitalisasi besar.

Sejalan dengan dinamika tersebut, International Monetary Fund dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada tahun 2025, relatif sejalan dengan realisasi pertumbuhan global pada tahun sebelumnya.

Di tengah perlambatan global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,11% secara tahunan pada 2025. Stabilitas pertumbuhan ini didukung oleh bauran kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, serta peran aktif dunia usaha dalam menjaga momentum ekonomi domestik.

Seluruh komponen pertumbuhan, yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor, mencatatkan kinerja yang positif. Penurunan suku bunga

MACROECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

In 2025, global economic growth moderated, driven primarily by heightened geopolitical tensions in the Middle East, the continuation of the Russia–Ukraine conflict, and the implementation of reciprocal trade tariffs by the United States on several of its trading partners. The increase in import tariffs constrained global trade activity and added pressure to overall economic growth.

The global slowdown was accompanied by increasing fragmentation among countries. Against this backdrop, the United States economy experienced a recovery supported by improvements in household consumption, a decline in imports, and increased investment related to artificial intelligence development. Sustained job growth and easing inflation further contributed to economic resilience.

In contrast, China's economy slowed, mainly due to contractions in the property and manufacturing sectors, along with rising risks of debt deflation. In the Eurozone, economic growth remained moderate. Across major European economies, the services sector continued to act as the primary growth engine compared to the industrial sector.

Global financial markets experienced relatively high volatility throughout 2025, with the US dollar strengthening against most major currencies. Global equity markets generally recorded gains, although concerns persisted regarding the potential formation of a bubble in large-cap technology stocks.

Reflecting these developments, the International Monetary Fund, in its January 2026 *World Economic Outlook* edition, reported global economic growth of 3.3% in 2025, broadly in line with the global growth recorded in the previous year.

Amid the global slowdown, Indonesia's economy remained resilient, recording positive year-on-year growth of 5.11% in 2025. This stable performance was supported by a balanced mix of monetary and fiscal policies implemented by Bank Indonesia and the Government, as well as continued contributions from the business sector.

All major components of economic growth, including household consumption, investment, government spending, and exports, posted positive performance.

acuan BI sebesar 100 basis poin sepanjang tahun 2025 turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan pergerakan nilai tukar Rupiah agar tidak mengalami depresiasi yang lebih dalam dibandingkan mata uang negara lain.

Kebijakan penurunan suku bunga tersebut berkontribusi pada stabilitas nilai tukar Rupiah, yang hanya terdepresiasi sebesar 3,46% terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, kelanjutan kebijakan hilirisasi turut memperkuat arus investasi asing ke pasar domestik. Implementasi berbagai program prioritas nasional, termasuk di bidang ketahanan pangan dan energi, juga memberikan dampak positif terhadap pergerakan aktivitas ekonomi.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, laju inflasi tahunan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran, yaitu sebesar 2,92% pada tahun 2025. Penguatan kinerja ekspor dan stabilitas nilai tukar Rupiah turut menopang posisi cadangan devisa yang memadai dan dinilai cukup aman dalam menghadapi potensi guncangan eksternal.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh sektor usaha mencatatkan pertumbuhan positif, dengan pengecualian sektor pertambangan. Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 8,35%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan keuangan digital. Penguatan ekosistem digital ini sejalan dengan upaya menuju masyarakat non-tunai (*cashless society*) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian.

Di pasar keuangan domestik, meningkatnya kepercayaan investor global yang didukung oleh pertumbuhan partisipasi investor lokal berdampak positif terhadap kinerja pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan tumbuh sebesar 22,13% secara tahunan dan ditutup pada level 8.646,94 pada 31 Desember 2025. Kinerja positif pasar saham tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah investor ritel, khususnya dari kalangan generasi milenial dan Generasi Z.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik, industri telekomunikasi juga terus mengalami pertumbuhan. Peningkatan *traffic* data dan upaya pemerataan konektivitas hingga wilayah terpencil tetap menjadi fokus utama. Pada saat yang sama, industri menunjukkan tingkat efisiensi dan kesehatan yang lebih baik seiring dengan konsolidasi melalui penggabungan operator besar ke dalam satu entitas usaha.

Penguatan industri telekomunikasi sebagai tulang punggung transformasi digital nasional memerlukan dukungan infrastruktur digital, termasuk menara telekomunikasi dan jaringan serat optik, untuk menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah terus mendorong pemerataan

The reduction of the BI policy rate by 100 basis points throughout 2025 helped preserve household purchasing power and mitigated pressure on the Rupiah, limiting depreciation relative to other currencies.

The accommodative monetary policy contributed to Rupiah stability, with the currency depreciating by only 3.46% against the US dollar. At the same time, the continuation of down streaming policies supported stronger foreign investment inflows into the domestic market. The execution of national priority programs, including those related to food and energy security, also contributed positively to economic activity.

In line with stable economic growth, annual inflation remained well contained within the target range, reaching 2.92% in 2025. Stronger export performance and a stable Rupiah supported an adequate level of foreign exchange reserves, which was considered sufficient to withstand potential external shocks.

From a sectoral perspective, all business sectors recorded positive growth, with the exception of the mining sector. The information and communication sector posted relatively high growth of 8.35%, driven by increased digital economic and financial activities. The strengthening digital ecosystem aligns with the ongoing transition toward a cashless society, aimed at enhancing economic efficiency and productivity.

In domestic financial markets, improved global investor confidence combined with growing participation from local investors contributed to stronger capital market performance. The Jakarta Composite Index increased by 22.13% year-on-year and closed at 8,646.94 as of December 31, 2025. This positive market performance was accompanied by growth in the number of retail investors, particularly among millennials and Generation Z.

In parallel with domestic economic growth, the telecommunications industry continued to expand. Data traffic increased, and efforts to extend connectivity to remote areas remained ongoing. Industry consolidation through the merger of major operators into a single business entity also contributed to improved efficiency and overall industry health.

Strengthening the telecommunications industry as a backbone of national digital transformation requires robust digital infrastructure, including telecommunications towers and fiber optic networks, to maintain service quality for customers. In this context, the Government continued to promote connectivity expansion through

konektivitas melalui penguatan kerangka regulasi, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 dan Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada pita 1,4 GHz sebagai tahap transisi menuju adopsi jaringan 5G.

STRATEGI TAHUN 2025

Dalam merespons konsolidasi industri yang berdampak pada tingkat utilisasi aset, Perseroan memfokuskan strategi pada optimalisasi aset yang telah dimiliki. Langkah ini dilakukan melalui pemanfaatan kontrak jangka panjang menara dan *fiber to the tower* dengan perusahaan operator telekomunikasi yang telah disepakati sebelum pelaksanaan aksi merger. Selain itu, Perseroan secara aktif membangun komunikasi yang efektif dengan entitas baru hasil penggabungan usaha.

Sejalan dengan upaya optimalisasi tersebut, ekspansi infrastruktur tetap dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan perubahan lanskap industri pasca merger. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia infrastruktur digital, Perseroan berupaya mendukung kebutuhan operasional pelanggan operator telekomunikasi dalam pengembangan dan keberlanjutan bisnis mereka.

Di sisi operasional, Perseroan terus mendorong peningkatan efisiensi melalui percepatan peta jalan pengembangan teknologi digital, termasuk penerapan automasi dan penguatan keamanan siber. Pemanfaatan kecerdasan buatan, *internet of things*, serta *cloud computing* dalam mendukung fungsi operasional, seperti pemantauan kinerja menara dan pemanfaatan data analitik, telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan.

Perseroan juga secara konsisten meningkatkan sistem keamanan siber guna menjaga kepercayaan pelanggan melalui pemenuhan standar operasional global dalam pengelolaan keamanan sistem manajemen informasi. Upaya ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola teknologi informasi sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Dari sisi keuangan, Perseroan memperkuat fundamental Perseroan melalui penurunan liabilitas dengan memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Strategi *deleveraging* ini ditujukan untuk menciptakan fleksibilitas keuangan yang lebih baik dalam mendukung kebutuhan bisnis serta menjaga kepercayaan investor. Dukungan dari induk perusahaan turut memberikan penguatan terhadap struktur permodalan Perseroan.

regulatory enhancements, including the issuance of the Minister of Communication and Digital Regulations No. 2 and No. 13 of 2025, which govern the utilization of the 1.4 GHz radio frequency band as a transitional phase toward the adoption of 5G networks.

STRATEGY FOR 2025

In response to industry consolidation that affected asset utilization levels, the Company focused its strategy on optimizing existing assets. This was achieved through the continued utilization of long-term tower and fiber to the tower contracts with telecommunications operators that had been agreed prior to the merger. In parallel, the Company actively maintained effective communication with the newly established merged entity.

In line with asset optimization efforts, infrastructure expansion continued to be carried out in a measured manner, taking into account changes in the post-merger industry landscape. As a digital infrastructure provider, the Company remained committed to supporting the operational needs of telecommunications operator customers in the development and sustainability of their businesses.

On operational aspect, the Company continued to enhance efficiency through the acceleration of its digital technology development roadmap, including automation and strengthened cybersecurity measures. The application of artificial intelligence, the Internet of Things, and cloud computing to support operational functions, such as tower performance monitoring and data analytics, contributed to improved efficiency and more precise decision-making.

The Company also consistently strengthened its cybersecurity framework to maintain customer trust by complying with global operational standards for information security management systems. This commitment reflects the Company's ongoing efforts to reinforce information technology governance as a key foundation supporting business sustainability.

From a financial perspective, the Company strengthened its fundamentals through the reduction of liabilities by fulfilling its obligations to creditors. This deleveraging strategy was aimed at enhancing financial flexibility to support business needs while maintaining investor confidence. Support from the parent company further reinforced the Company's capital structure.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Sepanjang tahun 2025, Direksi menjalankan peran sentral dalam proses perumusan dan implementasi strategi Perseroan. Pada tahap perumusan, Direksi memastikan bahwa arah strategis yang ditetapkan selaras dengan visi jangka panjang Perseroan sebagai penyedia infrastruktur digital yang andal, guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta kontribusi terhadap transformasi digital nasional.

Dalam proses tersebut, Direksi melakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi makroekonomi, dinamika industri telekomunikasi, perkembangan regulasi, serta profil risiko yang relevan. Secara paralel, Direksi juga menilai kesiapan sumber daya internal untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Direksi menetapkan strategi Perseroan yang responsif terhadap perubahan lingkungan usaha dan relevan dengan kebutuhan bisnis. Kebijakan strategis yang dirumuskan disusun dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan.

Dalam tahap implementasi, Direksi berperan aktif dalam memastikan efektivitas optimalisasi aset dan peningkatan efisiensi operasional. Direksi juga memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Grup SMN guna mendukung kinerja operasional serta mengoptimalkan peluang pertumbuhan usaha yang tersedia.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian, Direksi secara berkala melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi melalui rapat internal maupun rapat dengan unit kerja terkait. Forum-forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi capaian strategi, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

TINJAUAN KINERJA TAHUN 2025 SERTA PERBANDINGAN DENGAN TARGET

Implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten telah menopang pencapaian kinerja Perseroan yang tumbuh positif dan resilien sepanjang tahun 2025. Perseroan juga berhasil memperbaiki kondisi keuangan dari posisi rugi pada tahun sebelumnya menjadi laba, sehingga mampu memenuhi kepentingan pemegang saham serta memperkuat fondasi bagi keberlanjutan usaha.

ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

Throughout 2025, the Board of Directors served a central role in the formulation and implementation of the Company's strategy. During the formulation stage, the Board ensured that the strategic direction remained aligned with the Company's long-term vision as a reliable digital infrastructure provider, in support of sustainable growth and national digital transformation.

In this process, the Board conducted a comprehensive assessment of external factors, including macroeconomic conditions, developments in the telco industry, regulatory changes, and relevant risk considerations. At the same time, the Board evaluated the readiness of internal resources to ensure that formulated strategies could be executed effectively and in a disciplined manner.

Based on these assessments, the Board established strategic directions that were responsive to changes in the business environment and aligned with the Company's operational needs. The resulting strategic policies were developed with due regard to sound governance principles and integration of sustainability considerations into decision-making.

During the implementation phase, the Board actively ensured the effectiveness of asset optimization initiatives and operational efficiency measures. The Board of Directors also strengthened coordination and synergy with SMN Group to support operational performance and optimize available business growth opportunities.

As part of its oversight and control responsibilities, the Board of Directors regularly monitored the execution of strategies through internal meetings as well as meetings with relevant work units. These forums were used to review strategic progress, assess implementation challenges, and determine appropriate follow-up actions where necessary.

PERFORMANCE REVIEW FOR 2025 AND COMPARISON WITH TARGETS

The effective execution of the Company's strategy supported IBST's positive and resilient performance throughout 2025. The Company also successfully reversed its financial position from a loss in the prior year to a profit, enabling it to fulfill shareholder interests while strengthening the foundation for sustainable business continuity.

Pada 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp871,89 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1,09% *year to date* (ytd) dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp862,47 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari basis pelanggan utama yang terdiversifikasi. Realisasi pendapatan tersebut mencapai sebesar 103,16% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp845,22 miliar.

Strategi efisiensi operasional yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital berdampak signifikan terhadap penurunan beban usaha. Pada 2025, beban usaha tercatat menurun sebesar 88,19% ytd menjadi Rp18,98 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp160,75 miliar. Pada periode yang sama, beban pokok pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 49,64% ytd menjadi Rp61,70 miliar, dari Rp122,50 miliar pada tahun sebelumnya.

Penurunan beban tersebut secara langsung menopang peningkatan laba usaha yang mencapai 198,92% ytd menjadi Rp609,96 miliar pada 2025, dibandingkan Rp204,05 miliar pada tahun 2024. Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp411,44 miliar, berbalik dari kondisi rugi sebesar Rp1,85 triliun pada tahun sebelumnya. Pencapaian laba tahun berjalan tersebut setara dengan 142,75% dari target laba tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp288,22 miliar.

Dari sisi struktur keuangan, posisi keuangan IBST semakin solid dengan total aset sebesar Rp3,95 triliun pada 2025. Strategi *deleveraging* yang dijalankan secara disiplin tercermin dari penurunan liabilitas sebesar 39,33% ytd menjadi Rp1,37 triliun, dibandingkan Rp2,25 triliun pada tahun 2024.

Pencapaian laba tahun berjalan turut memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang tercermin dari peningkatan ekuitas menjadi Rp2,58 triliun pada 2025, atau tumbuh sebesar 18,97% ytd dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp2,17 triliun. Penguatan ekuitas ini memberikan dukungan yang lebih baik bagi pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan.

TANTANGAN DAN UPAYA PENANGANANNYA

Konsolidasi industri telekomunikasi membawa dampak positif, antara lain dalam peningkatan efisiensi industri dan terciptanya harga layanan yang lebih kompetitif bagi pelanggan. Namun, pada saat yang sama, konsolidasi tersebut turut memberikan tekanan terhadap tingkat pemanfaatan dan sewa menara (*tenancy ratio*). Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan sebagai penyedia infrastruktur digital melakukan langkah-langkah mitigasi melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan entitas hasil penggabungan usaha.

In 2025, IBST recorded revenue of Rp871.89 billion, a 1.09% year-to-date (ytd) increase compared with Rp862.47 billion in the same period of 2024. Revenue was generated from a diversified base of key customers. This revenue realization represented 103.16% of the 2025 target of Rp845.22 billion.

Operational efficiency initiatives, supported by the adoption of digital technologies, resulted in a significant reduction in operating expenses. In 2025, operating expenses declined by 88.19% ytd to Rp18.98 billion, compared with Rp160.75 billion in the previous year. During the same period, cost of revenue decreased by 49.64% ytd to Rp61.70 billion, from Rp122.50 billion in the prior year.

The reduction in expenses contributed directly to a substantial increase in operating profit, which rose by 198.92% ytd to Rp609.96 billion in 2025, compared with Rp204.05 billion in 2024. The Company recorded profit for the year of Rp411.44 billion, reversing a loss of Rp1.85 trillion in the previous year. This achievement represented 142.75% of the profit target for 2025, which was set at Rp288.22 billion.

From a financial position perspective, IBST's balance sheet strengthened, with total assets amounting to Rp3.95 trillion in 2025. The disciplined deleveraging strategy was reflected in a 39.33% ytd reduction in liabilities to Rp1.37 trillion, compared with Rp2.25 trillion in 2024.

The achievement of profit for the year further reinforced the Company's capital structure, as reflected in an increase in equity to Rp2.58 trillion in 2025, a 18.97% ytd growth from Rp2.17 trillion in 2024. The strengthened equity position provides enhanced support for the Company's business development strategies.

CHALLENGES AND MITIGATION MEASURES

Industry consolidation in the telecommunications sector has generated positive impacts, including improved efficiency and more competitive pricing for customers. At the same time, such consolidation has exerted pressure on tower utilization and lease levels, as reflected in the tenancy ratio. In response to this development, the Company, as a digital infrastructure provider, undertook mitigation measures through ongoing communication and coordination with the merged entity.

Perseroan memiliki kontrak sewa menara jangka panjang yang masih berlaku dengan entitas hasil merger tersebut. Selain itu, Perseroan melakukan realokasi infrastruktur menara serta optimalisasi aset melalui diversifikasi layanan kolokasi kepada pelanggan, sebagai upaya untuk memaksimalkan sumber pendapatan utama secara berkelanjutan.

Tantangan lainnya yang dihadapi Perseroan berasal dari meningkatnya intensitas persaingan, seiring dengan masuknya pelaku usaha baru yang menawarkan tarif sewa yang sangat kompetitif. Untuk merespons kondisi tersebut, Perseroan terus meningkatkan kualitas layanan guna mempertahankan basis pelanggan, disertai dengan penyesuaian tarif sewa yang dilakukan secara terukur.

PROSPEK USAHA

Perseroan memandang prospek usaha ke depan secara positif, sejalan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor telekomunikasi. Sebagai salah satu penopang utama aktivitas ekonomi dan keuangan digital yang terus berkembang, industri telekomunikasi memerlukan ketersediaan infrastruktur digital yang andal dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Perseroan mendukung upaya Pemerintah dalam mendorong pemerataan konektivitas hingga wilayah terpencil. Dukungan ini diwujudkan melalui inisiatif untuk mengembangkan jaringan serat optik bawah laut di kawasan Indonesia bagian timur yang selama ini belum terlayani secara optimal. Penguatan konektivitas sebagai bagian dari transformasi digital diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan posisi pasar yang dimiliki, Perseroan berada pada kondisi yang kondusif untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan, termasuk seiring dengan perkembangan adopsi jaringan 5G yang memasuki fase komersial serta potensi pengembangan layanan digital korporasi di masa mendatang.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan secara konsisten menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam seluruh aktivitas bisnis. Penerapan tata kelola tersebut merupakan bagian integral dari komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan usaha, sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas sebagai entitas bisnis. Sebagai wujud dari konsistensi penerapan Tata kelola yang Baik, pada tahun 2025, Perseroan kembali meraih 2 (dua) penghargaan tata kelola perusahaan, yaitu untuk kategori *TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company* dan *Best*

The Company holds long-term tower lease agreements that remain in effect with the merged entity. In addition, the Company carried out tower infrastructure reallocation and asset optimization through the diversification of colocation services to customers, with the objective of maximizing its primary revenue streams.

Other challenges are related to intensifying business competition, driven by the entry of new industry players offering highly competitive pricing. To address this challenge, the Company continued to enhance service quality to retain its customer base, while implementing measured adjustments to lease rates.

BUSINESS PROSPECTS

The Company maintains a positive view of its business prospects going forward, in line with the continued growth of the telecommunications sector. As a key backbone supporting the expansion of digital economic and financial activities, the telecommunications industry requires reliable and sustainable digital infrastructure.

In this context, the Company supports the Government's efforts to expand connectivity to underserved and remote areas. This support is reflected in initiatives to develop submarine fiber optic networks in eastern Indonesia, where connectivity has not yet been optimally served. Strengthening connectivity as part of the broader digital transformation is expected to contribute to regional economic growth and improved community welfare.

With its current market position, the Company is well placed to optimize growth opportunities, including in line with the commercialization phase of 5G network adoption and the potential development of corporate digital services in the future.

COMMITMENT TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

The Company consistently implements the principles of Good Corporate Governance in all of its business activities. Such governance implementation forms an integral part of the Company's commitment to business sustainability, while also reflecting compliance with applicable laws and regulations and the need to maintain trust and credibility as a business entity. As a manifestation of the consistent implementation of Good Corporate Governance, in 2025, the Company once again received 2 (two) corporate governance awards, namely for the *TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company* category and *Best Responsibility of the Board* from The

Responsibility of the Board dari *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award*.

Dalam pelaksanaannya, tata kelola perusahaan diterapkan melalui suatu kerangka kerja yang mencakup struktur, proses, dan hasil tata kelola. Perseroan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang mendukung penerapan praktik tata kelola yang baik, termasuk penguatan peran dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan serta pengawasan kegiatan usaha Perseroan.

Penguatan budaya kepatuhan di seluruh tingkat organisasi terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai inisiatif, antara lain *briefing*, penyampaian imbauan, serta penerapan ketentuan internal secara konsisten. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko guna mencegah terjadinya praktik kecurangan dan korupsi.

Perseroan secara aktif memperkuat sistem pelaporan pelanggaran dengan melakukan sosialisasi tata cara pelaporan, penunjukan pejabat yang berwenang untuk menangani laporan, serta penyediaan perlindungan yang memadai bagi pelapor.

APRESIASI

Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam mendukung pencapaian kinerja Perseroan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan, mitra strategis, pemasok, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi dan dukungan yang berkelanjutan terhadap pengembangan usaha Perseroan.

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award.

In practice, corporate governance was implemented through a governance framework encompassing governance structure, governance processes, and governance outcomes. The Company established policies and procedures that support good governance best practices, including strengthening the roles and functions of the Directors and the Board of Commissioners in managing and overseeing the Company's business activities.

The Company continued to strengthen a culture of compliance across all organizational levels through various initiatives, including briefings, internal communications, and the consistent enforcement of internal regulations. In parallel, the effectiveness of internal control systems and risk management was enhanced to prevent fraudulent and corrupt practices.

The Company also actively reinforced its whistleblowing system through the dissemination of reporting procedures, the appointment of authorized officers to handle reports, and the provision of adequate protection for whistleblowers.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our appreciation to the entire management team and employees for their dedication and hard work in supporting the Company's solid performance.

We would like to convey our appreciation to our shareholders for their continued support and trust in the Company. Our appreciation is also extended to customers, strategic partners, suppliers, communities, and all stakeholders for their ongoing contributions and support to the Company's business development.

Jakarta, 30 April 2026 | April 30, 2026
Atas Nama Direksi | On Behalf of the Directors



Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur Utama
President Director

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

4.

1.

2.

3.

1. Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur Utama
President Director



2. Doni Wilaga Kusuma
Direktur
Director



4. Suciratin
Direktur
Director



3. Catherine Sembiring Pelawi
Direktur
Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

STATEMENT LETTER OF

THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2025 OF
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all material information in the 2025 Annual Report of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk has been fully disclosed and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2026 | April 30, 2026

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Adam Gifari
Komisaris Utama
President Commissioner



Rinaldy Santosa
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Haryo Dewanto
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

STATEMENT LETTER OF
THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2025 OF
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all material information in the 2025 Annual Report of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk has been fully disclosed and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2026 | April 30, 2026

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur Utama
President Director



Doni Wilaga Kusuma
Direktur
Director



Catherine Sembiring Pelawi
Direktur
Director



Suciratin
Direktur
Director





Profil Perusahaan Company Profile

REBUILDING CONFIDENCE, DELIVERING PROGRESS

Jaringan serat optik yang berkembang dan kemitraan strategis IBST mencerminkan arah yang tegas serta komitmen Perseroan terhadap keandalan. Sebagai bagian dari Grup SMN, Perseroan terus memperkuat konektivitas digital melalui kinerja yang stabil dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

IBST's expanding fiber network and strategic partnerships reflect its firmed direction and commitment to reliability. As part of the SMN Group, the Company continues to empower digital connectivity through stable performance and sustainable value creation.



IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

	Nama Perusahaan Company Name	PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	28 April 2006 April 28, 2006
	Status Badan Hukum Legal Status	Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) Public Limited Company (Tbk)
	Kode Saham Ticker Code	IBST
	Bidang Usaha Line of Business	Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi Tower and Infrastructure Telecommunication Provider
	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Stock Listing Date	31 Agustus 2012 August 31, 2012
	Modal Dasar Authorized Capital	Rp1.500.000.000.000 terbagi atas 3.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500. Rp1,500,000,000,000, divided into 3,000,000,000 shares, each share has a nominal value of Rp500.
	Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-in Capital	Rp675.452.463.500 dengan komposisi 1.350.904.927 saham dengan nilai nominal Rp500 yang telah ditempatkan dalam Perusahaan. Rp675,452,463,500 comprising 1,350,904,927 shares with nominal value of Rp500 per share of the nominal value of any shares issued by the Company.
	Komposisi Kepemilikan Saham Share Ownership Composition	PT Iforte Solusi Infotek: 99,95% Masyarakat Public: 0,05%

	Jumlah Aset Total Assets	Rp3,95 triliun trillion
	Alamat Perseroan Company Address	Kantor Pusat Head Office Jl. Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah, Indonesia Tel. Phone: +62291 435984 Situs Web Website: www.ibstower.com Surat Elektronik Email: corpsec@ibstower.com Kantor Cabang* Branch Office Menara BCA, Lantai 49 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia Tel. Phone : +6221 23585549 *efektif per tanggal 6 Februari 2025 effective as of February 6, 2025.
	Negara Tempat Perusahaan Beroperasi Country of Operation	Indonesia
	Perubahan Status Perusahaan Change in Company Status	Tidak ada perubahan status Perusahaan No change in the Company's status
	Dasar Hukum Pendirian Perusahaan Legal Basis of the Company's Establishment	IBST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Inti Bangun Sejahtera" No. 07 tanggal 28 April 2006, dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00873 HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090515155266 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 029/BH.09.05/I/2007 tanggal 5 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No. 1337. IBST was established based on the Deed of Establishment of "PT Inti Bangun Sejahtera" No. 07 dated 28 April 2006, made before Yulia S.H., Notary in Jakarta. The deed has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") based on Decree No. W7-00873 HT.01.01-TH.2006 dated 22 September 2006 and has been registered in Companies Registry under Law No. 3 of 1982 on Company Registration with Company Registration No. 090515155266 at the Central Jakarta Company Registration Office No. 029/BH.09.05/I/2007 dated 5 January 2007 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12 dated 9 February 2007, Supplement No. 1337.

VISI, MISI, BUDAYA PERUSAHAAN, DAN NILAI-NILAI UTAMA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, CORPORATE CULTURE, AND CORE VALUES

VISI VISION

Menjadi perusahaan teratas pilihan para operator di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jaringan infrastruktur para operator yang dapat memaksimalkan nilai bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

To be the preferred choice for operators in Indonesia to meet their infrastructure needs, which maximizes value for all stakeholders.

MISI MISSION

- Menjadi mitra kerja yang dapat diandalkan para operator telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sehingga mereka dapat berfokus pada bisnis inti untuk kesuksesan bisnis.
- Memberikan “ketenteraman” dan nilai kepada seluruh stakeholders dengan menjadi perusahaan yang berorientasi pada operasi bisnis.
- Berfokus untuk menjadi Penyedia Solusi Inovatif Pilihan sebagai keunggulan kompetitif.
- Menciptakan perusahaan yang kuat dari segi organisasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.
- Menjalin kerja sama yang kuat di daerah untuk mendukung target pertumbuhan secara nasional.
- To be a key partner of choice for operators to meet their infrastructure needs, thereby enabling them to focus on their core business for business success.
- To offer “peace of mind” and value to all stakeholders by having a very client-centric business operation.
- To focus on being an Innovative Solutions Provider of Choice as our key competitive edge.
- To have a robust and scalable organization to meet the rapidly growing needs of the evolving marketplace.
- To strengthen regional cooperation in order to support nationwide goals.

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Budaya Perusahaan menjadi salah satu dasar penting dalam upaya mencapai dan menyukseskan rencana dan strategi Perusahaan. Budaya Perusahaan yang mencakup Visi, Misi, dan Nilai - Nilai Utama juga merupakan dasar utama bagi Perusahaan untuk merealisasikan aspek keberlanjutan dalam keseharian usaha.

NILAI - NILAI UTAMA PERUSAHAAN

- 1. Integritas**
Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi secara jujur.
- 2. Kepedulian**
Menumbuhkan minat dan ketertarikan dalam membantu dan mendukung orang lain dan lingkungan sekitar.
- 3. Komitmen**
Perusahaan berkomitmen memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku dan selalu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja melalui identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
- 4. Kepuasan Pelanggan**
Senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan maksimal terhadap permintaan kebutuhan pelanggan.
- 5. Inovatif dan Perbaikan yang Berkelanjutan**
Terus berinovasi terhadap kebutuhan pasar dan pelanggan, dan selalu melakukan pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap hal-hal yang dapat berdampak buruk bagi pelanggan, karyawan, dan Perusahaan.

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Visi, Misi, serta Nilai-Nilai Utama Perseroan tetap relevan dan sejalan dengan keadaan Perseroan pada saat ini.

Corporate culture is an important foundation for achieving and realizing the Company's plans and strategies. Corporate Culture which covers Vision, Mission, and Core Values is also the core foundation for the Company to realize the sustainability in its daily business activities.

CORPORATE CORE VALUES

- 1. Integrity**
To act consistently and honestly in accordance with the values and policies of the organization and professional code of conduct.
- 2. Care**
To grow interested and willing to help and support other people and surrounding areas.
- 3. Commitment**
The Company is committed to complying with the prevailing rules and regulations and always protecting the employees' health and safety through hazard identification and risk assessment.
- 4. Customer Satisfaction**
Always give the best and optimal service to meet customer demand.
- 5. Innovative and Continuous Improvement**
Continue to innovate in keeping with market and customer needs, and carry out ongoing prevention and improvement of issues that can have a negative impact on customers, employees, and the Company.

The Board of Directors and the Board of Commissioners consider that the Company's Vision, Mission, and Core Values remain relevant and aligned with the Company's current circumstances.

JEJAK LANGKAH

MILESTONES

2006

Perseroan didirikan dengan kegiatan usaha utama di bidang jasa penguatan sinyal dalam gedung (*in-building service provider*).

The Company was established with inbuilding service providers as its primary business activity.

2009

Perseroan mulai masuk ke bisnis menara telekomunikasi dengan mengakuisisi 114 menara.

The Company started to venture into the telecommunication tower business by acquiring 114 towers.

2011

Perseroan mengakuisisi lebih banyak menara dan portofolio menara bertumbuh hingga 17 kali lipat menjadi 1.989 menara.

The Company acquired more towers, and its tower portfolios grew 17 times larger into 1,989 towers.

2012

- Perseroan melakukan divestasi aset *in-building services* pada Maret 2012 untuk lebih fokus menjalankan bisnis sebagai penyedia menara telekomunikasi.
- Pada tanggal 31 Agustus 2012, saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan secara umum pada Bursa Efek Indonesia dengan simbol saham "IBST".
- The Company divested its in-building services in March 2012 and focus more on being the provider of telecommunication towers.
- On August 31, 2012, the Company listed its share on Indonesia Stock Exchange under the ticker symbol "IBST".

2013

Pada Juli 2013, Perseroan melakukan restrukturisasi utang obligasi konversi sebesar Rp690,38 miliar kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("DSSA") sebagai berikut: (i) sebesar Rp57,38 miliar tetap menjadi utang obligasi konversi yang kemudian dikonversi menjadi 114.760.000 penyertaan saham DSSA ke Perseroan; dan (ii) sebesar Rp633 miliar dicatat sebagai utang jangka panjang kepada DSSA.

total amount of Rp690.38 billion which was divided into the following: (i) Rp57.38 billion remained as convertible bonds, which then converted to ownership by DSSA on 114,760,000 Company shares; and (ii) Rp633 billion was recorded as long-term debt to DSSA.

2014

- Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 207.831.527 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 per saham. Ditawarkan dengan harga penawaran Rp3.176 per saham, keseluruhan penawaran saham bernilai Rp660.072.929.752.
- Pada November 2014, utang kepada DSSA sebesar Rp633 miliar telah dilunasi oleh Perseroan.
- The Company conducted Limited Public Offering I ("PUT I") for the issuance of Pre-emptive Rights ("HMETD") of 207,831,527 shares with a par value of Rp500 per share. It was offered Rp3,176 per share with a total value of Rp660,072,929,752.
- In November 2014, the Company's long-term debt of Rp633 billion to DSSA had been settled.

2015

Perseroan mencatat pertumbuhan portofolio 453 menara telekomunikasi baru dan 4.278 km jaringan serat optik untuk mendukung implementasi proyek 4G LTE.

The Company recorded a growth of 453 new towers and 4,278 km fiber optic network to support the 4G LTE project implementation.

2016

- Pada 25 Juli 2016, Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia menetapkan konsorsium Moratelindo-IBS-Smart Telecom sebagai pemenang lelang Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Timur.
- Pada 16 Agustus 2016, Perseroan bersama dengan PT Mora Telematika Indonesia dan PT Smart Telecom, sepakat untuk menandatangani Akta No. 83 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Palapa Timur Telematika, Badan Usaha Pelaksana Proyek.
- On July 25, 2016, the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia announced a consortium whose members are Moratelindo- IBS-Smart Telecom as the winner of a tender to build the eastern section of the Palapa Ring national fiber optic cable network project.
- On August 16, 2016, the Company, together with PT Mora Telematika Indonesia and PT Smart Telecom, agreed to sign Deed No. 83 on the Establishment of PT Palapa Timur Telematika, the joint operating Company for project implementation.

2017

Perseroan membeli 371 menara telekomunikasi dari PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

The Company purchased 371 telecommunications towers from PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

2018

Perseroan mencatat pertumbuhan hampir 1.000 menara baru dan lebih dari 6.000 km jaringan serat optik berskala nasional.

The Company recorded a growth of nearly 1,000 new towers and more than 6,000 km of national-scale fiber optic network.

2020

Pada tanggal 21 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat (*Conditional Asset Sales and Purchase Agreement*) dengan PT Tower Bersama ("TB") – anak perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG"), sehubungan dengan rencana untuk penjualan sebanyak-banyaknya 3.000 menara telekomunikasi milik Perusahaan, termasuk penyewaan tanah-tanah milik Perseroan yang terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual.

On December 21, 2020, the Company signed a Conditional Asset Sales and Purchase Agreement with PT Tower Bersama ("TB") – a subsidiary of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG") in related to the Company's plan to sell 3,000 telecommunication towers, at most, of its own, including the lease of the land that comes with the telecommunication towers.

2021

Pada 7 April 2021, transaksi penjualan aset sebanyak 3.000 menara telekomunikasi milik Perseroan kepada TB telah diselesaikan.

On April 7, 2021, the asset sale transaction of 3,000 telecommunication towers owned by the Company to TB was completed.

2022

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juli 2022, menyetujui pembagian dividen tunai final setinggi-tingginya 23,49% dari saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya atas tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 tersebut atau sebesar-besarnya Rp834.859.244.886 (*gross*).

The Annual General Meeting of Shareholders on July 27, 2022, approved the distribution of a final cash dividend of up to 23.49% of the Company's unappropriated retained earnings for the financial year ended on December 31, 2021 or Rp834,859,244,886 (*gross*) at most.

2023

Dalam upaya memperoleh sertifikat ISO/IEC 27001:2022 *Information Security Management Systems*, sejak kuartal - 3 tahun 2023, Perseroan memulai proses persiapan dan penerapan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana diatur dalam standar ISO/IEC 27001:2022.

In our effort to obtain the ISO/IEC 27001:2022 Certificate on Information Security Management Systems, since the third quarter of 2023, the Company has started the process of preparing and implementing to fulfill the requirements as stipulated in the ISO/IEC 27001:2022 standard.

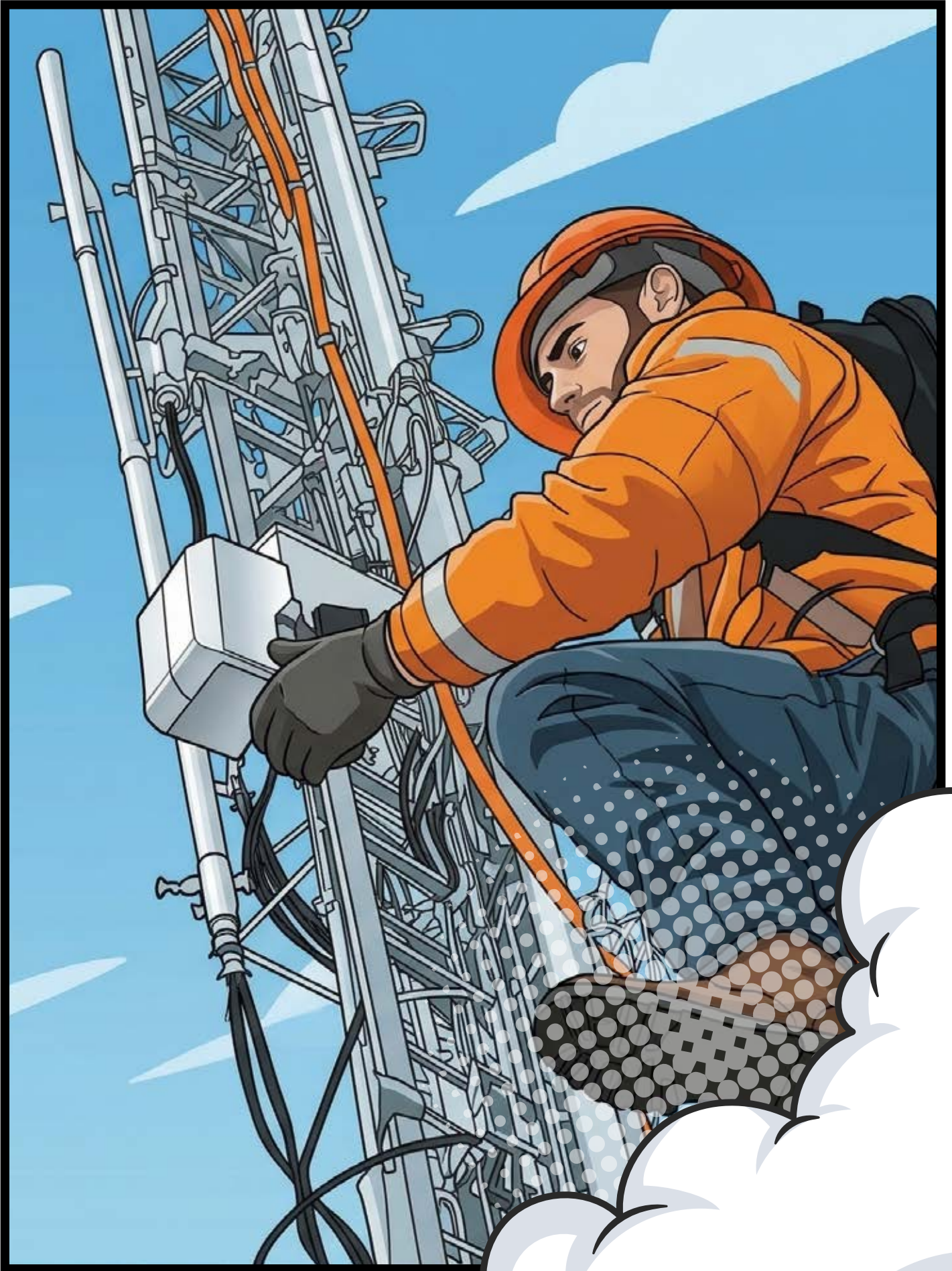
2024

- Pada tanggal 1 Juli 2024, PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), entitas anak tidak langsung yang dikendalikan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("SMN"), telah melakukan pengambilalihan atas saham-saham dalam Perseroan sebesar 90,11% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.
- Pada tanggal 4 Oktober 2024 Penawaran Tender Wajib telah selesai dilakukan sehingga kepemilikan saham Iforte dalam Perseroan menjadi 99,98% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.
- Pada tanggal 25 November 2024, Perseroan menerima 2 (dua) penghargaan tata kelola perusahaan untuk kategori *TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company* dan *Best Responsibility of the Board* dari *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) di ajang *The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award*. Penghargaan Ini merupakan salah satu pengakuan eksternal terhadap penerapan governansi korporat di Perseroan dan mendorong seluruh insan Perseroan untuk lebih meningkatkan kualitas governansi di Perseroan menjadi lebih baik lagi.
- On July 1, 2024, PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), an indirectly controlled subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("SMN"), completed the acquisition of 90.11% of the Company's shares from the total issued and paid-up capital.
- On October 4, 2024, the Mandatory Tender Offer was successfully completed, increasing Iforte's ownership in the Company to 99.98% of the total issued and paid-up capital.
- On November 25, 2024, the Company received 2 (two) corporate governance awards in the categories of *TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company* and *Best Responsibility of the Board* from The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

at The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award. This recognition serves as an external acknowledgment of the Company's corporate governance practices and encourages all employees to further enhance governance quality within the Company.

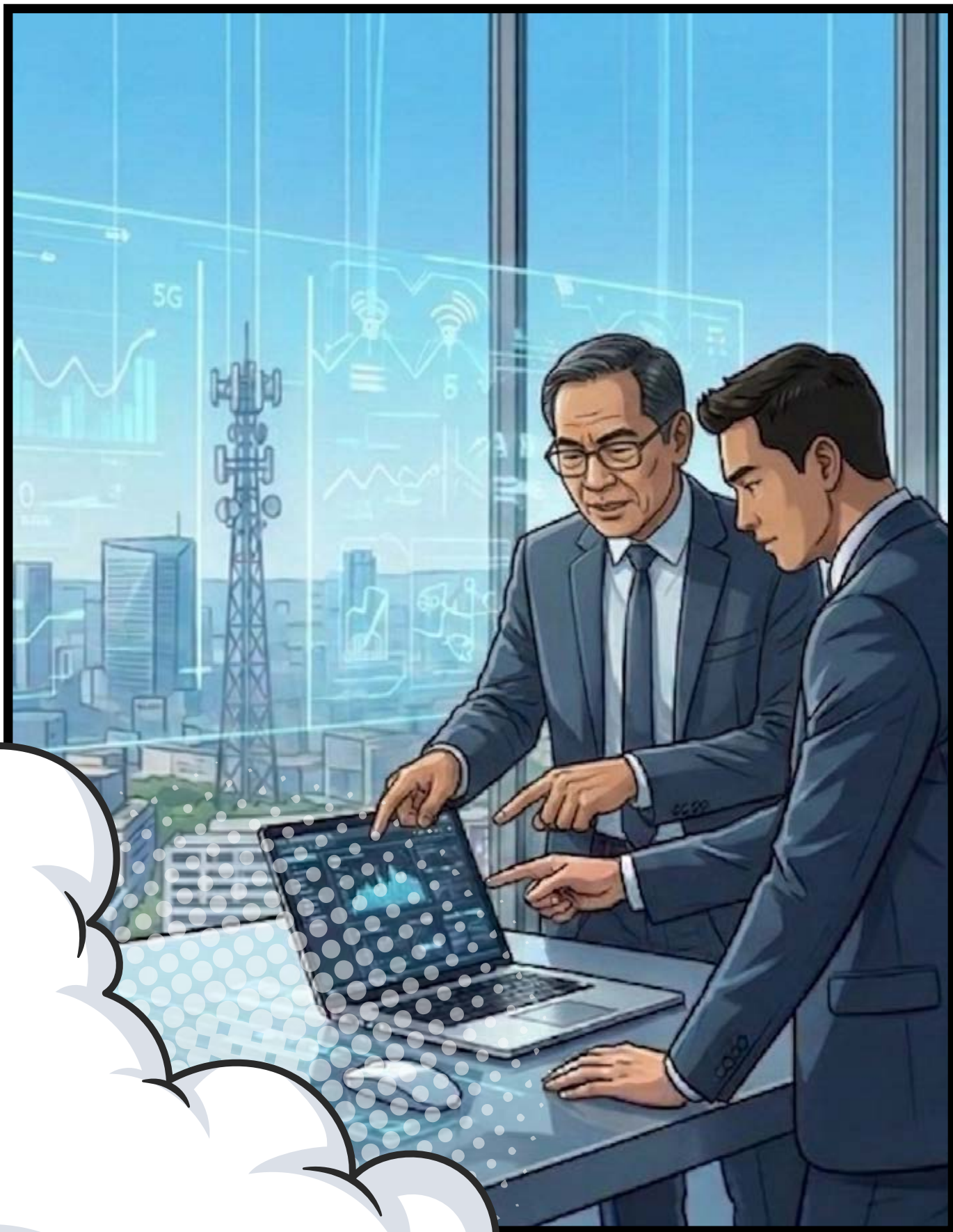
2025

- Pada tanggal 15 September 2025, Perseroan kembali meraih 2 (dua) penghargaan tata kelola perusahaan, yaitu untuk kategori *TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company* dan *Best Responsibility of the Board* dari *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang *The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award*.
- Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan telah memperoleh berbagai sertifikasi standar internasional, yaitu ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset, dan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kepemilikan sertifikasi tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam menerapkan praktik terbaik secara konsisten di berbagai aspek operasional guna mendukung efisiensi, keberlanjutan, serta tata kelola perusahaan yang baik.
- On 15 September 2025, the Company once again received 2 (two) corporate governance awards, namely in the categories of *TOP 50 Mid Capitalization Public Listed Company* and *Best Responsibility of the Board* from The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award.
- As of the end of 2025, the Company has obtained various internationally recognized certifications, namely ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System, ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System, ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, ISO 55001:2014 Asset Management System, and ISO 27001:2022 Information Security Management System. These certifications reflect the Company's commitment to consistently implementing best practices across various operational areas to support efficiency, sustainability, and strong corporate governance.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

COMPANY AT A GLANCE





Sebagai bagian dari Grup SMN, IBST terus memperkuat perannya melalui fokus, disiplin, dan sinergi. Didukung perluasan jaringan serat optik serta kolaborasi yang terintegrasi dalam Grup, Perseroan menghadirkan konektivitas andal untuk mendukung transformasi digital dan pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia.

As part of SMN Group, IBST continues to strengthen its role through focus, discipline, and synergy. Supported by the expansion of its fiber optic network and integrated collaboration across the Group, the Company delivers reliable connectivity to support Indonesia's digital transformation and sustainable growth.

IBST didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 28 April 2006 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00873.HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No.1337.

IBST was established in 2006 based on Deed of Establishment No. 7 dated 28 April 2006 made before Yulia, S.H., a Notary in Jakarta. The deed of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. W7-00873. HT.01.01-TH.2006 dated 22 September 2006 and was published in State Gazette No. 12 dated February 9, 2007, Supplement No. 1337.

Perseroan didirikan dengan kegiatan usaha utama dibidang jasa penguatan sinyal dalam gedung (*In-building service provider*).

The Company was established as an in-building service provider.

Perseroan terus meningkatkan usaha jasa penguat sinyal dalam gedung, selain mengembangkan potensi untuk memenuhi kebutuhan Operator akan menara. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki menara *built to suit* yang tersebar di wilayah-wilayah strategis dan potensial, yang sebagian besar menara berlokasi di wilayah Jawa dan Sumatera.

The Company continues to improve the in-building service provider business, apart from developing the potential to meet the demands of Operators on telecommunication. To date, the Company own towers spread across in strategic and potential areas, that largely of towers located in the area of Java dan Sumatera.

Pada Maret 2012, Perseroan melakukan pelepasan atas aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha jasa penguat sinyal, seiring dengan fokus Perseroan menjadi Penyedia menara telekomunikasi dan jaringan infrastruktur di Indonesia. Perseroan terus berinovasi

In March 2012, the Company divested all assets related with in-building service along with change of focus to become telecommunication tower and network infrastructure provider in Indonesia. The Company continues to innovate and developing its potentials in

untuk mengembangkan potensi dalam persaingan pasar penyedia menara telekomunikasi dan jaringan infrastruktur di Indonesia.

Pada April 2012, Perseroan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka, dan efektif sejak 31 Agustus 2012, saham Perseroan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia dengan kode IBST.

Pada tanggal 1 Juli 2024, PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") telah menyelesaikan pengambilalihan atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 1.217.293.423 saham Perseroan atau sebesar 90,11% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku, Iforte juga telah menyelesaikan Penawaran Tender Wajib atas 133.292.672 saham Perseroan atau sekitar 9,87% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2024. Dengan demikian, kepemilikan saham Iforte dalam Perseroan menjadi 99,98% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan mengelola dan mengoperasikan sebanyak 3.204 menara yang tersebar di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia.

the competitive market of tower telecommunication and network infrastructure provider in Indonesia.

In April 2012, the Company changed its status to a Public Company, and effective from 31 August 2012, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange under the ticker code IBST.

On 1 July 2024, PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") has completed the acquisition of 1,217,293,423 shares in the Company, representing 90.11% of the Company's total issued and paid-up capital. In accordance with the capital market prevailing regulations, Iforte has completed The Mandatory Tender Offer of 133,292,672 shares of the Company, representing approximately 9.87% of the total issued and paid-up capital of the Company on 4 October 2024, increasing Iforte's share ownership in the Company to 99.98% of the total issued and paid-up capital of the Company.

By the end of 2025, the Company managed and operated 3,204 towers located across various strategic areas throughout Indonesia.

PERUBAHAN NAMA

CHANGE OF THE COMPANY NAME

Perseroan tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri pada 2006 hingga saat ini. Perseroan berubah menjadi perusahaan publik sejak IPO pada Agustus 2012. Sejak saat itu, nama perseroan menjadi PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.

The Company has never changed its name since it was first established in 2006 up to the present. The Company became a public company following its IPO in August 2012. Since then, the Company's name has become PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.

KEGIATAN USAHA

BUSINESS ACTIVITIES

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024 dan memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0182981 tanggal 16 Agustus 2024 dan No. AHU-AH.01.09-0240375 tanggal 16 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171288.AH.01.11 TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
2. Instalasi Telekomunikasi;
3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
4. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
5. *Internet Service Provider*;
6. Jasa Interkoneksi Internet (*Nap*);
7. Jasa Konten SMS Premium;
8. Jasa Multimedia Lainnya;
9. Aktivitas Pengolahan Data;
10. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; dan
11. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Dalam mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, sebagai berikut:
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
 - c. Instalasi Telekomunikasi;
 - d. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
 - e. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
 - f. *Internet Service Provider*.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:
 - c. Jasa Interkoneksi Internet (*Nap*);
 - d. Jasa Konten SMS (*Premium*);
 - e. Jasa Multimedia Lainnya;
 - f. Aktivitas Pengolahan Data;
 - g. *Real Estate* Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
 - h. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

The Company's Articles of Association have undergone several amendments, with the most recent change documented in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 43 dated August 15, 2024, executed before Yulia, S.H., a Notary in South Jakarta. This latest amendment to the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as stated in Decree No. AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 dated August 16, 2024 and received acknowledgment from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt No. AHU-AH.01.03-0182981 dated August 16, 2024, and No. AHU-AH.01.09-0240375 dated August 16, 2024. The amendment has also been registered in the Company Register No. AHU-0171288.AH.01.11 TAHUN 2024 dated August 16, 2024.

Based on the Company's Articles of Association Article 3, the Company has the purpose and objective to do business in:

1. Central Telecommunication Construction;
2. Telecommunication Installation;
3. Large Trading of Telecommunication Equipment;
4. Telecommunications Activities With Cables;
5. Internet Service Provider;
6. Internet Interconnection Services (*Nap*);
7. Premium SMS Content Services;
8. Other Multimedia Services;
9. Data Processing Activities;
10. Real Estate Property Owned Or Rented; and
11. Other Consulting Management Activities.

To achieve its purpose and objective, the Company may perform the following business activities:

1. The Company's main business activities, as follow:
 - b. Central Telecommunication Construction
 - c. Telecommunication Installation;
 - d. Large Trading in Telecommunication Equipment;
 - e. Telecommunication Activities with Cables;
 - f. *Internet Service Provider*.
2. The Company's supporting business activities are as follows:
 - c. Internet Interconnection Services (*Nap*);
 - d. Premium SMS Content Services;
 - e. Other Multimedia Services;
 - f. Data Processing Activities;
 - g. Real Estate Property Owned or Rented;
 - h. Other Consulting Management Activities.

PRODUK & LAYANAN KAMI

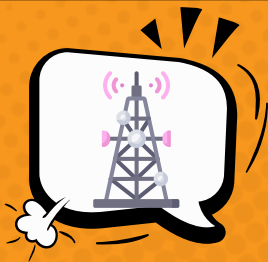
OUR PRODUCTS & SERVICES



BUILD TO SUIT (B2S)

Merupakan sewa ruang dalam infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan dengan pola membangun baik menara makro, semi-makro, mikro, jaringan kabel serat optik maupun infrastruktur telekomunikasi baru berdasarkan permintaan, lokasi, dan spesifikasi teknis dari pelanggan.

Leasing space inside the Company's telecommunications infrastructure in the form of constructing new macro, semi-macro, or micro towers, fiber optic network and telecommunications infrastructure based on the customer's needs, location and technical specifications.



KOLOKASI / COLOCATION

Merupakan layanan sewa ruang *Base Transceiver Station* (BTS) dengan menggunakan menara yang sudah dimiliki oleh Perseroan.

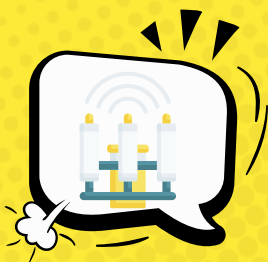
Leasing space for Base Transceiver System (BTS) utilizing the existing tower already owned by the Company.



BTS HOTEL

Merupakan salah satu solusi inovatif Perseroan untuk menyediakan dan menyewakan infrastruktur telekomunikasi berupa BTS Hotel terintegrasi. Solusi ini sangat berguna untuk diterapkan pada kompleks perumahan, kampus atau universitas ketika ketersediaan lahan sangat terbatas dan estetika dalam satu area sangat diperhatikan. Solusi ini akan merujuk pada cluster atau dasar kota.

One of the Company's innovative solutions to provide and lease telecommunication infrastructure in the form of BTS Hotel in limited space and when the aesthetic of the area becomes a point of concern, such as in housing clusters, campuses or universities. This solution will refer to the cluster or city infrastructure.



MICROCELL POLE

Salah satu solusi inovatif untuk menyediakan dan menyewakan infrastruktur telekomunikasi berupa Microcell Pole (MCP) di satu daerah atau kota yang dibatasi oleh peraturan pemerintah daerah.

A package of innovative solutions to provide and lease microcell pole (MCP) infrastructure in an area or town limited to local regulations.



MICROCELL POLE WITH FIBER OPTIC

Satu paket solusi inovatif untuk menyediakan dan menyewakan infrastruktur telekomunikasi berupa MCP yang terintegrasi dengan jaringan serat optik sebagai media transmisinya.

A package of innovative solutions to provide and lease telecommunication infrastructure in the form of integrated MCP infrastructure using an interconnected fiber optic network as the transmission media.



CLUSTER BASED

Merupakan solusi layanan terintegrasi di suatu kawasan untuk memenuhi layanan seluler (*wireless*) di dalam gedung dengan sistem IDAS (*Indoor Distributed Antenna Systems*) dan di luar gedung dengan sistem ODAS (*Outdoor Distributed Antenna Systems*). Pada umumnya produk ini merupakan solusi bagi area komersial dan bisnis di kawasan superblok.

An integrated solution in an area to meet the need for wireless service inside a building using IDAS (Indoor Distributed Antenna Systems) and outside the building using ODAS (Outdoor Distributed Antenna Systems). This product is specially developed as a solution for commercial and business superblock districts.



LEASED CORE

Salah satu layanan solusi untuk interkoneksi menggunakan serat optik bagi pelanggan Perseroan dalam rangka meningkatkan kemampuan data rate dan stabilitas.

One of the innovative solutions for the Company's customers to improve interconnectivity using fiber optic in order to increase the data rate capability and stability.



LOCAL LOOP

Perseroan memberikan solusi berupa kapasitas *bandwidth* untuk menghubungkan layanan data antar *site* atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai permintaan pelanggan. Hal ini membuat Perseroan memiliki kemudahan dalam mengatur kapasitas *bandwidth data rate*.

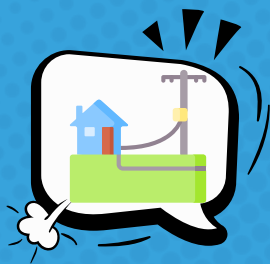
The Company offers a solution in the form of bandwidth capacity to connect data services from one location to another that is tailored to customer requests, which allows for easy management of the capacity of the data rate bandwidth.



LAYANAN INTERNET / INTERNET SERVICES

Berdasarkan Izin Penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP), Perseroan memberikan solusi layanan Internet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan korporasi.

Based on a license for Internet Service Provider (ISP), the Company offers Internet service solutions that can be tailored to the needs of its corporate customers.



INFRASTRUKTUR FTTX (FIBER TO THE HOME OR BUILDING)

Perseroan memberikan solusi penyediaan infrastruktur untuk para penyelenggara jaringan tetap lokal di Indonesia dengan beberapa bentuk kerja sama untuk diterapkan di area cluster perumahan atau apartemen dan gedung yang bersifat komersial.

The Company offers a solution to fixed network operators in Indonesia by providing infrastructures within residence clusters or apartment and commercial buildings in the form of cooperation.

WILAYAH OPERASIONAL

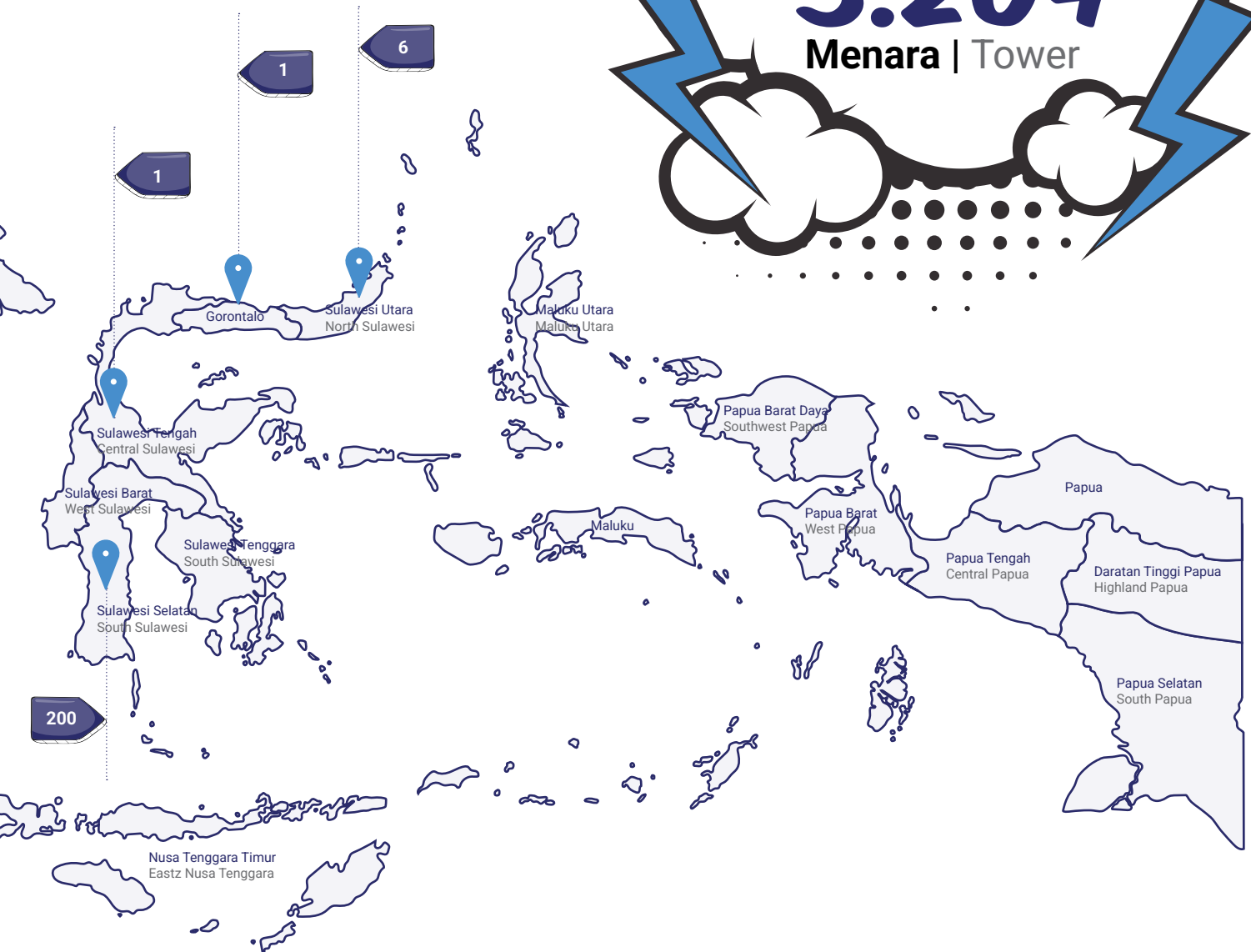
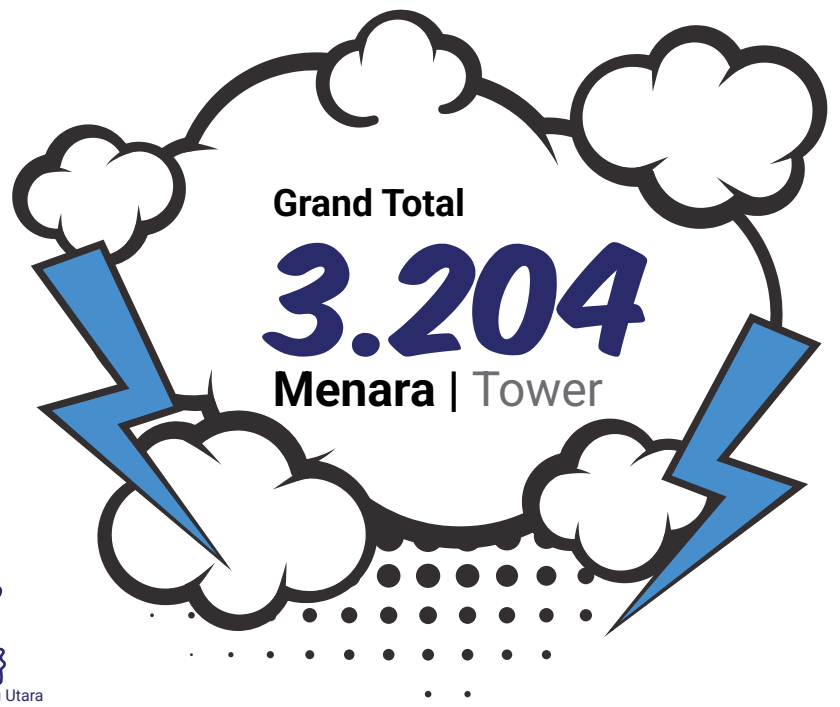
OPERATIONAL AREAS



SERAT OPTIK (Km) (Termasuk FTTT, FTTH dan Konektivitas)
FIBER OPTIC (Km) (Included FTTT, FTTH and Connectivity)

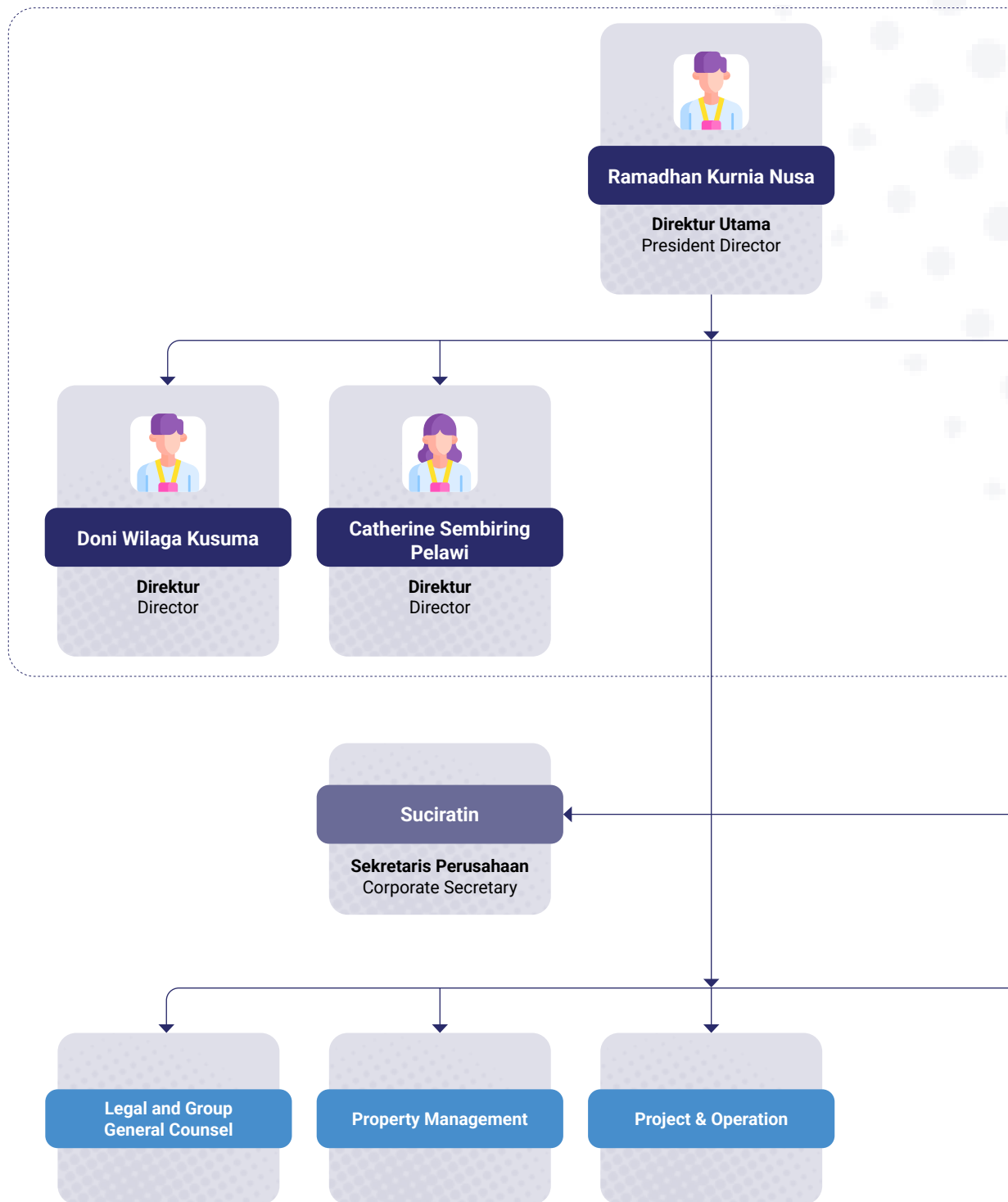
Pulau Island	2025
Bali	916
Java Java	11.325
Kalimantan	375
Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung Islands	88
Kepulauan Nusa Tenggara Nusa Tenggara Island	169

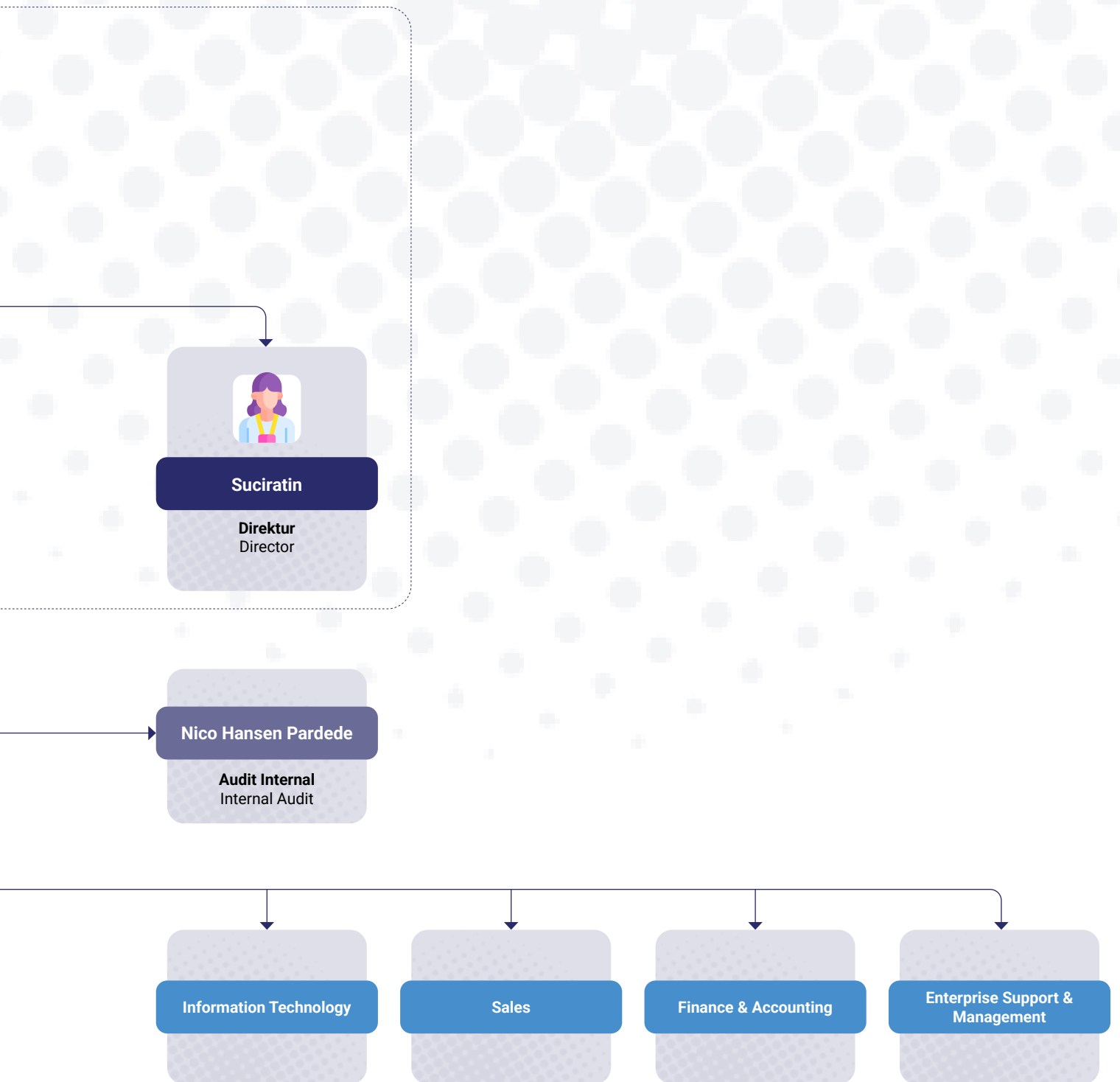
Pulau Island	2025
Kepulauan Riau Riau Island	1
Sulawesi	1.764
Sumatera	4.820
TOTAL	19.458



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE





KEANGGOTAAN ASOSIASI

ASSOCIATION MEMBERSHIP

	APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Indonesian Internet Service Providers Association
	APJATEL	Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Association of Telecommunication Network Operators
	AEI	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public Listed Companies
	ICSA	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)



KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

In 2025, no changes occurred to the composition of the Company's Board of Commissioners. As such, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Komisaris Utama

President Commissioner

Adam Gifari

Komisaris | Commissioner

Haryo Dewanto

Komisaris Independen |

Independent Commissioner

Rinaldy Santosa

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Adam Gifari
Komisaris Utama
President Commissioner

> Usia Age	48 Tahun Years Old
> Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
> Domisili Domicile	Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

> Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the President Commissioner of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
> Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia (1999) Earned a Bachelor's degree in Management from the University of Indonesia (1999)
> Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain. Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committee member in other publicly listed companies.
> Pengalaman Kerja Work Experience	- Wakil Direktur Utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2015-2024) Vice President Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2015-2024) - Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2015-2024) Vice President Director of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2015-2024) - Hubungan Investor PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2009 – saat ini) Investor Relations PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2009 – present) - Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara (2009-2015) President Director of PT Sarana Menara Nusantara (2009-2015) - Direktur Utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007-2015) President Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007-2015) - Investment Banking PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2003-2007) Investment Banking of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2003-2007) - Research Analyst PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999-2002) Research Analyst of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999-2002)
> Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu serta tidak memiliki saham Perseroan. He has no affiliate relationships with other members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholder of the Company either directly or indirectly to individual owners and does not own any Company's shares.





Rinaldy Santosa
Komisaris Independen
Independent Commissioner

- **Usia**
Age 57 Tahun | Years Old
- **Kewarganegaraan**
Citizenship Indonesia | Indonesian
- **Domisili**
Domicile Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

➤ Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the Independent Commissioner of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
➤ Riwayat Pendidikan Educational Background	• Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti (1993) Earned a Bachelor's degree in Accounting from University of Trisakti (1993) • Pasca Sarjana di bidang Finance dari University of Technology, Sydney, Australia (1997) Master Degree in Finance from University of Technology, Sydney, Australia (1997)
➤ Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komite Audit PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (Agustus 2024 – saat ini) Audit Committee of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (August 2024 – present)
➤ Pengalaman Kerja Work Experience	• Komite Audit PT Mitrabara Adiperdana Tbk (Agustus 2024 – 2025) Audit Committee of PT Mitrabara Adiperdana Tbk (August 2024 – 2025) • Direktur Desa Bingin Hospitality (Agustus 2024 – saat ini) Director of Desa Bingin Hospitality (August 2024 – present) • Direktur ACRE Bingin Nusantara (Juli 2024 – saat ini) Director of ACRE Bingin Nusantara (July 2024 – present) • Direktur ACRE Nusantara Sehati (Juli 2024 – saat ini) Director of ACRE Nusantara Sehati (July 2024 – present) • ACRE Advisor Pte Ltd (2024) ACRE Advisor Pte Ltd (2024) • Unity Digital Infrastructure Inc (2023) Unity Digital Infrastructure Inc (2023) • Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2010 – 2021) Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2010 - 2021) • VP Keuangan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007 - 2009) VP Finance of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007 - 2009) • CFO Eye CoRpMedia Indonesia (2005 - 2007) CFO of Eye CoRpMedia Indonesia (2005 - 2007) • Kepala Konsultan LM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004 - 2005) Principal Consultant of LM Faculty of Economics University of Indonesia (2004 - 2005) • Financial Specialist Conoco Philips (2003 – 2004) Financial Specialist of Conoco Philips (2003 – 2004) • Direktur Indopacific Public Relation (2002 – 2003) Director of Indopacific Public Relation (2002 – 2003) • Pricewaterhouse Coopers (1993 – 2022) Pricewaterhouse Coopers (1993 – 2022)
➤ Pernyataan Independensi Declaration of Independence	Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen Perseroan dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. He has not served as the Company's Independent Commissioner for more than 2 (two) periods and has no financial, management, stock ownership, or second-degree family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that could impair their ability to act independently.
➤ Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu serta tidak memiliki saham Perseroan. He has no affiliate relationships with other members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholder of the Company either directly or indirectly to individual owners and does not own any Company's shares.



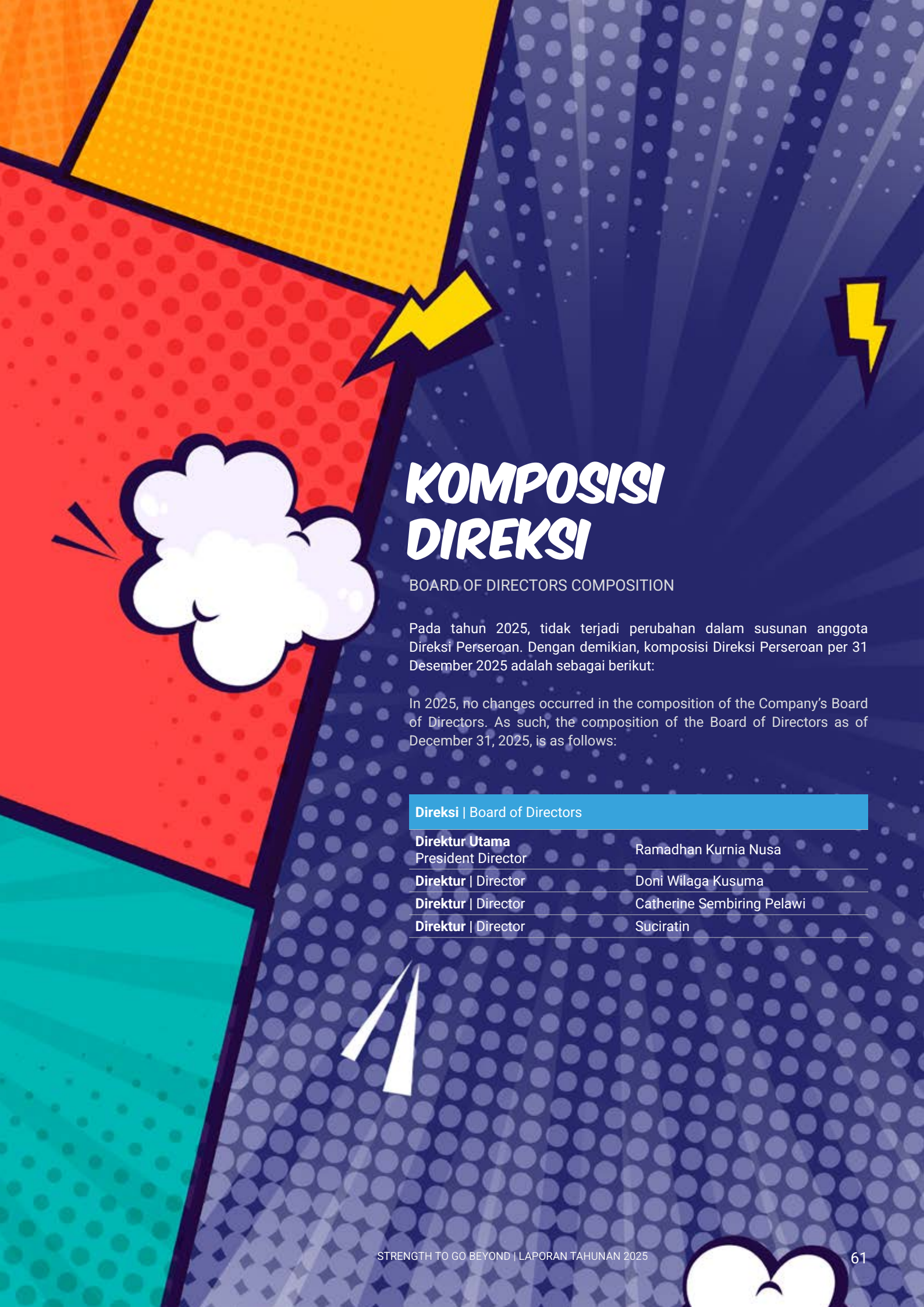


Haryo Dewanto
Komisaris
Commissioner

> Usia Age	59 Tahun Years Old
> Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
> Domisili Domicile	Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

> Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the Commissioner of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
> Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Dipenogoro (1990) Earned a Bachelor's degree in Accounting from the University of Dipenogoro (1990)
> Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain. Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committee member in other publicly listed companies.
> Pengalaman Kerja Work Experience	• Advisor Audit Internal PT Global Digital Niaga, Tbk (2024 – saat ini) Internal Audit Advisor of PT Global Digital Niaga, Tbk (2024 – present) • Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko PT Indodana Multi Finance (2024 - saat ini) Member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Indodana Multi Finance (2024 – present) • Kepala Audit Internal PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2017 - saat ini) Head of Internal Audit of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2017 – present) • Corporate Controller PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2007 – 2017) Corporate Controller of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2007 – 2017) • Finance Controller Ascott Group (1999 – 2005) Finance Controller in Ascott Group (1999 – 2005)
> Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. He has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan. He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.



KOMPOSISI DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Pada tahun 2025, tidak terjadi perubahan dalam susunan anggota Direksi Perseroan. Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

In 2025, no changes occurred in the composition of the Company's Board of Directors. As such, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Direksi | Board of Directors

Direktur Utama
President Director

Ramadhan Kurnia Nusa

Direktur | Director

Doni Wilaga Kusuma

Direktur | Director

Catherine Sembiring Pelawi

Direktur | Director

Suciratin

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE





Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur Utama
President Director

- **Usia**
Age 48 Tahun | Years Old
- **Kewarganegaraan**
Citizenship Indonesia | Indonesian
- **Domisili**
Domicile Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

➤ Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the President Director of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
➤ Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana jurusan Elektro dari Institut Teknologi Bandung (2000) Earned a Bachelor's degree in Electrical from the Bandung Institute of Technology (2000)
➤ Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain. Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committee member in other publicly listed companies.
➤ Pengalaman Kerja Work Experience	• <i>Chief of Non-Connectivity Project</i> PT Iforte Solusi Infotek (2021-saat ini) Chief of Non-Connectivity Project of PT iForte Solusi Infotek (2021-present) • <i>Operation & Sales General Manager</i> PT CLS Indonesia (2020) Operation & Sales General Manager PT CLS Indonesia (2020) • <i>Head of Branch Expansion</i> PT LinkNet Tbk (2019-2020) Head of Branch Expansion of PT LinkNet Tbk (2019-2020) • <i>Operation General Manager</i> PT Internux (2012 – 2019) Operation General Manager of PT Internux (2012 – 2019) • <i>Global Project Manager</i> PT eServGlobal (2009 – 2012) Global Project Manager of PT eServGlobal (2009 – 2012) • <i>Country Operation Leader</i> Nortel Networks (2005 – 2009) Country Operation Leader of Nortel Networks (2005 – 2009) • <i>Technical Support Manager</i> PT Infoasia Teknologi Global Tbk (2004 – 2005) Technical Support Manager of PT Infoasia Teknologi Global Tbk (2004 – 2005) • <i>Product Manager</i> PT Astragraphia Information Technology (2001 – 2004) Product Manager of PT Astragraphia Information Technology (2001 – 2004)
➤ Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. He has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan. He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.





Doni Wilaga Kusuma
Direktur
Director

> Usia Age	47 Tahun Years Old
> Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
> Domisili Domicile	Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

> Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the Director of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
> Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraiah gelar Sarjana jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dari <i>Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute</i> PERBANAS (2008) Earned a Bachelor's degree in Human Resource Management from Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) PERBANAS Institute (2008)
> Rangkap Jabatan Concurrent Positions	- Komite Remunerasi dan Nominasi PT Remala Abadi Tbk (2025 - saat ini) Remuneration and Nomination Committee of PT Remala Abadi Tbk (2025 – present) - Komite Remunerasi dan Nominasi PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2022 - saat ini) Remuneration and Nomination Committee of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2022 – present) - Komite Remunerasi dan Nominasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – saat ini) Remuneration and Nomination Committee of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – present) - Komite Remunerasi dan Nominasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014 – saat ini) Remuneration and Nomination Committee of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014 – present)
> Pengalaman Kerja Work Experience	- Kepala Divisi Grup Sumber Daya Manusia dan General Affairs PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2021 – saat ini) Head of Human Resources and General Affairs Group Division of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2021 – present) - Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2019 – 2021) Head of Human Resources and General Affairs Division of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2019 – 2021) - Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – 2019) Head of Human Resources Division of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – 2019) - Manajer Divisi Sumber Daya Manusia PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2010 – 2014) Human Resources Division Manager of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2010 – 2014) - Supervisor Sumber Daya Manusia PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2008 – 2010) Human Resources Supervisor of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2008 – 2010) - HR Supervisor PT Cakrawala Andalas Televisi (2006 – 2008) HR Supervisor of PT Cakrawala Andalas Televisi (2006 – 2008) - HR Supervisor PT GE Finance Indonesia (2000 – 2006) HR Supervisor of PT GE Finance Indonesia (2000 – 2006)
> Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. He has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan. He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.





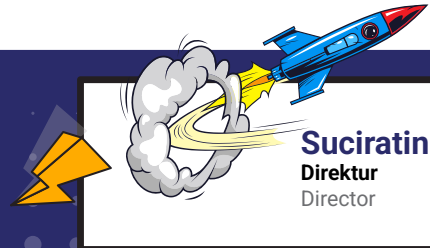
Catherine Sembiring Pelawi
Direktur
Director

- > **Usia**
Age 49 Tahun | Years Old
- > **Kewarganegaraan**
Citizenship Indonesia | Indonesian
- > **Domisili**
Domicile Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

> Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the Director of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
> Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana jurusan Teknik Elektro dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (2000). Earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Atma Jaya Catholic University, Jakarta (2000).
> Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain. Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committee member in other publicly listed companies.
> Pengalaman Kerja Work Experience	• <i>Head of Property Site Renewal Department</i> PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2024 – saat ini) Head of Property Site Renewal Department of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2024 – present) • <i>VP of Property Management Division</i> PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2021 – 2023) VP of Property Management Division of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2021 – 2023) • <i>General Manager Property Management</i> PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012 – 2021) General Manager Property Management of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012 – 2021) • <i>Senior Manager Property Department</i> PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2009 – 2011) Senior Manager Property Department of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2009 – 2011) • <i>Site Acquisition Manager</i> PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007 – 2009) Site Acquisition Manager of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007 – 2009) • <i>Project Manager Sitac & CME</i> PT Infratech Indonesia (2004 – 2007) Project Manager Sitac & CME of PT Infratech Indonesia (2004 – 2007) • <i>Assistant Project Manager</i> PT Isindo Interbuana (2002 – 2004) Assistant Project Manager of PT Isindo Interbuana (2002 – 2004)
> Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. He has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan. He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.





Suciratin
Direktur
Director

> Usia Age	43 Tahun Years Old
> Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
> Domisili Domicile	Indonesia

Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

> Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2024. Appointed as the Director of the Company based on Extraordinary GMS dated August 15, 2024.
> Riwayat Pendidikan Educational Background	- Diploma Manajemen dari STP Sahid (2004) Diploma in Management from STP Sahid (2004) - Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2017) Bachelor degree in Management from Bina Nusantara University (2017) - Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2020) Magister of Management from Bina Nusantara University (2020).
> Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain. Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committee member in other publicly listed companies.
> Pengalaman Kerja Work Experience	- Sekretaris Perusahaan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2024 – sekarang) Corporate Secretary of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2024 – present) - Head of Site Acquisition Build To Suit Department PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017 - 2021) Head of Site Acquisition Build To Suit Department of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017 - 2021) - Site Acquisition Division Manager PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014 – 2017) Site Acquisition Division Manager of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014 – 2017) - Site Acquisition Senior Manager PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012 – 2014) Site Acquisition Senior Manager of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012 – 2014) - Site Acquisition Manager PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2009 – 2012) Site Acquisition Manager of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2009 – 2012) - Site Acquisition Coordinator PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007 – 2009) Site Acquisition Coordinator of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007 – 2009) - Site Acquisition Coordinator PT Huawei Tech Investment (2005 – 2007) Site Acquisition Coordinator of PT. Huawei Tech Investment (2005 – 2007)
> Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Iforte Solusi Infotek (pemegang saham utama dan pengendali Perseroan), sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan. She has no affiliate relationship with PT Iforte Solusi Infotek (the major and controlling shareholder of the Company), other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.

DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHY

Pada tahun 2025, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 1 orang, dengan rincian 1 karyawan laki-laki (100%) dan 0 karyawan perempuan (0%). Berikut adalah data demografi karyawan per 31 Desember 2025:

In 2025, the Company employed a total of 1 personnel, consisting of 1 male employees (100%) and 0 female employees (0%). The employee demographics as of December 31, 2025 are as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Operational Area and Gender

Wilayah Operasional Operational Area	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Offices	252	120	372	72	35	107	1	0	1
Jumlah Total	252	120	372	72	35	107	1	0	1

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Position and Gender

Level Jabatan Position Level	2024					2025*				
	L/M	%	P/F	%	Jumlah Total	L/M	%	P/F	%	Jumlah Total
Chief & VP (Executive Level)	1	0,93%	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0,00%	0
General Manager (Senior Level)	1	0,93%	1	0,93%	2	0	0,00%	0	0,00%	0
Senior Manager & Manager (Middle Level)	20	18,69%	4	3,74%	24	0	0,00%	0	0,00%	0
Non-Manager (Entry Level)	50	46,73%	30	28,04%	80	1	100,00%	0	0,00%	1
Jumlah Total	72	67,29%	35	32,71%	107	1	100,00%	0	0,00%	1

Catatan | Notes : L/M (Laki-laki/Male), P/F (Perempuan/Female)

*Perubahan metode pencatatan kepegawaian setelah Perseroan menjadi bagian dari Grup | Change in method of recording employment after the Company became part of the Group

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Employment Status and Gender

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Karyawan Tetap Permanent Employee	195	103	298	54	33	87	0	0	0
Karyawan Kontrak Contract Employee	57	17	74	18	2	20	1	0	1
Jumlah Total	252	120	372	72	35	107	1	0	1

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Age and Gender

Usia Age	2024			2025*		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
18-25 tahun years old	2	0	2	0	0	0
26-35 tahun years old	17	13	30	0	0	0
36-45 tahun years old	40	18	58	1	0	1
46-55 tahun years old	13	4	17	0	0	0
>55 tahun years old	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	72	35	107	1	0	1

*Perubahan metode pencatatan kepegawaian setelah Perseroan menjadi bagian dari Grup | Change in method of recording employment after the Company became part of the Group

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia, Jabatan, dan Jenis Kelamin

Employee Composition by Age, Position, and Gender

Usia Age	2024								2025*							
	Executive Level		Senior Level		Middle Level		Entry Level		Executive Level		Senior Level		Middle Level		Entry Level	
	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F
18-25 tahun years old	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-35 tahun years old	0	0	0	0	2	0	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0
36-45 tahun years old	0	0	0	0	12	2	28	16	0	0	0	0	0	0	1	0
46-55 tahun years old	1	0	1	1	6	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
>55 tahun years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	1	0	1	1	20	4	50	30	0	0	0	0	0	0	1	0

Catatan | Notes : L/M (Laki-laki/Male), P/F (Perempuan/Female)
*Perubahan metode pencatatan kepegawaian setelah Perseroan menjadi bagian dari Grup | Change in method of recording employment after the Company became part of the Group

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Education and Gender

Pendidikan Education	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
SLTA Sederajat High School Equivalent	18	3	21	9	1	10	0	0	0
D3 Diploma	22	16	38	0	0	0	0	0	0
S1 Bachelor	198	95	293	62	32	94	1	0	1
S2 Master	14	6	20	1	2	3	0	0	0
Jumlah Total	252	120	372	72	35	107	1	0	1

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham per 1 Januari* dan 31 Desember 2025

Shareholder holding 5% or more of the outstanding shares as of January 1*, and December 31, 2025

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2025* January 1, 2025		31 Desember 2025 31 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Total Shares	(%)	Jumlah Saham Total Shares	(%)
1.	PT Iforte Solusi Infotek	1.350.586.095	99,98	1.350.254.095	99,95
2.	Masyarakat Public	318.832	0,02	650.832	0,05
	Jumlah Total	1.350.904.927	100,00	1.350.904.927	100,00%

*) Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024.
Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 1 Januari* dan 31 Desember 2025

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 1 Januari* dan 31 Desember 2025

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025* January 1, 2025		31 Desember 2025 31 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Total Shares	(%)	Jumlah Saham Total Shares	(%)
Adam Gifari	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Rinaldy Santosa	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Haryo Dewanto	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Ramadhan Kurnia Nusa	Direktur Utama President Director	-	-	-	-
Doni Wilaga Kusuma	Direktur Director	-	-	-	-
Catherine Sembiring Pelawi	Direktur Director	-	-	-	-
Suciratin	Direktur Director	-	-	-	-

*) Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024.
Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.



Transaksi Jual Beli Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 1 Januari dan 31 Desember 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan yang melakukan transaksi jual atau beli saham Perseroan.

Shares Trading Transaction of the Board of Commissioners and Board of Directors as of January 1 and December 31, 2025

Throughout 2025, no members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors engaged in any share purchase or sale transactions.

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan <5% per 1 Januari 2025*

Shareholders Composition from the Public with Ownership <5% as of January 1, 2025*

Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
Pemodal Domestik Domestic Shareholders			
Perorangan Domestik Domestic Retail	305.623	0,02	425
Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	9	0,00	1
Pemodal Asing Foreign Shareholders			
Perorangan Asing Foreign Retail	500	0,00	1
Institusi Asing Foreign Institution	12.700	0,00	2
Jumlah Total	318.832	0,02	429

*) Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024.
Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan <5% per 31 Desember 2025

Shareholders Composition from the Public with Ownership <5% per 31 Desember 2025

Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
Pemodal Domestik Domestic Shareholders			
Perorangan Domestik Domestic Retail	305,623	0,02	418
Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	9	0,00	1
Pemodal Asing Foreign Shareholders			
Perorangan Asing Foreign Retail	500	0,00	1
Institusi Asing Foreign Institution	344.700	0,03	3
Jumlah Total	650.832	0,05	423

*) Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024.
Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

**Komposisi Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan per 1 Januari*
dan 31 Desember 2025 Berdasarkan Klasifikasi**

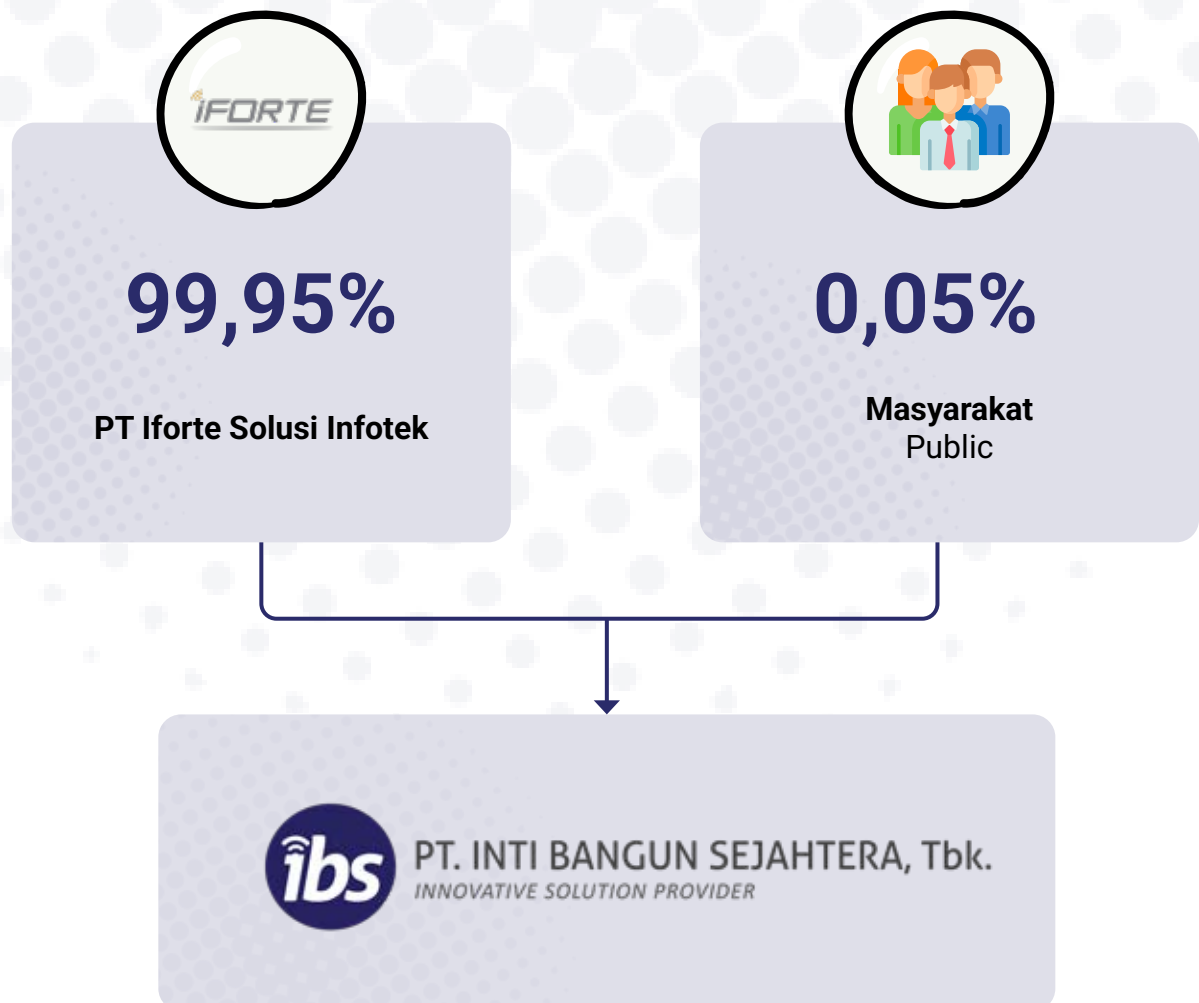
Shareholders and Percentage Ownership as of 1 January*
and 31 December 2025 Based on Classification

Pemodal Domestik Domestic Shareholders	1 Januari 2025* January 1, 2025*			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Saham Total Share	%	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Saham Total Share	%
Pemodal Domestik Domestic Shareholders						
Perorangan Domestik Domestic Retail	425	305.623	0,023	418	305.623	0,023
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	2	1.350.586.104	99,976	2	1.350,254,104	99,952
Sub Jumlah Sub Total	427	1.350.891.727	99,999	420	1.350.559.727	99,974
Pemodal Asing Foreign Shareholders						
Perorangan Asing Foreign Retail	1	500	0,000	1	500	0,000
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	2	12.700	0,001	3	344.700	0,026
Sub Jumlah Sub Total	3	13.200	0,001	4	345.200	0,026
Jumlah Keseluruhan Grand Total	430	1.350.904.927	100,000	424	1.350.904.927	100,000



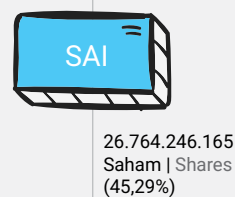
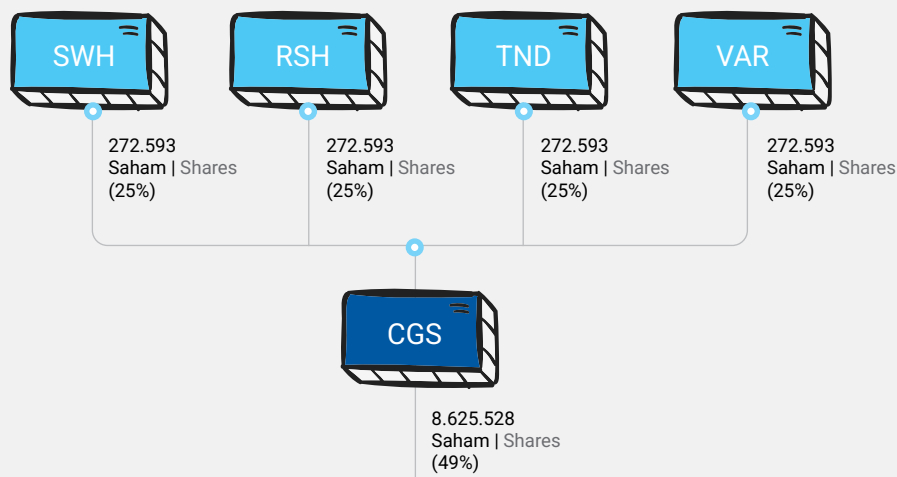
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS



STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS STRUCTURE



1 Saham | Shares (0,0001%)

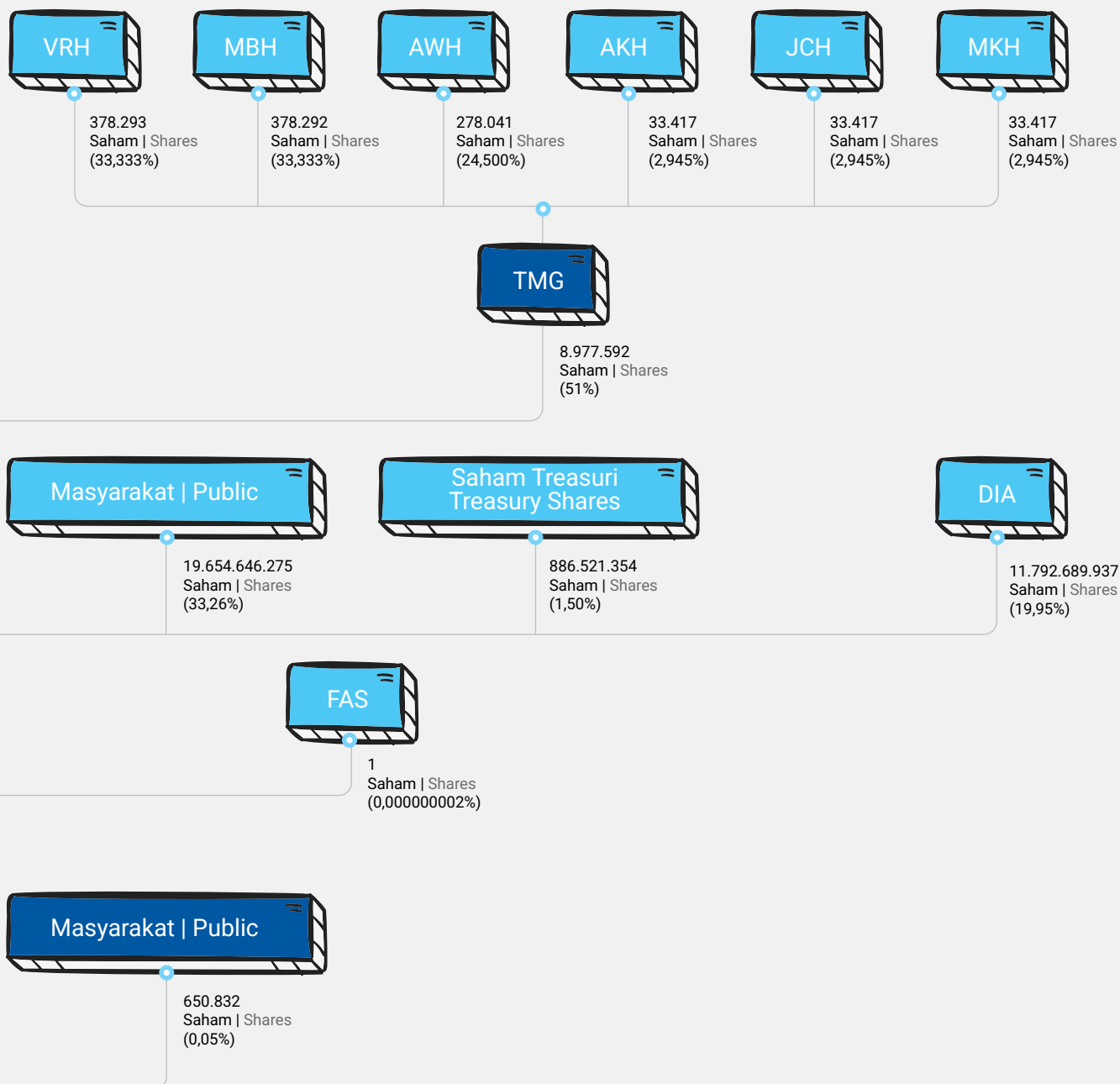
58.322.620.186 Saham | Shares (99,99999998%)

789.416 Saham | Shares (99,9999%)

1.350.254.095 Saham | Shares (99,95%)

SINGKATAN ABBREVIATIONS	
SWH	: Stefanus Wijaya Hartono
RSH	: Roberto Setiabudi Hartono
TND	: Tessa Natalia Damayanti Hartono
VAR	: Vanessa Ratnasari Hartono
VRH	: Victor Rahmat Hartono
MBH	: Martin Basuki Hartono
AWH	: Armand Wahyudi Hartono
AKH	: Alicia Katrina Hartono
JCH	: Jacqueline Chiara Hartono
MKH	: Marco Krisna Hartono
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala
TMG	: PT Tricipta Mandhala Gumilang
FAS	: Ferdinandus Aming Santoso
SMN	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
Protelindo	: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
SAI	: PT Sapta Adhikari Investama
DIA	: PT Dwimuria Investasi Andalan
iForte	: PT iForte Solusi Infotek
IBS	: PT Inti Bangun Sejahtera Tbk





ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Perseroan tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, maupun perusahaan ventura bersama.

The Company has no subsidiaries, associate companies, or joint venture entities.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

SHARE LISTING CHRONOLOGY

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi berupa pemecahan saham, penggabungan saham, pembagian dividen saham, penerbitan saham bonus, perubahan nilai nominal saham, konversi efek, maupun penambahan atau pengurangan modal.

Throughout 2025, the Company did not undertake any corporate actions, including stock splits, reverse stock splits, stock dividend distributions, bonus share issuances, changes in par value, securities conversions, or increases or decreases in capital.

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Ditempatkan & Disetor Issued and Fully Paid
30 Agustus 2012 August 30, 2012	Pra Penawaran Umum Perdana Pre-Initial Public Offering	874.066.400
31 Agustus 2012 August 31, 2012	Penawaran Umum Perdana sebanyak 154.247.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 dan ditawarkan dengan harga Rp1.000 tercatat dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Initial Public Offering of 154,247,000 shares, with a nominal value of Rp500 and offering price of Rp1,000, listed and traded in Indonesia Stock Exchange ("IDX"). Pada tanggal 15 Agustus 2012, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak 154.247.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.000 setiap saham. Saham-saham tersebut telah tercatat di BEI sejak tanggal 31 Agustus 2012. On 15 August 2012, the Company received an effective statement from Capital Market Supervisory Agency – Financial Institution ("Bapepam-LK") to conduct the Initial Public Offering by releasing 154,247,000 shares to the public with a nominal value of Rp500 per share and an offering price of Rp1,000 per share. The shares have been listed on the IDX since August 31, 2012.	1.028.313.400
12 September 2013 September 12, 2013	Konversi atas utang obligasi menjadi saham sejumlah 114.760.000 saham tambahan dengan nilai nominal Rp500 dan dengan harga pelaksanaan Rp500, tercatat dan diperdagangkan di BEI. Conversion of Bonds payable into 114,760,000 additional shares with a nominal value of Rp500 and exercise price of Rp500, listed and traded in IDX.	1.143.073.400
6 Mei 2014 May 6, 2014	Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 207.831.527 lembar saham tambahan dengan nilai nominal Rp500 dan ditawarkan dengan harga Rp3.176, tercatat dan diperdagangkan di BEI. Limited Public Offering I (PUT I) for the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) of 207,831,527 additional shares, with a nominal value of Rp500 and offering price of Rp3,176, listed and traded in IDX.	1.350.904.927

KRONOLOGI PENCATATAN OBLIGASI DAN/ATAU EFEK LAINNYA

BONDS AND/OR OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan maupun mencatatkan obligasi atau instrumen efek lainnya.

As of December 31, 2025, the Company had not issued or listed any bonds or other securities.

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Tjahjadi & Tamara
Centennial Tower 15/F, Suite 15B
Jl. Gatot Subroto Kav. 25, Jakarta 12930
Tel: 021-2295 8350

Akuntan Publik | Public Accountant:
Riani

Jasa yang diberikan | Services rendered:
Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Audit of the financial statements for the year ended December 31, 2025.

Periode penugasan | Assignment period:
2025

Biaya jasa | Fees:
Rp310.000.000 (belum termasuk *out-of-pocket expenses*), untuk Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Rp310,000,000 (excluding out-of-pocket expenses) for the audit of financial statements for the year ended December 31, 2025.

Jasa lain | Other services:
-

LEMBAGA DAN PROFESIONAL PENUNJANG PASAR MODAL

CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONS AND INSTITUTIONS

> BIRO ADMINISTRASI EFEK SHARE REGISTRAR

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav 47-48
Jakarta Pusat 12930
Indonesia

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

AWARDS & CERTIFICATIONS



> Nama Penghargaan

Awards Name

50 Perusahaan Publik dengan
Kapitalisasi Menengah
50 Medium Capitalization Public
Companies Award

> Pemberi Penghargaan

Awarded by

Indonesian Institute for Corporate
Director



> Nama Penghargaan

Awards Name

Tanggung jawab Terbaik kepada
Dewan
Best Responsibility of the Board

> Pemberi Penghargaan

Awarded by

Indonesian Institute for Corporate
Director

Nama Sertifikat Certificate Name	Diterbitkan oleh Issued by	Masa Berlaku Validity Period
ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System	PT Internasional Sertifikasi Indonesia	8 Maret 2027 March 8, 2027
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System	BSI Group Indonesia	24 Maret 2027 March 24, 2027
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety	BSI Group Indonesia	24 Maret 2027 March 24, 2027
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System	BSI Group Indonesia	24 Maret 2027 March 24, 2027
ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Asset Management System	BSI Group Indonesia	10 April 2027 April 10, 2027
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	BSI Group Indonesia	13 April 2028 April 13, 2028

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

CORPORATE WEBSITE INFORMATION

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 25 Juni 2015 ("POJK 8/2015"), Perseroan telah memiliki situs web yaitu www.ibstower.com yang dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web Perseroan senantiasa dilengkapi dan diperbarui secara berkala.

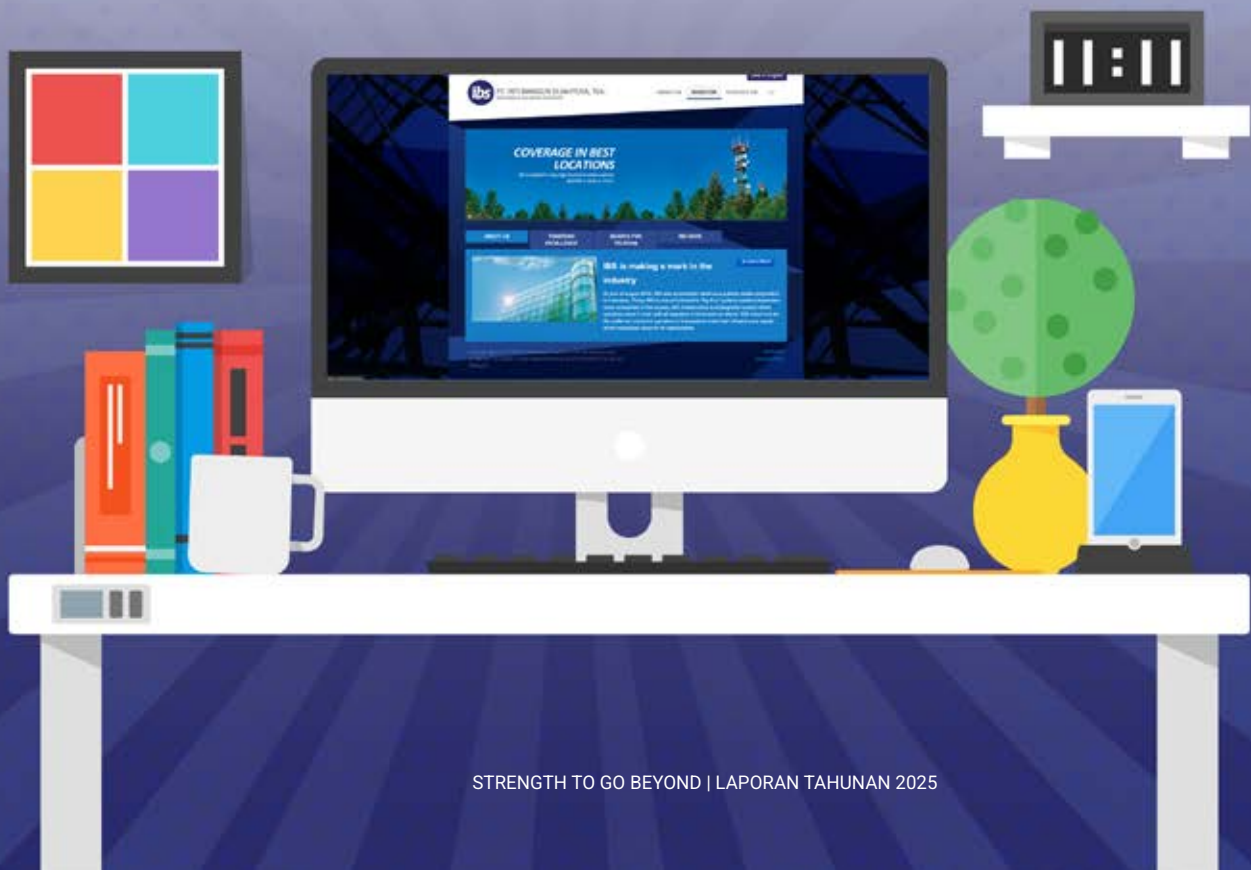
Situs web Perseroan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Pasal 6 POJK 8/2015, dimana Perseroan wajib menyampaikan informasi:

1. umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. bagi Pemodal atau Investor;
3. tata kelola perusahaan; dan
4. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pertaining to the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.4/2015 on the Websites of Issuers or Public Companies, dated June 25, 2015 ("POJK 8/2015"), the Company has established a website, www.ibstower.com, which is accessible in both Indonesian and English. The Company's website is continuously updated and supplemented with relevant information on a regular basis.

The website complies with the mandatory disclosure requirements set out in Article 6 of POJK 8/2015, ensuring the provision of the following information:

1. general info on the Issuer or Public Company;
2. for Shareholders or Investors;
3. on corporate governance; and
4. on corporate social responsibility.







STRENGTHENING FUNDAMENTALS TO DELIVER SUSTAINABLE VALUE

IBST terus memperkuat fundamental usaha melalui optimalisasi modal kerja, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan margin dan profitabilitas. Dengan dukungan portofolio aset yang strategis dan ekspansi yang dilakukan secara selektif dan disiplin, Perseroan membangun platform pertumbuhan yang lebih tangguh guna menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

IBST continues to strengthen its business fundamentals through working capital optimization, enhanced operational efficiency, and improved margin and profitability management. Supported by a strategically positioned asset portfolio and disciplined, selective expansion, the Company is building a more resilient growth platform to deliver sustainable long-term value for its stakeholders.



TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

MACROECONOMICS AND INDUSTRY OVERVIEW

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi global menghadapi tekanan akibat meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi ekonomi. Penerapan kebijakan tarif perdagangan baru oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagang menekan aktivitas perdagangan internasional, yang tercermin dari melambatnya arus ekspor dan impor di berbagai kawasan. Kondisi ini turut mendorong moderasi pertumbuhan ekonomi global.

Ketidakpastian global juga tetap tinggi sepanjang tahun, seiring berlanjutnya dinamika geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah dan konflik Rusia–Ukraina. Berdasarkan *World Economic Outlook Update* yang diterbitkan IMF pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,3% pada 2025, relatif stabil dibandingkan realisasi 2024 yang juga sebesar 3,3%. Negara maju mencatat pertumbuhan sekitar 1,7%, sedangkan negara berkembang utama tumbuh sekitar 4,1%, menegaskan peran penting emerging markets dalam menopang momentum ekonomi global.

Di sisi lain, inflasi global menurun menjadi sekitar 4,1% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tekanannya masih bervariasi antarnegara. Inflasi di negara maju berada pada kisaran 2,5%, sementara negara berkembang utama mencatat sekitar 5%. Di Amerika Serikat, inflasi masih dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan dan dampak tarif terhadap harga konsumen, sementara beberapa negara Asia mengalami moderasi inflasi seiring perlambatan aktivitas domestik dan penyesuaian kebijakan moneter. Perbedaan kondisi tersebut mencerminkan tantangan kebijakan yang beragam di berbagai kawasan sekaligus memengaruhi arah kebijakan moneter global.

(Sumber: www.imf.org) (www.worldbank.org)

TINJAUAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025. Kinerja ini ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik serta meningkatnya permintaan eksternal yang bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Dari sisi domestik, penguatan aktivitas ekonomi tercermin pada konsumsi masyarakat yang tetap solid. Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti)

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

In 2025, global economic growth came under pressure amid rising protectionism and economic fragmentation. The implementation of new trade tariffs by the United States on several trading partners weighed on international trade activity, as reflected in slower export and import flows across various regions. These conditions contributed to the moderation of global economic growth.

Global uncertainty also remained elevated throughout the year amid ongoing geopolitical developments, including tensions in the Middle East and the continuing Russia–Ukraine conflict. Based on the *World Economic Outlook Update* published by the IMF in January 2026, global economic growth reached 3.3% in 2025, relatively stable compared to the 3.3% recorded in 2024. Advanced economies posted growth of around 1.7%, while major emerging economies grew by around 4.1%, reaffirming the important role of emerging markets in sustaining global economic momentum.

At the same time, global inflation declined to around 4.1% in 2025 compared to the previous year, although inflationary pressures continued to vary across countries. Inflation in advanced economies stood at around 2.5%, while major emerging economies recorded inflation of around 5%. In the United States, inflation remained affected by trade policy dynamics and the impact of tariffs on consumer prices, while several Asian countries experienced moderating inflation amid slowing domestic activity and monetary policy adjustments. These differing conditions reflect the varied policy challenges across regions and continued to shape the direction of global monetary policy.

(Source: www.imf.org) (www.worldbank.org)

INDONESIAN ECONOMIC OVERVIEW

Indonesia's economy continued to demonstrate resilience amid the global economic slowdown, recording 5.11% year-on-year (YoY) growth in 2025. This performance was supported by solid domestic economic activity and stronger external demand, which together helped sustain national growth momentum.

On the domestic side, stronger economic activity was reflected in resilient household consumption. The Quarterly Household Economic Survey (Seruti)

mencatat konsumsi per kapita pada kelompok jasa makan minum dan akomodasi tumbuh 5,76% YoY, sementara kelompok barang dan jasa lainnya meningkat 7,49% YoY. Sejalan dengan itu, transaksi daring melalui e-retail dan marketplace naik 6,19% QoQ, menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang semakin berbasis digital.

Aktivitas transaksi keuangan digital juga terus meningkat, tercermin dari kenaikan nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit sebesar 10,30% YoY. Peningkatan ini didukung oleh penguatan literasi digital serta perluasan ekosistem pembayaran digital yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha.

Penguatan konsumsi turut mendorong aktivitas produksi. Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia berada pada zona ekspansi sebesar 51,66, sementara penjualan listrik meningkat 3,49% YoY. Hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 1,31%. Struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi, sedangkan sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi Jasa Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, Infokom, serta Jasa Keuangan.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan sebesar 5,11% dan kontribusi 53,63% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 30,02% terhadap perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan peningkatan inflasi. Inflasi tahunan pada 2025 tercatat sebesar 2,65%, meningkat dibandingkan 1,84% pada tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dari sisi moneter dan eksternal, nilai tukar Rupiah relatif terkendali di tengah ketidakpastian global. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 mencapai 156,5 miliar dolar AS, meningkat dari 150,1 miliar dolar AS pada akhir November 2025. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan

recorded per capita consumption growth of 5.76% YoY in the food service and accommodation category, while the other goods and services category grew by 7.49% YoY. In parallel, online transactions through e-retail and marketplace platforms increased by 6.19% QoQ, indicating an increasingly digital-based consumption pattern.

Digital financial transaction activity also continued to rise, as reflected in the 10.30% YoY increase in the value of electronic money, debit card, and credit card transactions. This growth was supported by stronger digital literacy and the expansion of the digital payment ecosystem involving both the Government and business players.

Stronger consumption also drove production activity. Bank Indonesia's Prompt Manufacturing Index (PMI) remained in the expansion zone at 51.66, while electricity sales rose by 3.49% YoY. Almost all business sectors posted positive growth, except for the mining sector, which contracted by 1.31%. The national economic structure continued to be dominated by Manufacturing, Agriculture, Trade, and Construction, while the highest growth was recorded in Transportation and Warehousing Services, Other Services, Information and Communication, and Financial Services.

From the expenditure side, all components recorded positive growth throughout 2025. Household consumption remained the main driver, growing by 5.11% and contributing 53.63% to economic growth. Meanwhile, investment, or Gross Fixed Capital Formation (GFCF), contributed 30.02% to the economy.

This economic growth was accompanied by higher inflation. Annual inflation in 2025 was recorded at 2.65%, up from 1.84% in the previous year, but still within the target range of $2.5 \pm 1\%$. The increase in inflation was mainly driven by the food, beverages, and tobacco group, as well as the personal care and other services group.

From the monetary and external side, the Rupiah exchange rate remained relatively well maintained amid global uncertainty. Indonesia's foreign exchange reserves at the end of December 2025 reached USD156.5 billion, up from USD150.1 billion at the end of November 2025. This position was equivalent to 6.4 months of imports or 6.3 months of imports and government external debt repayments, and remained above the international adequacy standard of around three months of imports.

devisa tersebut memadai untuk mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kondisi makroekonomi yang relatif kondusif tersebut turut didukung oleh kebijakan moneter yang terjaga, dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berada pada level 4,75%.

(Sumber: www.bps.go.id) (www.bi.go.id)

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Industri telekomunikasi di Indonesia terus berkembang sepanjang 2025, didukung oleh penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kolaborasi ini mendorong perluasan konektivitas nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan digital.

Dari sisi regulasi, pemerintah menegaskan komitmennya melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 2 dan No. 13 Tahun 2025 terkait penggunaan spektrum frekuensi pita 1,4 GHz. Kebijakan ini menjadi landasan bagi perluasan jaringan broadband nasional dan persiapan menuju teknologi 5G. Pemerintah juga memperkuat infrastruktur melalui peluncuran Satelit Nusantara 5 (N5) pada 12 September 2025 guna memperluas akses internet, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.

Satelit Nusantara 5 memiliki kapasitas 160 Gbps dan dilengkapi teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS), dengan proyeksi mulai beroperasi secara komersial pada April 2026. Dengan dukungan 101 spot beam dan 11 gateway, satelit ini diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru di wilayah dengan keterbatasan layanan. Sejalan dengan itu, kualitas layanan menunjukkan perbaikan, dengan rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 61,90 Megabit per second (Mbps) untuk unduh dan 22,46 Mbps untuk unggah, berdasarkan pengukuran kualitas layanan (quality of service / QoS) di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada kinerja jaringan seluler serta semakin meratanya layanan hingga menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seiring perkembangan infrastruktur tersebut, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,35% pada 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya trafik data dan aktivitas transaksi digital. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III 2025

Bank Indonesia considered these reserves sufficient to support external resilience and maintain macroeconomic and financial system stability.

This relatively conducive macroeconomic environment was also supported by a well-maintained monetary policy stance, with Bank Indonesia's policy rate (BI Rate) standing at 4.75%..

(Source: www.bps.go.id) (www.bi.go.id)

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY OVERVIEW

Indonesia's telecommunications industry continued to grow throughout 2025, supported by stronger synergy among the Government, industry players, businesses, and the public as service users. This collaboration drove the expansion of national connectivity while also increasing the utilization of digital services.

From a regulatory perspective, the Government reaffirmed its commitment through the issuance of Minister of Communication and Digital Regulations No. 2 and No. 13 of 2025 regarding the use of the 1.4 GHz frequency spectrum band. This policy serves as the foundation for expanding the national broadband network and preparing for the transition to 5G technology. The Government also strengthened infrastructure through the launch of the Nusantara 5 (N5) Satellite on September 12, 2025 to expand internet access, particularly in remote and underserved areas.

The Nusantara 5 Satellite has a capacity of 160 Gbps and is equipped with Very High Throughput Satellite (VHTS) technology, with commercial operations projected to begin in April 2026. Supported by 101 spot beams and 11 gateways, the satellite is intended to strengthen education, healthcare, and public services. The Government also targets an increase in download speeds of up to 16% by 2029, along with the addition of 8,000 new BTS in areas with limited service. In line with this, service quality improved, with the national average internet speed reaching 61.90 Megabits per second (Mbps) for downloads and 22.46 Mbps for uploads, based on quality of service (QoS) measurements across 156 regencies/cities throughout Indonesia. This improvement reflects the continued enhancement of cellular network performance and the increasingly even distribution of services to frontier, outermost, and disadvantaged (3T) areas.

Along with this infrastructure development, the information and communication sector recorded positive growth of 8.35% in 2025. This growth was in line with rising data traffic and digital transaction activity. Bank Indonesia noted that digital economic and financial transactions in the third quarter of 2025 continued to

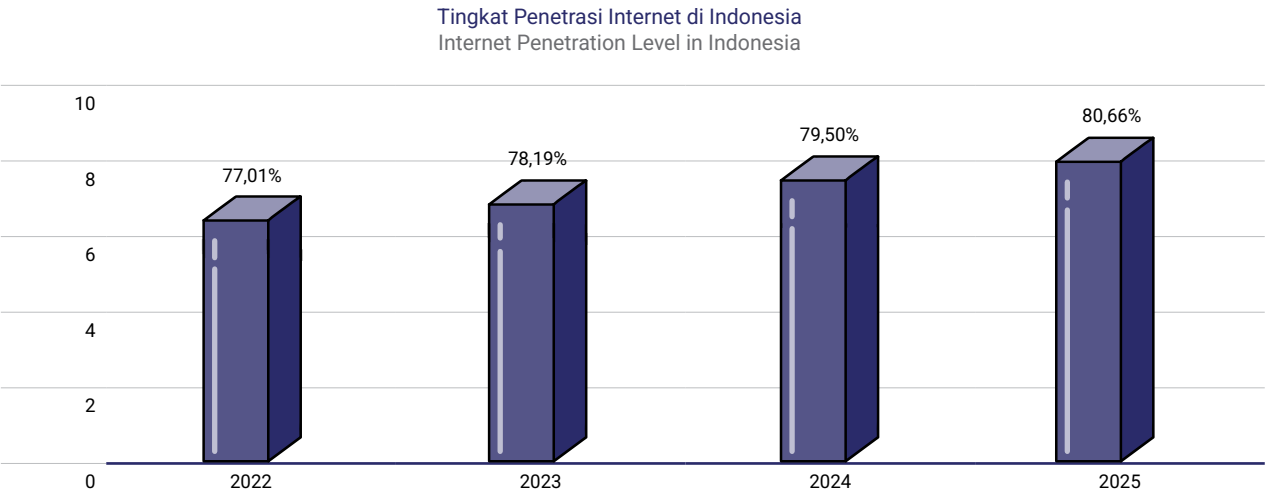
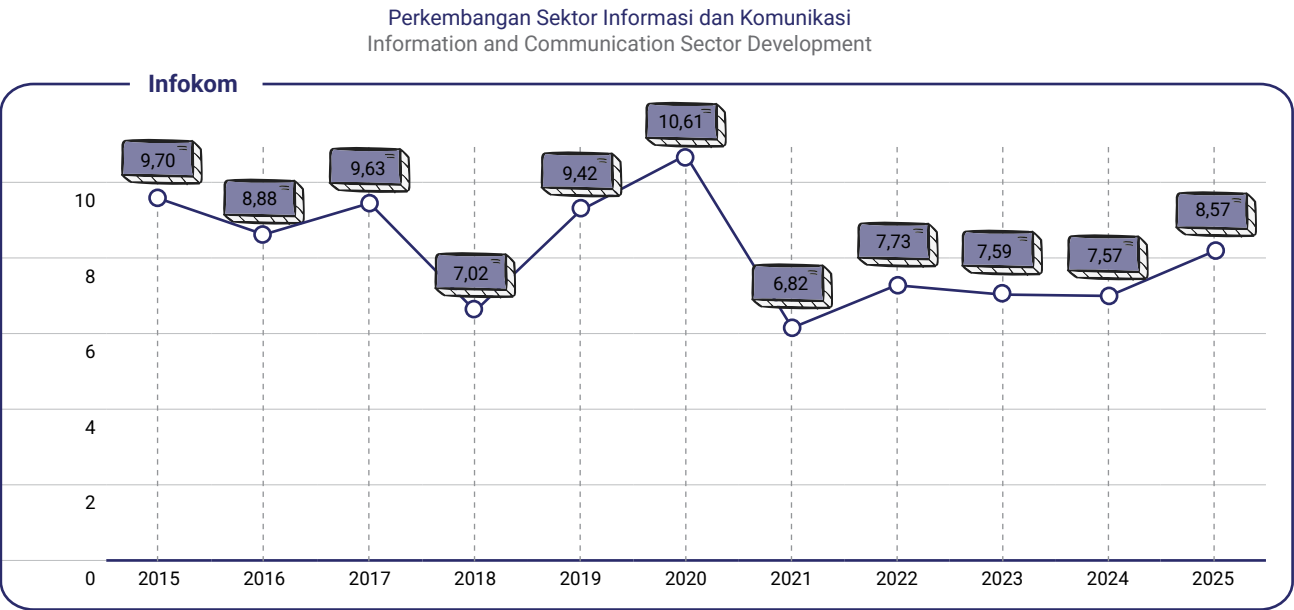
terus meningkat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, termasuk melalui perbankan digital dan penggunaan QRIS, dengan stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229.428.417 orang atau tingkat penetrasi sebesar 80,66% pada 2025, meningkat dari 79,50% pada tahun sebelumnya. Kontribusi pengguna terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar 58,14%, diikuti Sumatera 20,51%, Kalimantan 6,05%, Bali dan Nusa Tenggara 5,13%, Sulawesi 6,46%, serta Papua dan Maluku 3,71%. Pelanggan fixed broadband meningkat menjadi 38,70%, sementara non-fixed broadband menurun menjadi 61,30%. Pada tahun yang sama, industri juga mengalami konsolidasi melalui merger PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom Tbk menjadi PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.

(sumber: <https://survei.apjii.or.id>)

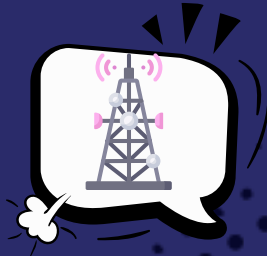
increase, supported by a secure, smooth, and reliable payment system, including through digital banking and QRIS usage, while payment system stability remained well maintained.

From the demand side, the number of internet users in Indonesia reached 229,428,417 people, or a penetration rate of 80.66% in 2025, up from 79.50% in the previous year. The largest share of users came from Java at 58.14%, followed by Sumatra at 20.51%, Kalimantan at 6.05%, Bali and Nusa Tenggara at 5.13%, Sulawesi at 6.46%, and Papua and Maluku at 3.71%. Fixed broadband subscribers increased to 38.70%, while non-fixed broadband declined to 61.30%. In the same year, the industry also underwent consolidation through the merger of PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, and PT Smart Telecom Tbk into PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.



STRATEGI PERUSAHAAN

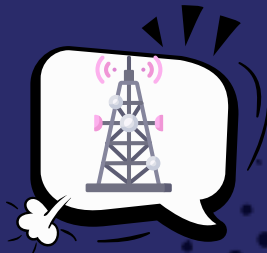
CORPORATE STRATEGY



SINERGI DAN EKSPANSI TERUKUR

Synergy and Measured Expansion

- Pertumbuhan organik yang selektif
Selective organic growth
- Akuisisi strategis dan selektif untuk memperkuat portofolio
Strategic and selective acquisitions to strengthen the portfolio



OPTIMALISASI ASET

Asset Optimization

- Portofolio di lokasi strategis
Strategically located portfolio
- Peningkatan penyewa kolokasi
Growth in co-location tenants
- Utilisasi aset & stabilitas pendapatan
Asset utilization & revenue stability
- Penyediaan solusi terintegrasi
Provision of integrated solutions



Tahun 2025 menjadi fase penting bagi IBST dalam mempercepat pemulihan kinerja dan memperkuat fundamental usaha secara menyeluruh. Perseroan memfokuskan strategi pada peningkatan efisiensi operasional melalui optimalisasi modal kerja, pengendalian biaya yang lebih disiplin, serta penguatan margin dan profitabilitas. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan agenda *turnaround* tersebut, Perseroan terus memperkuat sinergi dengan entitas dalam Grup guna mendukung ekspansi infrastruktur digital secara terintegrasi. Pendekatan ini dilakukan melalui pertumbuhan organik yang selektif maupun aksi akuisisi yang terukur, dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi, memperbaiki struktur biaya, serta memperkuat daya saing di tengah industri yang semakin kompetitif.

Dalam menjalankan strategi bisnisnya, Perseroan menempatkan pencapaian imbal hasil yang melebihi biaya operasional dan investasi sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pengelolaan struktur permodalan yang sehat serta akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif dan fleksibel menjadi elemen penting dalam mendukung kesinambungan strategi pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Keunggulan kompetitif Perseroan didukung oleh portofolio aset menara yang berada di lokasi strategis. Posisi tersebut memberikan potensi peningkatan jumlah penyewa kolokasi secara berkelanjutan dan menopang stabilitas pendapatan, sekaligus memperkuat utilisasi aset di tengah tekanan persaingan industri.

Seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan jaringan dan perkembangan teknologi telekomunikasi, peran infrastruktur digital, termasuk menara telekomunikasi, menjadi semakin krusial dalam menjaga keandalan dan kapasitas layanan operator. Aset menara Perseroan tetap menjadi elemen kunci dalam mempertahankan daya saing serta menciptakan nilai tambah jangka panjang.

Untuk memperkuat posisinya, Perseroan melanjutkan ekspansi jaringan menara melalui pembangunan menara baru maupun akuisisi strategis yang dilakukan secara selektif dan disiplin. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk memperluas cakupan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas portofolio aset dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan disiplin investasi.

The year 2025 marked a pivotal phase for IBST in accelerating performance recovery and strengthening its business fundamentals. The Company focused its strategy on improving operational efficiency through working capital optimization, stricter cost discipline, and enhanced margin and profitability management. These initiatives were designed to establish a healthier and more sustainable long-term growth foundation.

Aligned with its turnaround agenda, the Company strengthened synergies within the Group to support integrated digital infrastructure expansion. This approach combines selective organic growth and measured strategic acquisitions to enhance economies of scale, improve cost structures, and reinforce competitiveness in an increasingly consolidated industry landscape.

In executing its strategy, the Company prioritizes achieving financial returns that exceed operating and investment costs. Maintaining a sound capital structure and securing access to competitive and flexible financing sources remain critical to sustaining growth initiatives and ensuring financial stability. IBST's competitive advantage is supported by a strategically located tower portfolio, providing sustainable potential to increase co-location tenants and stabilize revenue streams, while improving asset utilization amid industry competition.

As telecommunications technology evolves and network requirements become more complex, digital infrastructure, including telecommunications towers, plays an increasingly vital role in ensuring service reliability and capacity. The Company's tower assets remain central to maintaining competitiveness and creating long-term value.

To reinforce its position, the Company continues to expand its tower network through new tower construction and selective strategic acquisitions. This disciplined expansion strategy aims not only to broaden infrastructure coverage but also to enhance portfolio quality and generate sustainable value for shareholders and stakeholders, while upholding prudent investment principles.



MENGOPTIMALKAN SEWA KOLOKASI PADA MENARA PERUSAHAAN

Perseroan terus melanjutkan strategi sewa kolokasi, yaitu menyewakan ruang yang tersedia pada menara eksisting kepada lebih dari satu penyewa. Strategi ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Perseroan, mengingat sebagian besar biaya operasional menara bersifat tetap, sehingga penambahan penyewa baru hanya memerlukan tambahan biaya yang relatif rendah. Selain itu, skema sewa kolokasi sejalan dengan strategi *asset-light* yang diterapkan oleh operator telekomunikasi dalam rangka mengendalikan belanja modal.

Dalam rangka mengoptimalkan peluang pertumbuhan, Perseroan secara aktif memasarkan layanan kolokasi kepada operator telekomunikasi serta terus melakukan edukasi pasar mengenai manfaat kolokasi. Upaya ini mencakup penyampaian nilai tambah berupa efisiensi biaya dan keuntungan operasional yang dapat diperoleh oleh para operator, sekaligus mendukung optimalisasi utilisasi aset Perseroan secara berkelanjutan.

PERTUMBUHAN MELALUI PEMBANGUNAN

Strategi *asset-light* telah lama diterapkan oleh operator telekomunikasi untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada penyediaan layanan, tanpa harus membangun dan memiliki infrastruktur digital secara langsung. Sejak bergabung dengan Grup SMN, Perseroan mengadopsi model *Build-to-Suit* sebagai pendekatan utama dalam pengembangan menara, guna memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan berdasarkan permintaan serta spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh operator telekomunikasi. Strategi ini didukung oleh kompetensi Perseroan dalam menyediakan solusi infrastruktur digital yang selaras dengan kebutuhan pelanggan.

Pengembangan usaha dilaksanakan melalui strategi yang terstruktur dengan mengutamakan proyek-proyek yang memberikan nilai ekonomis yang terukur. Dalam implementasinya, Perseroan berkolaborasi dengan operator telekomunikasi dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan jaringan menara di lokasi-lokasi strategis yang disesuaikan dengan rencana ekspansi jaringan masing-masing operator. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan modal serta penyesuaian kepentingan antara Perseroan dan pelanggan.

Setelah menara mulai beroperasi, operator telekomunikasi bertindak sebagai *anchor tenant* melalui perjanjian sewa jangka panjang, yang memberikan visibilitas dan kepastian pendapatan bagi Perseroan. Selanjutnya, Perseroan secara aktif mengupayakan penambahan penyewa untuk meningkatkan potensi

OPTIMIZING CO-LOCATION LEASES ON THE COMPANY'S TOWERS

The Company continues to implement its co-location leasing strategy, which involves leasing available space on existing towers to multiple tenants. This approach provides economic benefits, as the majority of tower operating costs are fixed, and the addition of new tenants requires only relatively limited incremental costs. Furthermore, the co-location model is aligned with the *asset-light* strategies adopted by telecommunications operators to manage capital expenditure more efficiently.

To maximize growth opportunities, the Company actively markets its co-location services to telecommunications operators and continues to educate the market on the benefits of co-location. These efforts emphasize cost efficiency and operational advantages for operators, while supporting sustainable optimization of the Company's asset utilization.

GROWTH THROUGH DEVELOPMENT

The *asset-light* strategy has long been adopted by telecommunications operators to enable a greater focus on service provision without the need to build and own digital infrastructure directly. Since joining the SMN Group, the Company has adopted a *Build-to-Suit* model as its primary approach to tower development, ensuring that construction activities are aligned with the demand and technical specifications of telecommunications operators. This growth strategy is supported by the Company's established capabilities in delivering digital infrastructure solutions tailored to customer requirements.

Business development is executed through a structured strategy that prioritizes projects with measurable economic value. In practice, the Company collaborates closely with telecommunications operators in planning, constructing, and managing tower networks at strategic locations aligned with the operators' network expansion strategies. This approach enables efficient capital deployment while aligning the interests of the Company and its customers.

Once a tower becomes operational, the telecommunications operator typically serves as an anchor tenant under a long-term lease agreement, providing revenue visibility and stability. In parallel, the Company actively seeks additional tenants to enhance co-location potential and maximize asset utilization.

kolokasi dan memaksimalkan utilisasi aset. Pada umumnya, pembangunan infrastruktur baru dilakukan setelah adanya komitmen sewa dari *anchor tenant*, sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk membatasi potensi kerugian dan menjaga disiplin investasi.

PERTUMBUHAN MELALUI AKUISISI

Akuisisi menara merupakan salah satu strategi utama yang mendukung posisi Perseroan sebagai salah satu pelaku terkemuka dalam industri infrastruktur telekomunikasi. Perseroan secara berkelanjutan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang akuisisi yang memenuhi kriteria pengembalian minimum atau memberikan akses terhadap wilayah layanan baru. Melalui strategi ini, Perseroan tidak hanya memperkuat portofolio aset yang telah ada, tetapi juga membuka potensi pengembangan sumber pendapatan baru secara terdiversifikasi.

Dalam pelaksanaan akuisisi menara, Perseroan menerapkan sejumlah kriteria evaluasi yang komprehensif, antara lain tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih dengan portofolio menara eksisting, lokasi dan utilisasi kapasitas menara, kepadatan penduduk di wilayah sekitar, serta prospek pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Selain pertimbangan ekonomis dan teknis, Perseroan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang *prudent*.

FOKUS TERHADAP KUALITAS LAYANAN

Dalam rangka meningkatkan *tenancy ratio* aset menara, Perseroan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang terarah dan selektif. Sebagian besar menara Perseroan dirancang untuk menampung dua atau lebih penyewa, sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan efisiensi operasional.

Untuk mendukung efektivitas strategi tersebut, Perseroan secara konsisten menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi melalui pemenuhan kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan. Perseroan menempatkan diri sebagai mitra yang andal dengan menjunjung komitmen komersial sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama pelanggan, sehingga menciptakan hubungan kerja sama yang stabil dan saling menguntungkan.

Perseroan juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan guna mendukung operator telekomunikasi dalam memperluas jangkauan operasional ke wilayah

New infrastructure development is generally undertaken following the securing of lease commitments from anchor tenants, serving as a risk mitigation measure to limit potential losses and maintain investment discipline.

GROWTH THROUGH ACQUISITIONS

Tower acquisitions represent one of the key strategies supporting the Company's position as a leading player in the telecommunications infrastructure industry. The Company continuously identifies and evaluates strategic acquisition opportunities that meet minimum return thresholds or enable expansion into new service areas. Through this approach, the Company strengthens its existing asset portfolio while also unlocking potential new business opportunities as alternative sources of revenue.

In executing tower acquisitions, the Company applies a comprehensive set of evaluation criteria, including returns on invested capital, co-location demand potential, overlapping with the existing tower portfolio, tower location and available capacity utilization, population density, and long-term growth prospects. In addition to economic and technical considerations, the Company ensures full compliance with applicable laws and regulations in each jurisdiction, reflecting its commitment to sound corporate governance and prudent risk management.

FOCUS ON SERVICE QUALITY

The Company implements a focused and selective sales and marketing strategy to enhance the tenancy ratio of its tower assets. The majority of the Company's towers are designed to accommodate two or more tenants, as part of an effort to optimize asset utilization and improve operational efficiency.

To support the effectiveness of this strategy, the Company consistently maintains long-term relationships with telecommunications operators by meeting customer requirements on an ongoing basis. The Company positions itself as a reliable partner by upholding commercial commitments in accordance with mutually agreed arrangements, thereby fostering stable and mutually beneficial partnerships.

The Company also places strong emphasis on enhancing service quality to support operators in expanding their operational reach into new areas in a timely manner, while

baru secara tepat waktu, serta meningkatkan cakupan dan kapasitas jaringan. Kualitas layanan yang konsisten menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan *tenancy ratio* Perseroan di tengah persaingan industri yang semakin intensif.

Berdasarkan pemahaman terhadap dinamika industri, Perseroan memusatkan strategi pada operator telekomunikasi yang tengah melakukan ekspansi dan peningkatan infrastruktur jaringan, meluncurkan teknologi baru, serta memperluas cakupan geografis. Perseroan meyakini bahwa portofolio menara yang luas memberikan landasan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, khususnya melalui pendekatan kolokasi yang terukur.

KENALI PELANGGAN

Pendekatan *know your customer* merupakan elemen penting dalam mendukung diversifikasi layanan serta penguatan kapasitas keuangan guna memenuhi kebutuhan mitra usaha. Integrasi pengetahuan pasar dan keahlian pemasaran dalam Grup telah memungkinkan terciptanya konektivitas yang efektif antara aset menara dan jaringan serat optik, sehingga mendukung penyediaan solusi infrastruktur yang terintegrasi.

Pemahaman yang komprehensif terhadap pelanggan, yang didukung oleh cakupan layanan Perseroan yang luas, memungkinkan identifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih akurat. Dengan demikian, Perseroan dapat merespons perubahan permintaan pasar secara tepat dan efektif, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan keberagaman kebutuhan pelanggan.

Orientasi strategi bisnis yang berfokus pada kebutuhan pelanggan semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu penyedia infrastruktur utama dalam industri telekomunikasi. Pendekatan ini sekaligus memastikan kesiapan Perseroan dalam menghadapi dan memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang di masa mendatang.

KEBIJAKAN KEUANGAN YANG BERFOKUS PADA KEBERLANJUTAN

Perseroan menerapkan kebijakan keuangan dan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang secara disiplin. Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan utang yang *prudent* serta penerapan investasi modal yang selektif dan terukur. Perseroan secara konsisten mengelola tingkat *leverage* sejalan dengan ekspansi portofolio menara, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki untuk menjaga stabilitas keuangan.

increasing network coverage and capacity. Consistent service quality remains a key factor in supporting the achievement of the Company's targeted *tenancy ratio* growth amid increasingly competitive industry conditions.

Based on its understanding of industry dynamics, the Company focuses its strategy on telecommunications operators that are expanding or upgrading network infrastructure, deploying new technologies, and broadening their geographic footprint. The Company believes that its extensive tower portfolio provides a solid foundation for sustaining long-term growth, particularly through a measured co-location approach.

KNOW YOUR CUSTOMER

A strong *know your customer* approach is a critical element in supporting service diversification and strengthening financial capacity to meet partner requirements. The integration of market knowledge and marketing expertise within the Group has enabled effective connectivity between tower sites and fiber optic networks, supporting the delivery of integrated infrastructure solutions.

Comprehensive customer insights, supported by the Company's broad service coverage, facilitate a deeper understanding of customer needs. This enables the Company to respond accurately and effectively to evolving market conditions and increasingly diverse customer requirements.

A customer-oriented business strategy further reinforces the Company's position as a key infrastructure provider in the telecommunications industry. This approach also ensures the Company's readiness to meet increasingly complex market demand in the future.

FINANCIAL POLICY FOCUSED ON SUSTAINABILITY

The Company implements disciplined financial and social policies oriented toward long-term sustainability. These policies include prudent debt management and disciplined capital investment practices. The Company continues to manage leverage levels in line with the expansion of its tower portfolio, while optimizing the management of all owned assets to maintain financial stability.

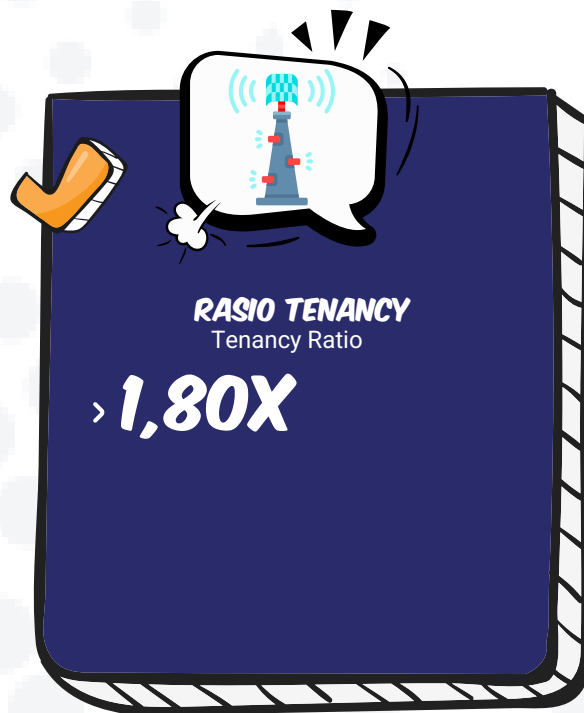
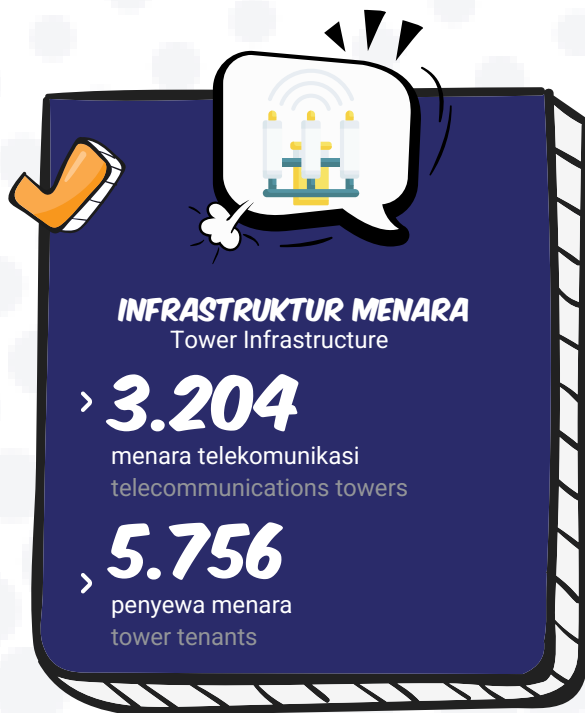
Seiring dengan penerapan disiplin keuangan, Perseroan menjalankan operasional secara efisien melalui optimalisasi modal kerja, serta peningkatan margin dan profitabilitas sebagai fondasi bagi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain aspek keberlanjutan finansial, Perseroan juga berkomitmen untuk memperkuat aspek sosial dan lingkungan melalui penerapan praktik operasional yang berkelanjutan, sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang kepada para pemangku kepentingan.

In parallel with its financial discipline, the Company operates efficiently through working capital optimization and improvements in margins and profitability, providing a strong foundation for sustainable business growth. Beyond financial sustainability, the Company is also committed to strengthening social and environmental aspects through the implementation of sustainable operational practices, reflecting its long-term responsibility to stakeholders.



ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS



STRATEGI PEMASARAN

Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang berfokus pada penyediaan solusi, pemanfaatan inovasi teknologi, serta komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan model bisnis Perseroan di tengah dinamika industri infrastruktur digital yang terus berkembang. Untuk menjaga efektivitas implementasi, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas strategi pemasaran yang dijalankan guna menyesuaikannya dengan perkembangan pasar dan kebutuhan pelanggan.

Dalam menjalankan aktivitas operasional, Perseroan mengintegrasikan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan menara. Inisiatif ini merupakan bagian dari penerapan prinsip pemasaran berkelanjutan, yang sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab. Selain itu, Perseroan secara konsisten membangun dan memperkuat kemitraan strategis dengan operator telekomunikasi, dengan tujuan memperluas cakupan layanan serta menjaga kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang.

PANGSA PASAR

Sebagai bagian dari Grup SMN, IBST merupakan salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia. Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan mengelola sebanyak 3.204 unit menara, dengan jumlah penyewaan menara sebanyak 5.756 unit dan *tenancy ratio* sebesar 1,80 kali. Selain itu, Perseroan memiliki jaringan serat optik yang telah menghasilkan pendapatan dengan total panjang mencapai 21.793 kilometer, yang mendukung penyediaan layanan infrastruktur digital secara terintegrasi.

MARKETING STRATEGY

The Company implements a marketing strategy focused on solution-based offerings, technological innovation, and a commitment to meeting customer needs and satisfaction. This approach is designed to ensure the continued relevance and sustainability of the Company's business model amid the dynamic development of the digital infrastructure industry. To maintain effectiveness, the Company conducts regular evaluations of its marketing strategy to ensure alignment with evolving market conditions and customer requirements.

In carrying out its business activities, the Company incorporates the use of more environmentally friendly technologies in tower construction and maintenance. This initiative forms part of the Company's sustainable marketing approach and reflects its commitment to responsible business practices. In addition, the Company continues to develop and strengthen strategic partnerships with telecommunications operators, with the objective of expanding service coverage and maintaining long-term customer trust.

MARKET SHARES

As part of the SMN Group, IBST is one of the largest telecommunications infrastructure providers in Indonesia. As of the end of the reporting period, the Company managed 3,204 towers, with 5,756 tower leases and a tenancy ratio of 1.80 times. In addition, the Company operates a revenue-generating fiber optic network with a total length of 21,793 kilometers, supporting the delivery of integrated digital infrastructure services.

PROSPEK USAHA TAHUN 2026

BUSINESS OUTLOOK FOR 2026

Industri telekomunikasi diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya trafik data. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) yang sejalan dengan akselerasi adopsi digital di berbagai sektor strategis, antara lain *smart city*, manufaktur, transportasi dan logistik, energi dan utilitas, kesehatan, ritel, serta sektor keuangan. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap konektivitas digital yang andal dan berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data, penyediaan infrastruktur digital yang memadai menjadi semakin penting. Infrastruktur seperti menara telekomunikasi, jaringan serat optik, serta pusat data diperlukan untuk membentuk ekosistem digital yang lebih terintegrasi, guna mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah tengah menyusun *roadmap* infrastruktur digital yang mencakup pengembangan kabel laut, pusat data, jaringan serat optik, serta *mobile broadband*. Inisiatif ini diarahkan untuk memperluas jangkauan digitalisasi hingga ke wilayah pedesaan. Selain itu, pemerintah mendorong penerapan konsep *infrastructure sharing* dan *open access* guna mempercepat pemerataan layanan digital serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan infrastruktur.

Transformasi digital nasional tersebut membuka peluang pertumbuhan bagi perusahaan penyedia infrastruktur digital, khususnya di tengah tren konsolidasi industri telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik menjadi elemen penting dalam mendukung agenda pemerataan layanan digital sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan industri secara jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, Perseroan telah memiliki perjanjian sewa menara jangka panjang, layanan *Fiber-to-the-Tower* (FTTT), serta penambahan kolokasi dengan operator telekomunikasi. Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperluas konektivitas dan memperkuat layanan FTTT, yang semakin dibutuhkan seiring berlanjutnya transformasi digital dan adopsi teknologi 5G.

Dengan dukungan posisi kontrak yang kuat, sinergi dalam Grup, serta ekspansi infrastruktur yang terus berjalan, Perseroan memandang prospek usaha tetap positif. Namun demikian, Perseroan tetap mencermati dinamika industri dan risiko yang melekat pada lingkungan usaha yang semakin terkonsolidasi, serta berkomitmen untuk mengelola peluang pertumbuhan secara *prudent* dan berkelanjutan.

The telecommunications industry is expected to continue expanding, supported by increasing data traffic. This growth is driven by the continued expansion of Internet of Things (IoT) applications in line with accelerating digital adoption across various strategic sectors, including smart cities, manufacturing, transportation and logistics, energy and utilities, healthcare, retail, and financial services. These developments reflect the growing reliance of economic activities on reliable and sustainable digital connectivity.

As data demand continues to increase, the availability of adequate digital infrastructure becomes increasingly critical. Infrastructure such as telecommunications towers, fiber optic networks, and data centers is required to establish a more integrated digital ecosystem capable of supporting the effective and sustainable implementation of the national digital transformation agenda.

From a regulatory perspective, the Government is in the process of formulating a digital infrastructure roadmap covering subsea cables, data centers, fiber optic networks, and mobile broadband. This initiative is aimed at extending digitalization to rural areas. In addition, the Government is promoting infrastructure sharing and open access frameworks to accelerate the equitable distribution of digital services and enhance infrastructure utilization efficiency.

The national digital transformation presents growth opportunities for digital infrastructure providers, particularly amid ongoing consolidation within the telecommunications industry. The availability of telecommunications towers and fiber optic networks remains essential in supporting the Government's objective of equitable digital service access, while also reinforcing the industry's long-term growth foundations.

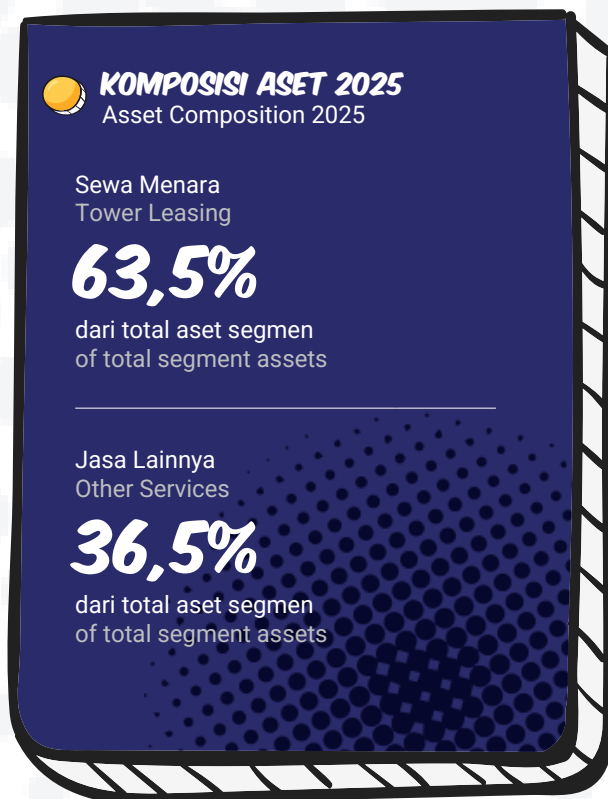
In this context, the Company has secured long-term tower lease agreements, Fiber-to-the-Tower (FTTT) services, and additional co-location arrangements with telecommunications operators. These expansions form part of the Company's strategy to broaden connectivity and strengthen FTTT services, which are increasingly critical amid continued digital transformation and the adoption of 5G technology.

Supported by a strong contracted position, Group synergies, and ongoing infrastructure expansion, the Company maintains a positive view on its business outlook. Nevertheless, the Company remains attentive to industry dynamics and inherent risks associated with a more consolidated operating environment and is committed to managing growth opportunities in a prudent and sustainable manner.

TINJAUAN OPERASIONAL SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT OPERATIONAL REVIEW

(Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah)



Perseroan bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dengan fokus pada penyediaan menara, fasilitas pendukung, serta layanan pemeliharaan menara, termasuk solusi penyediaan lokasi dan pengelolaan ruang di lokasi strategis untuk mendukung kebutuhan operator telekomunikasi. Manajemen memantau kinerja unit bisnis secara terpisah untuk tujuan alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja, dengan kinerja segmen diukur berdasarkan laba atau rugi segmen sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan, termasuk pendapatan dan beban antar segmen yang dicatat berdasarkan nilai pasar.

Perseroan mengelola dua segmen usaha, yaitu segmen sewa menara dan segmen jasa lainnya. Kinerja masing-masing segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Pendapatan dan beban segmen mencerminkan transaksi antar segmen operasional dan dicatat sesuai dengan nilai pasar.

The Company engages in the telecommunications infrastructure sector in Indonesia, focusing on the provision of towers, supporting facilities, and tower maintenance services, including site solutions and space management at strategic locations to support telecommunications operators. Management monitors business units separately for resource allocation and performance evaluation purposes, with segment performance measured based on segment profit or loss as presented in the financial statements, including inter-segment revenues and expenses recorded at market value.

The Company manages two business segments, namely tower leasing and other services. The performance of each segment is assessed based on profit or loss reported in the audited financial statements. Segment revenue and expenses reflect inter-segment operating transactions and are measured at market values.

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024			2025		
	Sewa Menara Tower Leasing	Jasa lainnya Other Services	Jumlah Total	Sewa Menara Tower Leasing	Jasa lainnya Other Services	Jumlah Total
Pendapatan Revenue	593.412	269.054	862.466	662.171	209.721	871.892
Laba Usaha Operating Profit	186.336	17.717	204.053	494.479	115.484	609.963
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Tax	(1.241.143)	(604.025)	(1.845.168)	341.622	106.915	448.537
Laba(Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(1.245.043)	(605.793)	(1.850.836)	341.440	70.001	411.441
Jumlah Aset Segmen Total Segment Assets	3.040.798	1.378.703	4.419.501	2.507.282	1.438.286	3.945.568

Pada tahun 2025, sewa menara tetap menjadi sumber pendapatan utama Perseroan, dengan pendapatan sebesar Rp662,17 miliar atau berkontribusi sebesar 75,95% terhadap total pendapatan Perseroan. Sementara itu, pendapatan dari jasa lainnya tercatat sebesar Rp209,72 miliar. Laba usaha Perseroan mencapai Rp609,96 miliar pada 2025, meningkat sebesar 198,92% dibandingkan dengan Rp204,05 miliar pada tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan kinerja operasional tersebut, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp411,44 miliar pada tahun 2025, dibandingkan dengan rugi bersih Perseroan sebesar Rp1,85 triliun pada tahun sebelumnya.

In 2025, tower leasing remained the Company's main source of revenue, generating Rp662.17 billion and contributing 75.95% to the Company's total revenue. Meanwhile, revenue from other services was recorded at Rp209.72 billion. The Company's operating profit reached Rp609.96 billion in 2025, an increase of 198.92% compared with Rp204.05 billion in 2024. In line with this improved operational performance, the Company recorded net profit of Rp411.44 billion in 2025, compared with a net loss of Rp1.85 trillion in the previous year.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas tinjauan keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, firma anggota jaringan global Morison Global, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following Management's Analysis and Discussion of the financial review is based on the Financial Statements of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk for the years ended December 31, 2025, and December 31, 2024. The financial statements have been audited by Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, a member of the Morison Global network, as stated in the Independent Auditor's Report. The auditor concluded that the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	661.353	400.603	(260.750)	(39,43%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.758.148	3.544.965	(213.183)	(5,67%)
Jumlah Aset Total Assets	4.419.501	3.945.568	(473.933)	(10,72%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.702.413	972.823	(729.590)	(42,86%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	548.701	392.917	(155.784)	(28,39%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.251.114	1.365.740	(885.375)	(39,33%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.168.387	2.579.828	411.441	18,97%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.419.501	3.945.568	(473.933)	(10,72%)

ASET

ASSETS

Jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp3,95 triliun pada tahun 2025, menurun sebesar 10,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4,42 triliun. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar dan aset tidak lancar, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 39,43% dan 5,67%.

The Company's total assets amounted to Rp3.95 trillion in 2025, a decrease of 10.72% compared to Rp4.42 trillion in the previous year. The decline in total assets was primarily attributable to decreases in both current and non-current assets, which declined by 39.43% and 5.67%, respectively.

Aset Lancar

Current Assets

Aset lancar Perseroan tercatat sebesar Rp400,60 miliar pada tahun 2025, menurun sebesar 39,43% dibandingkan dengan Rp661,35 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp184,07 miliar atau 60,78%, menjadi Rp118,80 miliar pada tahun 2025, dibandingkan dengan Rp302,87 miliar pada tahun 2024.

Current assets were recorded at Rp400.60 billion in 2025, declining by 39.43% from Rp661.35 billion in the prior year. This decrease was mainly driven by a reduction trade receivables of Rp184.07 billion, or 60.78%, to Rp118.80 billion in 2025, compared with Rp302.87 billion in 2024.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar Rp3,54 triliun pada tahun 2025, menurun sebesar 5,67% dibandingkan dengan Rp3,76 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi neto dalam sewa jangka panjang, dari Rp685,86 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp452,83 miliar pada tahun 2025.

LIABILITAS

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp1,37 triliun, menurun sebesar 39,33% dibandingkan dengan Rp2,25 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, yang masing-masing menurun sebesar 42,86% dan 28,39%. Perkembangan ini mencerminkan pengelolaan kewajiban yang lebih terukur sejalan dengan strategi penguatan struktur permodalan Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp0,97 triliun pada tahun 2025, turun sebesar 42,86% dibandingkan dengan Rp1,70 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang bank sebagai hasil dari pelunasan yang dilakukan oleh Perseroan, sehingga saldo utang bank menurun menjadi Rp567,30 miliar dari Rp1,34 triliun pada tahun 2024.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, provisi, liabilitas lainnya, serta liabilitas imbalan pasca kerja. Pada tahun 2025, liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp392,92 miliar, menurun sebesar 28,39% dibandingkan dengan Rp548,70 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas sewa yang tercatat sebesar Rp340,41 miliar.

EKUITAS

Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,58 triliun pada tahun 2025, meningkat sebesar 18,97% dibandingkan dengan Rp2,17 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ekuitas terutama didorong oleh kenaikan saldo laba yang mencapai Rp1,30 triliun, mencerminkan perbaikan kinerja keuangan dan penguatan posisi permodalan Perseroan.

Non-Current Assets

Non-current assets amounted to Rp3.54 trillion in 2025, a decrease of 5.67% compared to Rp3.76 trillion in the previous year. The decrease was primarily due to a reduction in net investment in long-term leases, which declined from Rp685.86 billion in 2024 to Rp452.83 billion in 2025.

LIABILITIES

In 2025, the Company recorded total liabilities of Rp1.37 trillion, a decrease of 39.33% compared to Rp2.25 trillion in 2024. The decline was primarily attributable to reductions in both current and non-current liabilities, which decreased by 42.86% and 28.39%, respectively. This development reflects a more measured management of obligations in line with the Company's strategy to strengthen its capital structure.

Current Liabilities

Current liabilities amounted to Rp0.97 trillion in 2025, declining by 42.86% from Rp1.70 trillion in the previous year. The decrease was mainly driven by a reduction in bank loans following repayments made by the Company, resulting in a decrease in outstanding bank loans to Rp567.30 billion from Rp1.34 trillion in 2024.

Non-Current Liabilities

Non-current liabilities comprise long-term borrowings net of current maturities, provisions, other long-term liabilities, and post-employment benefit obligations. In 2025, non-current liabilities were recorded at Rp392.92 billion, representing a decrease of 28.39% compared to Rp548.70 billion in 2024. The decline was primarily attributable to a reduction in lease liabilities, which amounted to Rp340.41 billion.

EQUITY

The Company's equity amounted to Rp2.58 trillion in 2025, an increase of 18.97% from Rp2.17 trillion in 2024. The increase in equity was mainly driven by the growth in retained earnings, which reached Rp1.30 trillion, reflecting improved financial performance and a strengthened capital position.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT OR LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME REVIEW

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Revenues	862.466	871.892	9.426	1,09%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(497.664)	(242.946)	(254.718)	(51,18%)
Laba Bruto Gross Profit	364.802	628.946	264.144	72,41%
Beban Penjualan dan Pemasaran Selling and Marketing Expenses	(3.849)	(2.928)	(921)	(23,93%)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(156.900)	(16.055)	(140.845)	(89,77%)
Laba Usaha Operating Profit	204.053	609.963	405.910	198,92%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(1.845.168)	448.537	2.293.705	(124,31%)
Pajak Penghasilan Income Tax	(5.668)	(37.096)	(31.428)	(555,48%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(1.850.836)	411.441	2.262.277	(122,23%)
Total Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	5.955	-	(5.955)	(100,00%)
Jumlah Laba (Rugi) Komperhensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) For The Year	(1.844.881)	411.441	2.256.322	(122,30%)
Laba Per Saham Dasar Nilai Penuh Basic Earnings per Share and Full Value	(1.370)	305	1.675	(122,26%)

Pendapatan

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp871,89 miliar, meningkat sebesar 1,09% dibandingkan dengan Rp862,47 miliar pada tahun 2024. Basis pelanggan Perseroan terdiri dari perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk sebesar 78,32% dan PT Indosat Tbk sebesar 12,63%, mencerminkan konsentrasi pendapatan pada pelanggan utama.

Revenues

In 2025, the Company recorded revenue of Rp871.89 billion, an increase of 1.09% compared to Rp862.47 billion in 2024. The Company's customers comprise leading telecommunications operators in Indonesia. The largest revenue contributions were derived from PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk at 78.32% and PT Indosat Tbk at 12.63%, indicating a concentration of revenue among major customers.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp242,95 miliar pada tahun 2025, menurun signifikan sebesar 51,18% dibandingkan dengan Rp497,66 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama didorong oleh berkurangnya beban penyusutan dan amortisasi, serta penurunan beban pokok pendapatan lainnya, sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi operasional Perseroan.

Cost of Revenue

Cost of revenue amounted to Rp242.95 billion in 2025, declined significantly by 51.18% from Rp497.66 billion in the previous year. The reduction was primarily driven by lower depreciation and amortization expenses, as well as a decrease in other costs of revenue, reflecting the Company's ongoing operational efficiency initiatives.

Beban penyusutan dan amortisasi, yang terdiri atas penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, amortisasi biaya perolehan kontrak, amortisasi perangkat lunak, dan amortisasi lainnya, tercatat sebesar Rp181,25 miliar pada tahun 2025, turun sebesar 51,69%

Depreciation and amortization expenses, comprising depreciation of fixed assets, depreciation of right-of-use assets, amortization of contract acquisition costs, software amortization, and other amortization, totaled Rp181.25 billion in 2025, a decrease of 51.69% from

dibandingkan dengan Rp375,16 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, beban pokok pendapatan lainnya, yang meliputi biaya pemeliharaan dan perbaikan, pajak dan perizinan, listrik, serta biaya lainnya, tercatat sebesar Rp61,70 miliar, menurun sebesar 49,64% dibandingkan dengan Rp122,50 miliar pada tahun sebelumnya.

Laba Bruto

Seiring dengan penurunan beban pokok pendapatan, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 72,41% menjadi Rp628,95 miliar pada tahun 2025, dibandingkan dengan Rp364,80 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan efisiensi operasional di tengah penurunan pendapatan.

Beban Usaha

Beban usaha, yang terdiri atas beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi, tercatat sebesar Rp18,98 miliar pada tahun 2025, turun sebesar 88,19% dibandingkan dengan Rp160,75 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya seluruh komponen beban usaha, sejalan dengan penerapan disiplin biaya oleh Perseroan.

Laba Usaha

Dengan perbaikan struktur biaya, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp609,96 miliar pada tahun 2025, meningkat sebesar 198,92% dibandingkan dengan Rp204,05 miliar pada tahun 2024.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Perseroan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp448,54 miliar pada tahun 2025, berbalik dari rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1,85 triliun pada tahun sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan pemulihan kinerja operasional dan struktur biaya yang lebih efisien.

Laba Tahun Berjalan

Setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp411,44 miliar pada tahun 2025, dibandingkan dengan rugi tahun berjalan sebesar Rp1,85 triliun pada tahun 2024.

Jumlah Laba (Rugi) Komperhensif Tahun Berjalan

Jumlah Laba (Rugi) Komperhensif Tahun Berjalan Perseroan pada tahun 2025 tercatat Rp411,44, berbalik dari rugi penghasilan komperhensif sebesar Rp1,84 triliun pada tahun sebelumnya.

Laba per Saham Dasar

Sejalan dengan pencapaian laba tahun berjalan, laba per saham dasar pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp305 per saham, dibandingkan dengan rugi per saham dasar sebesar Rp1.370 per saham pada tahun 2024.

Rp375.16 billion in 2024. Other costs of revenue, including maintenance and repair, taxes and licensing, electricity, and other expenses, amounted to Rp61.70 billion, down 49.64% from Rp122.50 billion in the prior year.

Gross Profit

Supported by lower costs of revenue, gross profit increased by 72.41% to Rp628.95 billion in 2025, compared with Rp364.80 billion in 2024. This improvement reflects enhanced operational efficiency despite lower revenue levels.

Operating Expenses

Operating expenses, consisting of selling and marketing expenses as well as general and administrative expenses, totaled Rp18.98 billion in 2025, a decrease of 88.19% from Rp160.75 billion in 2024. The decline resulted from reductions across all operating expense components, in line with the Company's cost discipline measures.

Operating Profit

As a result of the improved cost structure, the Company recorded operating profit of Rp609.96 billion in 2025, an increase of 198.92% compared with Rp204.05 billion in 2024.

Profit (Loss) Before Income Tax

The Company reported profit before income tax of Rp448.54 billion in 2025, reversing a loss before income tax of Rp1.85 trillion in the prior year. This turnaround reflects the recovery in operating performance and improved cost efficiency.

Profit for the Year

After accounting for income tax, the Company recorded profit for the year of Rp411.44 billion in 2025, compared with a loss of Rp1.85 trillion in 2024.

Total Comprehensive Income (Loss) For The Year

Total Comprehensive Income (Loss) For The Year for 2025 amounted to Rp411.44, compared with total comprehensive loss of Rp1.84 trillion in the previous year.

Basic Earnings per Share

In line with the profit recorded in 2025, basic earnings per share amounted to Rp305 per share, compared with a basic loss per share of Rp1,370 in 2024.

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	758.261	1.164.900	501.099	75,49%
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Provided by (Used in) Investment Activities	53.279	(115.969)	(169.248)	(317,66%)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used in Financing Activities	(1.575.038)	(1.065.966)	509.072	(32,32%)
Penurunan Neto Kas di Bank Net Decrease in Cash in Bank	(763.498)	(17.035)	780.533	(102,23%)
Kas di Bank Awal Tahun Cash in Banks at Beginning of the Year	781.636	18.138	(763.498)	(97,68%)
Kas di Bank Akhir Tahun Cash in Banks at End of the Year	18.138	1.103	(17.035)	(93,92%)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,16 triliun, meningkat dibandingkan dengan Rp758,26 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan arus kas operasional tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang mencapai Rp1,45 triliun, mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha inti.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash generated from operating activities amounted to Rp1.16 trillion in 2025, an increase compared to Rp758.26 billion in the previous year. This improvement was primarily driven by cash receipts from customers totaling Rp1.45 trillion, reflecting the Company's ability to generate cash flows from its core operations.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp115,97 miliar. Penggunaan kas tersebut terutama dialokasikan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp114,00 miliar, sejalan dengan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Perseroan. Sebagai perbandingan, kas neto diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp53,28 miliar.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash used in investing activities in 2025 amounted to Rp115.97 billion. The cash outflow was mainly attributable to the acquisition of fixed assets amounting to Rp114.00 billion, in line with the Company's infrastructure maintenance and development requirements. In comparison, net cash provided by investing activities in 2024 amounted to Rp53.28 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,07 triliun, menurun sebesar 32,32% dibandingkan dengan Rp1,58 triliun pada tahun 2024. Penggunaan kas ini terutama ditujukan untuk pembayaran utang bank, sejalan dengan upaya Perseroan dalam memperkuat struktur permodalan dan mengelola kewajiban keuangan secara *prudent*.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash used in financing activities in 2025 amounted to Rp1.07 trillion, a decrease of 32.32% compared to Rp1.58 trillion in 2024. The cash outflow was primarily utilized for the repayment of bank loans, reflecting the Company's prudent approach to managing its capital structure and financial obligations.

Kas di Bank pada Akhir Tahun

Kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,10 miliar, menurun sebesar 93,92% dibandingkan dengan Rp18,14 miliar pada akhir tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika arus kas selama periode pelaporan, khususnya terkait aktivitas pendanaan dan investasi.

Cash in Banks at End of Year

Cash and cash equivalents as of the end of 2025 amounted to Rp1.10 billion, a decrease of 93.92% compared to Rp18.14 billion at the end of 2024. This change reflects cash flow movements during the reporting period, particularly those related to financing and investing activities.

RASIO KEUANGAN UTAMA

Kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diukur menggunakan sejumlah rasio keuangan utama yang mencerminkan profitabilitas, likuiditas, dan struktur permodalan Perseroan. Rincian rasio dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Description	2024	2025
Rasio Lancar (X) Current Ratio (X)	0,39	0,41
Liabilitas/Aset Liabilities / Assets	0,51	0,35
Liabilitas/Ekuitas Liabilities / Equity	1,04	0,53
Pinjaman Terhadap Aset Debt to Assets Ratio	0,30	0,14
Pinjaman Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	0,61	0,22
Rasio Laba Terhadap Pendapatan Profit Margin	(2,15)	0,47
Rasio Laba Terhadap Aset Return on Assets (ROA)	(0,42)	0,10
Rasio Laba Terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	(0,85)	0,16
Marjin EBITDA EBITDA Margin	67,16	90,75

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Likuiditas

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek diukur melalui rasio lancar. Pada tahun 2025, rasio lancar tercatat sebesar 0,41x, meningkat dibandingkan dengan 0,39x pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan dinamika operasional Perseroan sebagai penyedia infrastruktur digital, khususnya menara telekomunikasi, yang secara inheren memerlukan belanja modal dalam jumlah signifikan. Dalam konteks tersebut, pendanaan melalui utang merupakan salah satu strategi yang digunakan Perseroan untuk mendukung pengembangan usaha.

Perseroan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan modal dan pemenuhan kewajiban keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas yang terjaga menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kondisi likuiditas Perseroan tetap sehat dan terkendali.

Solvabilitas

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dievaluasi melalui sejumlah rasio keuangan utama, yaitu Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas, Rasio Utang Neto terhadap

KEY FINANCIAL RATIOS

The Company's financial performance in 2025, compared with the prior year, is assessed using key financial ratios that reflect profitability, liquidity, and capital structure. Ratio details can be seen in the table as follow:

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

Liquidity

The Company's ability to meet its short-term obligations is measured using the current ratio. In 2025, the current ratio stood at 0.41x, an improvement compared with 0.39x in the previous year. This increase reflects the operational dynamics of the Company as a digital infrastructure provider, particularly in the telecommunications tower segment, which inherently requires significant capital expenditure. In this context, debt financing remains one of the strategies employed by the Company to support business expansion.

The Company consistently applies prudential principles in maintaining an appropriate balance between capital requirements and financial obligations, both in the short and long term. Sustained profitability serves as a key supporting factor in maintaining sound and manageable liquidity conditions.

Solvency

The Company's capacity to meet both short-term and long-term obligations is assessed using several key financial ratios, namely Net Debt to Equity, Net Debt to Assets, and Net Debt to LQA EBITDA. In 2025, these ratios

Aset, serta Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA. Pada tahun 2025, masing-masing rasio tersebut tercatat sebesar 0,22%, 0,14%, dan 0,63%, yang mencerminkan posisi keuangan yang relatif sehat serta kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Dari sisi pendanaan, Perseroan memiliki struktur pendanaan yang terdiversifikasi. Selain memperoleh fleksibilitas pendanaan melalui pinjaman dari berbagai bank domestik dan internasional, entitas anak juga mengoptimalkan sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Strategi ini mendukung terciptanya struktur permodalan yang kuat dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan rencana bisnis Perseroan.

Kolektibilitas Piutang

Dalam pengelolaan piutang usaha, Perseroan menerapkan pemantauan yang ketat dan berkelanjutan. Piutang usaha Perseroan tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga, dengan jangka waktu pelunasan rata-rata berkisar antara 30 hingga 60 hari. Untuk mengantisipasi risiko tidak tertagihnya piutang, Perseroan membentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian sebagai langkah mitigasi yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Manajemen meyakini bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian yang dibentuk memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih. Selain itu, Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan terhadap pihak ketiga tertentu, sehingga eksposur risiko kredit berada dalam batas yang dapat dikelola.

Tingkat kolektibilitas piutang diukur menggunakan rasio periode penagihan (hari). Pada tahun 2025, periode penagihan piutang usaha tercatat selama 88 hari.

were recorded at 0.22%, 0.14%, and 0.63%, respectively, reflecting a relatively sound financial position and adequate capacity to fulfill financial obligations.

From a funding perspective, the Company maintains a diversified financing structure. In addition to accessing loans from various leading domestic and international banks, subsidiaries also optimize funding sources through the issuance of bonds denominated in Rupiah and foreign currencies. This approach supports a resilient capital structure to underpin the Company's business plans.

Receivables Collectability

In managing trade receivables, the Company implements close and continuous monitoring. Trade receivables are unsecured and non-interest bearing, with average settlement terms ranging from 30 to 60 days. To mitigate the risk of uncollectible receivables, the Company establishes an expected credit loss allowance in line with prudent risk management practices.

Management believes that the expected credit loss allowance provided is sufficient to cover potential losses arising from uncollectible trade receivables. Furthermore, there is no significant concentration of credit risk with any particular third party, ensuring that overall credit risk exposure remains within manageable limits.

Receivable collectability is measured using the days' sales outstanding (DSO) ratio. In 2025, the trade receivables collection period was recorded at 88 days.

Uraian Description	2024	2025
Periode Penagihan (hari) Billing Period (days)	131	88

Informasi mengenai umur piutang usaha serta upaya pengelolaan piutang disajikan lebih lanjut pada tabel berikut:

Further details on the aging of trade receivables and related management efforts are presented in the following table:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Belum Lewat Jatuh Tempo Not Yet Due	3.285	86.696	83.411	2.539,15%
Lewat Jatuh Tempo Past Due:				
1-30 hari 1-30 days	262.921	22.819	(240.102)	(91,32%)
31-60 hari 31-60 days	39.536	7.461	(32.075)	(81,13%)
61-90 hari 61-90 days	905	86	(819)	(90,50%)
Lebih dari 90 hari Over 90 days	2.737	2.612	(125)	(4,57%)
Sub jumlah Subtotal	309.384	119.674	(189.710)	(61,32%)

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Allowance for Expected Credit Losses	(6.516)	(877)	5.639	(86,54%)
Jumlah Piutang-Bersih Net Trade Receivables	302.868	118.797	(184.071)	(60,78%)

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal Perseroan diarahkan untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara modal dan utang, guna mendukung keberlangsungan usaha serta mengoptimalkan imbal hasil bagi pemegang saham secara berkelanjutan. Kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan jangka panjang, profil risiko, serta kondisi pasar yang relevan.

Sebagai bagian dari strategi keuangan, Direksi secara berkala meninjau komposisi ekuitas dan utang untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan strategis Grup. Evaluasi struktur permodalan dilakukan setidaknya setiap tahun, dengan tujuan menyesuaikan kebijakan permodalan terhadap dinamika bisnis, kondisi keuangan, serta untuk memitigasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan Perseroan.

Struktur Permodalan

Struktur modal Perseroan pada tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa permodalan didominasi oleh ekuitas sebesar 65,4%, sementara porsi pinjaman tercatat sebesar 14,4%. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, porsi pinjaman tercatat sebesar 30,3% dan ekuitas sebesar 49,1%. Perubahan komposisi ini mencerminkan penguatan struktur permodalan Perseroan sejalan dengan strategi pengelolaan kewajiban dan permodalan yang lebih *prudent*. Rincian struktur modal Perseroan pada tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Capital Management Policy

The Company's capital management policy is aimed at maintaining a sound balance between equity and debt to support business continuity while optimizing sustainable returns for shareholders. This policy takes into account long-term funding requirements, risk profile, and prevailing market conditions.

As part of its financial strategy, the Directors periodically reviews the composition of equity and debt to ensure alignment with the Group's strategic objectives. Such evaluations are conducted at least annually to align the capital structure with business dynamics, financial conditions, and to mitigate risks that may affect the Company's financial stability.

Capital Structure

The Company's capital structure in 2025, as presented in the accompanying table, was predominantly supported by equity, which accounted for 65.4% of total capitalization, while borrowings represented 14.4%. In comparison, in the previous year, borrowers accounted for 30.3% and equity for 49.1%. The change in composition reflects a strengthening of the Company's capital structure in line with a more prudent approach to liability and capital management. Details of the Company's capital structure in 2025 can be explained in the following table:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024		2025	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Aset Assets	4.419.501	100,00%	3.945.568	100,00%
Liabilitas Liabilities	2.251.114	50,94%	1.365.740	34,61%
Pinjaman dari Bank Loans from Bank	1.340.000	30,32%	567.300	14,38%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	362.414	8,20%	405.524	10,28%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	548.701	12,42%	392.916	9,96%
Ekuitas Equity	2.168.387	49,06%	2.579.828	65,39%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	4.419.501	100,0%	3.945.568	100,00%

IKATAN MATERIAL UNTUK BELANJA MODAL

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (asumsi), Perseroan tidak memiliki komitmen material terkait investasi barang modal. Dengan demikian, informasi mengenai tujuan investasi, sumber pendanaan, denominasi mata uang, serta strategi mitigasi risiko atas eksposur nilai tukar tidak disajikan.

REALISASI BELANJA MODAL

Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar Rp203,03 miliar, yang terdiri dari perolehan aset tetap dan aset hak guna. Belanja modal tersebut ditujukan untuk mendukung ekspansi usaha Perseroan, khususnya dalam kegiatan penyewaan menara telekomunikasi dan usaha lainnya. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja modal selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025
Aset Tetap Fixed Assets:		
Hak atas Tanah Land Rights	27.378	2.650
Menara Telekomunikasi Telecommunication Tower	38.835	2.369
Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery	1.429	1.151
Peralatan Jaringan Network Equipment	247.933	1.094
Peralatan Kantor Office Equipment	591	50
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	1.626	-
Aset dalam Penyelesaian Assets under Construction	46.925	136.683
Sub Jumlah Subtotal	364.717	143.997
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets:		
Tanah Land	145.507	50.892
Atap Rooftop	2.846	8.140
Serat Optik Fibre Optic	614	-
Sub Jumlah Subtotal	148.967	59.032
Jumlah Total	513.684	203.029

INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, selain dari informasi atau fakta material yang telah diungkapkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pasar Modal.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Dalam menetapkan kebijakan pembagian dividen, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi keuangan, tingkat profitabilitas, kebutuhan

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

As of December 31, 2025 (assumption), the Company did not have any material commitments related to capital expenditure. Accordingly, information regarding investment objectives, funding sources, currency denominations, and foreign exchange risk mitigation strategies is not presented.

CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

During 2025, the Company realized capital expenditures amounting to Rp203.03 billion, comprising fixed assets and right-of-use assets. The capital expenditure was incurred to support business expansion, particularly in the telecommunications tower leasing segment and other related businesses. Further details on capital expenditure realization in 2025 are provided in the following table:

INFORMATION AND/OR MATERIAL FACTS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

There was no information or material fact that occurred after the date of the accountant's report, other than the information or material facts that have been disclosed by the Company in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly Capital Market regulations.

DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

Dividend Policy

In determining dividend distributions to shareholders, the Company takes into consideration several factors, including its financial condition, level of profitability,

biaya operasional, serta rencana investasi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan ke depan. Penetapan besaran dan waktu pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPK 40/2007 dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2024 dan tahun buku 2023.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun buku 2025, Perseroan tidak melakukan penawaran umum saham maupun obligasi dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Dengan demikian, Perseroan tidak mengungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI MATERIAL ANTARA LAIN MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Selama tahun 2025, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Guna memastikan transaksi pihak berelasi (transaksi afiliasi) Perseroan dijalankan secara wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (arm's length), Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk perubahannya;

operating cost requirements, and ongoing as well as planned investment programs. The amount and timing of dividend distributions are determined based on resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), in compliance with prevailing laws and regulations.

The Board of Directors, based on a resolution of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, is entitled to distribute interim dividends if the Company's financial condition permits, provided that such interim dividends will be taken into account in the dividends to be distributed based on the resolution of the next Annual GMS in accordance with the provisions of Article 72 of Company Law No. 40/2007 and with due regard to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

The Company did not distribute dividends for the 2024 financial year and the 2023 financial year.

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS

During the 2025 financial year, the Company did not conduct any public offerings of shares or bonds and as such, had no obligation to report on the use of proceeds from public offerings. Accordingly, no disclosure regarding the realization of proceeds from public offerings is presented in this Annual Report.

OTHER MATERIAL INFORMATION INCLUDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

During 2025, there was no material information regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, or debt/capital restructuring.

MATERIAL INFORMATION REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS, AFFILIATED TRANSACTIONS, AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

During 2025, the Company did not carry out any material transactions containing conflicts of interest.

To ensure that the Company's related party transactions (affiliated transactions) are conducted fairly and in accordance with generally accepted business practices (arm's length), the Company refers to the prevailing laws and regulations, including:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public, including its changes;

2. Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
3. Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan
4. Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tentang Perubahan Peraturan No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan No. 32 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite Audit, melakukan penelaahan dan memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak berelasi yang memenuhi batasan nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar serta mengacu pada prinsip *arm's length*, sebagaimana transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga lainnya.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025, SERTA PROYEKSI TAHUN 2026

Perseroan telah menyusun dan menetapkan target kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Business Plan tahun 2025. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, dinamika industri, serta kapasitas operasional dan keuangan Perseroan.

Realisasi kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, serta proyeksi kinerja untuk tahun 2026, disajikan sebagai bagian dari evaluasi manajemen atas pencapaian kinerja dan sebagai dasar penyusunan strategi ke depan. Proyeksi tahun 2026 disusun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, asumsi yang terukur, serta potensi risiko dan peluang yang diperkirakan akan memengaruhi kinerja Perseroan. Realisasi pencapaian tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 sebagai berikut:

Dalam Milliaran Rupiah | In Billion Rupiah

Uraian Description	2025			Proyeksi 2026 2026 Projection
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	
Pendapatan Revenues	845,22	871,89	103,16	804,05
EBITDA	740,64	791,21	106,83	741,08
Laba (Rugi) Profit (Loss)	288,22	411,44	142,75	408,35
Struktur Modal Capital	3.259,61	3.147,13	96,55	2.988,18

2. OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
3. OJK Regulation No. 42 of 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions; and
4. Board of Directors Decree of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00087/BEI/12-2025 concerning Amendments to Regulation No. I-E regarding the Obligation to Submit Information.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note No. 32 to the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2025.

The Board of Commissioners, based on the recommendation of the Audit Committee, reviews and ensures that each transaction with related parties that meets certain value thresholds in accordance with the prevailing laws and regulations is carried out on fair terms and conditions and with reference to the arm's length principle, as with transactions conducted with other third parties.

2025 TARGETS AND REALIZATION, AS WELL AS 2026 OUTLOOK

The Company has formulated and established its performance targets for 2025 as set out in the 2025 Business Plan. These targets were developed with due consideration of macroeconomic conditions, industry dynamics, and the Company's operational and financial capacity.

The Company's performance realization throughout 2025 compared with the set targets, as well as the performance projection for 2026, are presented as part of management's evaluation of performance achievements and as a basis for formulating future strategies. The 2026 projection has been prepared with prudent principles, measured assumptions, and consideration of potential risks and opportunities that are expected to affect the Company's performance. The 2025 performance realization and the 2026 projection are as follows:

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan peraturan pemerintah maupun ketentuan otoritas pasar modal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, maupun posisi keuangan Perseroan. Perseroan tetap memantau secara berkelanjutan perkembangan regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku serta mengantisipasi potensi dampak terhadap operasional di masa mendatang.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan beberapa amandemen atas standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2025, sebagai berikut:

1. PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
2. Amandemen PSAK 117 tentang "Kontrak Asuransi pada Penerapan Awal PSAK 117 dan Informasi Perbandingan PSAK 109"; dan
3. Amandemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing" terkait kekurangan ketertukaran.

Penerapan amandemen standar akuntansi tersebut tidak mengakibatkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan, baik pada tahun berjalan maupun pada periode sebelumnya.

CHANGES IN REGULATIONS WITH A SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Throughout 2025, there were no changes in government regulations or capital market authority regulations that had a significant impact on the Company's business activities, financial performance, or financial position. The Company continues to closely monitor regulatory developments to ensure ongoing compliance and to anticipate any potential implications for its operations going forward.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) issued several amendments to financial accounting standards that became effective on or after January 1, 2025, as follows:

1. PSAK 117: "Insurance Contracts";
2. Amendments to PSAK 117 on "Insurance Contracts on Initial Application of PSAK 117 and Comparative Information under PSAK 109"; and
3. Amendments to PSAK 221: "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" relating to lack of exchangeability.

The adoption of the above amendments did not result in any substantive changes to the Group's accounting policies and had no significant impact on the Company's financial statements, either in the current year or in prior periods.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES





Sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan semakin kompleksnya kebutuhan jaringan, aset menara Perseroan diperkirakan akan tetap memegang peranan penting dalam infrastruktur industri ke depan. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya memperkuat posisinya di sektor telekomunikasi melalui perluasan jaringan menara, baik melalui pembangunan baru maupun akuisisi strategis. Pendekatan ini memastikan Perseroan tetap berada di garis depan pertumbuhan industri sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

In line with the advancement of telecommunications technology and the growing complexity of network requirements, the Company's tower assets are expected to remain a key element of the industry's infrastructure going forward. Accordingly, the Company continues to strengthen its position in the telecommunications sector by expanding its tower network through both new developments and strategic acquisitions. This approach ensures the Company remains at the forefront of industry growth while creating long-term value for stakeholders.

STRATEGI MANAJEMEN SDM

Pada tahun 2025, Perseroan memfokuskan pengembangan SDM pada sejumlah inisiatif strategis yang diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat kompetensi, dan mendukung keselarasan dengan target bisnis Grup. Seluruh inisiatif tersebut dirancang untuk membentuk tenaga kerja yang tangguh dan siap menghadapi tantangan bisnis pada masa mendatang.

Salah satu fokus utama Perseroan adalah pelaksanaan program peningkatan kesadaran karyawan, termasuk ESG PROFound, yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman atas prinsip keberlanjutan di seluruh organisasi. Di samping itu, Perseroan terus memperkuat budaya pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan yang terarah dan pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan bisnis saat ini maupun proyeksi ke depan.

Untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan meningkatkan retensi jangka panjang, Perseroan juga memperkuat program kesejahteraan karyawan. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja, mempertahankan motivasi yang tinggi, serta memastikan keterlibatan karyawan tetap sejalan dengan arah strategis Perseroan.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY

In 2025, the Company focused its Human Resources development on strategic initiatives aimed at enhancing employee engagement, strengthening competencies, and aligning with the Group's business targets. These initiatives were designed to build a resilient workforce prepared to respond to future business challenges.

One of the Company's key priorities was the implementation of employee awareness programs, including ESG PROFound, intended to strengthen understanding of sustainability principles across the organization. In addition, the Company continued to reinforce a culture of continuous learning through targeted training programs and competency development aligned with current business needs as well as future projections.

To maintain workforce stability and improve long-term retention, the Company also strengthened its employee welfare programs. These initiatives were designed to enhance job satisfaction, sustain high motivation, and ensure employee engagement remains aligned with the Company's strategic direction. Through a comprehensive

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi ke depan, Perseroan terus membangun tenaga kerja yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi dinamika industri yang terus berkembang.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SDM

REKRUTMEN

Perseroan memandang SDM yang unggul sebagai faktor utama dalam mendukung keberhasilan Perseroan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan strategi manajemen SDM, Perseroan menerapkan proses rekrutmen yang selektif dan cermat guna memperoleh talenta terbaik dengan potensi dan kualifikasi yang sesuai untuk setiap posisi yang tersedia.

Dalam pelaksanaan proses rekrutmen, Perseroan membaginya ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Rekrutmen profesional yang memiliki keahlian di bidang tertentu; dan
2. Rekrutmen *fresh graduate* yang siap untuk dikembangkan.

Selain itu, proses rekrutmen dilakukan melalui berbagai saluran, baik internal maupun eksternal. Sumber internal berasal dari tenaga kerja yang telah bekerja di Perseroan, baik sebagai tenaga tetap, alih daya, maupun magang. Sementara itu, sumber eksternal berasal dari tenaga kerja yang belum bergabung dengan Perseroan.

Melalui pendekatan tersebut, Perseroan tidak hanya memperluas cakupan pencarian talenta, tetapi juga mendukung citra Perseroan secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan perekrutan karyawan baru.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perseroan telah menetapkan Prosedur Standar Operasi (SOP) pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM. Program pelatihan dirancang untuk dilaksanakan sepanjang tahun dengan tujuan untuk terus mengasah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan karyawan. Melalui perhatian yang besar terhadap pengembangan keterampilan dan keahlian karyawan, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawan dalam organisasi memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan.

Selain itu, Perseroan mengimplementasikan inovasi dalam pengembangan kompetensi karyawan melalui pemanfaatan aplikasi *Learning Management System* (LMS) bernama MyLearning. Melalui platform ini, karyawan dapat mengakses pelatihan secara fleksibel

and forward-looking approach, the Company continues to build an adaptive, capable, and prepared workforce amid the industry's evolving dynamics.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES AND IMPLEMENTATION

RECRUITMENT

The Company views high-quality Human Resources as a key factor in supporting the Company's long-term success. Accordingly, in implementing its Human Resources management strategy, the Company applies a selective and careful recruitment process to identify the best talent with the appropriate potential and qualifications for each available position.

In carrying out the recruitment process, the Company classifies it into two categories, namely:

1. Professional recruitment for individuals with expertise in specific fields; and
2. Fresh graduate recruitment for individuals who are ready to be developed.

In addition, the recruitment process is conducted through various channels, both internal and external. Internal sources are derived from workers who are already employed by the Company, whether as permanent employees, outsourced workers, or interns. Meanwhile, external sources are derived from workers who have not yet joined the Company.

Through this approach, the Company not only broadens the scope of its talent search but also supports the overall image of the Company.

Throughout 2025, the Company did not conduct any new employee recruitment activities.

COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company has established Standard Operating Procedures (SOP) for education and training to enhance Human Resources competencies. Training programs are designed to be conducted throughout the year with the objective of continuously sharpening employees' knowledge and improving their capabilities. By placing strong emphasis on the development of employee skills and expertise, the Company ensures that every employee across the organization possesses the competencies required to support the achievement of the Company's vision and mission.

In addition, the Company has implemented innovation in employee competency development through the use of a Learning Management System (LMS) application called MyLearning. Through this platform, employees are able to access training flexibly without time

tanpa dibatasi waktu dan lokasi, sehingga mendukung penyampaian pembelajaran yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Program pelatihan yang dikembangkan mencakup kompetensi teknis infrastruktur digital, kapabilitas manajerial, dan pengembangan kepemimpinan, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pelatihan daring tersebut juga dilengkapi dengan pelatihan luring atau tatap muka, baik yang dilaksanakan secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal, guna mendukung efektivitas pengembangan kompetensi sekaligus memperkuat kesiapan Perseroan dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan efisiensi operasional.

Pada tahun 2025, belum terdapat pelatihan formal/kursus yang diikuti oleh karyawan Perseroan.

PENGEMBANGAN KARIR

Perseroan merancang program Pengembangan Karier untuk menyiapkan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan agar dapat memberikan kontribusi optimal, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Saat ini, Perusahaan memiliki program pengembangan karier yang tersusun secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari tingkat jabatan awal hingga eksekutif, yang disiapkan untuk mengisi posisi-posisi kosong sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan karier tersebut didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kompetensi yang diukur melalui penilaian berkala dan kinerja individu yang dinilai melalui sistem yang terstandarisasi.

Pelaksanaan pengembangan karier berlaku bagi seluruh karyawan tanpa diskriminasi, baik untuk promosi vertikal maupun horizontal, dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Evaluasi administratif yang meliputi kinerja, lama bekerja, histori pekerjaan, dan usia;
2. Penilaian potensi dan kinerja berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di industri serta evaluasi pencapaian kinerja yang terstandarisasi;
3. Penilaian manajerial yang melibatkan masukan dari pihak pengambil keputusan strategis.

Setiap karyawan yang memenuhi kriteria akan dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dengan nilai potensi dan kompetensinya. Unit SDM akan melaksanakan proses kategorisasi tersebut serta mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan dengan kebutuhan unit terkait.

Program pengembangan karier dijalankan sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi dan proyeksi posisi yang kosong. Pada tahun 2025, belum terdapat karyawan yang mengikuti program ini. Evaluasi kinerja juga dilaksanakan

and location constraints, thereby supporting more structured and accessible learning delivery. The training programs developed through this approach cover digital infrastructure technical competencies, managerial capabilities, and leadership development, aligned with organizational needs. These online training programs are also complemented by offline or in-person sessions, conducted either internally or in collaboration with external parties, in order to support the effectiveness of competency development while strengthening the Company's readiness to support digital transformation and improved operational efficiency.

In 2025, there were no formal training programs/courses attended by the Company's employees.

CAREER DEVELOPMENT

The Company designs a Career Development program to prepare, develop, and retain employees so that they can make an optimal contribution, both at present and in the future. Currently, the Company has a structured and tiered career development program, starting from entry-level positions up to executive level, which is prepared to fill vacant positions in accordance with organizational needs. Such career development is based on two main aspects, namely competencies measured through periodic assessments and individual performance assessed through a standardized system.

The implementation of career development applies to all employees without discrimination, both for vertical and horizontal promotions, by referring to the established competencies and job requirements. The assessment is carried out based on three main dimensions, namely:

1. Administrative evaluation covering performance, length of service, work history, and age;
2. Assessment of potential and performance based on competency standards applicable in the industry, as well as standardized evaluation of performance achievement;
3. Managerial assessment involving input from strategic decision-makers.

Each employee who meets the criteria will be grouped into a category in accordance with their potential and competency values. The HR unit will carry out the categorization process and consider the suitability of the job profile with the needs of the relevant unit.

The career development program is implemented in accordance with the needs of the organizational structure and the projection of vacant positions. In 2025, there were no employees who participated in this

secara berkala untuk menilai pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung dan difasilitasi oleh unit kerja SDM dengan mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Setiap karyawan memiliki target: Tugas dan tanggung jawab karyawan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan, yang berhubungan langsung dengan tujuan Perseroan.
2. Target harus terukur: Setiap karyawan diharapkan mencapai target dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama atasan dan diformulasikan dalam format yang terukur.
3. Evaluasi kinerja berkala: Pencapaian target dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun melalui proses formal, meskipun tinjauan informal juga dilakukan melalui diskusi berkelanjutan untuk memastikan karyawan tetap terdepan dalam menghadapi dinamika bisnis.

Perusahaan juga menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai alat ukur kinerja secara objektif. Unit kerja SDM bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan proses penilaian kinerja berjalan secara efektif dengan memperhatikan aspek komunikasi, administrasi, dan koordinasi yang berkaitan dengan sistem *reward and punishment*. Hasil evaluasi kinerja ini digunakan sebagai dasar dalam berbagai keputusan pengembangan karyawan, termasuk program pelatihan, promosi, dan pembinaan lanjutan.

REMUNERASI

Perseroan menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja untuk mendukung hubungan yang profesional antara karyawan dan Perseroan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kompensasi dan benefit yang diterima karyawan sepadan dengan pencapaian individu dan kinerja secara keseluruhan. Penerapan sistem tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghargai kontribusi karyawan, tetapi juga untuk mempertahankan posisi karyawan dengan performa tinggi dan hasil kerja yang optimal.

Perseroan juga memastikan bahwa sistem remunerasi yang diterapkan bersifat kompetitif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk upah minimum di wilayah operasional. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk memastikan tidak terdapat diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan perbedaan upah berdasarkan gender. Untuk itu, Perseroan menerapkan kebijakan gender pay gap nol persen, yang berarti bahwa karyawan laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama akan menerima kompensasi yang setara. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan upah berdasarkan gender serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil.

program. Performance evaluations are also carried out periodically to assess the achievement of established targets. Performance assessments are conducted by direct supervisors and facilitated by the HR work unit by referring to three main principles, namely:

1. Each employee has targets: Employees' duties and responsibilities are aligned with the targets that have been set, which are directly related to the Company's objectives.
2. Targets must be measurable: Each employee is expected to achieve targets within a certain period that has been mutually agreed upon with their supervisor and formulated in a measurable format.
3. Periodic performance evaluation: Target achievement is evaluated at least once a year through a formal process, although informal reviews are also conducted through ongoing discussions to ensure employees remain at the forefront in facing business dynamics.

The Company also uses *Key Performance Indicators* (KPI) as an objective performance measurement tool. The HR work unit acts as a facilitator to ensure that the performance assessment process runs effectively by taking into account communication, administration, and coordination aspects related to the reward and punishment system. The results of this performance evaluation are used as the basis for various employee development decisions, including training programs, promotions, and further development.

REMUNERATION

The Company implements a performance-based remuneration system to support a professional relationship between employees and the Company. This system is designed to ensure that the compensation and benefits received by employees are commensurate with individual achievements and overall performance. The implementation of this system is intended not only to recognize employee contributions, but also to maintain employee positions associated with high performance and optimal results.

The Company also ensures that its remuneration system remains competitive and is in compliance with applicable laws and regulations, including minimum wage requirements in its areas of operation. In addition, the Company is committed to ensuring the absence of discrimination, particularly with respect to gender-based wage differences. To this end, the Company applies a zero percent gender pay gap policy, meaning that male and female employees performing work of equal value receive equal compensation. This policy is intended to achieve gender-based pay equity and to foster an inclusive and fair working environment.

Untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam pemberian remunerasi, Perseroan secara berkala melaksanakan audit gaji dan *benchmarking* dengan perusahaan sejenis di Indonesia. Proses ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan daya saing remunerasi yang ditawarkan, tetapi juga untuk memastikan tidak terdapat ketimpangan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh jenjang karyawan Perseroan.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Perseroan menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif untuk mendukung kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Program ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kesehatan dan pensiun, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas yang diberikan meliputi tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan melahirkan, tunjangan gigi, pemeriksaan kesehatan tahunan, serta optimalisasi manfaat melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain pemberian tunjangan, Perseroan juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan produktif melalui pengelolaan keseimbangan kerja yang selaras dengan kebutuhan karyawan dan operasional Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan menjunjung prinsip kesetaraan bagi karyawan tetap maupun paruh waktu, dengan tetap memastikan bahwa kesejahteraan karyawan menjadi prioritas tanpa diskriminasi dalam aspek-aspek yang esensial.

BUDAYA KERJA

Perseroan menerapkan budaya kerja yang dirancang untuk mendorong karyawan memberikan kontribusi terbaik dalam setiap aspek pekerjaannya. Di samping berfokus pada pencapaian target dan tanggung jawab, karyawan juga diharapkan untuk senantiasa mengikuti dan menginternalisasi budaya kerja yang menitikberatkan pada kinerja, kreativitas, dan inovasi secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk diseminasi informasi melalui email yang menjangkau seluruh karyawan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan budaya kerja diterapkan secara efektif.

Sejalan dengan penguatan budaya kerja tersebut, Perseroan juga terus menanamkan budaya kepatuhan di seluruh tingkat organisasi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, antara lain *briefing*, komunikasi internal, serta penerapan ketentuan internal secara konsisten, sebagai bagian dari pembentukan lingkungan kerja yang tertib, bertanggung jawab, dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

To maintain transparency and fairness in remuneration practices, the Company periodically conducts salary audits and benchmarking against peer companies in Indonesia. This process is carried out not only to ensure the competitiveness of the remuneration offered, but also to confirm that no wage disparities exist between male and female employees across all employee levels within the Company.

EMPLOYEE WELFARE

The Company provides a competitive benefits and welfare package to support employees' overall well-being. This program focuses on two main aspects, namely health and pension, and is implemented in accordance with applicable laws and regulations. The facilities provided include holiday allowances, health benefits, maternity benefits, dental benefits, annual medical check-ups, as well as optimization of benefits through BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan.

In addition to providing benefits, the Company also supports an inclusive and productive work environment through the management of work-life balance aligned with employee needs and the Company's operational requirements. In its implementation, the Company upholds the principle of equality for both permanent and part-time employees, while ensuring that employee welfare remains a priority without discrimination in essential aspects.

WORK CULTURE

The Company promotes a work culture designed to encourage employees to deliver their best contribution in every aspect of their work. In addition to focusing on the achievement of targets and responsibilities, employees are also expected to consistently follow and internalize a work culture that emphasizes performance, creativity, and continuous innovation.

In 2025, the Company carried out various activities, including the dissemination of information through email reaching all employees. These efforts were undertaken to ensure that the work culture is implemented effectively.

In line with the strengthening of this work culture, the Company also continues to foster a culture of compliance across all levels of the organization. This effort is carried out through various initiatives, including briefings, internal communications, and the consistent enforcement of internal provisions, as part of building an orderly and responsible working environment that supports sustainable business growth.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan telah membentuk lembaga kerja sama Bipartit sebagai sarana komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan serikat pekerja yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Pembentukan lembaga ini merupakan komitmen Perseroan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan karyawan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan dan perjanjian kerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan yang baik antara Perseroan dan karyawan, Perseroan menyediakan berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses oleh karyawan, termasuk melalui sistem internal SDM. Melalui saluran komunikasi tersebut, Perseroan berupaya memastikan setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, Perseroan menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR PENGELOLA SDM

Pencapaian visi, misi, dan tujuan bisnis Perseroan sangat bergantung pada kekuatan SDM yang andal, berdedikasi, dan kompeten. Oleh karena itu, pengembangan individu dan tim, serta pembentukan budaya perusahaan yang kuat, senantiasa menjadi prioritas utama dalam strategi bisnis Grup untuk memastikan pencapaian hasil terbaik.

Pengelolaan SDM berada di bawah divisi Group Corporate Services & Branding yang dipimpin oleh Director & Chief of Enterprise Support Management.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengelolaan SDM juga diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi *business support* Perseroan sejalan dengan arah pertumbuhan usaha. Melalui pengembangan kapabilitas karyawan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan dukungan terhadap penerapan teknologi, pengelolaan SDM diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas operasional serta kesiapan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company has established a Bipartite Cooperation Institution as a forum for communication and consultation between management and the labor union registered with the authorized manpower agency. The establishment of this institution reflects the Company's commitment to providing labor protection and effective communication channels for employees, including in fulfilling their rights based on the applicable regulations and employment agreements.

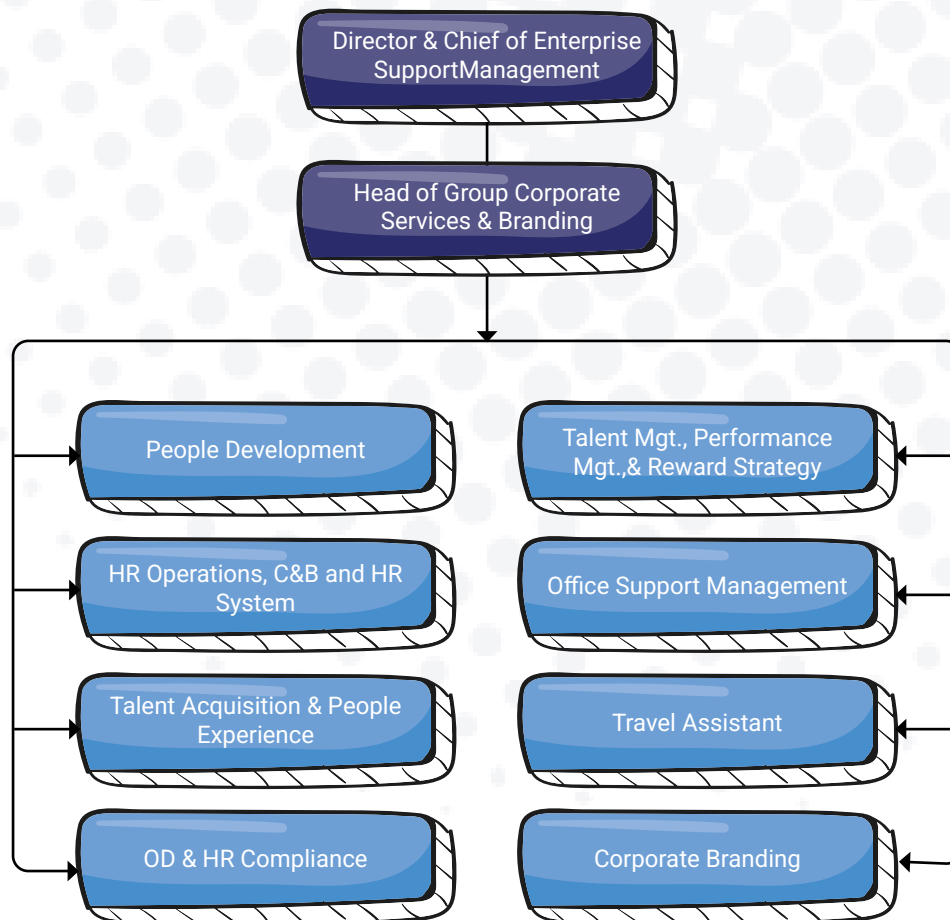
As part of its efforts to strengthen a positive relationship between the Company and employees, the Company provides various communication channels accessible to employees, including through the internal Human Resources system. Through these communication channels, the Company seeks to ensure that any issues that arise can be properly resolved. In addition, the Company guarantees employees' freedom of association in accordance with applicable laws and regulations.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRUCTURE

The achievement of the Company's vision, mission, and business objectives is highly dependent on strong, dedicated, and competent Human Resources. Therefore, the development of individuals and teams, as well as the establishment of a strong corporate culture, has consistently remained a key priority in the Group's business strategy to ensure the achievement of optimal results.

HR management is overseen by the Group Corporate Services & Branding division, led by the Director & Chief of Enterprise Support Management.

In its implementation, the Human Resources management function is also directed toward supporting the strengthening of the Company's business support functions in line with its business growth direction. Through the development of employee capabilities relevant to organizational needs and support for the adoption of technology, Human Resources management is expected to contribute to improved operational effectiveness and the Company's readiness to respond to industry dynamics.



RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2026

Rencana pengembangan SDM Perseroan untuk tahun 2026 disusun sebagai bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Rencana ini difokuskan pada penguatan kapabilitas karyawan, peningkatan efektivitas pengelolaan SDM, serta dukungan terhadap keberlanjutan operasional Perseroan. Adapun rencana pengembangan SDM untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PLAN 2025

The Company's Human Resources development plan for 2026 was prepared as part of its efforts to ensure the availability of a competent workforce aligned with business needs. The plan focuses on strengthening employee capabilities, improving the effectiveness of Human Resources management, and supporting the sustainability of the Company's operations. The Human Resources development plan for 2026 is as follows:

Keterangan Level	Jumlah Kaderisasi Talent Numbers
Manajemen Menengah & Senior Middle Management & Senior	1
Supervisor	1
Staf Staff	1

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perseroan menempatkan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai salah satu prioritas utama, mengingat karakteristik industri yang memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi. Penerapan prinsip-prinsip K3 dalam setiap proses bisnis Perseroan dikoordinasikan oleh tim QHSE (*Quality, Health, Safety and Environment*) dan dijalankan oleh unit-unit terkait. Perseroan telah mengadopsi dan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001, yang kini telah bertransformasi menjadi ISO 45001, selaras dengan sertifikasi lainnya seperti ISO 9001 dan ISO 14001. Perseroan juga telah memiliki kebijakan QHSE yang terintegrasi dalam kebijakan IMS dan telah ditandatangani oleh Direksi. Adapun isi kebijakan IMS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan secara berkelanjutan peran Perseroan sebagai mitra yang andal dalam industri telekomunikasi.
2. Meningkatkan secara berkelanjutan tingkat pemahaman aspek kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dan keamanan informasi serta profesionalisme seluruh karyawan di tempat kerja.
3. Mematuhi peraturan yang relevan dan persyaratan terkait kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dan keamanan informasi.
4. Bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk memberikan pemahaman kepada karyawan serta memberikan pengaruh kepada pemasok dan subkontraktor dalam praktik aspek kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dan keamanan informasi.
5. Membangun, memelihara, dan meningkatkan secara berkelanjutan proses Sistem Manajemen Terintegrasi Perseroan.
6. Bekerja untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan melibatkan konsultasi dan partisipasi seluruh pekerja, komitmen untuk mencegah pencemaran lingkungan, pemrosesan aset dan fasilitas informasi melalui kebijakan yang efektif, serta mendukung kinerja manajemen aset dalam jangka panjang.
7. Melaksanakan pekerjaan dengan kesadaran terhadap budaya dan komunitas.

Kebijakan ini disusun sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan dalam kegiatan usahanya. Kebijakan ini juga berlaku bagi mitra vendor Perseroan.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

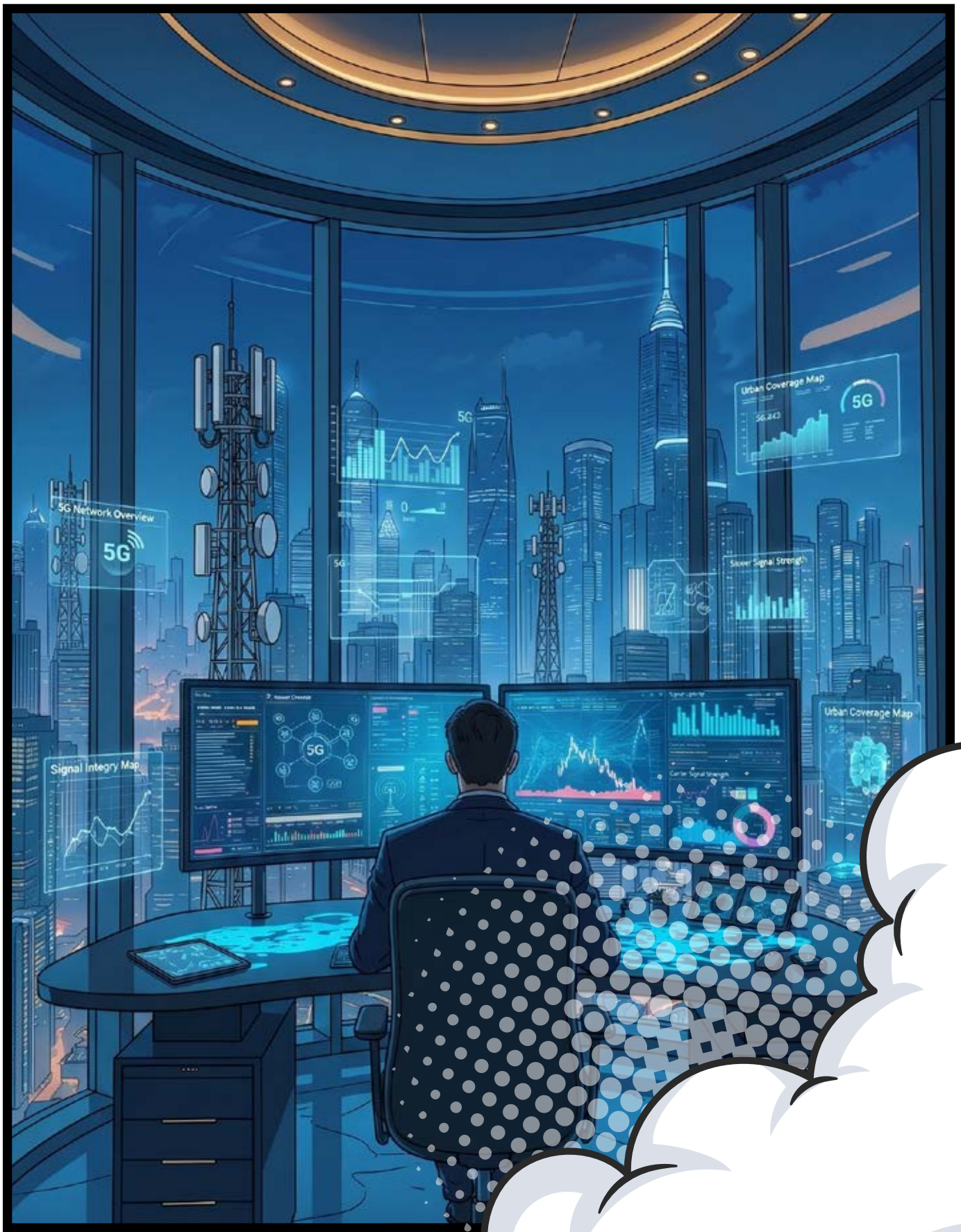
The Company places the enhancement of occupational health and safety (OHS) as one of its top priorities, considering the nature of the industry, which carries a high level of work-related risk. The implementation of OHS principles across all of the Company's business processes is coordinated by the QHSE (*Quality, Health, Safety and Environment*) team and carried out by the relevant units. The Company has adopted and implemented the Occupational Health and Safety Management System OHSAS 18001, which has now transitioned to ISO 45001, in line with other certifications such as ISO 9001 and ISO 14001. The Company also has a QHSE policy integrated into its IMS policy, which has been signed by the Board of Directors. The contents of the IMS policy are as follows:

1. To continuously enhance the Company's role as a reliable partner in the telecommunications industry.
2. To continuously improve the level of understanding of quality, health, occupational safety, environmental, and information security aspects, as well as the professionalism of all employees in the workplace.
3. To comply with relevant regulations and requirements relating to quality, health, occupational safety, environmental, and information security aspects.
4. To work with all stakeholders, including providing understanding to employees and influencing suppliers and subcontractors in the practice of quality, health, occupational safety, environmental, and information security aspects.
5. To establish, maintain, and continuously improve the Company's Integrated Management System processes.
6. To work toward providing safe and healthy working conditions, eliminating hazards and reducing occupational health and safety risks, preventing work accidents and occupational illnesses, by involving consultation and participation of all workers, maintaining a commitment to preventing environmental pollution, processing assets and information facilities through effective policies, and supporting long-term asset management performance.
7. To carry out work with awareness of culture and community.

This policy was established as the Company's commitment to health, occupational safety, and environmental aspects in its business activities. This policy also applies to the Company's vendor partners.

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY





Untuk mendukung penciptaan nilai tambah, IBST mengembangkan dan menerapkan teknologi yang tepat guna guna mempercepat pertumbuhan bisnis melalui kebijakan strategis di bidang Teknologi Informasi. Pada tahun 2025, pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi Perseroan difokuskan pada otomatisasi proses, yang mencakup pemanfaatan *robotic process automation* dan *artificial intelligence*.

To support the creation of added value, IBST develops and implements appropriate technology to accelerate business growth through strategic policies in the field of Information Technology. In 2025, the Company's Information Technology management and development focused on process automation, which included the use of robotic process automation and artificial intelligence.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

IBST menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi ("TI") secara optimal berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan serta tantangan bisnis yang terus berkembang. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan mendorong penerapan teknologi yang relevan, termasuk *artificial intelligence*, *Internet of Things*, dan cloud computing, guna memperkuat efektivitas operasional, mendukung diversifikasi layanan, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis.

Sistem TI yang diterapkan di IBST dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi berbagai proses, memperkuat daya saing, dan membentuk keunggulan kompetitif. Penerapannya dilakukan dengan mengedepankan inovasi yang berkelanjutan, seiring dengan penyesuaian terhadap kebutuhan operasional dan fungsional Perseroan.

Sebagai wujud komitmen tersebut, IBST telah menetapkan berbagai kebijakan terkait teknologi informasi, termasuk Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi ("**Kebijakan TI**"). Kebijakan TI ini ditetapkan untuk memastikan proses bisnis berjalan secara efisien, memungkinkan Perseroan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan,

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

IBST recognizes that the optimal use of information technology ("IT") plays an important role in enhancing productivity, competitiveness, and adaptability to ongoing business changes and challenges. To support this, the Company promotes the implementation of relevant technologies, including artificial intelligence, the Internet of Things, and cloud computing, to strengthen operational effectiveness, support service diversification, and create added value for customers and business partners.

The IT systems implemented at IBST are designed to improve operational efficiency through the automation of various processes, strengthen competitiveness, and create competitive advantage. Their implementation emphasizes continuous innovation while remaining aligned with the Company's operational and functional needs.

As part of this commitment, IBST has established a range of policies related to information technology, including the Information Technology Security Policy ("**IT Policy**"). This IT Policy is intended to ensure that business processes operate efficiently, enable the Company to provide optimal service to customers, and

serta menyediakan informasi bisnis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis manajemen.

Komponen utama dalam Kebijakan TI meliputi:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perseroan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk membangun kesadaran pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perseroan, serta meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perseroan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna dalam melindungi data rahasia Perseroan melalui pelaksanaan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga keamanan data rahasia Perseroan, dan melindungi perangkat yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
5. Klasifikasi data beserta penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia, dan data non-rahasia, termasuk ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang wajib dijaga dengan tingkat kerahasiaan tertinggi, dengan akses yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol domain Perseroan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk semakin mengamankan infrastruktur Perseroan, aplikasi bisnis, data, serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk *malware*, virus, dan pelaku ancaman lainnya. Penerapannya mencakup implementasi dan investasi pada *multi factor authentication*, PAM (*Privilege Access Management*), *firewall*, VPN, anti virus, teknologi web-filter, email security, serta *Security Operations Center* ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perseroan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi serta jejak audit atas akses tersebut.

STRATEGI TI

Strategi TI IBST diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional, dengan fokus utama sebagai berikut:

1. Sentralisasi IT *capabilities* untuk mengembangkan kapabilitas yang dapat dipergunakan bersama (*shared*).

provide accurate business information as a basis for management's strategic decision-making.

The key components of the IT Policy include:

1. The implementation of general IT security measures to protect the Company's confidential data, business applications, and other IT infrastructure from cybersecurity threats.
2. The provision of regular communication to build awareness among IT users regarding the importance of IT security to the Company's business operations, while also enhancing users' role and contribution in protecting the Company from cybersecurity threats.
3. Users' responsibility to protect the Company's confidential data by carrying out work activities responsibly, including by following IT security guidelines, maintaining the security of the Company's confidential data, and protecting the devices they use in their daily work.
4. Procedures and management of data storage.
5. Data classification and related explanations, including personal data, highly confidential data, and non-confidential data, as well as provisions on the storage of personal data and highly confidential data that must be maintained with the highest level of confidentiality, where access is granted based on need and maintained within the Company's domain controller system. Requests for new access or modifications may be submitted to the IT administrator with the approval of the respective division head.
6. An explanation of the capability to further secure the Company's infrastructure, business applications, data, and end-user devices from potential cybersecurity threats, including malware, viruses, and other threat actors. The measures implemented include the implementation of and investment in multi factor authentication, PAM (Privilege Access Management), firewall, VPN, anti-virus, web-filter technology, email security, and a Security Operations Center ("SOC") for cybersecurity threat monitoring.
7. Provisions relating to the Company's business applications and IT Infrastructure, which are equipped with password-protected access and audit trails for such access.

IT STRATEGY

IBST's IT strategy is directed toward improving operational effectiveness and efficiency, with the following key focuses:

1. Centralization of IT capabilities to develop capabilities that can be used jointly (*shared*).

2. *Process automation* untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat proses bisnis.
3. *Continuous improvement* pada IT security.
4. Penerapan teknologi baru yang relevan, termasuk eksplorasi penerapan teknologi *Artificial Intelligence* secara terukur, agar dukungan aplikasi tetap memadai seiring pertumbuhan bisnis.
5. Pengembangan personel TI yang juga memahami konteks bisnis.

Strategi TI Perseroan dirancang untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi operasional melalui pembangunan sistem yang semakin terhubung, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pasar. Dengan pendekatan yang terarah dan terstruktur, Perseroan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses bisnis secara lebih optimal, meminimalkan hambatan operasional, serta meningkatkan mutu layanan bagi pelanggan dan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan strategi tersebut juga ditujukan untuk mendukung penguatan bisnis infrastruktur digital dan layanan connectivity Perseroan melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi. Cakupan inisiatif ini meliputi dukungan terhadap pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas analisis data guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta pengembangan kapabilitas sistem yang sejalan dengan diversifikasi layanan, termasuk solusi pengelolaan daya yang efisien dan andal.

Untuk menjalankan agenda tersebut, pengelolaan TI di Perseroan dilaksanakan oleh Divisi TI Grup yang terdiri atas:

- Departemen Infrastruktur TI, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan, server, serta keamanan sistem untuk memastikan stabilitas operasional teknis.
- Departemen TI *Support & Automation*, yang menyediakan dukungan teknis dan solusi atas kendala yang dihadapi pengguna, sekaligus mendorong otomasi proses untuk meningkatkan efisiensi kerja.
- Departemen TI *Applications*, yang mengembangkan dan mengelola aplikasi bisnis yang relevan untuk mendukung kegiatan operasional secara langsung serta meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas dalam pelaksanaan bisnis sehari-hari.
- Departemen Keamanan TI, yang bertanggung jawab menjaga aset digital dan infrastruktur organisasi melalui pemantauan ancaman dan mitigasi risiko siber, dengan fokus pada perlindungan integritas data, pemenuhan kepatuhan regulasi, dan pengelolaan respons insiden guna mencegah akses yang tidak sah.

2. Process automation to improve accuracy and accelerate business processes.
3. Continuous improvement in IT security.
4. Adoption of relevant new technologies, including exploration on selective implementation of Artificial Intelligence, to ensure that application support remains adequate in line with business growth.
5. The development of IT personnel who also understand business context.

The Company's IT strategy is designed to enhance operational effectiveness and efficiency by establishing systems that are increasingly integrated, adaptive, and aligned with market needs. Through a structured and well-directed approach, the Company leverages technology to support business processes more optimally, reduce operational constraints, and improve service quality for customers and stakeholders.

The implementation of this strategy is also intended to support the strengthening of the Company's digital infrastructure and connectivity services through the use of increasingly integrated technology. This approach includes support for infrastructure monitoring and maintenance, enhancement of data analytics quality to enable more precise decision-making, and the development of system capabilities that are aligned with service diversification, including efficient and reliable power management solutions.

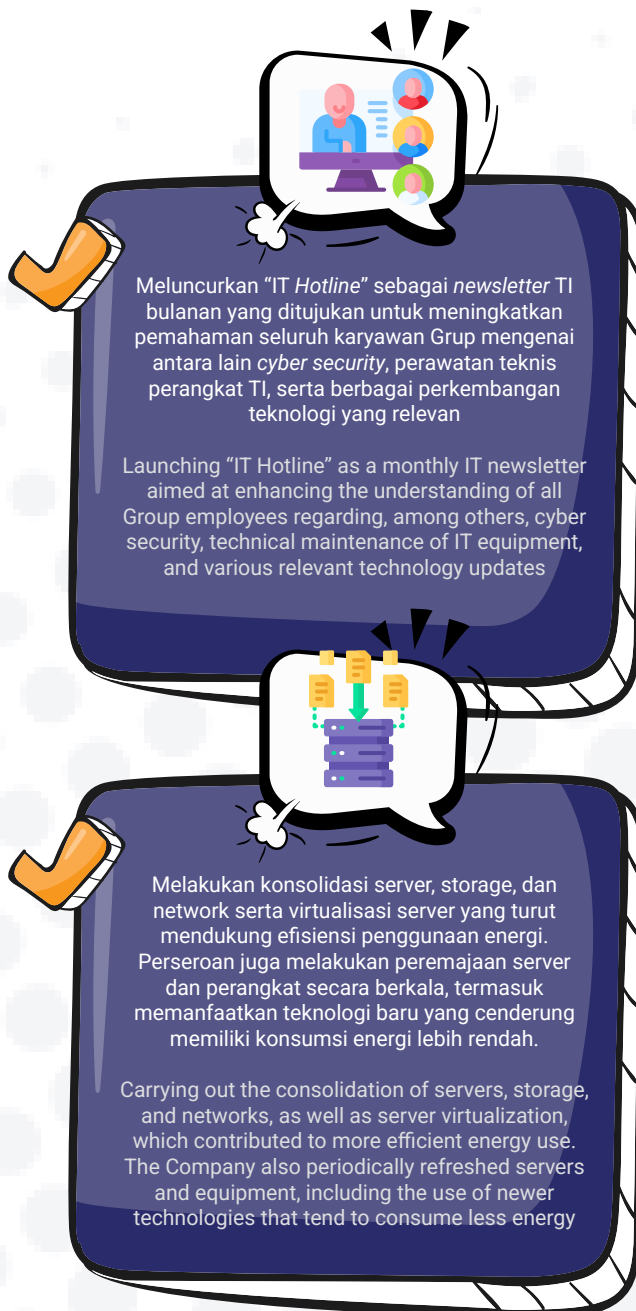
To support these efforts, IT management within the Company is carried out by the Group IT Division, which consists of:

- IT Infrastructure Department, which focuses on managing and maintaining network devices, servers, and system security to ensure stable technical operations.
- IT Support & Automation Department, which provides technical support and solutions to issues encountered by users, while also driving process automation to improve efficiency.
- IT Applications Department, which develops and manages relevant business applications that directly support operational activities and help improve productivity and flexibility in day-to-day business execution.
- IT Security Department, which is responsible for protecting the organization's digital assets and infrastructure through threat monitoring and cyber risk mitigation, with a primary focus on safeguarding data integrity, ensuring regulatory compliance, and managing incident response to prevent unauthorized access.

PROGRAM TI BERKELANJUTAN

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan operasional sekaligus mendorong peningkatan kinerja sistem informasi, Perseroan terus mengembangkan inovasi di bidang TI secara terarah. Inisiatif tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga untuk memperkuat keandalan sistem serta mendukung kebutuhan operasional yang terus berkembang.

Dalam mendukung keberlanjutan operasional TI, Perseroan telah melaksanakan sejumlah program, antara lain:



SUSTAINABLE IT PROGRAM INITIATIVES

As part of its efforts to strengthen operational sustainability while enhancing information system performance, the Company continued to advance IT innovation in a focused manner. These initiatives were intended not only to improve efficiency and productivity, but also to reinforce system reliability and support evolving operational needs.

To support the sustainability of its IT operations, the Company implemented a number of initiatives, including:



INISIATIF PENGEMBANGAN APLIKASI DIGITAL

Untuk mendukung proses bisnis yang semakin efektif, efisien, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat inovasi produk dan layanan kepada pelanggan, Perseroan terus mengembangkan berbagai aplikasi digital yang relevan dengan kebutuhan operasional. Pengembangan ini mencakup aplikasi yang mendukung pencatatan transaksi, penyusunan laporan, integrasi data internal dan eksternal, serta otomatisasi proses yang membantu mempercepat dan mempermudah transaksi bisnis. Melalui inisiatif ini, Perseroan berupaya memperkuat kinerja operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kelancaran komunikasi antarunit bisnis maupun dengan pemangku kepentingan terkait.

Selama dua belas bulan terakhir, pengembangan aplikasi di lingkup Grup difokuskan pada sejumlah inisiatif utama, yaitu:

- Transformasi platform data yang memungkinkan pengguna menyusun laporan dan melakukan analisis data secara lebih menyeluruh, mandiri, dan terotomasi. Pengembangan platform ini juga memberikan kemampuan yang lebih baik bagi manajemen untuk memantau perkembangan usaha dan operasional Perseroan secara komprehensif;
- Perseroan akan secara selektif mengevaluasi dan menerapkan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) pada fungsi-fungsi operasional yang memiliki dampak strategis tinggi. Pendekatan ini diarahkan pada identifikasi *use case* yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, termasuk melalui otomatisasi proses bisnis;
- Penguatan tata kelola akses, arsitektur infrastruktur TI, dan edukasi untuk meningkatkan kapabilitas keamanan TI secara berkelanjutan. Inisiatif ini mencakup implementasi *Privileged Access Management* (PAM), peningkatan segmentasi jaringan TI, penguatan resiliensi data melalui penerapan immutable storage untuk data *back-up*, serta berbagai kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan *awareness* karyawan terhadap keamanan TI melalui pelatihan, simulasi *phishing*, dan pengayaan materi pada IT *Hotline*.

INFRASTRUKTUR TI

IBST telah meningkatkan keamanan informasi melalui implementasi:

- Sertifikasi ISO 27001 untuk *Information Security Management System*
- Kebijakan Perlindungan Data (IT Security Policy)

DIGITAL APPLICATION DEVELOPMENT INITIATIVES

In order to support business processes that are more effective, efficient, and integrated, while also enhancing product and service innovation for customers, the Company continued to develop various digital applications relevant to its operational needs. These developments include applications that support transaction recording, report preparation, internal and external data integration, as well as process automation that helps accelerate and simplify business transactions. Through these initiatives, the Company seeks to strengthen operational performance, improve service quality, and maintain smooth communication across business units and with relevant stakeholders.

Over the past twelve months, the Group's application development efforts were focused on the following key initiatives:

- Transformation of the data platform to enable users to generate reports and conduct more comprehensive, independent, and automated data analysis. The development of this platform also provides management with stronger capabilities to monitor the Company's business progress and operations more comprehensively;
- The Company will selectively assess and implement Artificial Intelligence (AI) technologies in operational functions with high strategic impact. This approach is focused on identifying use cases that can deliver significant added value, including through business process automation;
- Strengthening access governance, IT infrastructure architecture, and education to continuously improve IT security capabilities. These initiatives include the implementation of Privileged Access Management (PAM), enhanced IT network segmentation, stronger data resilience through the adoption of immutable storage for back-up data, as well as other activities aimed at increasing employee awareness of IT security through training, phishing simulations, and enriched content in the IT Hotline.

IT INFRASTRUCTURE

IBST has strengthened information security through the implementation of:

- ISO 27001 certification for the Information Security Management System
- Data Protection Policy (IT Security Policy)

TATA KELOLA TI

Tata Kelola TI merupakan rangkaian proses yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan memastikan bahwa keputusan terkait kapabilitas teknologi informasi dapat mendukung penyampaian nilai kepada seluruh *stakeholder* Perseroan. Tata kelola TI yang efektif menjadi elemen penting dalam pencapaian tujuan bisnis karena mampu menyelaraskan strategi TI dengan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, tata kelola TI yang baik memerlukan keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu *People*, *Process*, dan *Technology*, yang saling mendukung dalam menciptakan *value* yang berkelanjutan.

IBST menerapkan tata kelola TI melalui tiga proses inti yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional Perseroan. Pertama, proses pengelolaan perangkat jaringan, server, dan sistem keamanan untuk memastikan infrastruktur TI berfungsi secara optimal dan aman. Kedua, proses otomasi yang bertujuan memberikan dukungan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna secara lebih efisien. Ketiga, proses pengembangan dan pengelolaan aplikasi bisnis yang mendukung berbagai kegiatan operasional Perseroan, termasuk transaksi dan manajemen data.

Pada aspek pengelolaan perangkat jaringan, server, dan sistem keamanan, Perseroan memiliki kebijakan yang jelas terkait perlindungan data. Kebijakan tersebut dituangkan dalam *IT Security Policy* yang bertujuan menjaga keamanan data Perseroan, data pribadi karyawan, serta data milik *supplier* dan mitra bisnis. Kebijakan ini mencakup pengaturan akses data yang ketat, di mana hanya pihak yang berwenang berdasarkan fungsi bisnis yang memperoleh akses sesuai persetujuan manajemen. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga integritas informasi.

Lebih lanjut, *IT Security Policy* juga mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap potensi ancaman siber yang dapat merugikan Perseroan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan telah menerapkan berbagai teknologi keamanan yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menangani ancaman *cybercrime*. Pendekatan ini mencakup penggunaan *firewall* canggih, enkripsi data, serta pemantauan berkelanjutan terhadap potensi serangan siber, sehingga data dan sistem TI tetap terlindungi dari ancaman eksternal maupun internal.

Dengan demikian, tata kelola TI di IBST tidak hanya berfokus pada pengelolaan teknologi, tetapi juga pada penyusunan kebijakan yang memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara menyeluruh.

IT GOVERNANCE

IT Governance constitutes a series of processes used to monitor, control, and ensure that decisions related to information technology capabilities support the delivery of value to all corporate stakeholders. Effective IT governance is an important element in achieving business objectives, as it is able to align IT strategy with the organization's vision and mission. Accordingly, sound IT governance requires a balance among three main pillars, People, Process, and Technology, which support one another in creating sustainable value.

IBST implements IT governance through three core processes, each of which plays a vital role in supporting the smooth operation of the Company. First, the process of managing network devices, servers, and security systems to ensure that IT infrastructure functions optimally and securely. Second, the automation process, which is intended to provide support and resolve issues faced by users more efficiently. Third, the process of developing and managing business applications that support various operational activities of the Company, including transactions and data management.

In the area of network device, server, and security system management, the Company has established a clear policy regarding data protection. This policy is set out in the IT Security Policy, which is intended to safeguard Company data, employees' personal data, as well as data belonging to suppliers and business partners. The policy includes strict data access controls, under which access is granted only to authorized parties based on business function and management approval. This is important to prevent data misuse and maintain information integrity.

Furthermore, the IT Security Policy also includes protection measures against potential cyber threats that could harm the Company. As part of these efforts, the Company has implemented various security technologies capable of detecting, preventing, and addressing cybercrime threats. This approach includes the use of advanced firewalls, data encryption, and continuous monitoring of potential cyberattacks, ensuring that data and IT systems remain protected from both external and internal threats.

Accordingly, IT governance at IBST is not solely focused on technology management, but also on the establishment of policies that mitigate risk, improve efficiency, and support the achievement of the Company's objectives in a holistic manner.

KEAMANAN INFORMASI

Sebagai bagian dari komitmennya dalam melindungi data Perseroan dan pelanggan, IBST terus mengedepankan penguatan sistem keamanan siber. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013, yang menjadi acuan dalam mengelola dan melindungi informasi berdasarkan standar internasional yang ketat.

Melalui penerapan ISO 27001:2013, Perseroan dapat memastikan perlindungan maksimal atas informasi yang dimiliki, baik dalam bentuk digital, *hardcopy*, maupun yang disimpan di *cloud*. Sertifikasi ini juga memungkinkan Perseroan untuk mengantisipasi potensi serangan siber dan mengelola risiko terkait keamanan sistem informasi secara lebih tepat dan efektif.

INFORMATION SECURITY

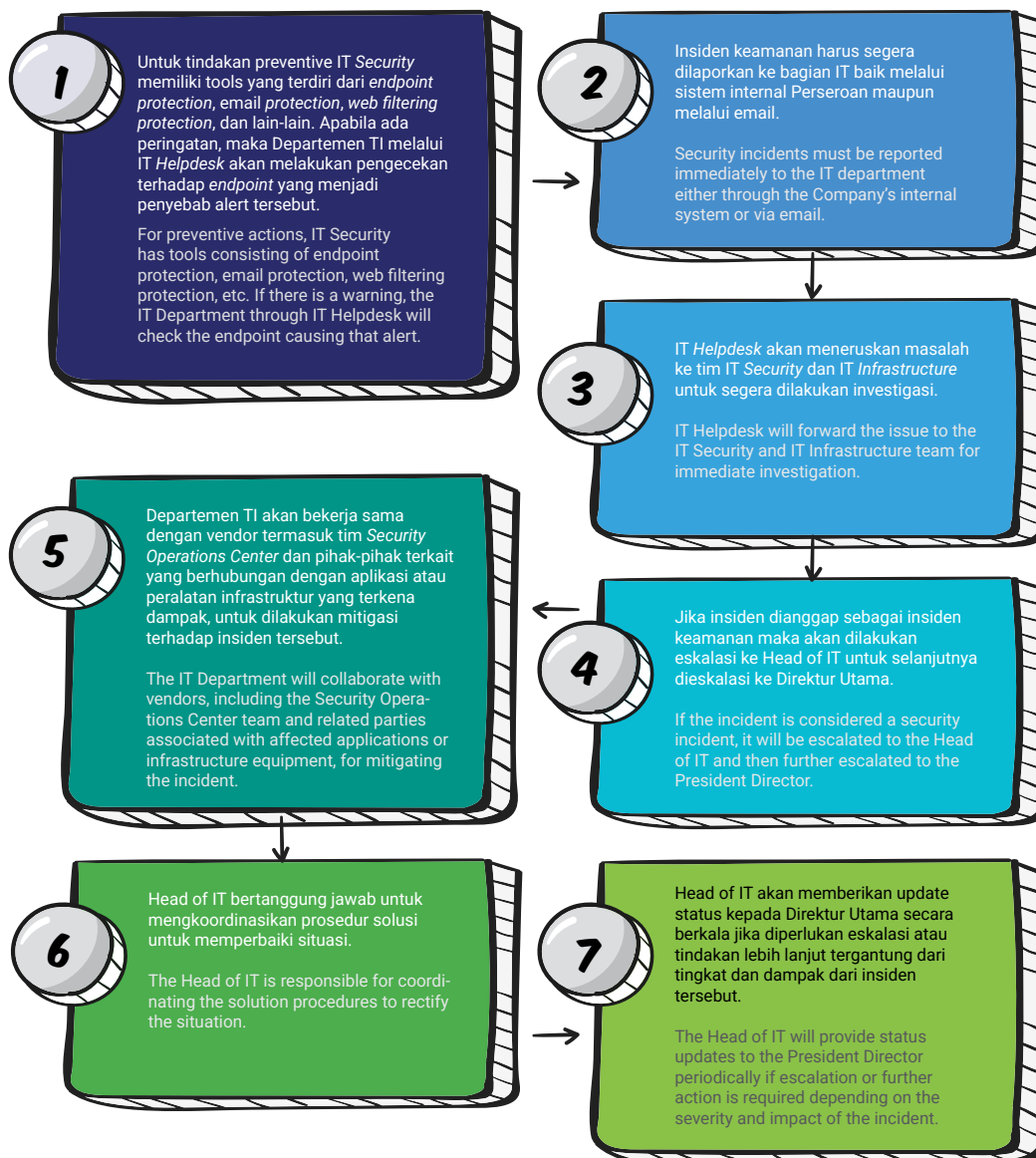
As part of its commitment to protecting Company and customer data, IBST continues to prioritize the strengthening of its cybersecurity systems. One of the key measures undertaken was obtaining ISO 27001:2013 certification, which serves as a reference in managing and protecting information in accordance with strict international standards.

Through the implementation of ISO 27001:2013, the Company is able to ensure maximum protection of the information it holds, whether in digital form, *hardcopy*, or stored in the cloud. This certification also enables the Company to anticipate potential cyberattacks and manage risks related to information system security in a more appropriate and effective manner.

PROSEDUR ESKALASI ATAS INSIDEN TI IT INCIDENT ESCALATION PROCEDURE

Departemen TI telah menetapkan prosedur atau mekanisme tata Kelola keamanan informasi dan proses eskalasi jika terjadi kejahatan siber. Adapun prosedur tersebut adalah:

The IT department has established procedures or mechanisms for information security governance and escalation processes in the event of cybercrime. These procedures include:



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI TAHUN 2025

Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen keamanan informasi guna memperkuat ketahanan dan meningkatkan keandalan sistem keamanan siber melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Mengimplementasikan *software* antivirus pada seluruh perangkat laptop dan desktop *users*.
2. Mengimplementasikan *multi factor authentication* untuk *access* ke seluruh internal *system*.
3. Mengimplementasikan PAM (*Privileged Access Management*) untuk memperkuat kontrol akses ke dalam internal *system*.
4. Mengaktifkan *firewall*, webfilter, dan anti-spam.
5. Menugaskan *team* SOC (*Security Operation Center*) untuk melakukan monitoring, identifikasi, dan mitigasi apabila terdapat risiko atau aktivitas mencurigakan pada jaringan Perseroan.

PENGEMBANGAN SDM TI

Dalam mendukung pencapaian rencana strategis TI, peningkatan kompetensi SDM di bidang TI menjadi aspek yang sangat penting. Untuk itu, Grup telah menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi karyawan TI Grup secara terstruktur dan terencana melalui sejumlah inisiatif berikut:

1. Pengembangan kompetensi teknis yang relevan dengan teknologi yang di-implementasikan pada Perseroan.
2. Pengembangan kompetensi managerial melalui program pengembangan yang dikoordinasikan oleh Divisi HRD.
3. Pengembangan diri melalui "*Learning by Doing*" untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap dinamika dan proses bisnis Perseroan.

RENCANA KERJA TI 2026

Memasuki tahun 2026, Perseroan menempatkan konsistensi pelaksanaan strategi TI sebagai elemen penting untuk memastikan terbentuknya sinergi yang efektif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target strategis TI yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat kesiapan sistem dan kapabilitas digital Perseroan dalam menopang perkembangan bisnis infrastruktur digital dan layanan connectivity.

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN 2025

The Company remains committed to continuous improvement in information security management in order to strengthen resilience and enhance the reliability of its cybersecurity systems through various strategic measures, including:

1. Implementing antivirus software on all user laptops and desktop devices.
2. Implementing multi factor authentication for access to all internal systems.
3. Implementing PAM (*Privileged Access Management*) to strengthen access control within internal systems.
4. Activating firewall, web filter, and anti-spam.
5. Assigning the SOC (*Security Operation Center*) team to monitor, identify, and mitigate risks or suspicious activities within the Company's network.

IT HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

To support the achievement of the IT strategic plan, enhancing the competencies of Human Resources in the IT field is a highly important aspect. In this regard, the Group has designed and implemented a structured and planned competency development program for IT Group employees through the following initiatives:

1. Development of technical competencies relevant to the technologies implemented within the Company.
2. Development of managerial competencies through development programs coordinated by the HRD Division.
3. Self-development through "*Learning by Doing*" to enhance employees' understanding of the Company's business dynamics and processes.

IT WORK PLANS FOR 2026

Entering 2026, the Company places strong emphasis on the consistent execution of its IT strategy as an essential element in creating effective and well-targeted synergy aligned with business needs. This approach is expected to support the achievement of the Company's established IT strategic objectives, while also strengthening system readiness and digital capabilities to support the growth of its digital infrastructure and connectivity businesses.

Rencana kerja TI Grup untuk tahun 2026 mencakup beberapa fokus utama sebagai berikut:

1. Melanjutkan transformasi platform data yang telah dimulai pada tahun 2025, dengan memperluas akses pengguna serta meningkatkan pemahaman users terkait analisa data dan keterhubungan data di sepanjang *value chain* Perseroan. Pengembangan platform data ini juga membuka peluang bagi penerapan sistem *artificial intelligence* yang relevan.
2. Sejalan dengan semakin luasnya kapabilitas analisa data, implementasi *Artificial Intelligence* akan dilakukan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap kebutuhan Perseroan serta aspek-aspek yang mampu memberikan nilai tambah.
3. Seiring pertumbuhan Perseroan dan meningkatnya konvergensi antar lini usaha, Perseroan akan mengembangkan mekanisme integrasi yang menjadi standar bagi integrasi antar aplikasi internal maupun integrasi dengan pihak eksternal.
4. Penguatan berkelanjutan pada aspek IT security tetap menjadi salah satu prioritas pengembangan TI pada tahun 2026, yang antara lain meliputi peningkatan kapabilitas *Security Operations Center*, implementasi platform untuk simulasi phishing, penyempurnaan mekanisme *back-up system*, serta kelanjutan pengembangan segmentasi jaringan TI Perseroan.

Secara keseluruhan, rencana kerja TI tahun 2026 diarahkan untuk semakin memperkuat kesiapan sistem dan kapabilitas digital Perseroan agar tetap sejalan dengan perkembangan bisnis infrastruktur digital yang semakin dinamis. Melalui penguatan platform data, penerapan AI, otomasi, pengembangan platform integrasi sistem, dan peningkatan keamanan sistem, Perseroan berupaya memastikan bahwa fungsi TI dapat terus memberikan dukungan yang andal bagi pertumbuhan usaha di masa mendatang.

Group IT work plan for 2026 includes the following key priorities:

1. Continuing the data platform transformation initiated in 2025 by broadening user access and enhancing users' understanding of data analytics and data interconnectivity across the Company's value chain. The development of this data platform also creates opportunities for the implementation of relevant artificial intelligence systems.
2. In line with broader data analytics capabilities, the implementation of Artificial Intelligence will be carried out in a measured and selective manner, taking into account its relevance to the Company's needs and the aspects that can generate added value for the Company.
3. Alongside the Company's growth and the increasing convergence across business lines, the Company will develop integration mechanisms that will serve as a standard model for integration among internal applications as well as with external parties.
4. The continuous enhancement of IT security will remain one of the main priorities of IT development in 2026, including improvements in Security Operations Center capabilities, the implementation of a phishing simulation platform, enhancements to back-up system mechanisms, and the continuation of the development of the Company's IT network segmentation.

Overall, the 2026 IT work plan is directed toward further strengthening the Company's system readiness and digital capabilities so that they remain aligned with the increasingly dynamic development of the digital infrastructure business. Through stronger data platforms, AI implementation, automation, system integration platform development, and improved system security, the Company seeks to ensure that the IT function can continue to provide reliable support for the Company's future business growth.





GOVERNANCE ANCHORED IN INTEGRITY AND SUSTAINABILITY

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan fondasi bagi Perseroan dalam menegakkan perilaku beretika, kepemimpinan yang akuntabel, pengambilan keputusan yang transparan, serta penciptaan nilai yang berkelanjutan. Tata kelola tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kepatuhan, tetapi juga sebagai penggerak strategis untuk memperkuat kepercayaan, ketahanan, dan kinerja jangka panjang.

Good Corporate Governance is the foundation through which the Company ensures ethical conduct, accountable leadership, transparent decision-making, and sustainable value creation. Governance is not merely a compliance framework, but a strategic enabler that strengthens trust, resilience, and long-term performance.



KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

COMMITMENT TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES



Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan disiplin, dengan berlandaskan prinsip Etika dan Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan. Melalui penguatan berkelanjutan atas struktur tata kelola, kebijakan, serta mekanisme pengawasan, Perseroan berupaya melindungi kepentingan pemangku kepentingan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis.

The Company is committed to implementing Good Corporate Governance in a consistent and disciplined manner, guided by the principles of Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability. Through continuous strengthening of governance structures, policies, and oversight mechanisms, the Company seeks to safeguard stakeholder interests, ensure regulatory compliance, and support sustainable growth amid an evolving business landscape.

Perseroan menempatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai fondasi utama dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan usaha. GCG diterapkan sebagai kerangka kerja yang membimbing seluruh pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional agar dijalankan secara berintegritas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten, Perseroan berupaya menjaga keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan sekaligus memastikan kesinambungan usaha dan penciptaan nilai.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan GCG di seluruh struktur tata kelola, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan di tengah dinamika industri.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Perseroan secara konsisten mengembangkan dan menerapkan praktik tata kelola yang sehat guna memperkuat ketahanan dan daya saing usaha dalam jangka panjang. Dengan menjunjung tinggi standar GCG, Perseroan membangun organisasi yang disiplin dan adaptif, sehingga mampu mengelola risiko, merespons perubahan industri dan tantangan global secara proaktif, serta meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

The Company places Good Corporate Governance (GCG) at the core of its organisational foundation and business conduct. GCG is embedded as a guiding framework to ensure that all strategic decisions and operational activities are carried out with integrity, transparency, accountability, and long-term sustainability. Through the consistent application of GCG principles, the Company seeks to balance the interests of all stakeholders while safeguarding business continuity and value creation.

To strengthen this commitment, the Company continuously enhances the effectiveness and quality of GCG implementation across governance structures, policies, and decision-making processes. This ongoing effort aims to reinforce stakeholder confidence, ensure full compliance with applicable regulations, and support the achievement of sustainable and optimal performance in a dynamic industry environment.

As a concrete expression of this commitment, the Company systematically develops and applies sound governance practices that support business resilience and long-term competitiveness. By upholding high governance standards, the Company builds a disciplined and adaptive organisation, one that is well positioned to navigate industry transformation, manage emerging risks, and respond proactively to global and sectoral challenges while enhancing overall corporate value.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LEGAL BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Berikut dasar hukum penerapan GCG di Perseroan:

The following are legal references for implementing GCG in the Company:

No.	Peraturan	Regulations
1.	Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal dan Perseroan Terbatas	Laws of the Republic of Indonesia relating to the Capital Market and Limited Liability Companies
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") yang terkait dengan penerapan tata kelola	Financial Services Authority Regulations ("OJK Regulation") and Financial Services Authority Circular Letters ("OJK Circular Letter") relating to the implementation of governance
3.	Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan OJK.	Indonesia's Corporate Governance Roadmap Issued by OJK
4.	ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF)	ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5.	Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi	The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Governance Policy Committee
6.	Anggaran Dasar Perseroan	The Company's Articles of Association
7.	Peraturan dan kebijakan Tata Kelola Perusahaan	Corporate Governance Policies and Regulations

PENERAPAN PRINSIP GCG

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

Penerapan GCG di Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

GCG implementation in the Company adheres to the basic principles of GCG in line with the Indonesia Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) 2021 that have been updated by the Governance Policy National Committee (KNKG), namely Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation
Perilaku Beretika Ethical Conduct	Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the Company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The Company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.
Akuntabilitas Accountability	Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company can account for its performance transparently and reasonably. As such, the company must be managed correctly, measurably and in accordance with company interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also those that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.
Keberlanjutan Sustainability	Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibility towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve community lives in a way that is in line with business interests and the sustainable development agenda.

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI GCG

GCG POLICY AND IMPLEMENTATION

Sebagai bagian dari Grup SMN, penerapan tata kelola perusahaan dikelola secara terpusat di tingkat Grup, sehingga seluruh kebijakan dan upaya perbaikan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh entitas anak.

Sepanjang tahun 2025, upaya untuk memperkuat penerapan GCG melalui pelaksanaan *benchmarking* dan analisis kesenjangan guna mengidentifikasi area peningkatan, penguatan komunikasi internal untuk memastikan koordinasi yang efektif antar unit kerja dalam penerapan prinsip tata kelola, serta peningkatan komunikasi eksternal melalui penyampaian informasi yang transparan dan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan, masih terus dilakukan.

Perseroan telah mengembangkan berbagai kebijakan GCG yang menjadi panduan dalam operasional Perseroan, antara lain:

1. Kode Etik
2. Piagam Dewan
3. Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris
4. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
5. Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi
6. Kebijakan Nominasi dan Remunerasi
7. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko
8. Kebijakan lainnya yang mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan

Perseroan juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis, praktik terbaik industri, serta perubahan regulasi yang berlaku.

Implementasi GCG Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Grup SMN secara terpusat telah menginisiasi dan melaksanakan berbagai program serta inisiatif strategis yang diterapkan secara terintegrasi dan konsisten di seluruh entitas dalam grup, termasuk Perseroan, di antaranya:

1. Memperkuat kerangka tata kelola melalui kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), guna mendukung praktik tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan pasar.
2. Menyelaraskan praktik tata kelola dengan agenda keberlanjutan Perseroan melalui penerapan standar keberlanjutan global, termasuk kerangka *International Sustainability Standards Board*, untuk

As part of the SMN Group, the implementation of corporate governance is managed centrally at the Group level, allowing all policies and continuous improvement efforts to be implemented consistently across all subsidiaries.

Throughout 2025, efforts to strengthen GCG implementation through benchmarking and gap analysis to identify areas for improvement, strengthening internal communication to ensure effective coordination among work units in the implementation of governance principles, as well as enhancing external communication through transparent and continuous disclosure of information to stakeholders, continued to be carried out.

The Company has developed various GCG policies that serve as guidelines in the Company's operations, including:

1. Code of Conduct
2. Board Charter
3. Charter of the Supporting Committees of the Board of Commissioners
4. Whistleblowing Policy
5. Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
6. Nomination and Remuneration Policy
7. Risk Management Policy Guidelines
8. Other policies that support the consistent and sustainable implementation of GCG

The Company also ensures that these policies are updated periodically to remain relevant to business developments, industry best practices, and changes in applicable regulations.

GCG Implementation in 2025

Throughout 2025, the SMN Group centrally initiated and implemented various programs and strategic initiatives that were applied in an integrated and consistent manner across all entities within the Group, including the Company, among others:

1. Strengthening the governance framework through consistent compliance with the regulations of the Financial Services Authority ("OJK") and the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), in order to support good governance practices and maintain market confidence.
2. Aligning governance practices with the Company's sustainability agenda through the implementation of global sustainability standards, including the *International Sustainability Standards Board*

mendukung perilaku usaha yang bertanggung jawab, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan nilai jangka panjang.

3. Melaksanakan evaluasi internal dan *benchmarking* secara berkala untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
4. Meningkatkan kesadaran tata kelola melalui program internal yang mencakup pembaruan regulasi, penguatan nilai-nilai perusahaan, serta penanaman budaya anti-korupsi dan integritas di seluruh jenjang organisasi.

framework, to support responsible business conduct, effective risk management, and long-term value creation.

3. Conducting periodic internal evaluations and benchmarking to improve governance effectiveness, strengthen oversight mechanisms, and support sound decision-making.
4. Enhancing governance awareness through internal programs that include regulatory updates, reinforcement of corporate values, as well as the cultivation of an anti-corruption and integrity culture at all levels of the organization.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

GCG ASSESSMENTS

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas penerapan GCG guna memastikan efektivitas serta meningkatkan kualitas tata kelola secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan self-assessment sebagai mekanisme penelaahan internal untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Didukung oleh kesadaran organisasi yang kuat akan pentingnya GCG, evaluasi ini memungkinkan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mengadopsi praktik terbaik yang selaras dengan standar internasional. Melalui tindak lanjut yang konsisten atas hasil evaluasi dan penerapan perbaikan yang direkomendasikan, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional.

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan penilaian penerapan GCG melalui 2 (dua) model penilaian, yaitu:

1. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan OJK.
2. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan OJK

Sebagai Perseroan terbuka, Perseroan senantiasa menjalankan seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam penerapan tata kelola, Perseroan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka ("**POJK 21/2015**"), yang diperjelas dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 ("**SEOJK 32/2015**").

Pedoman ini mencakup 5 (lima) aspek utama, 8 (delapan) prinsip, dan 25 rekomendasi yang menjadi dasar dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan. Dengan mengacu pada standar tersebut, Perseroan terus memperkuat praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kepercayaan dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company regularly evaluates the implementation of GCG to ensure its effectiveness and continuously enhance governance quality, including through self-assessment as an internal review mechanism to identify areas for improvement. Supported by a strong organisational awareness of the importance of GCG, these evaluations enable the Company to ensure regulatory compliance while adopting best practices aligned with international standards. Through consistent follow-up on evaluation results and the implementation of recommended improvements, the Company remains committed to strengthening transparency, accountability, and sustainability across all aspects of its operations.

In 2025, the Company has carried out GCG assessment through 2 (two) assessment models, as follows:

1. GCG Assessment Based on OJK.
2. GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters.

GCG Assessment Based on OJK

As a publicly listed company, the Company adheres to all regulations set by the OJK and continuously strives for improvements to create added value for shareholders and other stakeholders. In its governance practices, the Company follows the guidelines outlined in OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015, dated November 16, 2015, on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies ("**OJK Regulation 21/2015**"), further elaborated in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, dated November 17, 2015 ("**OJK Circular Letter 32/2015**").

These guidelines encompass 5 (five) key aspects, 8 (eight) principles, and 25 recommendations that serve as the foundation for implementing GCG principles within the Company. By adhering to these standards, the Company continuously strengthens transparent, accountable, and sustainable governance practices, ensuring regulatory compliance while enhancing trust and long-term value for all stakeholders.

**Pemenuhan Rekomendasi Pedoman TataKelola
Perusahaan Terbuka**

**Fulfillment of Public Company Governance
Guidelines Recommendations**

Rekomendasi Recommendation		Keterangan Description
A. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS		
Prinsip 1 Principle 1 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention		
1.1	Perseroan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public company has technical procedures for opened or closed voting that promote independency and shareholders' interests.	Terpenuhi Comply
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All Members of the Directors and Board of Commissioners are present at Annual GMS.	Terpenuhi Comply
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perseroan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS Minutes is available on public company's Website by no less than 1 (one) year.	Terpenuhi Comply
Prinsip 2 Principle 2 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors		
2.1	Perseroan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau Investor. Public company has a communication policy with shareholders or investors.	Terpenuhi Comply
2.2	Perseroan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public company discloses its communication policy with shareholders or investors in Website.	Terpenuhi Comply
B. FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS THE FUNCTIONS AND ROLES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS		
Prinsip 3 Principle 3 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka. Determination of number of Board of Commissioners' members shall consider the conditions of Public Company.	Terpenuhi Comply
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Composition of Board of Commissioners' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
Prinsip 4 Principle 4 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Commissioners		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has self assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners.	Terpenuhi Comply
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkap melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka. Self Assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners is disclosed in Annual Report of Public Company.	Terpenuhi Comply
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of the member of the Board of Commissioners if such member is involved in financial crime.	Terpenuhi Comply

Rekomendasi Recommendation		Keterangan Description
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or Committee that conduct the Nomination and Remuneration functions arrange succession policy in nomination process of members of Board of Directors.	Terpenuhi Comply
C. FUNGSI DAN PERAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' FUNCTIONS AND ROLES		
5.	Prinsip 5 Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of number of Board of Directors' members considers the condition of public company and the effectiveness of decision-making.	Terpenuhi Comply
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Board of Directors' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of Board of Directors who is liable for accounting or finance has accounting expertise and/ or knowledge.	Terpenuhi Comply
6.	Prinsip 6 Principle 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has self assessment policy to assess performance of Directors.	Terpenuhi Comply
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkap melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in Annual Report of public company.	Terpenuhi Comply
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Directors has a policy related to resignation of Board of Directors' members involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
D. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS		
7.	Prinsip 7 Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving corporate governance aspect through participation of stakeholders	
7.1	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Public Company has a policy to prevent insider trading.	Terpenuhi Comply
7.2	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Public company has anti corruption and anti fraud policy.	Terpenuhi Comply
7.3	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public company has a policy concerning selection and capability improvement of suppliers and vendors.	Terpenuhi Comply
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. Public company has a policy concerning the fulfillment of creditors' rights.	Terpenuhi Comply
7.5	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan Whistleblowing System. Public company has a policy of Whistleblowing System.	Terpenuhi Comply
7.6	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. Public company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.	Terpenuhi Comply
E. KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE		
8.	Prinsip 8 Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Improving the Implementation of Information Disclosure	

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
8.1	Perseroan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Company takes benefits from application of a broader information technology other than website as information disclosure media.	Terpenuhi Comply
8.2	Laporan Tahunan Perseroan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan dan pengendali. Annual Report of public company discloses beneficial owner in share ownership of public company of at least 5% (five percent), other than disclosure of beneficial owner in share ownership of public company through major controlling shareholders.	Terpenuhi Comply

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard

Perseroan melaksanakan penilaian tata kelola perusahaan berdasarkan standar internasional, termasuk ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Dengan menjadikan ACGS sebagai acuan benchmarking, Perseroan secara sistematis mengevaluasi dan menyempurnakan praktik tata kelola guna memastikan keselarasan dengan standar terbaik di tingkat regional, sekaligus menegaskan komitmen Perseroan dalam memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan.

GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters

The Company conducts corporate governance assessments based on international standards, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), as part of its efforts to enhance governance quality. By using ACGS as a benchmarking tool, the Company systematically evaluates and refines its governance practices to ensure alignment with leading regional standards, reinforcing its commitment to strengthening the implementation of Good Corporate Governance in a consistent and sustainable manner. Baik secara konsisten dan berkelanjutan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola Perseroan disusun berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("**UUPT 40/2007**") tentang Perseroan Terbatas. Struktur ini mencakup organ-organ tata kelola utama dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, guna memastikan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang efektif, akuntabel, dan konsisten di seluruh tingkatan organisasi.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perseroan yang mewakili kepemilikan para pemegang saham. Melalui RUPS, pemegang saham secara kolektif menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan, guna memastikan akuntabilitas serta keselarasan dengan kepentingan pemegang saham.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan arahan strategis kepada Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan, sekaligus melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip GCG. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan strategi bisnis, mengelola risiko secara efektif, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan.

Setiap organ tata kelola menjalankan fungsinya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mekanisme tata kelola yang terstruktur dan jelas, struktur ini memastikan penerapan GCG secara efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.

The Company's governance structure is established in accordance with the principles of Good Corporate Governance and aligned with Law No. 40 of 2007 ("**Law No.40/2007**") on Limited Liability Companies. This structure comprises key governance bodies with clearly defined roles and responsibilities, designed to ensure the effective, accountable, and consistent implementation of corporate governance practices across all levels of the organisation.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the Company's highest governing body, representing the collective ownership of shareholders. Through the GMS, shareholders exercise their fundamental rights in accordance with prevailing regulations. The GMS also functions as a formal forum for the Board of Directors and the Board of Commissioners to account for the management and supervisory performance of the Company, thereby ensuring accountability and alignment with shareholders' interests.

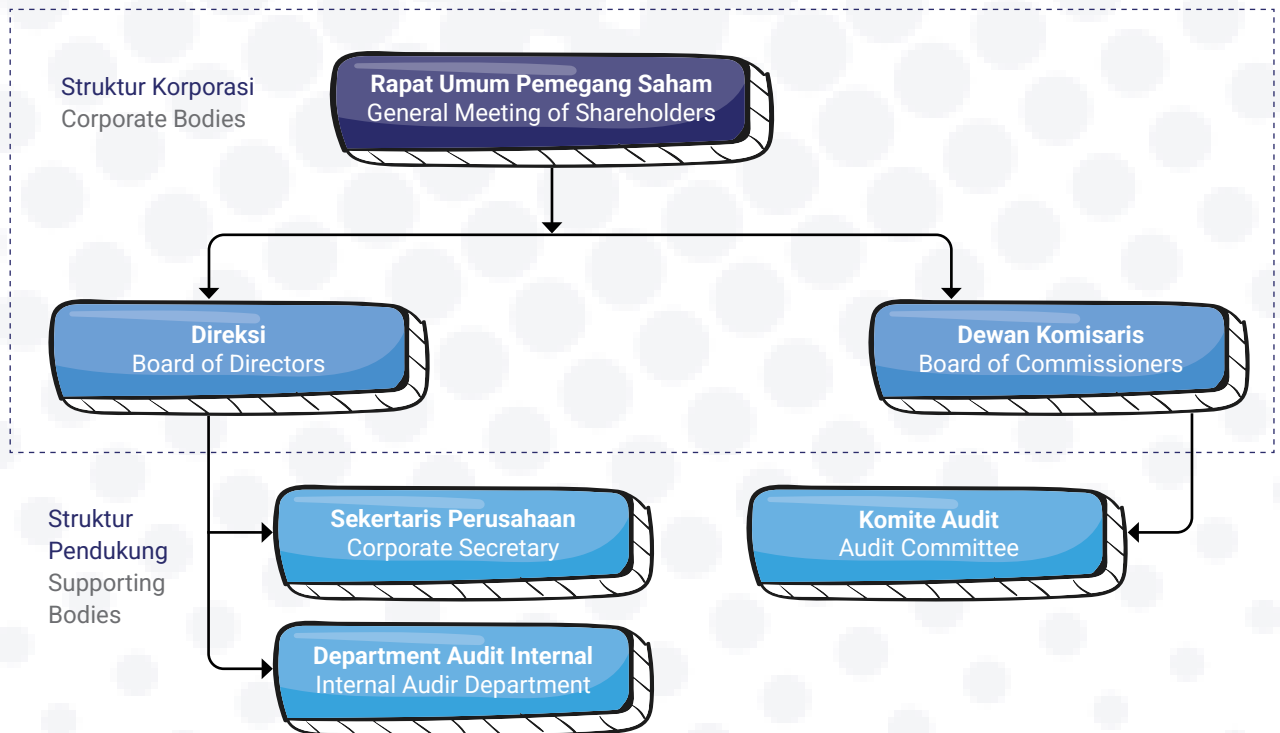
Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out oversight and provides strategic direction to the Board of Directors. In performing its duties, the Board of Commissioners ensures compliance with prevailing regulations and corporate policies, while safeguarding the interests of shareholders and other stakeholders.

Board of Directors

The Board of Directors is responsible for managing the Company's operations in line with the principles of GCG. In carrying out its duties, the Board of Directors is accountable for executing business strategies, managing risks effectively, and ensuring sustainable growth and long-term value creation for the Company.

Each governance body operates in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing regulations. Supported by clearly defined governance mechanisms, this structure ensures the effective, transparent, and sustainable implementation of GCG, in alignment with the long-term interests of all stakeholders.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perseroan yang menjadi sarana utama bagi pemegang saham untuk menjalankan hak-haknya dalam pengambilan keputusan strategis serta penetapan arah jangka panjang Perseroan. Dalam pelaksanaan fungsinya, RUPS diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui RUPS, pemegang saham memperoleh wadah untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan agenda rapat, dengan setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan jangka panjang Perseroan serta prinsip GCG.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan ("**RUPST**") yang diselenggarakan satu kali dalam satu tahun dan RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal tertentu atau bersifat mendesak.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Perseroan mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. UUPT 40/2007.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
4. Anggaran Dasar Perseroan.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Sesuai dengan POJK, pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham Perseroan atau Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

The General Meeting of Shareholders ("**GMS**") is the highest governing body within the Company's corporate governance structure, serving as the primary forum through which shareholders exercise their rights to make strategic decisions and determine the Company's long-term direction. In carrying out its functions, the GMS operates in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, ensuring transparent and accountable governance. Through the GMS, shareholders are provided with a platform to express opinions and obtain relevant information within the scope of the meeting agenda, with all resolutions taken in alignment with the Company's long-term interests and the principles of GCG.

The GMS consists of the Annual GMS ("**AGMS**"), which is held once a year, and the Extraordinary GMS ("**EGMS**"), which may be held at any time to discuss certain matters or urgent matters.

LEGAL BASIS

The legal basis for the GMS implementation of the Company's refers to several regulations as follows:

1. Law No.40/2007.
2. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**").
3. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 16/2020**").
4. The Company's Articles of Association.

RIGHTS AND AUTHORITY OF SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities who legally own shares of the Company. In accordance with OJK Regulation, shareholders individually or jointly representing at least 1/10 of the total shares of the Company or the Board of Commissioners may request the Board of Directors to call and convene an EGMS. The request must be submitted in writing to the Board of Directors of the Company stating the matters to be discussed with the reasons and fulfilling other provisions as required in the Company's Articles of Association.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan;
4. Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hak-hak pemegang saham dalam RUPS

Hak-hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS serta hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS. Formulir surat kuasa tersedia pada situs web Perseroan;
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS dan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi terkait mata acara rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Hak untuk bertanya di setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS;
5. Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
6. Pemegang Saham juga memiliki hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Perseroan, termasuk pembagian dividen.

The authority of shareholders through the GMS includes:

1. Approve amendments to the Company's Articles of Association;
2. Appoint and dismiss members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners;
3. Appointment of a public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information;
4. Other matters duly submitted in the GMS are in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Shareholders Rights in the GMS

The rights of shareholders in the GMS include:

1. The right to attend and vote at the GMS and the right to authorize other parties if shareholders are unable to attend the GMS. The proxy form is available on the Company's website;
2. The right to propose the agenda of the GMS and candidates for members of the Board of Commissioners and Directors by 1 (one) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights;
3. At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information related to the agenda of the meeting in accordance with prevailing laws and regulations;
4. The right to ask questions in every discussion of the agenda and every decision on the GMS agenda;
5. Receive part of the Company's profits intended for shareholders in the form of dividends and other profit distribution in accordance with prevailing laws and regulations.
6. Shareholders also have other rights, in line with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, among others (i) appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Directors, (ii) evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors, (iii) suspend members of the Board of Directors, (iv) approve amendments to the Articles of Association, (v) approve the annual report, (vi) approve the remuneration of the Board of Commissioners, and (vii) approve the proposed allocation of the use of company profits, including dividend distribution.

Hak Pemegang Saham Independen

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 42/POJK 04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Perseroan melakukan transaksi afiliasi yang (i) mengandung benturan kepentingan, (ii) nilainya memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; (iii) dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan dan/atau (iv) berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, secara rinci diatur mengenai hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham

PRAKTIK UNTUK MENDORONG KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS

Praktik untuk mendorong keterlibatan pemegang saham di luar RUPS adalah aspek penting untuk meningkatkan tata kelola Perseroan dan membangun kepercayaan dengan investor. Praktik-praktik ini bertujuan untuk mendorong dialog yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan antara Perseroan dan pemegang saham, memastikan bahwa Pemegang Saham memiliki informasi yang baik dan terlibat aktif dalam Perseroan di luar formalitas RUPST atau RUPSLB. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik yang diadopsi Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1. Pelaporan yang Transparan**
Lebih dari persyaratan pelaporan minimum untuk memberikan penjelasan rinci tentang strategi, risiko, dan peluang Perseroan, antara lain: laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.
- 2. Penggunaan Teknologi**
Memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi kehadiran virtual di rapat, pemungutan suara real-time, dan partisipasi dalam diskusi. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi, terutama di kalangan investor internasional atau nasional yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung.
- 3. Komunikasi antar Pemegang Saham**
Perseroan memberikan kebebasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi satu dengan lainnya maupun dengan Perseroan tanpa adanya batasan apapun.

Rights of Independent Shareholders

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 42/POJK 04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**OJK Regulation 42/2020**"), the Company is required to obtain approval from Independent Shareholders at a General Meeting of Shareholders if the Company carries out an affiliated transaction that (i) contains a conflict of interest, (ii) has a value that meets the threshold for a material transaction requiring GMS approval, (iii) may result in a disruption to the continuity of the Company's business, and/or (iv) based on OJK's consideration requires approval from Independent Shareholders.

In the Company's Articles of Association, details are set forth regarding the rights, authorities, and responsibilities of Shareholders.

PRACTICES TO ENCOURAGE SHAREHOLDER ENGAGEMENT BEYOND GENERAL MEETINGS

Practices to encourage shareholder engagement beyond general meetings is a vital aspect of enhancing corporate governance and building trust with investors. These practices aim to foster a transparent, inclusive, and continuous dialogue between the Company and its shareholders, ensuring the shareholder the latter are well-informed and actively involved in the Company's affairs beyond the formalities of AGMS or EGMS. Here are several strategies and practices that the Company adopts to achieve this goal:

- 1. Transparent Reporting**
Going beyond the minimum reporting requirements to provide detailed explanations of the Company's strategies, risks, and opportunities. This includes annual report, financial statement and sustainability report.
- 2. Use of Technology**
Leveraging technology to facilitate virtual attendance at meetings, real-time voting, and participation in discussions. This can help to increase participation rates, especially among international or retail investors who might not be able to attend in person.
- 3. Communication Among Shareholders**
The Company grants shareholders the freedom to communicate and consult with one another without any restrictions.

PROSEDUR RUPS

Sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk tujuan memaksimalkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS dan melindungi kepentingan mereka, Perseroan mengumumkan RUPS dan mata acara RUPS dalam: (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), (ii) situs web BEI dan (iii) situs web Perseroan (www.ibstower.com). Bahan Rapat dan tata tertib RUPS dapat diunduh oleh pemegang saham melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dinyatakan sah dan berwenang mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan persyaratan kuorum yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu lebih dari 50% dari saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Untuk keputusan tertentu, termasuk penggabungan dan peleburan usaha, RUPS menerapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2026

Untuk pelaksanaan RUPS Tahunan 2026 yang akan diselenggarakan di bulan Juni 2026, Perseroan telah menunjuk Notaris Yulia, S.H., dan PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS SEPANJANG TAHUN 2025

Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPST pada tanggal 23 April 2025 yang dihadiri oleh pemegang saham secara fisik dan elektronik.

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, Perseroan menyediakan fasilitas secara elektronik melalui fasilitas penyedia e-RUPS KSEI *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI"), sehingga Pemegang saham yang hadir secara online tetap mempunyai hak yang sama untuk dapat menyampaikan hak suaranya.

GMS PROCEDURES

As stipulated in OJK Regulation 15/2020 and the Company's Articles of Association, for the purpose of maximizing shareholders' participation in the GMS and protecting their interests, the Company announces the GMS and the GMS agenda through: (i) the e-GMS website provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), (ii) the IDX website, and (iii) the Company's website (www.ibstower.com). The Meeting Materials and the rules of conduct for the GMS may be downloaded by shareholders through the Company's website from the date of the GMS summons until the GMS is held.

A GMS is deemed valid and authorised to adopt binding resolutions when attended by shareholders and/or their proxies representing more than 50% of the Company's total issued shares with voting rights, unless the Articles of Association stipulate a higher quorum. As a general principle, resolutions are reached through deliberation to achieve consensus. In the absence of consensus, decisions are made by a majority vote of more than 50% of the shares with voting rights present at the meeting. For certain matters, including mergers and consolidations, higher quorum and voting thresholds apply in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing regulations.

IMPLEMENTATION OF THE 2026 ANNUAL GMS

For the implementation of the 2026 Annual GMS, which will be held in June 2026, the Company has appointed Notary Yulia, S.H., and PT Raya Saham Registra as independent parties to conduct and validate the vote counting in the GMS.

IMPLEMENTATION OF GMS IN 2025

The Company held 1 (one) GMS, namely the AGMS on April 23, 2025, which was attended by shareholders both physically and electronically.

For shareholders attending electronically, the Company provides electronic facilities through the e-RUPS provider, the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), thereby ensuring that shareholders attending online have the same rights to exercise their voting rights.

Proses Penyelenggaraan RUPST tanggal 23 April 2025

Implementation Process of the AGMS on April 23, 2025

Tanggal dan Waktu Date and Time	Rabu, 23 April 2025 09.18 WIB – 09.35 WIB	Wednesday, April 23, 2025 09.18 AM – 09.35 AM
Lokasi Location	Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310.	
Kuorum Quorum	RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.350.591.593 saham atau 99,977% dari 1.350.904.927 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	The Company's AGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing 1,350,591,593 shares or 99.977% of 1,350,904,927 shares constituting all shares issued by the Company.
Pimpinan RUPST AGMS Chairman	RUPST dipimpin oleh Bapak Adam Gifari, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.	AGMS was chaired by Mr. Adam Gifari as President Commissioner of the Company as appointed by the Board of Commissioners.
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of BOC and BOD	RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Bpk. Adam Gifari Komisaris Independen: Bpk. Rinaldy Santosa Komisaris: Bpk. Haryo Dewanto Direksi: Direktur Utama: Bpk. Ramadhan Kurnia Nusa Direktur: Bpk. Doni Wilaga Kusuma Direktur: Ibu Catherine Sembiring Pelawi Direktur: Ibu Suciratin	The Company's AGMS was attended by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely Board of Commissioners: President Commissioner: Mr. Adam Gifari Independent Commissioner: Mr. Rinaldy Santosa Commissioner: Mr. Haryo Dewanto Board of Directors: President Director: Mr. Ramadhan Kurnia Nusa Director: Doni Wilaga Kusuma Director: Mrs. Catherine Sembiring Pelawi Director: Ms. Suciratin
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Opportunity to Ask Questions and/or Opinions	Dalam pelaksanaan RUPST, Perseroan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan mata acara Rapat untuk selanjutnya dijawab atau ditanggapi oleh Perseroan. Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan kepada Perseroan dalam Rapat yang dilaksanakan secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI. Selanjutnya proses tanya jawab ini dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan.	In the AGMS' execution, the Company provides an opportunity for Shareholders and the proxies/representatives of Shareholders present to submit questions related to the agenda items of the Meeting, which will then be answered or addressed by the Company. Shareholders and the proxies/representatives of Shareholders who wish to ask questions to the Company in the AGM conducted electronically are able to do through the eASY.KSEI application. Subsequently, this question-and-answer process is recorded and included in the Minutes of the AGM prepared by a Notary appointed by the Company.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	The shareholders and proxies of the shareholders have been given a chance to raise questions and/or give opinions for each of the Meeting agendas, however there is no shareholders and proxies of the shareholders raised question and/or opinion.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Decision-making mechanism during the Meeting	Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.	Decision-making on agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that consensus is not achieved, decisions are made through voting.
Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan Rapat Independent parties to carry out quorum calculations and Meetings' resolution votes	Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk Notaris Yulia, S.H., dan PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara dalam Rapat.	To maintain independence, the Company has appointed Notary Yulia, S.H., and PT Raya Saham Registra as independent parties to conduct and validate the vote count at the Meeting.
Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Voting Process and Vote Counting	Proses pemungutan suara RUPST Perseroan secara elektronik menggunakan eASY.KSEI. eASY KSEI adalah sistem atau sarana elektronik yang disediakan oleh KSEI yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham.	The voting process at the Company's AGMS was conducted electronically using eASY.KSEI. eASY KSEI is a system or electronic facility provided by KSEI that is used to support the provision of information, the implementation and reporting of the GMS, as well as the exercise of voting rights at the GMS by shareholders.

	Pemungutan suara dalam RUPST Perseroan diambil dari: • suara elektronik dari <i>e-voting</i> pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI; • suara elektronik dari pemberi kuasa <i>e-proxy</i> pada aplikasi eASY.KSEI; • suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan; • suara dari kuasa pemegang saham selain <i>e-proxy</i> yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan; Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: • pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain <i>e-proxy</i> yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas Perseroan akan membagikan lembar formulir untuk diisi. • pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain <i>e-proxy</i> yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju. • pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain. pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilaksanakan selama 30 detik (<i>voting time</i>). Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan (atau kuasa pemegang saham selain <i>e-proxy</i>) hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya. Pengungkapan prosedur <i>e-voting</i> dilakukan di tempat RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPST pada tanggal 25 Maret 2025. Tata tertib pelaksanaan RUPST yang mencakup prosedur pemungutan dan perhitungan suara juga telah disampaikan kepada pemegang saham sebelum RUPST dimulai atau dibuka.	Voting at the Company's AGMS is derived from: • electronic votes from <i>e-voting</i> on the eASY.KSEI application, submitted by shareholders attending electronically and registered on the eASY.KSEI application; • electronic votes from <i>e-proxy</i> grantors on the eASY.KSEI application; • votes from shareholders attending the Meeting venue, submitted at the time of voting for the relevant agenda item; • votes from shareholder proxies other than <i>e-proxy</i> who are present in the Meeting room, submitted at the time of voting for the relevant agenda item; Voting was conducted in accordance with the following procedures: • shareholders or shareholder proxies other than <i>e-proxy</i> who cast dissenting votes will be asked to raise their hands, and the Company's officers will distribute form sheets to be completed. • shareholders or shareholder proxies other than <i>e-proxy</i> who do not raise their hands or who leave the Meeting room at the time of voting shall be deemed to have cast approving votes. • shareholders attending electronically and registered on the eASY.KSEI application shall cast and submit their votes for each Meeting agenda item, whether approving, dissenting, or abstaining (blank vote), through the eASY.KSEI application, and if they do not cast or submit their vote, the eASY.KSEI application shall deem such vote as abstaining. Direct electronic voting through the eASY.KSEI application, for each Meeting agenda item, will be conducted for 30 seconds (<i>voting time</i>). Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder or his/her lawful proxy owns or represents more than 1 (one) share, then such person (or shareholder proxy other than <i>e-proxy</i>) may only cast 1 (one) vote and shall be deemed to represent the shares owned or represented by him/her. The disclosure of the <i>e-voting</i> procedures at the AGMS venue has been fully set out in the Rules of Conduct of the AGMS, which were announced/uploaded on the Company's website simultaneously with the Notice of the AGMS on March 25, 2025. The rules of conduct for the AGMS, including the voting and vote-counting procedures, were also conveyed to shareholders before the AGMS commenced or was opened.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST tanggal 23 April 2025

Stages of AGMS held on April 23, 2025

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date of Activity	Keterangan Description
Pemberitahuan Mata Acara RUPS Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS Agenda Notification The Company must first submit a notification of the agenda of the GMS to the Financial Services Authority no later than 5 (five) working days prior to the GMS announcement, without taking into account the announcement date of the GMS	3 Maret 2025 March 3, 2025	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan kepada OJK pada 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman Rapat. Notification of the agenda of the Meeting to the OJK was carried out 5 (five) working days before the announcement of the Meeting, without taking into account to the date of Announcement of the Meeting.
Pengumuman RUPS Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. GMS Announcement The GMS announcement shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS invitations without taking into account the announcement date and the date of invitation	10 Maret 2025 March 10, 2025	Pengumuman telah disampaikan ke OJK, BEI, dan Situs web penyedia fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) serta dipublikasikan di situs web Perseroan pada 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris The announcement has been submitted to the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and the Website of Electronic General Meeting System facility provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) and published on the Company's website on 14 (fourteen) days prior to the Invitation in Indonesian and English
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Recording Date of Shareholders List Entitled to Attend the Meeting	24 Maret 2025 March 24, 2025	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPST. At 1 (one) working day before the AGMS Invitation.
Pemanggilan RUPS dan informasi penjelasan mata acara RUPS Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS Notice and Explanation of Meeting Agenda The notice of the GMS is issued no later than 21 (twenty-one) days before the date of the GMS, excluding the date of the notice and the date of the GMS itself.	25 Maret 2025 March 25, 2025	Pemanggilan RUPS telah disampaikan ke OJK, BEI, dan Situs web penyedia fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY. KSEI) serta dipublikasikan di situs web Perseroan pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dokumen-dokumen yang disampaikan Perseroan pada saat Pemanggilan RUPST yaitu termasuk bahan mata acara dan penjelasan masing-masing agenda RUPST, tata tertib pelaksanaan RUPST, Laporan Tahunan 2024, Laporan Keuangan tahun buku 2024, dan Formulir Surat Kuasa untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik maupun melalui eASY. KSEI agar memberikan kuasa dan suaranya melalui Biro Administrasi Efek yang telah ditunjuk. The GMS notice has been submitted to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Additionally, it was published on the Company's website 28 (twenty-eight) days before the GMS in both Indonesian and English. The documents provided by the Company in the GMS notice include meeting materials and explanations for each agenda item of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), rules and procedures for the AGMS, the 2024 Annual Report and the 2024 Financial Statements, and a Power of Attorney template for shareholders unable to attend physically or via eASY.KSEI, allowing them to grant authority and vote through the appointed Share Registrar.

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date of Activity	Keterangan Description
Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	23 April 2025 April 23, 2025	RUPST diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK 16/2020 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The meeting was held electronically using the eASY.KSEI Application and took into account OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company also organized AGMS physically. All participants who are physically and electronically present can participate and actively participate in the AGMS.
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Ringkasan Risalah RUPS diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPS. Submission of GMS Minutes Summary Summary of GMS Minutes shall be announced to the public no later than 2 (two) working days after the date of the GMS.	24 April 2025 April 24, 2025	Ringkasan Risalah RUPST telah disampaikan ke OJK, BEI, dan Situs web penyedia fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) serta dipublikasikan di situs web Perseroan pada 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPST. Summary of AGMS Minutes has been submitted to the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and Electronic General Meeting System facility provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) and published on the Company's website on 1 (one) working day after the AGMS.
Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPS Risalah/Berita Acara RUPS disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS. Submission of GMS Minutes/Deeds Minutes of GMS shall be submitted no later than 30 (thirty) days after the GMS date.	22 Mei 2025 May 22, 2025	Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPST kepada OJK pada 29 hari setelah penyelenggaraan RUPST melalui surat Perseroan No. 033/IBST-CSY/V/2025 tanggal 22 Mei 2025. Submission of GMS Minutes to OJK on 29 days after the GMS through Company Letter No. 033/IBST-CSY/V/2025 dated May 22, 2025.

Keputusan RUPST tanggal 23 April 2025

Resolutions of the 2025 AGMS dated 23 April 2025

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan dan Pengesahan atas: (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (<i>acquit et decharge</i>). Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2024 (<i>acquit et de charge</i>).
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda				
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.350.591.593 saham/shares	Tidak ada None	Tidak ada None	1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama The Resolution of the First Meeting Agenda	Menyetujui dan mengesahkan (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (<i>acquitt et de charge</i>). Approved and ratified (i) the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, including the Company's activities report and the Board of Commissioners supervisory report for the fiscal year ended December 31, 2024, and (ii) the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as granting full acquittal and discharge of the Board of Commissioners and Board of Directors from any liabilities for their supervisory and management actions performed during the fiscal year ended December 31, 2024 (<i>acquitt et de charge</i>).			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2024;			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.350.591.593 saham/shares	Tidak ada None	Tidak ada None	1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua The Resolution of the Second Meeting Agenda	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan untuk tahun buku 2024. Approved not to distribute dividends or allocate reserve funds for the fiscal year 2024.			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025 and tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative 1.350.591.593 saham/shares	Tidak Setuju Negative Tidak ada None	Abstain Abstain Tidak ada None	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain) 1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga The Resolution of the Third Meeting Agenda	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Iforte Solusi Infotek untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Approved to grant authority and power to the controlling shareholder of the Company, PT Iforte Solusi Infotek, to determine the salaries and allowances for the members of the Board of Directors and the salaries or honorariums and allowances for the members of the Board of the Commissioners of the Company for the fiscal year 2025, as well as performance bonuses for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2024, taking into account the recommendations from the Company's Board of Commissioners, which also carries out the functions of Nomination and Remuneration.			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative 1.350.591.593 saham/shares	Tidak Setuju Negative Tidak ada None	Abstain Abstain Tidak ada None	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain) 1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat
The Resolution of the Fourth Meeting
Agenda

1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Appointed Riani and Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, each registered with the OJK as a Public Accountant and Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025, or appoint another Public Accountant from the same Public Accounting Firm in the event that the aforementioned is permanently unable to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:
 - a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan
determined the amount of honorarium and other terms related to the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as mentioned in item 1 above, while considering the recommendations of the Company's Audit Committee; and
 - b) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
appointed a replacement for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including determining the amount of honorarium and other terms) while considering the input and recommendations of the Company's Audit Committee, in the event that for any reason: (i) the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as mentioned in item 1 cannot be made; or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as mentioned in item 1 cannot carry out or complete the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025; with the following criteria and limitations:
 - a. mempunyai reputasi internasional;
have an international reputation;
 - b. terdaftar pada OJK; dan
registered on the OJK; and
 - c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
fulfill other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's Board of Commissioners, by taking into account suggestion and consideration from the Audit Committee of the Company.

Realisasi
Realization

Telah direalisasikan.
Has been realized.

KEPUTUSAN & REALISASI RUPS SEPANJANG TAHUN 2024

Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu, 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB yang keduanya diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2024 dan 1 (satu) kali RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2024.

Seluruh keputusan RUPS sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan dan penjelasan atas setiap mata acara adalah sebagai berikut:

GMS RESOLUTIONS & REALIZATION THROUGHOUT 2024

The Company held 3 (three) GMS, namely, 1 (one) AGMS and 1 (one) EGMS, both of which were held on May 31, 2024, and 1 (one) EGMS which was held on August 15, 2024.

All GMS resolutions throughout 2024 have been implemented, and the explanation for each agenda item is as follows:

Keputusan & Realisasi RUPST tanggal 31 Mei 2024

Resolution & Realization of the AGMS dated May 31, 2024

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda												
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Approval on the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023 including ratification of the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2023.											
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).											
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	<table><tr><th>Setuju Affirmative</th><th>Tidak Setuju Negative</th><th>Abstain Abstain</th><th>Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)</th></tr><tr><td>1.350.565.521 saham/shares</td><td>Tidak ada None</td><td>500 saham/ shares</td><td>1.350.566.021 saham/shares</td></tr></table>	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)	1.350.565.521 saham/shares	Tidak ada None	500 saham/ shares	1.350.566.021 saham/shares			
Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)									
1.350.565.521 saham/shares	Tidak ada None	500 saham/ shares	1.350.566.021 saham/shares									
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama The Resolution of the First Meeting Agenda	1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan Approved the Annual Report, including Report of the Board of Directors, and Report of Supervisory of the Board of Commissioner for the financial year ended 2023 (two thousand and twenty three); and 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00243/2.1030/AU.1/06/0501- 1/1/III/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit-et-de-charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ratified the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 (thirty one) December 2023 (two thousand and twenty three) which has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as mentioned in its report Number 00243/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/III/2024 dated 27 (twenty seven) March 2024 (two thousand and twenty four) with unqualified opinion, and thereby granting release and discharge (<i>acquit-et-de-charge</i>) to the members of the Board of Directors of the Company for their managerial acts and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory acts over the financial year of 2023 (two thousand and twenty three) to the extent that their actions are reflected in the Financial Statements of the Company for financial year ended 31 (thirty one) December 2023 (two thousand and twenty three) provided that those actions do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations.											
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.											

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Determination on the use of net income of the Company for the financial year ended 31 December 2023.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.350.565.521 saham/shares	Tidak ada None	500 saham/shares	1.350.566.021 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua The Resolution of the Second Meeting Agenda	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: Determined the use of net income of the Company for the financial year 2023 (two thousand and twenty three), as follows: - Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan; dan Amounted to Rp1,000,000,000 (one billion Rupiahs) shall be designated as reserve to comply with the provision of article 70 of the Company Law, that will be used in accordance with article 28 of the Company's Articles of Association; and - Sisanya, akan menambah saldo laba/<i>retained earning</i>, terutama untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan aset tetap. The remaining balance will add to the retained earnings, mainly for business expansion and investment in fiber optic network and fixed assets.			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's accounts for the financial year ended 31 December 2024.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.350.565.521 saham/shares	Tidak ada None	500 saham/shares	1.350.566.021 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga The Resolution of the Third Meeting Agenda	Menyetujui atas pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: Approval to grant the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to: - Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). Appointed the Public Accountant / Public Accounting Firm to conduct audit of the Company's accounts for the financial year ended 31 (thirty one) December 2024 (two thousand and twenty four). - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. Determined the honorarium and any other requirements of such appointment. - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau POJK. Appointed a substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with professional standards of public accountant and applicable laws, including regulations on capital market and/or OJK regulations.			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024. Determination on salary / honorarium and allowances for the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for year 2024.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.350.565.521 saham/shares	Tidak ada None	500 saham/shares	1.350.566.021 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat The Resolution of the Fourth Meeting Agenda	Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/ honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Approved delegation of authority to the Board of Commissioners to determine salaries/ honorarium and allowances of the member of Board of Commissioners and the member of Board of Directors for year 2024 (two thousand and twenty four).			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Keputusan & Realisasi RUPSLB tanggal 31 Mei 2024

Resolution & Realization of the EGMS dated May 31, 2024

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Approval for the Company to transfer or pledge its assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) fiscal year, in a single transaction or a series of related or unrelated transactions.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.350.565.636 saham/shares	Tidak ada None	Tidak ada None	1.350.565.636 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama The Resolution of the First Meeting Agenda	A.1 Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; Approved the Company to transfer or pledge its assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) fiscal year, in a single transaction or a series, of related or unrelated transactions; 2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan Granted the full authority to the Board of Directors of the Company, in relation to the above resolutions, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to, transfer agreements and other relevant documents such as power of attorney, statement letter, documents as may be required to transfer assets based on certain requirements and provisions as deemed necessary and proper by the Board of Directors of the Company, without any exception; and			

	3. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian. Confirmed and ratified all actions made by the Board of Directors of the Company in relation to the implementation of the above resolutions, without any exception.
	B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara pertama RUPSLB dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. Granted the full authority to the Board of Directors of the Company collectively and individually, to state the resolutions of this first agenda of the EGMS in a Notary deed. For come before where necessary, to provide information and report, to made or require to made and to sign all letters or deed as may be deemed necessary and then do all actions as may be deemed necessary and useful to carry out the foregoing, without any exceptions.
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.

Keputusan & Realisasi RUPSLB tanggal 15 Agustus 2024

Resolution & Realization of the EGMS dated August 15, 2024

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative 1.224.801.495 saham/shares	Tidak Setuju Negative Tidak ada None	Abstain Abstain Tidak ada None	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain) 1.224.801.495 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama The Resolution of the First Meeting Agenda	1. Menerima pengunduran diri nyonya FARIDA BAU, sebagai Komisaris Utama, tuan KANAKA PURADIREDDJA, sebagai Komisaris Independen, tuan MOHAMAD HASSAN, sebagai Komisaris Independen, tuan ANDRIE TJIOE, sebagai Direktur Utama dan tuan HANDRA KARNADI, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB. Accepted the resignation of Mrs. FARIDA BAU, as President Commissioner, Mr. KANAKA PURADIREDDJA, as Independent Commissioner, Mr. MOHAMAD HASSAN, as Independent Commissioner, Mr. ANDRIE TJIOE, as President Director and Mr. HANDRA KARNADI as Director of the Company, effective from the closing of the EGMS. 2. Mengangkat: Appointed: a. Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi, sebagai Komisaris Utama Perseroan; Mr. ADAM GIFARI, Bachelor of Economics, as President Commissioner of the Company; b. Tuan HARYO DEWANTO, sebagai Komisaris Perseroan; Mr. HARYO DEWANTO as Commissioner of the Company; c. Tuan RINALDY SANTOSA, sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mr. RINALDY SANTOSA as Independent Commissioner of the Company; d. Tuan RAMADHAN KURNIA NUSA, sebagai Direktur Utama Perseroan; Mr. RAMADHAN KURNIA NUSA as President Director of the Company; e. Tuan DONI WILAGA KUSUMA, sebagai Direktur Perseroan; Mr. DONI WILAGA KUSUMA as Director of the Company; f. Nyonya CATHERINE SEMBIRING PELAWI, sebagai Direktur Perseroan; Mrs. CATHERINE SEMBIRING PELAWI as Director of the Company; g. Nona SUCIRATIN, sebagai Direktur Perseroan; Ms. SUCIRATIN as Director of the Company;			

terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

effective from the closing of the EGMS until the closing of the fifth GMS after their appointment date, without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan, akan menjadi sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Boards of Commissioners and the Board of Directors of the Company effective from the closing of this EGMS until the closing of the fifth GMS after their appointment date shall be as follows:

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

- Komisaris Utama: Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi
President Commissioner: Mr. ADAM GIFARI, Bachelor of Economics
- Komisaris: Tuan HARYO DEWANTO
Commissioner: Mr. HARYO DEWANTO
- Komisaris Independen: Tuan RINALDY SANTOSA
Independent Commissioner: Mr. RINALDY SANTOSA

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

- Direktur Utama: Tuan RAMADHAN KURNIA NUSA
President Director: Mr. RAMADHAN KURNIA NUSA
- Direktur: Tuan DONI WILAGA KUSUMA
Director: Mr. DONI WILAGA KUSUMA
- Direktur: Nyonya CATHERINE SEMBIRING PELAWI
Director: Mrs. CATHERINE SEMBIRING PELAWI
- Direktur: Nona SUCIRATIN
Director: Ms. SUCIRATIN

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution regarding the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda

Mata Acara Meeting Agenda	Penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Reaffirmation of the composition of the Company's shareholders.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.224.801.495 saham/shares	Tidak ada None	Tidak ada None	1.224.801.495 saham/shares

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua The Resolution of the Second Meeting Agenda	1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, per tanggal 1 (satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut: Approved to reaffirm the composition of the shareholders of the Company, based on the Shareholders' Register issued by the Company's Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, as of 1 (one) July 2024 (two thousand twenty-four), as follows: Dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor milik Perseroan yaitu seluruhnya berjumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham, susunan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut: The composition of the Company's shareholders based on the total number of issued and paid-up shares of the Company, which amounts to 1,350,904,927 (one billion three hundred fifty million nine hundred four thousand nine hundred twenty-seven) shares with a nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah) per share, are as follows:
	a. PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, pemegang saham sebanyak 1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) lembar saham atau sama dengan 90,11% (sembilan puluh koma satu satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan; PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, the shareholder of 1,217,293,423 (one billion two hundred seventeen million two hundred ninety-three thousand four hundred twenty-three) shares or equivalent to 90.11% (ninety point one one percent) of the Company's issued and paid-up capital b. MASYARAKAT, pemegang saham sebanyak 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) lembar saham atau sama dengan 9,89% (sembilan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. PUBLIC, the shareholder of 133,611,504 (one hundred thirtythree million six hundred eleven thousand five hundred four) shares or equivalent to 9.89% (nine point eight nine percent) of the Company's issued and paid-up capital.
	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan pemegang saham tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution regarding the composition of the shareholders in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda

Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan. Approval of the change of domicile of the Company			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.224.801.495 saham/shares	Tidak ada None	Tidak ada None	1.224.801.495 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga The Resolution of the Third Meeting Agendaw	1. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kabupaten Kudus. Approved and changed the domicile of the Company to be located in Kudus Regency. 2. Menyetujui dan mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: Approved and amended Article 1, paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to be written and read as follows:			

	Pasal 1 ayat 1: Article 1 paragraph 1: Perseroan terbatas ini bernama "PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kudus. This limited liability company shall bear the name "PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk." (hereinafter referred to as the "Company"), having its seat in Kudus Regency. 3. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi: Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347. To approve and change the address of the Company's head office to: Jalan Tanjung Karang number 11, RT 004 RW 003, Desa Jati Kulon, Jati District, Kudus Regency, Central Java Province, Postal Code 59347. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai tempat kedudukan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution regarding the Company's domicile in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda				
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan. Approval of amendments to the articles of association of the Company.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Affirmative	Tidak Setuju Negative	Abstain Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.224.801.495 saham/shares	Tidak ada None	Tidak ada None	1.224.801.495 saham/shares
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat The Resolution of the Fourth Meeting Agenda	1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 5 tentang Saham; Pasal 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 18 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS; Pasal 20 tentang Direksi; Pasal 21 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; Pasal 23 tentang Dewan Komisaris; Pasal 26 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; serta mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI. Approved the amendments to the Company's Articles of Association, namely Article 5 on Shares; Article 9 on the General Meeting of Shareholders; Article 18 on Resolutions, Quorum for Attendance, and Quorum for Resolutions at GMS; Article 20 on the Board of Directors; Article 21 on the Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors; Article 23 on the Board of Commissioners; Article 26 on the Business Plan, Fiscal Year and Annual Report; as well as to amend and restate the entire provisions of the Company's Articles of Association, in accordance with the key points of amendments to the Articles of Association that have been uploaded on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI facility provider's website.			

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan baik sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan-keputusan RUPSLB dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, BEI, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors individually or jointly with right of substitution to take any and all necessary actions as needed in connection with the resolution, including but not limited to state the resolution in deeds made before a Notary, to amend and/or restructure the entire provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the resolutions (including but not limited to drafting the wording of the Articles of Association if necessary) as required by and in accordance with applicable laws and regulations, and subsequently to apply for approval and/or submit notifications regarding the resolutions of the EGMS and/or amendments to the Articles of Association in the resolutions of the EGMS to the relevant authorities, including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, and to take all necessary actions to fully implement the resolutions of the EGMS in accordance with applicable laws and regulations, without exception.

Realisasi
Realization

Telah direalisasikan.
Has been realized.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan serta memberikan arahan strategis kepada Direksi. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi, kebijakan, dan keputusan yang dilaksanakan oleh Direksi selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Kode Etik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten di seluruh jenjang organisasi.

DASAR HUKUM

Dasar pengangkatan Dewan Komisaris:

1. UUPT 40/2007.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah tetap sama sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Adam Gifari	Komisaris Utama President Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029
Haryo Dewanto	Komisaris Commissioners	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029
Rinaldy Santosa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan dimulai sejak tanggal pengangkatan dalam RUPS dan berakhir pada RUPS kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui RUPS.

Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diputuskan melalui RUPS dengan mengacu pada UUPT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK 33/2014, serta Anggaran Dasar Perseroan.

The Board of Commissioners is the organ responsible for supervising the management of the Company and providing strategic direction to the Board of Directors. In carrying out its role, the Board of Commissioners ensures that strategies, policies, and decisions implemented by the Board of Directors are aligned with the Company's Articles of Association, Code of Conduct, and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners also plays a key role in overseeing the consistent implementation of Good Corporate Governance principles across all levels of the organisation.

LEGAL BASIS

Basis of appointment of the Board of Commissioners:

1. Law No.40/2007.
2. The Company's Articles of Association.
3. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("OJK Regulation 33/2014").

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2025, no changes occurred to the composition of the Company's Board of Commissioners. As such, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, remains unchanged as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The term of office begins from the date of appointment at the GMS and ends at the fifth GMS thereafter, without prejudice to the GMS's authority to dismiss members at any time. Members whose term of office has expired may be reappointed by the GMS.

The resignation of a member of the Board of Commissioners is resolved through the GMS with reference to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, OJK Regulation 33/2014, and the Company's Articles of Association.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:

1. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
2. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan Perseroan.
4. Dipidana karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.
5. Merangkap jabatan yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Meninggal dunia.
7. Mengundurkan diri.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan melalui RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentian, setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada POJK 33/2014 dan Piagam Dewan Komisaris. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap lebih dari lima rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris pada emiten atau perusahaan publik lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan/institusi/organisasi lain selama tahun 2025 disajikan dalam Bab Profil Perusahaan pada bagian profil Dewan Komisaris.

Members of the Board of Commissioners may be dismissed before the end of their term if they:

1. Fail to perform their duties and responsibilities properly.
2. Do not comply with prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association.
3. Engage in actions that cause losses to or harm the Company.
4. Are convicted of a criminal offense related to their supervisory duties.
5. Hold prohibited concurrent positions under applicable regulations.
6. Pass away.
7. Resign.

Early dismissal of a member of the Board of Commissioners must be resolved by the GMS by stating the reason for dismissal, after providing the concerned member with the opportunity to present a defence in accordance with applicable regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS

The provisions regarding multiple positions held by members of the Board of Commissioners refer to OJK Regulation 33/2014 and the Board of Commissioners Charter. Accordingly, members of the Board of Commissioners may concurrently serve as:

1. members of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
2. members of the Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies.

In the event that a member of the Board of Commissioners does not concurrently serve as a member of the Board of Directors, the relevant member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies.

As of the date of this Annual Report, all members of the Company's Board of Commissioners have complied with the applicable provisions, and there are no members of the Board of Commissioners who hold more than five concurrent positions, either as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners in other issuers or public companies. Further information regarding the concurrent positions held by members of the Board of Commissioners in other companies/institutions/organizations during 2025 is presented in the Company Profile Chapter under the profile of the Board of Commissioners.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Kriteria pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan POJK 33/2014, yaitu:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau Laporan keuangan kepada OJK.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

Selanjutnya, Dewan Komisaris akan memeriksa usulan kandidat sesuai dengan kriteria pengangkatan Dewan Komisaris yang telah ditetapkan. Setelah pemeriksaan selesai, usulan kandidat anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria, akan diusulkan untuk disetujui dan diangkat dalam RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT CRITERIA

The Board of Commissioners appointment criteria is set forth under OJK Regulation 33/2014 as follows:

1. having good moral and integrity as well as legal capacity to take any legal action;
2. within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
 - a. has never been declared bankrupt;
 - b. has never been performed as former member of the Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
 - c. has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and
 - d. has never been performed as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship:
 - i. has never been convened an Annual General Meeting of Shareholders,
 - ii. his/her accountability, management and supervisory report rejected by the GMS or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
 - iii. caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/ or financial reports to the Financial Service Authority;
3. has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
4. has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.

NOMINATION AND APPOINTMENT PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Company's Articles of Association, one (1) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights may submit a candidate proposal for the Board of Commissioners to the Board of Commissioners, which carries out the nomination and remuneration function.

Furthermore, the Board of Commissioners will review the proposed candidates in accordance with the established criteria for the appointment of members of the Board of Commissioners. After the review is completed, the proposed candidates for members of the Board of Commissioners who meet the criteria will be proposed for approval and appointment at the GMS.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Piagam tersebut mengatur tugas dan wewenang Dewan Komisaris, ketentuan rapat, nilai-nilai utama, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta larangan-larangan tertentu. Untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Piagam Dewan Komisaris ditinjau dan diperbarui secara berkala. Peninjauan terakhir telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 1 Desember 2023 dan berlaku sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, Piagam Dewan Komisaris dipublikasikan melalui situs web Perseroan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi serta mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya. Sesuai dengan POJK 33/2014, Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut wajib menyatakan kembali independensinya kepada RUPS sebelum dilakukan pengangkatan kembali.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pengelolaan dan kebijakan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dijalankan secara independen guna mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi kepentingan jangka panjang Perseroan dan pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama yang meliputi:

Aspek Operasional

1. Memberikan persetujuan atas misi, visi, dan strategi Perseroan;
2. Meninjau, memberi saran dan persetujuan atas rencana bisnis dan rencana keuangan Perseroan jangka panjang dan jangka pendek;

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners performs its roles and responsibilities in accordance with the Board of Commissioners Charter, which serves as the primary guideline for the execution of its supervisory and advisory functions to the Board of Directors. The Charter sets out the duties and authorities of the Board of Commissioners, meeting provisions, core values, reporting and accountability mechanisms, as well as prohibited actions. To ensure ongoing effectiveness and compliance with prevailing regulations in Indonesia, the Charter is periodically reviewed and updated. The most recent review was approved by the Board of Commissioners on December 1, 2023 and remained effective throughout the reporting year ended December 31, 2024. As part of its commitment to transparency, the Charter is publicly accessible on the Company's website.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently in accordance with the provisions set out in the Board of Commissioners Charter. The Board of Commissioners consistently upholds the principle of independence and places the interests of the Company above any personal or other interests. In line with OJK Regulation 33/2014, Independent Commissioners whose term of office exceeds 2 (two) consecutive periods are required to reaffirm their independence to the GMS prior to any reappointment.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the Company's management and policies, as well as providing advice to the Board of Directors. These supervisory and advisory functions are carried out independently to support sustainable value creation in the long-term interests of the Company and its shareholders, while considering the interests of all stakeholders. In relation to its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the following key duties:

Operational Aspects

1. Approving the Company's mission, vision, and strategy;
2. Reviewing, providing recommendations, and approving the Company's long-term and short-term business and financial plans;

3. Meninjau strategi Perseroan paling tidak setiap tahun;
4. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-undangan, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, dan standar prosedur yang berlaku;
5. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas integritas akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.
6. Menelaah secara berkala struktur modal dan utang Perseroan agar sesuai dengan tujuan strategis dan selera risikonya.

Aspek Tata Kelola Perusahaan

1. melakukan pengawasan terhadap efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan;
2. melakukan pengawasan, mereviu dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perseroan serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengomunikasian Perseroan;
3. atas rekomendasi dari Komite Audit, meninjau dan memastikan setiap transaksi dengan pihak berelasi yang memenuhi batasan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan dengan prinsip arm's length, seperti halnya transaksi dilakukan dengan pihak ketiga lainnya.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

3. Reviewing the Company's strategy at least once a year;
4. Supervising and guiding the implementation of risk management and an appropriate and effective internal control system that aligns with the Company's objectives, targets, and strategy while ensuring compliance with laws and regulations, the Code of Business Ethics and Work Ethics, and applicable standard procedures;
5. Supervising and guiding the integrity of the Company's accounting and financial reporting, as well as the independence of internal and external audit functions.
6. Reviews on an annual basis that the Company's capital and structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite.

Corporate Governance Aspects

1. supervising the effectiveness of corporate governance policies and their implementation, as well as proposing changes if necessary;
2. overseeing, reviewing, and approving the Company's annual report and sustainability report, ensuring their integrity, and monitoring the Company's disclosure and communication processes;
3. review and ensure that each transaction with related parties that meets a certain value threshold, in accordance with applicable laws and regulations, is conducted under fair terms and conditions and follows the arm's length principle, similar to transactions with third parties, based on recommendation of the Audit Committee.

In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities in such supervision, the Board of Commissioners is required to establish and determine the composition of the audit committee and other committees as required by the prevailing laws and regulations and the regulations applicable in the Capital Market, and is also obliged to evaluate the performance of such committees at the end of each financial year of the Company.

The Board of Commissioners is prohibited from engaging in decision-making related to the Company's operational activities, except for matters stipulated in the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations. Any decision made by the Board of Commissioners remains part of its supervisory duties and does not eliminate the Board of Directors' responsibility for the management and execution of the Company's operations.

PEMBAGIAN TUGAS DAN PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara anggota, namun demikian fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada perannya sebagai bagian dari Komite Penunjang Dewan Komisaris sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab terutama:

1. Mengkoordinasikan pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris;
2. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur;
3. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris;
4. Melakukan pemanggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

Kewenangan Dewan Komisaris adalah sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain:

1. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya; dan
2. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Bapak Rinaldy Santosa selaku Komisaris Independen Perseroan merangkap jabatan sebagai ketua Komite Audit Perseroan, sesuai dengan kompetensi dan bidangnya.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam POJK 33/2014 diantaranya:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

DIVISION OF DUTIES AND DELEGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners regulates the division of work among members, however, the focus of the supervisory area of each member of the Board of Commissioners refers to the division of roles as Committee of the Board of Commissioners according to their competence and experience.

In addition to the duties and responsibilities outlined previously, the President Commissioner has the following key duties and responsibilities:

1. Coordinating the supervisory function among members of the Board of Commissioners;
2. Ensuring that the Board of Commissioners fulfills its responsibilities in accordance with established procedures;
3. Submitting the supervisory report for approval at the AGMS regarding the execution of the Board of Commissioners' duties and oversight;
4. Convening and presiding over meetings of the Board of Commissioners or joint meetings with the Board of Directors.

The authority of the Board of Commissioners is as stipulated in the Company's Articles of Association, which includes, among others:

1. Temporarily suspending members of the Board of Directors by providing reasons; and
2. Undertaking management actions for the Company under specific circumstances and within a defined period.

Mr. Rinaldy Santosa, in his capacity as the Company's Independent Commissioner, concurrently serves as Chairman of the Company's Audit Committee, in accordance with his competence and field of expertise.

INDEPENDENT COMMISSIONER

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who meets the requirements as an Independent Commissioner as stipulated in OJK Regulation 33/2014, including:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner.
2. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.
3. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.

4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

4. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders of the Company.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris Independen

Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK 33/2014, sebagai berikut:

Statement of Independence of Members of the Independent Board of Commissioners

The independence statement of each Independent Commissioner is in line with the provisions set forth in Article 25 paragraph (1) of OJK Regulation 33/2014, as follows:

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Pemenuhan Aspek Independensi Fulfillment of Independence Aspects
	Rinaldy Santosa
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Has no affiliation with the Company, other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders of the Company.	✓
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Does not have financial relationships, management relationships, share ownership relationships, family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Company.	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.	✓

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat Dewan Komisaris telah diatur sebagai berikut:

Frekuensi Rapat:

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pemberitahuan Rapat:

Pemberitahuan rapat disampaikan melalui surat elektronik terdaftar atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Pemberitahuan harus diberikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat, tidak termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal pelaksanaan rapat.

Kehadiran Rapat:

Rapat dapat dihadiri secara fisik maupun virtual. Kehadiran virtual difasilitasi melalui telekonferensi, konferensi video, atau platform media elektronik lainnya. Jika seorang anggota tidak dapat hadir, anggota tersebut

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Based on the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners Meetings are stipulated as follows:

Meeting Frequency:

Meetings of the Board of Commissioners are held at least once every 2 (two) months, as stipulated in the Company's Articles of Association.

Meeting Notifications:

Notice of meetings is delivered through registered electronic mail or submitted directly to each member of the Board of Commissioners. The notice must be given no later than 5 (five) days before the meeting, excluding the date of notice and the date of the meeting.

Meeting Attendance:

Meetings can be attended either physically or virtually. Virtual attendance is facilitated through teleconference, video conference, or other electronic media platforms. If a member is unable to attend, they may appoint another

dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai perwakilan dengan memberikan kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

Persyaratan Kuorum:

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, rapat dinyatakan sah dan berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah total anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

Proses Pengambilan Keputusan:

Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diutamakan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jadwal Rapat Tahun 2025:

Dewan Komisaris harus menyusun jadwal rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan) untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan untuk tahun 2025 telah disusun pada akhir tahun 2024.

Selama tahun 2025, Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Adam Gifari	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100
Haryo Dewanto	Komisaris Commissioners	6	6	100
Rinaldy Santosa	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi tahun 2025 telah diagendakan sebelum tahun berjalan yang dituangkan dalam program kerja Dewan Komisaris tahun 2024.

member of the Board of Commissioners as their proxy for the meeting.

Quorum Requirements:

In accordance with the Board of Commissioners Charter, a meeting is considered valid and authorized to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one-half) of the total members of the Board of Commissioners are present or validly represented at the meeting.

Decision-Making Process:

Resolutions in meetings of the Board of Commissioners are primarily adopted through deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total valid votes cast in the Meeting.

Meeting Schedule for 2025:

The Board of Commissioners must prepare the schedule for meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners by inviting the Board of Directors (Joint Meetings) for the following financial year before the end of the current financial year. The schedule for the Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings for 2025 was prepared at the end of 2024.

During 2025, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings attended by members of the Board of Commissioners.

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In accordance with the Company's Articles of Association, Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months.

The Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2025 had been scheduled prior to the current year as set out in the 2024 Board of Commissioners work program.

Pada tahun 2025, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

In 2025, Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 6 (six) times, attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Adam Gifari	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100
Haryo Dewanto	Komisaris Commissioners	6	6	100
Rinaldy Santosa	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris BOC Average Attendance				100
Ramadhan Kurnia Nusa	Direktur Utama President Director	6	6	100
Doni Wilaga Kusuma	Direktur Director	6	6	100
Catherine Sembiring Pelawi	Direktur Director	6	6	100
Suciratin	Direktur Director	6	6	100
Rata-rata Kehadiran Direksi BOD Average Attendance				100
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi BOC and BOD Average Attendance				100

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk memberikan pemahaman mengenai kegiatan usaha, strategi, kerangka tata kelola, serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan, anggota Dewan Komisaris juga dibekali dengan dokumen referensi utama, antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Anggaran Dasar, serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, sehingga Perseroan tidak menyelenggarakan program induksi atau pengenalan bagi Dewan Komisaris pada tahun pelaporan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan sertifikasi, serta program pengembangan

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company organizes an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners to provide an understanding of the business activities, strategy, governance framework, as well as the roles and responsibilities of the Board of Commissioners. To support the effectiveness of the supervisory function, members of the Board of Commissioners are also provided with key reference documents, including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, the Articles of Association, and the Company's Long-Term Plan.

In 2025, there were no appointments of new members of the Board of Commissioners, therefore the Company did not organize an induction or orientation program for the Board of Commissioners during the reporting year.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To support the effective performance of their supervisory and strategic advisory roles, the Company provides opportunities for members of the Board of Commissioners to enhance their competencies through training and certification, as well as other development

lainnya seperti seminar dan lokakarya. Berikut pelaksanaan Program Pelatihan dan Pengembangan bagi Dewan Komisaris selama tahun 2025:

programmes such as seminars and workshops. The following are the Board of Commissioners' Training and Development Program activities in 2025:

No.	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
1.	11-13 Maret 2025 March 11-13, 2025	<i>Certified Risk Governance Professional</i>	GIRMA PT LSP Manajemen Risiko	Jakarta
2.	30 September 2025 September 30, 2025	<i>Sustainability Reporting, Impact and Implementation PSPK 1 and 2 for Professional</i>	Ikatan Akuntan Indonesia	Jakarta
3.	22-24 Oktober 2025 October 22-24, 2025	<i>Certified Audit Committee Practices</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
4.	28 Oktober 2025 October 28, 2025	<i>Certified Audit Committee Practices</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
5.	19 November 2025 November 19, 2025	<i>Financial Due Diligence</i>	Internal	Jakarta
6.	5 Desember 2025 December 5, 2025	<i>Recognition CPA - 10 year with CPA Australia</i>	CPA Australia	Jakarta

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan selama tahun 2025, di antaranya:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Memberikan persetujuan atas anggaran dan rencana kerja tahunan Perseroan.
3. Meneliti dan menelaah laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta tugas Komite Audit, termasuk fungsi pengendalian internal Perseroan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegal Dewan Komisaris. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

The Board of Commissioners has carried out supervisory duties on the Company's operational activities in 2025, including:

1. Conducted supervision and was responsible for supervising the management policies, the course of management in general, both with respect to the Company and the Company's business, and provided advice to the Board of Directors.
2. Approved the Company's annual budget and work plan.
3. Examined and reviewed the annual report and financial statements prepared by the Board of Directors and signed the annual report.
4. Ensured the implementation of Good Corporate Governance, among others by assessing the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the duties of the Audit Committee, including the Company's internal control function, legal compliance, and conflicts of interest.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT POLICY

Performance assessment of the Board of Commissioners is assessed annually by each member of the Board of Commissioners using a *self-assessment* method on their individual and collegial performance. With this *self-assessment*, it is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to continuously improving the performance of the Board of Commissioners.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan pengawasan atas penerapan kepatuhan dan tata Kelola Perseroan yang baik.
3. Tingkat kehadiran Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama dengan Direksi.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kinerja komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses *self-assessment* untuk selanjutnya akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk memberikan masukan dalam penentuan skema kompensasi/insentif bagi Dewan Komisaris dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris akan disampaikan melalui Laporan Dewan Komisaris (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang kemudian akan menjadi salah satu mata acara/agenda yang dibahas dan disetujui dalam RUPST Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite pendukungnya yang bertujuan untuk menilai efektivitas peran setiap komite dalam mendukung fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis, dengan mempertimbangkan kriteria antara lain kehadiran rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi, integritas, pemahaman terhadap visi, misi, dan strategi Perseroan, serta kualitas rekomendasi yang diberikan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pertimbangan perpanjangan masa tugas anggota komite sekaligus sebagai landasan untuk peningkatan tata kelola dan kinerja komite secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, yang menjalankan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan Piagam Komite Audit. Komite Audit berperan dalam mendukung Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aspek laporan keuangan. Tugas ini mencakup pemberian rekomendasi terkait pengangkatan, pergantian, serta evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi

The implementation of performance assessment by each member of the Company's Board of Commissioners is carried out with reference to aspects or assessment criteria, including the following:

1. Implementation of functions, duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Oversight of the implementation of compliance and good corporate governance.
3. Attendance level of Commissioners in the Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors.
4. Oversight of the performance of committee under the Board of Commissioners.

The performance assessment results through the self-assessment process will subsequently serve as a basis for the Company's Board of Commissioners which performs the Nomination and Remuneration function to provide input in determining compensation/ incentive schemes for the Commissioners and as a fundamental consideration for the Company's Shareholders to determine the appointment or nomination of the respective Board members.

The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners will be conveyed through the Board of Commissioners Report (as part of the Annual Report) which will then become one of the agenda items discussed and approved in the Company's AGMS.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING COMMITTEE

The Board of Commissioners conducts an annual performance assessment of its supporting committees aimed at evaluating the effectiveness of each committee's role in supporting the supervisory function and providing strategic direction, by taking into account criteria including meeting attendance, ability to work together and communicate, integrity, understanding of the Company's vision, mission, and strategy, as well as the quality of recommendations provided. The results of the assessment are used as the basis for considering the extension of the term of office of committee members, as well as the foundation for the continuous improvement of governance and committee performance.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, which performs its roles, responsibilities, and authority in accordance with the Audit Committee Charter. The Audit Committee plays a role in supporting the Board of Commissioners in enhancing the effectiveness of supervision over financial reporting aspects. These duties include providing recommendations related to the appointment, replacement, and evaluation of the

audit internal dan eksternal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi menyeluruh atas kinerja Komite Audit dan menyimpulkan bahwa komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Iforte Solusi Infotek untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam menetapkan besaran remunerasi tersebut, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

implementation of the duties and responsibilities of the internal and external audit functions, as well as ensuring compliance with the applicable laws and regulations.

In 2025, the Board of Commissioners conducted a comprehensive evaluation of the performance of the Audit Committee and concluded that the committee had carried out its duties and responsibilities effectively in accordance with the criteria established by the Board of Commissioners.

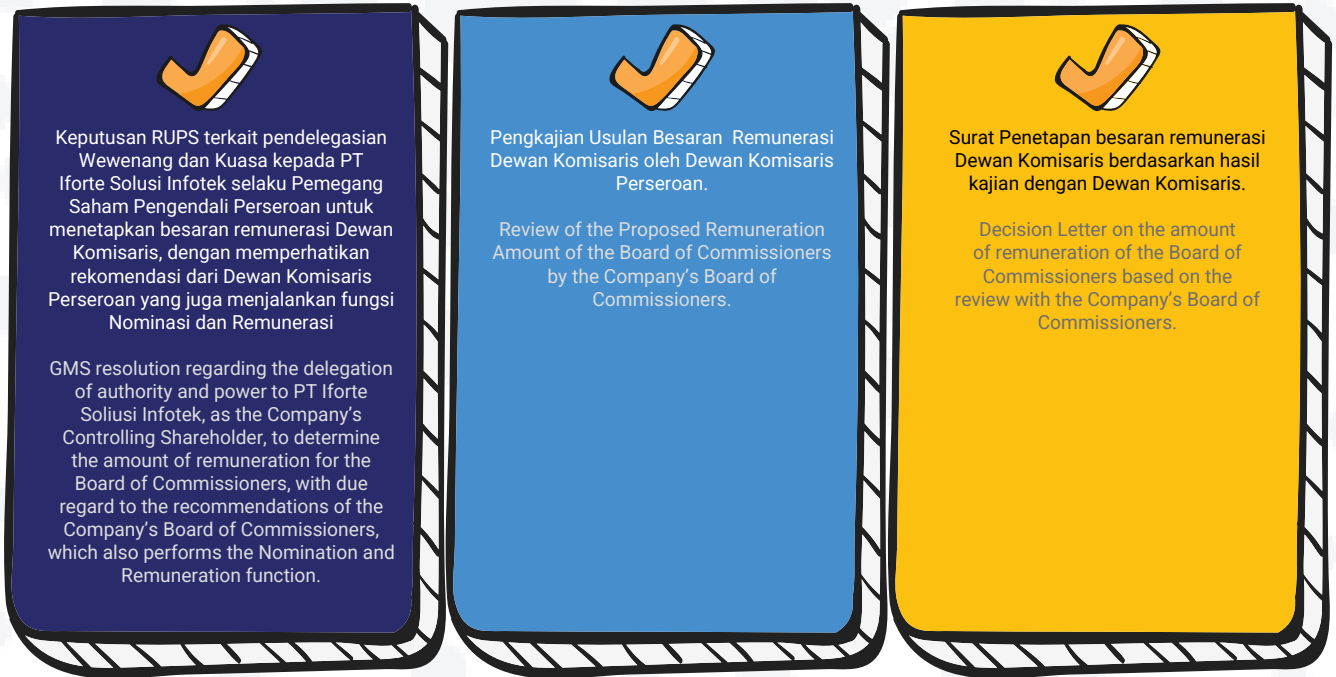
REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Procedure to Determine the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the GMS resolution, the Company's Shareholders approved the granting of authority and power to the controlling shareholder of the Company, namely PT Iforte Solusi Infotek, to determine the salary or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners, with due regard to the recommendations of the Company's Board of Commissioners, which also performs the Nomination and Remuneration function. In determining the amount of such remuneration, the Board of Commissioners takes into consideration several main factors, including the following:

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Directors and Commissioners; and
4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Determination Process



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 adalah sebesar Rp9,5 miliar.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Commissioners for fiscal year 2025 was Rp9.5 billion.

The remuneration structure indicating the Remuneration component for the Board of Commissioners in 2025 is as follows:

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan* Allowance*					Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*		
		Transportasi Transportation	Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain** Other Allowances	Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	Di atas 2 miliar Rupiah Above 2 billion Rupiah
Adam Gifari	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
Haryo Dewanto	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
Rinaldy Santosa	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan) | Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Commissioners, including their other positions in the other entities within the Company Group (as relevant).

**) Tunjangan lain yang diterima oleh Komisaris Independen Perseroan, tidak termasuk opsi saham dan saham kinerja (performance shares) | Other allowances received by the Company's Independent Commissioner do not include stock options, performance shares, and bonuses.

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib untuk memberitahukan kepada OJK apabila terjadi perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan akan saham Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP POLICY

All members of the Board of Commissioners are required to notify the OJK of any change in ownership of the Company's shares, whether directly or indirectly, no later than 3 (three) working days after the change in ownership of the Company's shares occurs.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 4/2024"), Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK 10/2025") dan Pedoman Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan dan Pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham, Perseroan telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya kepada OJK melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya kepemilikan hak suara atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK 33/2014, OJK mengeluarkan POJK 21/2015, dimana POJK 21/2015 lebih lanjut diatur dalam SEOJK 32/2015. POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 tersebut, kebijakan pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan.

Throughout 2025, there were no members of the Board of Commissioners who held shares in the Company, either directly or indirectly.

Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners

In accordance with OJK Regulation No. 4 of 2024 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies and Reports on Pledging Activities of Shares of Public Companies ("OJK Regulation 4/2024"), OJK Circular Letter No. 10 of 2025 concerning the Electronic Submission of Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies and Reports on Pledging Activities of Shares of Public Companies ("OJK Circular Letter 10/2025"), and the Guidelines for Reporting Ownership or Any Changes in Ownership and Reporting Pledging Activities of Shares, the Company has established a policy requiring members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to report any changes in their ownership of the Company's shares to the OJK through the electronic system provided by KSEI as soon as possible, no later than 3 (three) working days from the date of the acquisition of voting rights or any change in the ownership of voting rights over the Company's shares.

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS WHO ARE INVOLVED IN FINANCIAL

Law No.40/2007 and OJK Regulation 33/2014 stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners is having never been convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and OJK Regulation 33/2014, OJK issued OJK Regulation 21/2015, which OJK Regulation 21/2015 further stipulated in OJK Circular Letter 32/2015. OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015 that include recommendations for public companies to establish policies governing the resignation of members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes. Such financial crimes include market manipulation, various forms of fraud in financial services activities, and money laundering offences.

Following the OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015, the Company has prepared the policy of resignation for the members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes was regulated in the charter of the Board of Commissioners.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan mencerminkan keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang profesional dari berbagai sektor industri. Keberagaman kompetensi ini memperkuat efektivitas fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan, sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta pencapaian tujuan strategis Perseroan. Informasi lebih lanjut mengenai keberagaman Dewan Komisaris disajikan dalam Bab Profil Perusahaan pada bagian profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Perseroan memastikan bahwa setiap pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan transaksi afiliasi, benturan kepentingan, dan transaksi material, guna memastikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana transaksi dengan pihak ketiga. Untuk memperkuat penerapan prinsip kewajaran tersebut, pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris juga harus melalui kajian dan persetujuan Komite Audit Perseroan.

The resignation procedure for the members of the Board of Commissioners are as follows:

1. A member of the Board of Commissioners shall resign from their position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 days before the effective date of the resignation;
2. The Company is required to disclose such resignation information to the public and submit it to the OJK.
3. The Company is required to convene a GMS to decide on the resignation of the member of the Board of Commissioners within no later than 90 days after receipt of the resignation letter. The member of the Board of Commissioners who resigns as referred to above may still be held accountable in the GMS for the period from his/her appointment until the date of his/her resignation.
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

The composition of the Company's Board of Commissioners reflects a diverse range of expertise, experience, and professional backgrounds across various industry sectors. This diversity of competencies strengthens the effectiveness of oversight over the Company's management, enabling the Board of Commissioners to perform its role optimally in supporting good corporate governance and the achievement of the Company's strategic objectives. Detailed information on the diversity of the Board of Commissioners is presented in the Company Profile chapter under the profile of each Commissioner.

LOAN POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company ensures that any loan provided to members of the Board of Commissioners is carried out in accordance with prevailing laws and regulations, particularly those relating to affiliated transactions, conflicts of interest, and material transactions, to ensure that such transactions are conducted on an arm's length basis and equivalent to transactions with third parties. To further uphold the arm's length principle, the provision of such loans is subject to review and approval by the Company's Audit Committee.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan guna mencapai tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten di seluruh jenjang organisasi dan bertanggung jawab kepada RUPS sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola.

DASAR HUKUM

Penunjukan Direksi berdasarkan ketentuan:

1. UUPT 40/2007.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK 33/2014.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan anggota Direksi Perseroan. Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Ramadhan Kurnia Nusa	Direktur Utama President Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029
Doni Wilaga Kusuma	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029
Catherine Sembiring Pelawi	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029
Suciratin	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 15 Agustus 2024 First Appointment: EGMS August 15, 2024	2024-2029

MASA JABATAN DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPST yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut. RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut wajib diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan UUPT 40/2007, POJK 33/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan.

The Board of Directors is the corporate element collectively responsible for managing the Company in the best interests of achieving its objectives, in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors ensures the consistent implementation of good corporate governance across all levels of the organisation and is accountable to the GMS as a manifestation of responsibility for the Company's management in line with governance principles.

LEGAL BASIS

Appointment of the Board of Directors refers to:

1. Law No.40/2007.
2. Articles of Association of the Company.
3. OJK Regulation 33/2014.

BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE AND COMPOSITION

In 2025, no changes occurred in the composition of the Company's Board of Directors. As such, the structure of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS TENURE

Referring to the Company's Articles of Association, the term of office of members of the Board of Directors is effective from the date of the GMS that appointed them until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS following the appointment. The GMS has the authority to dismiss one or more members of the Board of Directors at any time prior to the end of their term of office. Members of the Board of Directors whose term has ended may be reappointed by the GMS.

In the event that a member of the Board of Directors resigns, the resignation must be decided by the GMS allowing for the provisions of Law No.40/2007, OJK Regulation 33/2014, and the Company's Articles of Association.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi mengacu pada POJK 33/2014 dan Piagam Direksi. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, seluruh anggota Direksi Perseroan telah mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap lebih dari dua rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris pada emiten atau perusahaan publik lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai rangkap jabatan anggota Direksi pada perusahaan/institusi/organisasi lain selama tahun 2025 disajikan dalam Bab Profil Perusahaan, pada bagian Profil Anggota Direksi.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi berdasarkan kriteria POJK 33/2014 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

The provisions regarding multiple positions held by members of the Board of Directors refer to OJK Regulation 33/2014 and the Board of Directors Charter. Members of the Board of Directors may concurrently serve as:

1. members of the Board of Directors in a maximum of 1 (one) other Issuer or Public Company;
2. members of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other Issuers or Public Companies; and/or
3. members of committees in a maximum of 5 (five) committees in Issuers or Public Companies where the relevant person also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

As of the date of this Annual Report, all members of the Company's Board of Directors have complied with the applicable provisions, and there are no members of the Board of Directors who hold more than two concurrent positions, either as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners in other issuers or public companies. Further information regarding the concurrent positions held by members of the Board of Directors in other companies/institutions/organizations during 2025 is presented in the Company Profile Chapter, under the Profile of Members of the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT CRITERIA

The Company's Board of Directors has fulfilled the following criteria as stipulated by OJK Regulation 33/2014 are as follows:

1. have good morals and integrity as well as capable of doing legal action;
2. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
 - a. has never been declared bankrupt;
 - b. has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners that is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. has never been punished for committing criminal acts that are detrimental to state finances and/ or relating to the financial sector; and
 - d. has never been a member of the Board of Directors and/or any member of the Board of Commissioners during his tenure:
 - i. has never convened an annual GMS;
 - ii. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not granted

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan

- iii. pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau Laporan keuangan kepada OJK.

- 3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN DIREKSI

1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Jika diperlukan, Perseroan dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yang independen untuk terlibat dalam proses pemilihan kandidat anggota Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan memeriksa usulan kandidat sesuai dengan kriteria pengangkatan Direksi yang telah disebutkan di atas. Setelah pemeriksaan selesai, usulan kandidat anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria, akan diusulkan untuk disetujui dan diangkat dalam RUPS Perseroan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara independen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Direksi. Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi serta mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi maupun individu.

PIAGAM DIREKSI

Piagam Direksi merupakan pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus memastikan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan kegiatan usaha Perseroan. Piagam Direksi ditinjau secara berkala agar tetap selaras dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan Perseroan. Piagam ini antara lain mengatur tugas dan wewenang Direksi, ketentuan rapat, nilai-nilai, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta larangan-larangan tertentu. Peninjauan terakhir telah disetujui oleh Direksi pada 1 Desember 2023 dan berlaku sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, Piagam Direksi telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan.

responsibility as a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and

- iii. has never caused a company obtaining permit, approval or registration from the OJK fails to fulfill the obligation to submit the Annual Report and/or Financial Statement to the OJK.

- 3. have a commitment to comply with laws and regulations; and
- 4. have knowledge and/or expertise in the field.

NOMINATION AND APPOINTMENT PROCEDURE FOR THE BOARD OF DIRECTORS

1 (One) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights may submit a proposal for candidates for the Board of Directors to the Board of Commissioners, which carries out the nomination and remuneration functions. If necessary, the Company may engage an independent third party to assist in the selection process of Board of Directors candidates. Subsequently, the Board of Commissioners will review the proposed candidates based on the appointment criteria outlined above. Upon completion of the review, candidates who meet the criteria will be proposed for approval and appointment at the Company's GMS.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors acts independently in line with the Board of Directors Charter. The Board of Directors consistently upholds the principle of independence and places the interests of the Company above any personal or individual interests.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Board of Directors Charter serves as a key reference for the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities, ensuring effective coordination in managing the Company's business activities. The Charter is periodically reviewed to remain aligned with regulatory developments and the Company's evolving needs. It sets out, among others, the duties and authorities of the Board of Directors, meeting provisions, values, reporting and accountability mechanisms, as well as prohibited actions. The most recent review was approved by the Board of Directors on 1 December 2023 and remained effective through the reporting year ended December 31, 2025. As part of the Company's commitment to transparency, the Charter has been published on the Company's website.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar dan Piagam Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan Perseroan.
2. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan.
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya.
4. Menyusun laporan tahunan untuk disetujui oleh RUPS
5. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perseroan.

Wewenang Direksi, antara lain mewakili Perseroan di dalam dan di luar Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi secara rinci telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Piagam Direksi yang telah diunggah pada situs web Perseroan.

Tanggung Jawab Individual dan Bersama Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi, baik secara individu maupun kolektif, bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menunjuk salah satu anggotanya sebagai penanggung jawab atas penerapan dan pemantauan prinsip GCG di Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Untuk memastikan pengelolaan Perseroan yang efektif dan efisien, setiap anggota Direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sebagaimana diatur dalam uraian tugas masing-masing, sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS DUTIES, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors is collegially tasked and responsible in managing the Company. The duties and responsibilities of the Board of Directors are stated in the Articles of Association and Charter of the Board of Directors, including the following:

1. Lead, manage, and control the Company in accordance with the objectives set by the articles of association and the provisions of the prevailing laws and regulations, as well as for the benefit of the Company.
2. Controlling, maintaining and managing the Company's assets.
3. Prepare an annual work plan outlining the Company's annual budget and must be submitted to the Board of Commissioners for approval prior to the beginning of the next fiscal year.
4. Prepare an annual report for approval by the GMS.
5. Apply GCG principles in every activity of the Company.

The authority of the Board of Directors, among others, to represent the Company inside and outside the Company, binds the Company with other parties and carries out all actions both regarding management and ownership with certain limitations as outlined in the Company's Articles of Association.

The Board of Directors duties, responsibilities and authorities are stated in the Company's Articles of Association and the Board of Directors Charter which have been uploaded on the Company's website.

Individual and Joint Responsibility of the Board of Directors

The Board of Directors carries out its duties in good faith and with full responsibility. Each member of the Board of Directors, individually and collectively, is accountable for any losses incurred by the Company arising from violations or negligence in the performance of their duties, in accordance with prevailing laws and regulations. The Board of Directors appoints one of its members to be responsible for the implementation and monitoring of GCG principles within the Company.

Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

To ensure effective and efficient management of the Company, each member of the Board of Directors is assigned specific roles and responsibilities, as set out in their respective job descriptions, as follows:

Ramadhan Kurnia Nusa Direktur Utama President Director	Mengoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen Perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha Perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi dan nilai Perseroan, mengawasi dan menelaah manajemen risiko, sistem pengendalian internal Perseroan, governansi korporasi untuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, memimpin Direksi serta memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan Perseroan. Coordinates, supervises and leads the Company's management and ensures that all the Company's business activities are executed in accordance with the vision, mission and values of the Company, monitors and reviews the Company's risk management, internal control system, corporate governance for the interests of the minority shareholders and other stakeholders and compliance with regulations, leads the BoD and give direction on Company's policies.
Doni Wilaga Kusuma Direktur Director	Bertanggung jawab terutama pada bidang sumber daya manusia dan penyediaan laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan dapat diperbandingkan, serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal yang berlaku. Responsible mainly in the field of human resources and the provision of financial statements in a timely, accurate and comparable manner, and presented in accordance with Financial Accounting Standards and applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
Catherine Sembiring Pelawi Direktur Director	Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas operasional antara lain yang berkaitan dengan unit kerja Property Sitac Renewal. Plans, coordinates, directs, controls, implements and evaluates operational tasks related to Property Sitac Renewal.
Suciratin Direktur Director	Bertanggung jawab atas unit kerja <i>Corporate Secretary</i>. Responsible for the Corporate Secretary work unit.

RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi telah diatur dengan tata tertib sebagai berikut:

Frekuensi Rapat:

Rapat Direksi harus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan atau sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun. Selain itu, rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan untuk membahas hal-hal tertentu atau mendesak.

Pemberitahuan Rapat:

Pemberitahuan rapat Direksi dikirimkan melalui surat elektronik terdaftar atau disampaikan langsung kepada setiap anggota. Pemberitahuan harus diberikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat, tidak termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal pelaksanaan rapat.

Kehadiran Rapat:

Rapat Direksi dapat diadakan secara fisik maupun non-fisik. Kehadiran non-fisik difasilitasi melalui telekonferensi, konferensi video, atau platform komunikasi elektronik lainnya. Jika seorang anggota tidak dapat hadir, anggota tersebut dapat menunjuk anggota Direksi lainnya untuk mewakilinya dengan memberikan kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Based on the Company's Articles of Association, the Board of Directors' meetings are stipulated as follows:

Meeting Frequency:

The meetings of the Board of Directors shall be convened at least once a month or 12 (twelve) times a year. Additional meetings may be held as needed to address specific requirements or urgent matters.

Meeting Notification:

Notifications for Board of Directors meetings are sent via registered electronic mail or delivered directly to each member. These notifications must be issued at least 5 (five) days prior to the meeting date, excluding the date of notification and the date of the meeting itself.

Meeting Attendance:

Board meetings can be conducted with either physical or non-physical attendance. Non-physical meetings are facilitated through teleconference, video conference, or other electronic communication platforms. If a member is unable to attend, they may appoint another Board member to represent them by granting a specific proxy for this purpose.

Persyaratan Kuorum:

Sesuai dengan Piagam Direksi, rapat dinyatakan sah dan berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

Proses Pengambilan Keputusan:

Keputusan dalam rapat Direksi diutamakan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara yang membutuhkan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total suara sah yang diberikan dalam rapat.

Jadwal Rapat Tahun 2025:

Direksi harus menyusun jadwal rapat Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Jadwal Rapat Direksi untuk tahun 2025 telah disusun pada akhir tahun 2024.

Selama tahun 2025, Rapat Direksi telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh anggota Direksi.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Ramadhan Kurnia Nusa	Direktur Utama President Director	12	12	100
Doni Wilaga Kusuma	Direktur Director	12	12	100
Catherine Sembiring Pelawi	Direktur Director	12	12	100
Suciratin	Direktur Director	12	12	100

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DIREKSI

Perseroan menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat untuk memberikan pemahaman mengenai kegiatan usaha, strategi, kerangka tata kelola, serta peran dan tanggung jawab Direksi. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan, Direksi juga dibekali dengan dokumen referensi utama, antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Anggaran Dasar, Rencana Jangka Panjang Perseroan, serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengangkatan anggota Direksi baru, sehingga Perseroan tidak menyelenggarakan program induksi bagi Direksi pada tahun pelaporan.

Quorum Requirements:

According to the Board of Directors' Charter, a meeting is considered valid and authorized to make binding decisions if more than 1/2 (one half) of the total Board members are present or legally represented during the meeting.

Decision-Making Process:

Decisions in Board of Directors meetings shall be prioritized to be made through deliberation to achieve consensus. If consensus cannot be reached, decisions are determined by a vote, requiring more than 1/2 (one half) of the total valid votes cast during the meeting.

Meeting Schedule for 2025:

The Board of Directors must prepare the schedule for Board of Directors meetings for the following financial year before the end of the current financial year. The schedule for the Board of Directors Meetings for 2025 was prepared at the end of 2024.

During 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) meetings attended by members of the Board of Directors.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR DIRECTORS

The Company conducts an induction programme for newly appointed members of the Board of Directors to provide an overview of the Company's business activities, strategy, governance framework, and the roles and responsibilities of the Board of Directors. To support effective management, members of the Board of Directors are also provided with key reference documents, including the Annual Report, Corporate Work Plan and Budget, Articles of Association, Long-Term Corporate Plan, and other relevant materials.

In 2025, there were no appointments of new members of the Board of Directors; therefore, no induction program for Directors was conducted during the year.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pada tahun 2025, anggota Direksi Perseroan mengikuti program pendidikan dan pelatihan berikut yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan:

No.	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
1.	Juli 2025 July 2025	<i>Managing Organizational Change for Managers (2018)</i>	LinkedIn	Online
2.	Agustus 2025 August 2025	<i>Fundamentals of Agentic AI: Business Implications and Ethical Insights</i>	LinkedIn	Online
3.	Agustus 2025 August 2025	<i>What Is Generative AI?</i>	Linkedin Learning	Online
4.	September 2025	<i>Annual Budget Planning (ABP) for Competitive Advantage</i>	Bester & Co	Jakarta
5.	Oktober 2025 October 2025	<i>Learning Design Thinking</i>	Linkedin Learning	Online
6.	November 2025	<i>Design Thinking: How to Use Creative Problem-Solving for Better Design</i>	Linkedin Learning	Online
7.	November 2025	<i>How to Make Innovative Thinking a Habit</i>	Linkedin Learning	Online
8.	November 2025	<i>Dealing with Client</i>	Talk Inc	Jakarta
9.	November 2025	<i>Coaching Skills for Leaders and Managers</i>	LinkedIn	Online
10.	November 2025	<i>Learning Design Thinking</i>	LinkedIn	Online
11.	Desember 2025 December 2025	Memahami Corporate Criminal Liability & Kesiapan Perusahaan di Era KUHUP 2023 Understanding Corporate Criminal Liability & Company Readiness in the Era of the 2023 Criminal Code	Indonesia Institute for Corporate Directorship	Online

Sepanjang tahun 2025, Bapak Doni Wilaga Kusuma juga menjadi narasumber pada beberapa seminar dan pelatihan, antara lain sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In 2025, members of the Board of Directors participated in the following education and training programmes relevant to the Company's business activities:

Throughout 2025, Mr. Doni Wilaga Kusuma also served as a speaker in several seminars and training sessions, among others as follows:

No.	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
1.	17 Mei 2025 May 17, 2025	<i>UGM Integrated Career Days: A Culture of Continuous Improvement</i>	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta
2.	5 Juli 2025 July 5, 2025	Podcast: Berpusat Pada Manusia, Bergerak dengan AI Podcast: Human-Centered, AI-Driven	SWA Media Inc.	Jakarta
3.	16 Juli 2025 July 16, 2025	<i>Accelerating Sustainable Growth through Human-Centered Approaches in the Age of Gen-AI</i>	SWA Media Inc.	Jakarta
4.	16 Juli 2025 July 16, 2025	<i>Beyond Legacy HCM: Transforming HR for a New Era of Work</i>	Darwin Box	Jakarta
5.	6 Agustus 2025 August 6, 2025	<i>CDP: Managing Communication, Team Collaboration & Diversity</i>	Protelindo Group	Jakarta
6.	18 Desember 2025 December 18, 2025	<i>Zoom Innovation Award</i>	ZOOMTopia	Jakarta

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Sesuai dengan POJK 33/ 2014, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan

SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS (INCLUDING THE PRESIDENT DIRECTOR)

In reference with OJK Regulation 33/ 2014, proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors at the GMS must take into account recommendations from the Board of

fungsi nominasi. Dalam hal ini, Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi berperan penting dalam mempersiapkan kepemimpinan Perseroan dengan memastikan bahwa anggota Direksi merupakan profesional yang berintegritas, berdedikasi, serta memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola kegiatan operasional Perseroan secara efektif.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas yang bersifat strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan Perseroan dan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan; dan
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan.
4. Menyusun laporan tahunan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perseroan.

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris

Selain keputusan-keputusan Direksi yang dapat diambil berdasarkan wewenang Direksi sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris antara lain:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank); dan
2. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan investasi selaku pemegang saham Perusahaan dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Penilaian kinerja setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama, dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing Direksi dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolektif Direksi. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

Commissioners or a committee performing nomination functions. In this context, the Board of Commissioners, which carries out the Nomination and Remuneration functions, plays a key role in preparing the Company's leadership by ensuring that members of the Board of Directors are professionals with integrity, dedication, and the competencies required to manage the Company's operations effectively.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the Board of Directors has carried out strategic duties, including the following:

1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the objectives set by the articles of association and the provisions of the prevailing laws and regulations, as well as for the benefit of the Company and strives to make efforts to improve the efficiency and effectiveness of the Company.
2. Controlling, maintaining and managing the Company's assets.
3. Develop an annual work plan containing the Company's annual budget.
4. Develop an annual report.
5. Apply GCG principles in every activity of the Company.

Board of Directors Actions that Require Written Approval from the Board of Commissioners

In addition to the resolutions of the Board of Directors that may be adopted based on the authority of the Board of Directors as mentioned above, actions of the Board of Directors that must obtain prior written approval from the Board of Commissioners include:

1. Borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding withdrawing the Company's money from a bank); and
2. establishing a company, participating in an investment as a shareholder of a company and/or transferring rights to the Company's shares in companies within and/or outside the territory of the Republic of Indonesia.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT POLICY (INCLUDING PRESIDENT DIRECTOR)

Performance evaluation of each member of the Board of Directors, including the President Director, is conducted annually by each Director using a self-assessment method on their individual and collegial performance. This self-assessment aims to help each Director contribute continuously towards improving the performance of the Board of Directors.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing Direksi Perseroan, termasuk Direktur Utama akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 2. Pelaksanaan fungsi memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 4. Pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan aset Perseroan;
 5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris; dan
 6. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
- b. Pemenuhan dan pencapaian *Company Shared Key Performance Indicators* (KPI), atau target, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi, yang telah disusun dan disepakati sebelumnya.
- c. Penerapan kepatuhan dan tata Kelola perusahaan yang baik.
- d. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses *self-assessment* untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan skema kompensasi/insentif bagi Direksi dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi akan disampaikan melalui Laporan Direksi (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang kemudian akan menjadi salah satu mata acara yang dibahas dan disetujui dalam RUPST Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Perseroan tidak memiliki komite khusus yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh Sekretaris Perseroan, Audit Internal, dan

The implementation of performance assessment by each Director of the Company, including the President Director, will be based on various aspects or evaluation criteria, including the following:

- a. Execution of functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors, which includes:
 1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the Company's objectives;
 2. Enhancing the efficiency and effectiveness of the Company;
 3. Control, maintenance, and management of the Company's assets;
 4. Preparation of the Company's annual work plan and budget to be submitted to the Board of Commissioners; and
 5. Fulfillment of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the GMS.
- b. Fulfillment and achievement of Company Shared Key Performance Indicators (KPIs), or targets, according to the duties and functions of each member of the Board of Directors, which have been previously arranged and agreed upon.
- c. Implementation of compliance and good corporate governance.
- d. Attendance level of the Directors in the Board Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners.

The results of the performance assessment through the self-assessment process will subsequently be submitted to the President Director, which constitute an integral part of determining the compensation/incentive scheme for the Board of Directors and serve as a basis for consideration by the Company's Shareholders in determining the designation or appointment of the relevant members of the Board of Directors, with due regard to input from the Board of Commissioners performing the nomination and remuneration function. The entire implementation of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors will be presented through the Board of Directors' Report (as part of the Annual Report), which will subsequently become one of the agenda items discussed and approved at the Company's AGMS.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Company has not established a dedicated committee to support the execution of the Board of Directors' duties. In carrying out its roles and responsibilities, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary,

Manajemen Risiko, serta dibantu oleh jajaran manajemen yang berada satu tingkat di bawahnya.

Internal Audit, and Risk Management, as well as assisted by the management team at the level directly below it.

REMUNERASI BAGI DIREKSI

REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Procedure to Determine the Remuneration of the Board of Directors

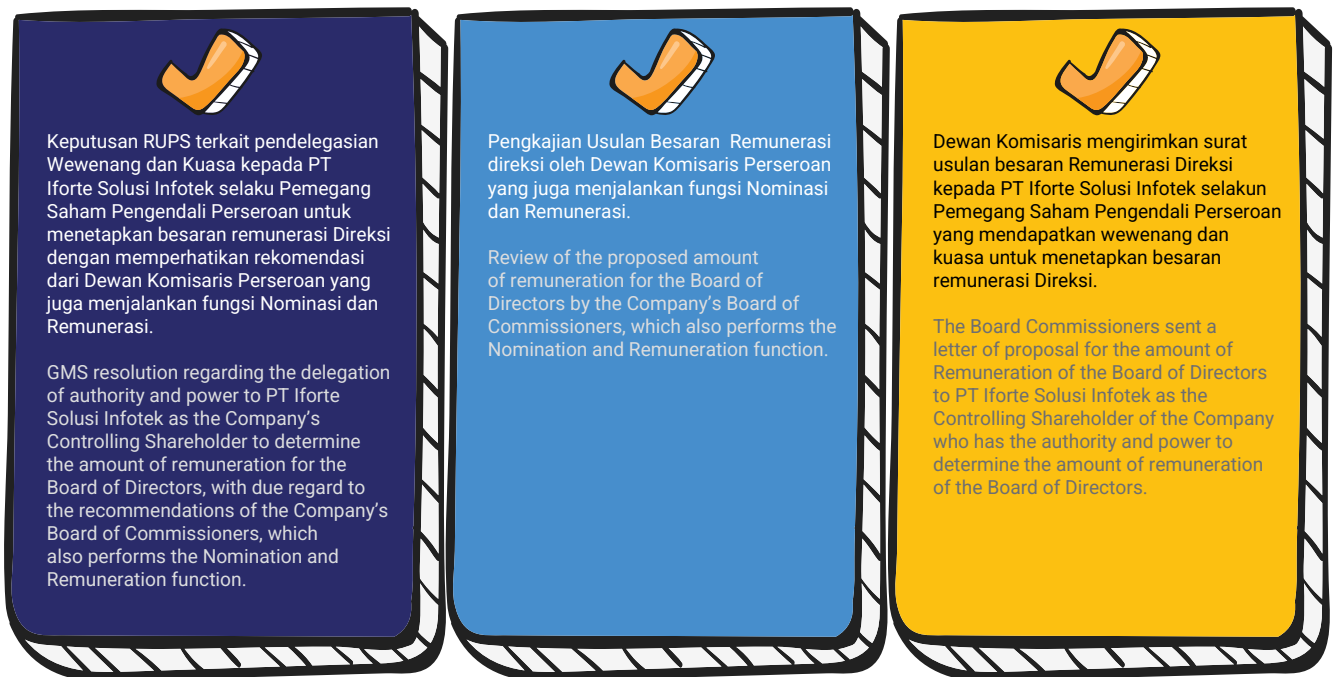
Berdasarkan keputusan RUPS, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Iforte Solusi Infotek untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Dalam menetapkan besaran remunerasi tersebut, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain sebagai berikut:

Based on the GMS resolution, the Company's Shareholders approved the granting of authority and power to the controlling shareholder of the Company, namely PT Iforte Solusi Infotek, to determine the salary and allowances for members of the Board of Directors, with due regard to the recommendations of the Company's Board of Commissioners, which also performs the nomination and remuneration function. In determining the amount of such remuneration, the Board of Commissioners takes into consideration several main factors, including the following:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Directors and Commissioners; and
4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Direksi Board of Directors Remuneration Determination Process



Struktur Remunerasi Direksi

Board of Directors Remuneration Structure

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025 adalah sebesar Rp17,7 miliar.

The total remuneration for all members of the Board of Directors for fiscal year 2025 is Rp17.7 billion.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Direksi selama tahun buku 2025, adalah sebagai berikut:

The remuneration structure indicating the Remuneration component for the Board of Directors during 2025 fiscal year is as follows:

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan* Allowance*					Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*		
		Transportasi Transportation	Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain Other Allowances	Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	Di atas 2 miliar Rupiah Above 2 billion Rupiah
Ramadhan Kurnia Nusa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Doni Wilaga Kusuma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Catherine Sembiring Pelawi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Suciratin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Direksi, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan) | Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Directors, including their other position in the other entities within the Company Group (as relevant).

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh anggota Direksi wajib untuk memberitahukan kepada OJK apabila terjadi perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan akan saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 4/2024"), Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK 10/2025") dan Pedoman Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan dan Pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham, Perseroan telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya kepada OJK melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya kepemilikan hak suara atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP POLICY

All members of the Board of Directors are required to notify the OJK of any change in ownership of the Company's shares, whether directly or indirectly, no later than 3 (three) working days after the occurrence of the change in ownership of the Company's shares.

Throughout 2025, there were no members of the Board of Directors who held shares in the Company, either directly or indirectly.

Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Directors

In accordance with OJK Regulation No. 4 of 2024 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies and Reports on Pledging Activities of Shares of Public Companies ("OJK Regulation 4/2024"), OJK Circular Letter No. 10 of 2025 concerning the Electronic Submission of Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies and Reports on Pledging Activities of Shares of Public Companies ("OJK Circular Letter 10/2025"), and the Guidelines for Reporting Ownership or Any Changes in Ownership and Reporting Pledging Activities of Shares, the Company has established a policy requiring members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to report any changes in their ownership of the Company's shares to the OJK through the electronic system provided by KSEI as soon as possible, no later than 3 (three) working days from the date of the acquisition of voting rights or any change in the ownership of voting rights over the Company's shares.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Direksi yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK 33/2014, OJK mengeluarkan POJK 21/2015, dimana POJK 21/2015 lebih lanjut diatur dalam SEOJK 32/2015. POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi Perseroan.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut; Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

RESIGNATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS INVOLVED IN A FINANCIAL CRIME

UUPT 40/2007 and OJK Regulation 33/2014 regulate one of the requirements for the appointment of members of the Board of Directors, which states that they must not have been convicted of criminal offenses that cause financial losses to the state and/or are related to the financial sector. In accordance with the Company Law and OJK Regulation 33/2014, OJK issued OJK Regulation 21/2015, which OJK Regulation 21/2015 further stipulated in OJK Circular Letter 32/2015. OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015 among other things provides recommendation to the public company to have a policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Directors who may be involved in a financial crime. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Following the OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015, the Company has prepared the policy of resignation for the members of the Board of Directors who are involved in financial crimes regulated as set out in the charter of the Board of Directors.

The resignation procedure for the members of the Board of Directors are as follows:

1. The member of the Board of Directors shall resign from his position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK;
3. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation of a member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter. The resigning member of the Board of Directors may still be held accountable for their actions from the date of their appointment until the date of their resignation, as determined in the GMS.
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit the result to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

KEBERAGAMAN DIREKSI

Komposisi Direksi Perseroan mencerminkan keberagaman keahlian, latar belakang, pengetahuan, serta pengalaman yang luas dari berbagai sektor industri. Keberagaman ini memperkuat efektivitas Direksi dalam mengelola Perseroan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan bisnis, serta penerapan prinsip GCG secara konsisten. Informasi lebih lanjut mengenai keberagaman Direksi, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional masing-masing anggota, disajikan dalam Bab Profil Perusahaan pada bagian profil Direksi.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

Perseroan memastikan bahwa setiap pemberian pinjaman kepada anggota Direksi didokumentasikan dalam suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang wajar, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*), serta menggunakan tingkat suku bunga yang sesuai dengan kondisi pasar pada saat pinjaman diberikan. Untuk memastikan penerapan prinsip tersebut, setiap pemberian pinjaman kepada anggota Direksi wajib melalui kajian dan persetujuan Komite Audit serta mematuhi POJK 42/2020.

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

The composition of the Company's Board of Directors reflects a diverse mix of expertise, backgrounds, knowledge, and extensive experience across various industry sectors. This diversity strengthens the effectiveness of the Board of Directors in managing the Company, including in strategic decision-making, business planning, and the consistent implementation of GCG principles. Further details on the diversity of the Board of Directors, including the educational background and professional experience of each member, are presented in the Company Profile chapter under the Board of Directors' profile.

LOAN POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Company ensures that any loan granted to members of the Board of Directors is documented under a formal agreement with fair and reasonable terms, applies the arm's length principle, and uses interest rates in line with prevailing market rates at the time of issuance. To uphold this principle, such loans are subject to analysis and approval by the Company's Audit Committee and must comply with OJK Regulation 42/2020.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya terkait kualitas dan keandalan laporan keuangan yang dipublikasikan, proses manajemen risiko dan audit, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Audit.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit Perseroan mengacu ke POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**") dan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

KEANGGOTAAN & MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan pihak independen sebagai anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Susunan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Komite Audit Position in the Audit Committee	Periode Jabatan Term of Office
1.	Rinaldy Santosa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	2024 - 2029
2.	Jacobus Sindu Adisuwono	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	2024 - 2029
3.	Patricia Marina Sugondo	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	2024 - 2029

The Audit Committee is an independent committee established by and accountable to the Board of Commissioners. The Committee supports the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, particularly in relation to the quality and integrity of published financial reports, risk management and audit processes, as well as compliance with applicable laws and regulations. The Audit Committee performs its duties and responsibilities in accordance with the provisions set out in the Audit Committee Charter.

LEGAL REFERENCES

The Company's Audit Committee establishment refers to OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Implementation Guidelines for the Audit Committee ("**OJK Regulation 55/2015**") and OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning Use of Public Accountants and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP AND TENURE

In line with OJK Regulation 55/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of Audit Committees, the Company's Audit Committee consists of 3 (three) members, comprising an Independent Commissioner as Chairman and independent parties as members, who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2025, is as follows:

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEMBERS PROFILES



Ketua Komite Audit Perseroan sejak 15 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2024, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024. Profil Bapak Rinaldy Santosa sebagai Ketua Komite Audit sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Chairman of the Company's Audit Committee since August 15, 2024 based on Circular Resolutions in Lieu of BoC Meeting dated August 15, 2024, effective from August 16, 2024. The profile of Mr. Rinaldy Santosa as the Chairman of the Audit Committee as well as an Independent Commissioner can be seen in the Profile of the Board of Commissioners of the Company in the Company Profile Chapter in this Annual Report.



Dasar Hukum
Penunjukkan
Appointment Basis

Diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2024, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024.

Appointed as member of the Company's Audit Committee based on Circular Decree In Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated August 15, 2024

Riwayat Pendidikan
dan Sertifikasi
Educational
Background and
Certification

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1986)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Indonesia Internal Auditor Practitioner (IIAP)
- Certification in Audit Committee Practices (CACP)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

- Bachelor of Economics from Parahyangan Catholic University, Bandung (1986)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Indonesia Internal Auditor Practitioner (IIAP)
- Certification in Audit Committee Practices (CACP)
- Banking Risk Management Certification Level 7

Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Anggota Komite Audit PT Bank KB Indonesia Tbk (2022 – saat ini) - Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana, Tbk (2021-saat ini) - Anggota Komite Audit PT Bank SMBC Indonesia Tbk (2025-saat ini)	- Member of the Audit Committee of PT Bank KB Indonesia Tbk (2022–present) - Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Ina Perdana, Tbk (2021–present) - Member of the Audit Committee of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (2025–present)
Pengalaman Kerja Professional Background	- Anggota Komite Audit PT Indomarco Financial Services (2025-saat ini) - Komisaris PT Asuransi Umum BCA (Agustus 2021-saat ini) - Anggota Komite Audit PT Bank Ina Perdana, Tbk. (2021-2024) - Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018-2021) - Anggota Komite Audit PT Bank BCA Syariah (2017-saat ini) - Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BCA (2009-2018) - Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti BCA (2009-2018) - Beberapa posisi manajerial pada fungsi audit internal PT Bank Central Asia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (1987-2017) - Beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi, di antaranya: Audit Committee Chairman The Institute of Internal Auditors Indonesia (2018-saat ini), Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank (2017-2020), Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (2014-2017) dan Sekretaris Jenderal Ikatan Auditor Intern Bank (2011-2014).	- Member of the Audit Committee of PT Indomarco Financial Services (2025–present) - Commissioner of PT Asuransi Umum BCA (August 2021–present) - Member of the Audit Committee of PT Bank Ina Perdana, Tbk. (2021–2024) - President Commissioner of PT BCA Finance (2018–2021) - Member of the Audit Committee of PT Bank BCA Syariah (2017–present) - Chairman of the Supervisory Board of Dana Pensiun BCA (2009–2018) - Chairman of the Supervisory Board of Yayasan Bhakti BCA (2009–2018) - Held several managerial positions in the internal audit function of PT Bank Central Asia, Tbk, with the last position as Head of Internal Audit Division (1987–2017) - He has also been active in various professional organizations, including: Chairman of the Audit Committee of The Institute of Internal Auditors Indonesia (2018–present), Member of the Supervisory Board of Ikatan Auditor Intern Bank (2017–2020), Chairman of Ikatan Auditor Intern Bank (2014–2017), and Secretary General of Ikatan Auditor Intern Bank (2011–2014).





Patricia Marina Sugondo
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

> Usia Age	58 Tahun Years Old pada 31 Desember 2025 as of December 31, 2025
> Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
> Domisili Domicile	Indonesia

Dasar Hukum Penunjukkan Appointment Basis	Diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2024, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024.	Appointed as member of the Company's Audit Committee based on Circular Decree In Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated August 15, 2024, effective from August 16, 2024.
Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi Educational Background and Certification	- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (1991) - Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2022) - Certification in Audit Committee Practices (CACP) (2019) - Indonesian Certified Public Accountant (2001)	- Bachelor Degree of Economics in Accounting from Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (1991) - Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2022) - Certification in Audit Committee Practices (CACP) (2019) - Indonesian Certified Public Accountant (2001)

Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Anggota Komite Audit PT Indokripto Koin Semesta Tbk (2025 – saat ini) - Anggota Komite Audit PT Kedoya Adhyaraya Tbk (2022 – saat ini) - Komisaris Independen PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (Mei 2021 – saat ini) - Ketua Komite Audit PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (Mei 2021 – saat ini) - Anggota Komite Audit PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (2020 -saat ini) - Anggota Komite Audit PT Surya Citra Media Tbk (2017 – saat ini)	- Member of the Audit Committee of PT Indokripto Koin Semesta Tbk (2025–present) - Anggota Komite Audit PT Kedoya Adhyaraya Tbk (2022 – saat ini) - Komisaris Independen PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (Mei 2021 – saat ini) - Ketua Komite Audit PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (Mei 2021 – saat ini) - Anggota Komite Audit PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (2020 -saat ini) - Anggota Komite Audit PT Surya Citra Media Tbk (2017 – saat ini)
Pengalaman Kerja Professional Background	- Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2018 – 2024) - Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Juni 2017 – Maret 2023) - Komite Audit PT Indosiar Karya Mandiri Tbk (Desember 2011 - Mei 2013) - Komite audit PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Juli 2010 - Mei 2019) - Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk (Oktober 2009 – Juni 2021) - Konsultan Independen di PT GNV Consulting (2008 – saat ini). - Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam audit, akuntansi, dan konsultasi, termasuk 12 tahun sebagai Assurance and Business Advisor di PricewaterhouseCoopers (1990–2002). - Beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi, di antaranya: anggota Ikatan Komite Audit Indonesia (“IKAI”) dan anggota Global Integrated Risk Management Association (“GIRMA”).	- Member of Audit Committee, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2018 – 2024) - Audit Committee PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (June 2017 – March 2023) - Audit Committee PT Indosiar Karya Mandiri Tbk (December 2011 - May 2013) - Audit Committee PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (July 2010 - May 2019) - Audit Committee PT Samudera Indonesia Tbk (October 2009 – June 2021) - Independent Consultant at PT GNV Consulting (2008 - current). - Has over 30 years of experience in audit, accounting, and consulting, including 12 years as an Assurance and Business Advisor at PricewaterhouseCoopers (1990–2002). - She is also actively involved in various professional organizations, including as a member of the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) and the Global Integrated Risk Management Association (GIRMA).

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit bersifat independen dan terbebas dari benturan kepentingan, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, objektif, dan independen. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik Perseroan serta bertindak tanpa pengaruh dari pihak mana pun.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is independent and free from conflicts of interest, enabling it to perform its roles and responsibilities professionally, objectively, and independently. In carrying out its duties, the Audit Committee consistently upholds the best interests of the Company and operates without influence from any party.

Pernyataan Independensi Statement of Independence	Rinaldy Santosa	Jacobus Sindu Adisuwono	Patricia Marina Sugondo
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;	✓	✓	✓
Not a person in the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who provide insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;			
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen);	✓	✓	✓
Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months (except for Independent Commissioners);			
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan; Does not have direct or indirect shares in the Company;	✓	✓	✓

Pernyataan Independensi Statement of Independence	Rinaldy Santosa	Jacobus Sindu Adisuwono	Patricia Marina Sugondo
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;	✓	✓	✓
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company;			
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;	✓	✓	✓
Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities;			
Keterangan: ✓= Ya x=Tidak Description: ✓= Yes x=No			

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif. Piagam tersebut pertama kali ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada 1 Agustus 2013 dan telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dengan pembaruan terakhir disetujui pada 1 Desember 2023. Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap transparansi, Piagam Komite Audit dipublikasikan melalui situs web Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan dan Kegiatan Asuransi
 - b. Melakukan revidu atas keandalan informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan historis, laporan keuangan proyeksian, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - c. Melalui hasil kerja auditor eksternal, melakukan revidu ketepatan desain dan efektivitas implementasi pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan Perseroan;
 - d. Merevidu pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
 - f. Melakukan kajian atas rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material;

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee has in place the Audit Committee Charter as a guiding framework to ensure the independent and objective execution of its roles and responsibilities. The Charter was initially established and approved by the Board of Commissioners on August 1, 2013 and has undergone several revisions, with the most recent update approved on December 1, 2023. As part of the Company's commitment to transparency, the Audit Committee Charter is publicly available on the Company's website.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Company's Audit Committee Charter, as follows:

1. Financial Statements and Assurance Activity
 - b. To review the reliability of financial information to be disclosed by the Company to the public and/or authorities, including historical financial statements, projected financial report, and other reports relating to the Company's financial information;
 - c. Through the work of external auditors, to review the accuracy of design and effectiveness of the implementation of internal controls exercised by management during the process of preparing financial statements to prevent any financial misstatements;
 - d. To review feedback related to the Company's accounting and reporting process;
 - e. To provide an independent opinion should there be disagreements between management and the external auditors with respect to the rendered services;
 - f. To review the external auditor's plans and outcomes of activities to ensure the financial statements are adequately reviewed for material misstatements;

g. Melakukan kajian atas objektivitas, independensi dan kompetensi auditor eksternal; h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian perikatan dengan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup perikatan dan imbalan jasa; i. Mempersiapkan hasil kajian dan rekomendasi penunjukan auditor eksternal seperti yang disebut dalam butir (f) dan (g) diatas, yang nantinya akan disampaikan oleh Direksi kepada OJK. 2. Manajemen Risiko c. Melakukan tinjauan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dalam hal Perseroan tidak memiliki fungsi Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris; d. Melakukan tinjauan atas risiko-risiko yang diidentifikasi oleh Manajemen dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan memadai. 5. Auditor Internal a. Melakukan tinjauan atas rencana, pelaksanaan dan hasil audit oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil observasi auditor internal; b. Melakukan kajian atas objektivitas dan independensi auditor internal; c. Melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan kerja audit internal dan mengevaluasi kinerja secara berkala; d. Memastikan pelaksanaan audit internal berdasarkan standar professional audit internal yang berlaku dan kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kode etik Perseroan. 4. Governansi dan Kepatuhan e. Melakukan tinjauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip governansi korporat; f. Melakukan monitor atas terlaksananya penerapan praktek Governansi Korporat Perseroan, termasuk program pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting);	g. To review the objectivity, independence and competence of the external auditors; h. To give recommendations to the BoC regarding the appointment, re-appointment and termination of engagement of external auditors based on independence, scope of engagement, and services fee; i. To prepare result of review and recommendation regarding the appointment of external auditors as referred to in letters (f) and (g) above for submission by the BoD to the OJK. 2. Risk Management c. To review the risk management activities carried out by the BoD in the event that the Company has no Risk Monitoring Committee function under the BoC; d. To review all risks identified by the Management and ensure that those risks are adequately managed. 5. Internal Auditor a. To review the plans, implementation and results of audits performed by the Company's internal auditors and oversee the implementation of follow-up by the BoD on the internal auditors' observation results; b. To review the objectivity and independence of the Company's internal auditors; c. To review the effectiveness of internal audit implementation and periodically evaluating performance; d. Ensure the implementation of internal audit based on applicable internal audit professional standards and compliance with the professional code of conduct and the Company's code of conduct. 4. Governance and Compliance e. To review the Company's compliance with all applicable laws and regulations relating to the Company's activities, taking into account the principles of corporate governance; f. To monitor corporate governance implementation practices within the Company, including program of sustainability reporting;

- g. Meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas setiap transaksi dengan pihak berelasi yang memenuhi batasan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan dengan prinsip arm's length, seperti halnya transaksi dilakukan dengan pihak ketiga lainnya;
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang berada di bawah wewenanganya.

RAPAT KOMITE AUDIT

Mengacu pada Piagam Komite Audit, Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan rapat tambahan apabila diperlukan. Rapat Komite Audit dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota; apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat akan ditunda dan dijadwalkan kembali. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui sarana elektronik, termasuk telekonferensi atau video konferensi. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengundang perwakilan manajemen yang terkait dengan agenda rapat. Pada akhir setiap tahun, Komite Audit menyusun rencana kegiatan dan jadwal rapat untuk tahun berikutnya, dengan jadwal rapat Komite Audit tahun 2025 disusun pada akhir tahun 2024.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat Komite Audit dengan kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

- g. Review and provide recommendations to the Board of Commissioners on each transaction with related parties that meets a certain value threshold, in accordance with applicable laws and regulations, ensuring that it is conducted under fair terms and conditions and follows the arm's length principle, similar to transactions with third parties;
- h. To keep confidential all the Company's documents, data and information under its authority.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Referring to the Audit Committee Charter, the Audit Committee holds meetings regularly at least once every 3 (three) months and may convene additional meetings as necessary. An Audit Committee meeting is valid and may adopt resolutions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members; if the quorum is not met, the meeting is postponed and rescheduled. Meetings may be conducted in person or through electronic media, including teleconference or video conference facilities. Where required, the Audit Committee may invite management representatives relevant to the meeting agenda. At the end of each year, the Audit Committee prepares its activity plan and meeting schedule for the following year, with the 2025 meeting schedule prepared at the end of 2024.

In 2025, the Audit Committee held 5 (five) meetings, with attendance from Audit Committee members as follows:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Komite Audit

Meeting Frequency and Attendance Level of the Audit Committee in the Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Rinaldy Santosa	Ketua Chairman	5	5	100
Jacobus Sindu Adisuwono	Anggota Member	5	5	100
Patricia Marina Sugondo	Anggota Member	5	5	100

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Program pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2025, adalah berikut:

The education and/or training programs attended by the Audit Committee throughout 2025 are as follows:

Pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Audit

Training and competency development for the Audit Committee

No.	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
1.	31 Januari 2025 January 31, 2025	Manajemen Risiko sebagai Integrator Implementasi POJK 12/2024 Risk Management as an Integrator of OJK Regulation 12/2024 Implementation	Global Integrated Risk Management Association ("GIRMA")	Daring Online
2.	11–13 Maret 2025 March 11-13, 2025	Certified Risk Governance Professional	GIRMA PT LSP Manajemen Risiko	Jakarta
3.	17 Maret 2025 March 17, 2025	Data Science, Machine Learning, and Artificial Intelligence for Risk Management Applications	GIRMA	Daring Online
4.	9 Agustus 2025 August 9, 2025	Revealing The Hidden Truth: Forensic Accounting in Financial Crime Investigation	Accounting Academy Indonesia	Daring Online
5.	19 Agustus 2025 August 19, 2025	Risk and Governance Summit 2025	OJK	Daring Online
6.	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management	GRC Management	Daring Online
7.	22-23 September 2025 September 22-23, 2025	Manajemen Risiko Pajak Atas Penerapan Core Tax sesuai PER-11/PJ/2025 Tax Risk Management for the Implementation of Core Tax in accordance with PER-11/PJ/2025	Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI")	Jakarta
8.	30 September 2025 September 30, 2025	Sustainability Reporting, Impact and Implementation PSPK 1 and 2 for Professional	IAI	Jakarta
9.	8 Oktober 2025 October 8, 2025	Internal Audit and Risk Management Forum	Deloitte Jakarta	Jakarta
10.	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam Penguatan Tata Kelola Risiko : Strategi Menyusun Risk Appetite, Sistem Pengendalian, Budaya Risiko dan Respons Risiko Improving the Quality of Risk Management Implementation in Strengthening Risk Governance: Strategies for Developing Risk Appetite, Control Systems, Risk Culture and Risk Response	Strategic Development Group	Jakarta
11.	15-16 Oktober 2025 October 15-16, 2025	Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	The Institute of Internal Auditors Indonesia	Jakarta
12.	22-24 Oktober 2025 October 22-24, 2025	Certified Audit Committee Practices	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
13.	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Certified Audit Committee Practices	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
14.	5 Desember 2025 December 5, 2025	Recognition CPA - 10 year with CPA Australia	CPA Australia	Jakarta

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit dan Program Kerja Komite Audit Tahun 2025. Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan tinjauan atas keandalan informasi Laporan Keuangan Perseroan sebelum dipublikasikan guna memastikan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan Perseroan mulai dari perencanaan hingga penyelesaiannya.
3. Melakukan kajian atas objektivitas, independensi dan kompetensi auditor eksternal maupun auditor internal dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.
4. Melakukan penelaahan terhadap rencana kegiatan manajemen risiko.
5. Melakukan pengawasan terhadap proses audit yang dilaksanakan oleh auditor internal mulai dari perencanaan, pelaksanaannya hingga penyelesaian hasil observasi audit oleh manajemen.

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

The Audit Committee carried out its duties and responsibilities in reference with the Audit Committee Charter and the 2025 Audit Committee Work Program. The implementation of the Audit Committee's duties in 2025 included the following:

1. Reviewed the reliability of the Company's Financial Statement information before publication to ensure its compliance with Indonesian Financial Accounting Standards and the applicable regulations.
2. Oversaw the audit process conducted by the external auditor auditing the Company's financial statements from planning through completion.
3. Reviewed the objectivity, independence, and competence of both the external auditor and the internal auditor and evaluated the provision of audit services on the Financial Statements by the Public Accounting Firm, and submitted recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the Public Accounting Firm that would audit the Company's Financial Statements.
4. Reviewed the risk management activity plan.
5. Oversaw the audit process conducted by the internal auditor from planning, implementation, through the completion of audit observation results by management.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang berlaku efektif sejak 29 Mei 2023, sehubungan dengan belum tersedianya kandidat yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").

PIAGAM FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi yang efektif dan akuntabel, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang disusun dan disetujui pada 1 Desember 2023.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Terkait dengan Fungsi Nominasi
 - b. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e. Menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi;
 - f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama;
 - g. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi
 - c. Menyusun struktur remunerasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

The Company's Nomination and Remuneration function is carried out by the Board of Commissioners, as determined through a Circular Resolution in Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners effective May 29, 2023, due to the absence of candidates who meet the requirements for membership in the Nomination and Remuneration Committee. This function is conducted in reference with the OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("**OJK Regulation 34/2014**").

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION CHARTER

To ensure effective and accountable implementation of the nomination and remuneration functions, the Board of Commissioners has set out the Nomination and Remuneration Functions Charter, which was prepared and approved on December 1, 2023.

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

1. In connection with Nomination Function
 - b. Prepare the composition and nomination process of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - c. Prepare policies and criteria required in the nomination process for candidates of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - d. Conducting performance assessment of members of the Board of Directors and/or Commissioners based on the benchmark that have been established as evaluation basis;
 - e. Prepare a succession policy in the nomination process of members of the Board of Directors;
 - f. Prepare development programs for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and review the reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director;
 - g. Review and propose candidates who are qualified to be members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to GMS.
2. In connection with the Remuneration Function
 - c. Formulating remuneration structure for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - d. Formulating policies on remuneration for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;

- e. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan Perseroan yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang Perseroan dan pemegang saham;
- f. Mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

- e. Formulating the amount of remuneration for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that aligns with the sustainable development of the Company and the long-term interests of the Company and shareholders;
- f. Periodically reviewing the remuneration system for the Directors and Commissioners.

RAPAT FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan, dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
2. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir merupakan Komisaris Independen.

Pada tahun 2025, rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION MEETINGS

Meetings of the Nomination and Remuneration Function are held regularly at least once every 4 (four) months, and may be convened at any time if deemed necessary, provided that the following conditions are fulfilled:

1. the meeting is attended by the majority of members of the BoC; and
2. one of the majority of the attending members of the BoC is an Independent Commissioner.

In 2025, the Nomination and Remuneration Function has held 3 (three) meetings with the following levels of member attendance:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat terkait Nominasi dan Remunerasi

Meeting Frequency and Attendance Level of the Members of the BoC in the Meeting related to Nomination and Remuneration

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Adam Gifari	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100
Haryo Dewanto	Komisaris Commissioners	3	3	100
Rinaldy Santosa	Komisaris Independen Independent Commissioner	3	3	100

KEGIATAN TERKAIT NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta evaluasi kinerja serta kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

NOMINATION AND REMUNERATION ACTIVITIES

In 2025, the Board of Commissioners conducted an evaluation of the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as well as an evaluation of the performance and the appropriateness of the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung dan memegang peran penting dalam mendukung hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab mengelola unit yang menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan, mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait.

DASAR HUKUM

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), perusahaan terbuka wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara organ Perseroan dengan pihak eksternal, termasuk instansi pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan pasar modal lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengangkat Suciratin sebagai Sekretaris Perusahaan yang efektif sejak 16 Agustus 2024.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Profil Ibu Suciratin sebagai Sekretaris Perusahaan sekaligus Direktur Perseroan dapat dilihat pada Profil Direksi Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of Ms. Suciratin as the Corporate Secretary as well as Director of the Company is presented in the Board of Directors' Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan susunan organisasi Perseroan, Divisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama.

Organization Structure of Corporate Secretary

Based on the Company's Organizational Structure, the Corporate Secretary Division is under the President Director.

PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawabnya secara efektif, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Sekretaris Perusahaan yang disetujui oleh Direksi pada 14 Maret 2017.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Peran dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mendorong partisipasi aktif Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh elemen perusahaan dalam penerapan empat pilar prinsip tata kelola perusahaan, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan;
2. Memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan pemangku kepentingan, terutama menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham, OJK, BEI dan masyarakat;
3. Memastikan tersedianya informasi yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan, di antaranya dengan menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK, Bursa dan masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
4. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Komite, Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk membantu menyusun rencana kerja dan jadwal secara tahunan, serta menjadi penghubung antara Komite, Dewan Komisaris dan Direksi.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan dan tim telah mengikuti inisiatif pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
28 Februari 2025 February 28, 2025	Sosialisasi terkait Pemenuhan Ketentuan <i>Free Float</i> dan Jumlah Pemegang Saham Socialization on Compliance with Free Float Requirements and Number of Shareholders
15 Juni 2025 June 15, 2025	<i>Compliance Refreshment</i> Juni 2025 Compliance Refreshment June 2025
19 Juni 2025 June 19, 2025	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal Socialization on OJK Regulation Number 9 of 2025 concerning the Dematerialization of Equity Securities and the Management of Unclaimed Assets in the Capital Market

CORPORATE SECRETARY CHARTER

To support the effective execution of its functions, roles, duties, and responsibilities, the Corporate Secretary functions under the Corporate Secretary Charter, which was approved by the Board of Directors on March 14, 2017.

CORPORATE SECRETARY DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Enhance the active participation of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all elements of the Company in implementing the four pillars of corporate governance principles, namely ethical conduct, accountability, transparency, and sustainability.
2. Ensure effective communication between the Company and stakeholders, particularly in connecting the Company with shareholders, the OJK, IDX, and the public.
3. Ensure the availability of information that is accessible to stakeholders in accordance with their reasonable needs, including through timely disclosure of information to the OJK, the Exchange, and the public, as well as the provision of information on the Company's website.
4. Organise and document meetings of the Committees, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, including assisting in the preparation of annual work plans and schedules, and acting as a liaison among the Committees, the Commissioners, and the Directors.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF CORPORATE SECRETARY

In 2025, the Corporate Secretary and team has participated in the following competency development initiatives as follow:

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
10 September 2025 September 10, 2025	<i>Merger & Acquisition</i> pada Perusahaan Terbuka: Strategi, Regulasi, dan Peran <i>Corporate Secretary</i> Merger & Acquisition in Public Companies: Strategy, Regulation, and the Role of the Corporate Secretary
26 November 2025 November 26, 2025	Sosialisasi terkait Pemenuhan Ketentuan <i>Free Float</i> dan Jumlah Pemegang Saham Socialization on Compliance with Free Float Requirements and Number of Shareholders
15 Desember 2025 December 15, 2025	Sosialisasi <i>Compliance Refreshment</i> Desember 2025 Compliance Refreshment December 2025
19 Desember 2025 December 19, 2025	Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham serta Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Secara Elektronik Socialization on the Obligation to Submit Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership as well as Reports on Share Pledging Activities Electronically

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*;
2. Melakukan keterbukaan informasi ke publik atau pelaporan kepada OJK yang memadai dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Mengelola komunikasi dengan: OJK, BEI, KSEI dan Biro Administrasi Efek (BAE);
4. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan;
5. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta membuat risalah rapat; dan
6. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK.

CORPORATE SECRETARY DUTIES PERFORMANCE

The Corporate Secretary has carried out the following activities during 2025:

1. Organizing the implementation of the General Meeting of Shareholders and Public Expose;
2. Conducting adequate and timely public disclosures or reporting to the OJK in accordance with the applicable regulations;
3. Managing communication with: OJK, IDX, KSEI, and the Securities Administration Bureau (BAE);
4. Organizing and participating in the preparation of the Company's Annual Report and Sustainability Report;
5. Organizing all meetings held for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee, as well as preparing the minutes of meetings; and
6. Drafting and preparing relevant procedures and policies as regulated in the Corporate Governance Guidelines issued by the OJK.

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

Unit Audit Internal berfungsi sebagai unit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memperkuat nilai perusahaan serta meningkatkan efektivitas operasional. Melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis, Unit Audit Internal menilai dan memperkuat penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan guna mendukung kinerja usaha yang berkelanjutan.

The Internal Audit Unit serves as an independent and objective assurance and consulting function that contributes to strengthening corporate value and improving operational effectiveness. Through a structured and systematic approach, the Unit evaluates and enhances risk management, internal control, and corporate governance processes to support sustainable business performance.

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT HEAD PROFILE



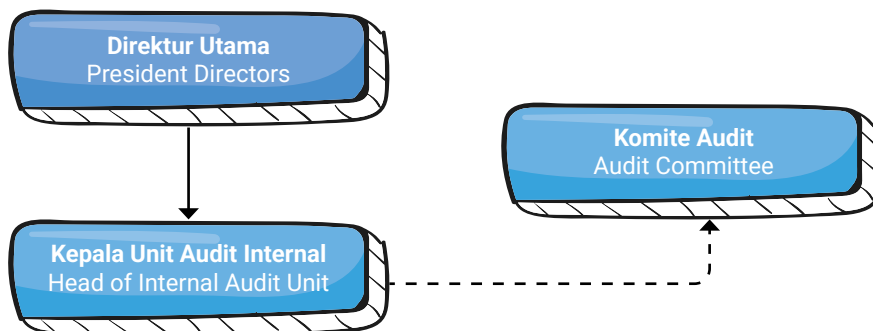
Nico Hansen Pardede
Kepala Unit Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

> Usia Age	46 Tahun Years Old pada 31 Desember 2025 as of December 31, 2025
> Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
> Domisili Domicile	Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No.001/IBST-DIR/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Oktober 2024	Appointed as the Head of the Company's Internal Audit Unit based on the President Director's Decree No. 001/IBST-DIR/X/2024 dated October 21, 2024, with the approval of the Company's Board of Commissioners on the same date.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Pada tahun 2004, Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia, Kabupaten Bandung Barat. Dan ditahun 2007, Lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) di Universitas Indonesia, Jakarta.	In 2004, earned a Bachelor's degree in Accounting from Universitas Advent Indonesia, West Bandung Regency. In 2007, completed the Professional Accounting Education (PPAK) program at Universitas Indonesia, Jakarta.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pernah bekerja sebagai Auditor di KAP "Osman Bing Satrio & Rekan" member firm of Deloitte Touche Tohmatsu (2004-2012) dengan Jabatan Terakhir sebagai Asisten Manajer. Pada tahun 2012 bergabung dengan Grup PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") sebagai Finance External Reporting, kemudian ditahun 2019 menjadi Internal Auditor di Grup Protelindo.	Previously worked as an Auditor at KAP "Osman Bing Satrio & Rekan" member firm of Deloitte Touche Tohmatsu (2004-2012) with the last position as Assistant Manager. In 2012, joined PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") Group as Finance External Reporting, then in 2019 became an Internal Auditor at Protelindo Group.

KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Kedudukan Unit Audit Internal Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama Perseroan yang dipimpin oleh Kepala Unit, sebagai berikut:



INTERNAL AUDIT UNIT POSITION IN THE CORPORATE STRUCTURE

The structure of the Company's Internal Audit Unit is directly under the Company's President Director led by the Head of Unit, as follows:

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal Perseroan menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter/IAC*) yang ditinjau secara berkala agar tetap selaras dengan praktik terbaik terkini. Piagam Audit Internal tersebut telah disetujui oleh Direksi pada 11 Juli 2012 dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan.

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company's Internal Audit Unit operates under an Internal Audit Charter (IAC) that is periodically reviewed to remain aligned with current best practices. The Internal Audit Charter was approved by the Board of Directors on July 11, 2012 and has been published on the Company's website.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia dan pemasaran;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

As stated in the Internal Audit Charter, the main duties and responsibilities of the Head of Internal Audit Unit are as follows:

1. Prepare and implement the annual Internal Audit plan.
2. Examine and evaluate the implementation of the internal control system and risk management in accordance with the Company's policies.
3. Conduct reviews and assessments of efficiency and effectiveness in the areas of finance, accounting, operations, human resources, and marketing.
4. Provide recommendations for improvement and objective information on audited activities at all management levels.
5. Prepare audit reports and submit such reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Monitor, analyse, and report on the implementation of follow-up actions on recommended improvements.
7. Develop programmes to evaluate the quality of internal audit activities.
8. Conduct special audits when necessary.

SUMBER DAYA MANUSIA UNIT AUDIT INTERNAL

Hingga akhir Desember 2025, struktur keanggotaan Unit Audit Internal terdiri dari 2 (dua) personel, yaitu 1 (satu) Kepala Unit Audit Internal dan 1 (satu) anggota yang mendukung pelaksanaan audit internal.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Kode etik auditor internal Perseroan mengacu pada Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

HUMAN RESOURCES OF INTERNAL AUDIT UNIT

As of the end of December 2025, the Internal Audit Unit consists of 2 (two) members, namely 1 (one) Head of Internal Audit and 1 (one) supporting member responsible for conducting internal audits.

INTERNAL AUDITOR CODE OF ETHICS

The Company's internal auditor code of ethics refers to the Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors which contains standards of conduct as guidelines for all Internal Auditors in carrying out internal audit practices.



METODOLOGI AUDIT

Unit Audit Internal menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan. Penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh, baik pada unit kerja di kantor pusat maupun unit bisnis.

AUDIT METHODOLOGY

The Internal Audit Unit applies a risk-based audit methodology that is applied starting from the annual audit planning stage, audit implementation to reporting. Risk assessment is carried out thoroughly, both in work units at the head office and business units.

RAPAT UNIT AUDIT INTERNAL

Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah melakukan Rapat dengan Direksi sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) kali dengan Dewan Komisaris dan 2 (dua) kali dengan Komite Audit.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Pada tahun 2025, anggota Unit Audit Internal mengikuti berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

No.	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator	Pelatihan Training	Lokasi Location
1.	20 Agustus 2025 August 20, 2025	LinkedIn Learning	<i>Introduction to Data Science</i>	Daring Online
2.	6 Oktober 2025 October 6, 2025	LinkedIn Learning	<i>Algorithmic Auditing and Continuous Monitoring</i>	Daring Online
3.	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Internal	<i>Financial Due Diligence</i>	Jakarta
4.	21 Oktober 2025 October 21, 2025	LinkedIn Learning	<i>Audit and Due Diligence Foundations</i>	Daring Online

PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL

Pada tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan kegiatan audit pada area sebagai berikut:

1. Direktorat *Commercial Tower*
2. Direktorat *Sales & Marketing Non-Tower*
3. Direktorat *Project & Operation Tower*
4. Direktorat *Technology, Operation & Project Non-Tower*
5. Direktorat *Property Management*
6. Direktorat *Finance & Accounting*
7. Direktorat *Enterprise Support Management*
8. *Information & Technology*

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

During 2025, the Internal Audit Unit has held 1 (one) meeting with the Board of Directors, 1 (one) time with the Board of Commissioners and 2 (two) times with the Audit Committee.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT

In 2025, members of the Internal Audit Unit have participated in various education and/or training programs for competency improvement, as follows:

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIT ACTIVITIES

In 2025, the Internal Audit Unit carried out audit activities in the following areas:

1. Commercial Tower Directorate
2. Non-Tower Sales & Marketing Directorate
3. Project & Operation Tower Directorate
4. Non-Tower Technology, Operation & Project Directorate
5. Property Management Directorate
6. Finance & Accounting Directorate
7. Enterprise Support Management Directorate
8. Information & Technology

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Berdasarkan hasil RUPST tanggal 23 April 2025, Perseroan telah memutuskan kriteria dan batasan dalam menunjuk jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP"), yaitu:

1. Mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
2. Terdaftar sebagai Auditor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di OJK; dan
3. Syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Atas dasar tersebut, Perseroan telah menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Berikut adalah KAP dan AP yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Based on the results of the AGMS dated April 23, 2025, the Company has determined the criteria and limitations in appointing the services of a Public Accounting Firm ("KAP"), namely:

1. Having an international reputation (including the Registered Public Accountant affiliated with such Registered Public Accounting Firm);
2. Being registered as an auditor for the Non-Bank Financial Industry (IKNB) with the OJK; and
3. Other terms and conditions deemed appropriate by the Company's Board of Commissioners with due regard to the input and considerations of the Company's Audit Committee.

On this basis, the Company has appointed Riani and Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, each registered with the OJK as a Public Accountant and Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025, or appoint another Public Accountant from the same Public Accounting Firm in the event that the aforementioned is permanently unable to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025.

Below are the Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP) that have audited the Company's financial statements over the past 5 (five) years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Publik Public Accountant
2025	Tjahjadi & Tamara	Riani
2024	Tjahjadi & Tamara	Riani
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Rudi Hartono Purba
2022	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited)	Bambang Subagyo, SE., CPA
2021	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited)	Bambang Subagyo, SE., CPA

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Perseroan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen, dengan pengawasan serta peninjauan berkala yang dilakukan oleh Komite Audit. Sistem ini merupakan proses terstruktur yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan mekanisme *check and balance* yang memadai.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan menerapkan pendekatan komprehensif berbasis risiko yang mencakup risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan, serta dijalankan melalui model *three lines* yang melibatkan fungsi manajemen, manajemen risiko, dan Unit Audit Internal. Untuk memastikan keselarasan dengan tujuan dan arah strategis Perseroan, sistem ini dievaluasi secara berkala dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris serta didukung oleh Komite Audit, yang memberikan *assurance* agar pengendalian internal tetap efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pada tahun 2025, fungsi Audit Internal Perseroan melaksanakan audit operasional sesuai dengan rencana audit tahunan yang telah disetujui, kebijakan internal, serta ketentuan peraturan yang berlaku, dengan setiap audit disertai Evaluasi Pengendalian Internal. Efektivitas sistem pengendalian internal dievaluasi secara tahunan dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris, yang menegaskan bahwa sistem tersebut berfungsi secara efektif, sebagaimana tercermin dari diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen eksternal. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan atas pencapaian tujuan Perseroan dan keberlangsungan usaha, serta menegaskan komitmen Perseroan untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal agar selaras dengan perkembangan bisnis dan regulasi.

The Company has established an Internal Control System designed and implemented by management, with oversight and periodic review conducted by the Audit Committee. This system represents a structured process involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and all employees, aimed at ensuring operational effectiveness and efficiency, the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, and the consistent application of sound check-and-balance mechanisms.

The Internal Control System adopts a comprehensive, risk-based approach that takes into account financial, operational, and compliance risks, and is implemented through the three lines model involving management functions, risk management roles, and the Internal Audit Unit. To ensure continued alignment with the Company's objectives and strategic direction, the system is regularly evaluated with the involvement of the Board of Directors and the Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, providing assurance that internal controls remain effective, adaptive, and sustainable.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

In 2025, the Company's Internal Audit function conducted operational audits in accordance with the approved annual audit plan, internal policies, and applicable regulations, with each audit including an Internal Control Evaluation. The effectiveness of the internal control system was evaluated annually with the involvement of the Board of Directors and the Board of Commissioners, confirming that the system operated effectively, as reflected by the unqualified opinion issued by the independent external auditor. This provides reasonable assurance to management, shareholders, and stakeholders regarding the achievement of the Company's objectives and business continuity, while the Company remains committed to continuously strengthening its internal control system to align with evolving business and regulatory requirements.

PERNYATAAN KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERNAL

Kecukupan pengendalian internal merupakan pilar penting dalam komitmen Perseroan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan pencapaian visi dan misi Perseroan. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif guna mendukung pencapaian tujuan Perseroan, sementara Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit, menjalankan fungsi pengawasan atas penerapannya, termasuk memantau kebijakan pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi.

Sistem pengendalian internal dirancang untuk mengelola dan memitigasi risiko secara efektif, sehingga seluruh aktivitas dan transaksi Perseroan berjalan selaras dengan tujuan Perseroan. Sistem ini mencakup pelaksanaan kegiatan operasional yang efisien dan efektif, penyusunan laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem pengendalian internal Perseroan dinilai memadai dalam mendukung pencapaian tujuan secara efektif, memastikan kepatuhan, dan menjaga keunggulan operasional.

STATEMENT OF ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL

The adequacy of internal control is a key pillar of the Company's commitment to implementing good corporate governance as the foundation for achieving its vision and mission. The Board of Directors is responsible for establishing and maintaining an effective internal control system to support the achievement of the Company's objectives, while the Board of Commissioners, with the support of the Audit Committee, oversees its implementation, including monitoring policies issued by the Board of Directors related to internal control.

The internal control system is designed to manage and mitigate risks effectively, ensuring that all activities and transactions are conducted in line with the Company's objectives. It covers efficient and effective operational activities, the preparation of accurate, complete, and timely financial and management reports, as well as compliance with applicable laws and regulations. Based on the evaluations conducted, the Company's internal control system has been assessed as adequate to support the effective achievement of objectives, ensure compliance, and maintain operational excellence.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Manajemen Risiko Perseroan merupakan kerangka kerja yang proaktif dan terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko secara efektif dan efisien, guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan kegiatan usaha. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses organisasi, Perseroan berupaya melindungi kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, sekaligus memperkuat ketahanan usaha.

Untuk mengarahkan pengawasan dan pengelolaan risiko, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, yang memastikan bahwa pertimbangan risiko terintegrasi di seluruh tingkatan manajemen serta tertanam dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mengantisipasi dampak risiko, merespons secara tepat waktu, dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang sehat.

Kerangka manajemen risiko Perseroan juga mencakup pengelolaan risiko inheren dalam kegiatan operasional, termasuk risiko terkait perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan bencana alam. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan menerapkan kerangka *Business Continuity Management* (BCM) yang menyediakan pendekatan terstruktur dalam mengelola gangguan dan menjaga keberlangsungan operasional, sekaligus memantau aktivitas yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor iklim.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menjalankan manajemen risiko dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk:

1. Menggabungkan pendekatan yang konsisten untuk manajemen risiko ke dalam budaya dan proses perencanaan strategis organisasi yang mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat operasional dan strategis.
2. Menerapkan pendekatan yang konsisten terhadap manajemen risiko untuk mendukung tanggung jawab tata kelola organisasi untuk inovasi dan pengambilan risiko yang bertanggung jawab, pengembangan kebijakan, program, dan tujuan. Dalam semua kasus, langkah-langkah yang tepat akan dilakukan untuk mengatasi dampak yang tidak menguntungkan dari risiko dan manfaat yang menguntungkan dari peluang.
3. Mengelola pendekatan yang transparan terhadap risiko melalui komunikasi dan pemantauan yang terbuka dan bermakna terhadap semua risiko utama yang menyeimbangkan biaya pengelolaan risiko dengan manfaat yang diantisipasi.

The Company's Risk Management serves as a proactive and integrated framework to identify, assess, and manage potential risks effectively and efficiently, supporting the sustainability and growth of its business operations. By embedding risk management into its organisational processes, the Company seeks to safeguard its economic, social, environmental, and governance performance while strengthening overall resilience.

To guide risk oversight and management, the Company has established a Risk Management Policy that ensures risk considerations are integrated across all management levels and embedded in business processes and decision-making. This approach enables the Company to anticipate potential impacts, respond in a timely manner, and support sound and informed strategic decisions.

The risk management framework also addresses inherent operational risks, including climate-related risks such as extreme weather events and natural disasters. To manage these risks, the Company applies a Business Continuity Management (BCM) framework that provides a structured approach to managing disruptions and maintaining operational continuity, while monitoring activities that may affect or be affected by climate-related factors.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Company carries out risk management by referring to Risk Management Policy with the following objectives:

1. Incorporate a consistent approach to risk management into an organization's strategic planning culture and processes that support decision-making and resource allocation at operational and strategic levels.
2. Apply a consistent approach to risk management to support organizational governance responsibilities for innovation and responsible risk-taking, policy development, programs, and objectives. In all cases, appropriate measures will be taken to address the unfavorable impact of the risks and the beneficial benefits of the opportunity.
3. Manage a transparent approach to risk through transparent and meaningful communication and monitoring of all key risks that balance the costs of managing risk with anticipated benefits.

Adapun lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan mencakup semua rencana, aktivitas, proses bisnis, kebijakan, prosedur dan individu yang tergabung dalam Grup SMN.

Dalam mengelola risiko berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko, Perseroan menerapkan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam melakukan proses manajemen risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko juga ditinjau secara berkala sesuai dengan antara lain perkembangan usaha Grup dan sebagai akibat dari perubahan hukum dan undang-undang.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan didukung oleh komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang tercermin melalui pengesahan Kebijakan Manajemen Risiko oleh Direksi serta pembahasan manajemen risiko secara berkala dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan rapat gabungan. Perseroan juga melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara periodik di seluruh tingkatan organisasi, dengan manajemen risiko secara konsisten menjadi agenda utama dalam rapat Direksi guna memastikan pengawasan yang efektif dan perbaikan berkelanjutan.

RISIKO UTAMA, MITIGASI DAN TINJAUAN RISIKO

Perseroan, melalui Departemen Manajemen Risiko, telah melakukan kajian serta analisa untuk mengidentifikasi risiko utama, mitigasi serta tinjauan atas risiko sebagaimana diuraikan di bawah ini:

The scope of the Company's Risk Management Policy covers all plans, activities, business processes, policies, procedures, and individuals incorporated in the SMN Group.

In managing its risks pursuant to the Risk Management Policy, the Company applies ISO 31000:2018 as a reference in carrying out the risk management process.

The Policy is also reviewed regularly in accordance with, among others, the business development of the Group and as a result of legal or statutory change.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ROLES ON RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

The effectiveness of the Company's risk management system is supported by the strong commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as reflected in the ratification of the Risk Management Policy by the Board of Directors and regular discussions on risk management in Board of Directors, Board of Commissioners, and joint meetings. The Company also conducts periodic evaluations of its risk management system across all organisational levels, with risk management consistently included as a key agenda item in Board of Directors meetings to ensure effective oversight and continuous improvement.

KEY RISKS, MITIGATION AND RISK REVIEW

The Company, through Risk Management Department, has conducted review and analysis to identify key risks, mitigation as well as risk review as provided below:

Risiko Utama Main Risks	Penjelasan Description	Mitigasi Dan Tinjauan Risiko Mitigation and Risk Review
Kredit Pelanggan Customer Credit	Risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa infrastruktur. This refers to the risk that a counterparty will fail to meet its financial obligations based on financial instruments or customer contracts, resulting in financial loss. The Company is exposed to credit risk from operational activities related to infrastructures leasing.	Risiko kredit pelanggan dikelola sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit. Customer credit risk is managed according to the Company's policies, procedures, and established controls related to credit risk management.

Risiko Utama Main Risks	Penjelasan Description	Mitigasi Dan Tinjauan Risiko Mitigation and Risk Review
Regulasi dan perizinan Regulations and Licensing	Adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, kesulitan mendapatkan ijin dan persetujuan, pencabutan, atau tidak diperpanjang ijin yang diperlukan untuk infrastruktur, penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa lokasi infrastruktur. This involves changes in government regulations and policies, difficulties in obtaining permits and approvals, revocation, or non-renewal of necessary permits for infrastructures, and rejection by local communities of certain infrastructures locations.	Perseroan memantau perkembangan lokasi infrastruktur yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi infrastruktur, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi manfaat ekonomis dari infrastruktur kepada masyarakat sekitarnya. The Company monitors the development of infrastructures locations to be built, acquired, or already existing. The Company also maintains and nurtures relationships with regulators and local communities to ensure the continuity of land leases, infrastructures site development, and land acquisition. The Company actively engages with the community to educate them about the economic benefits of infrastructures to the surrounding area.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Health and Safety	Adanya risiko pekerja vendor mengalami kecelakaan kerja, baik selama proses pembangunan maupun <i>maintenance</i> infrastruktur dan non infrastruktur, seperti: A risk of vendor workers experiencing work accidents, both during infrastructures and non- infrastructures construction and maintenance processes, such as: • Jatuh dari ketinggian Falling from heights • Tersengat listrik Electric shocks • Tertimpa material Struck by materials • Tertabrak Crash accidents • Mengangkat beban berat, terkilir Lifting heavy loads, spraining • Tersambar petir Struck by lightning • Dan risiko lainnya And other risks.	Perseroan memiliki sistem dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dijalankan oleh vendor. Sistem dan aturannya meliputi persyaratan penggunaan APD, sertifikasi bekerja di ketinggian, serta persyaratan dokumen K3 seperti: <i>Job Safety Analysis</i>, <i>QHSE briefing</i>, <i>Permit Letter</i>, dll. The Company has a system and rules for occupational health and safety that must be followed by vendors. The system and rules include requirements for using Personal Protective Equipment (PPE), certification for working at heights, and OHS document requirements such as Job Safety Analysis, QHSE briefing, Permit Letter, etc. Aturan tersebut diatas dan kebijakan K3 yang lain diinfokan/disosialisasikan kepada vendor melalui email <i>blast</i> QHSE setiap bulan. The above rules and other OHS policies are communicated to vendors via monthly QHSE email blasts. Selain itu, Perseroan juga melakukan monitoring terhadap implementasi yang dijalankan oleh vendor melalui random HSE <i>inspection</i>, ISO internal audit, ISO <i>external audit</i>, <i>emergency site drill</i>, dll. The Company also monitors the implementation by vendors through random HSE inspections, internal ISO audits, external ISO audits, emergency site drills, etc.
Likuiditas Liquidity	Risiko apabila Perseroan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo. This risk occurs when the Company encounters difficulties in meeting financial obligations when they become due.	Perseroan mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Selain itu, Perseroan menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas. The Company maintains adequate cash and bank balances to support business activities in a timely manner. In addition, the Company also maintains a balance between the continuity of accounts receivable collection and through the flexibility of using bank loans to manage liquidity risk. Perseroan juga menggunakan alat perencanaan likuiditas untuk memonitor risiko likuiditas. The Company also utilizes liquidity planning tools to monitor liquidity risk.

Risiko Utama Main Risks	Penjelasan Description	Mitigasi Dan Tinjauan Risiko Mitigation and Risk Review
Bencana Alam Natural Disaster	Bencana alam muncul tanpa diduga dan bisa mengganggu keberlanjutan bisnis, yang berpotensi akan kehilangan <i>revenue</i>, berdampak pada sumber daya Perseroan dan mengganggu pemberian pelayanan kepada pelanggan. Kejadian seperti ini juga akan menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur Menara dan Non-Menara, yang berakibat pada jaringan dan kemampuan operasional. Natural disasters occurs unexpectedly and can disrupt business continuity, result in potential revenue loss, impact the Company's human resources, and interrupt services to customers. Such events may also cause physical damage to both tower and non-tower infrastructure, affecting network availability and operational reliability.	Perseroan menggunakan Asuransi untuk mengcover semua Menara dan Non-Menara, dan juga kebijakan <i>self-insured</i>. Company use insurance to coverage all tower and non-tower, also policy self-insured. Perencanaan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis telah diperkuat melalui update pembentukan Tim Tanggap Darurat, <i>On-Site Drills</i>, program <i>awareness health & safety</i>, dan implementasi program IT <i>Disaster Recovery</i>. Sebagai tambahan, saat ini Perseroan juga sedang dalam proses pengembangan Keberlanjutan Usaha (<i>Business Continuity</i>) untuk menambah ketahanan operasional Perseroan. Emergency Response and Crisis Management plans have been strengthened through the establishment of Emergency Response Teams, on-site drills, health and safety awareness programs, and the implementation of an IT Disaster Recovery Program. In addition, the Company is currently in the process of developing a Business Continuity Plan to further enhance operational resilience.
Perubahan Iklim Climate Change	Risiko muncul dikarenakan perubahan yang signifikan pada pola cuaca global dan temperatur dimana dapat mempengaruhi operasional, keuangan dan reputasi Perseroan. This risk occurs due to significant changes in global weather patterns and temperatures that can affect company's operations, finances, and reputation. Ini juga termasuk risiko diantara para pekerja kontraktor yang mengalami kecelakaan kerja, karena kondisi cuaca ekstrim (seperti: terpapar cahaya, hujan deras, perubahan cuaca ekstrim), keduanya termasuk proses pembangunan dan perawatan infrastruktur Menara dan Non-Menara. This involve risk among contractor workers experiencing work accidents, due to extreme weather conditions (such as: exposed to sunlight, heavy rain, extreme climate change), both during tower and non-tower infrastructure construction and maintenance processes.	Perseroan telah memasukan risiko cuaca ekstrim kedalam HIRADC, termasuk penggunaan dari alat pelindung diri (<i>helm safety</i>, sepatu <i>safety</i>, baju pelindung panjang), peralatan hidrasi, penggunaan <i>sunscreen</i>, dan penghentian pekerjaan jika kondisi cuaca ekstrim. <i>Awareness</i> Kesehatan dan Keselamatan Kerja terus dilakukan kepada Karyawan dan pekerja kontraktor untuk mengurangi risiko operasional dan keselamatan. The Company has incorporated extreme weather risks into its HIRADC, including the use of appropriate PPE (safety helmets, safety shoes, long-sleeved clothing), hydration practices, <i>sunscreen</i> usage, and work stoppage during adverse weather conditions. Health and safety awareness is continuously promoted among employees and contractor workers to minimize operational and safety risks.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan penerapan manajemen risiko, Departemen Manajemen Risiko senantiasa berupaya meningkatkan komitmen pimpinan Perseroan untuk memberi dukungan dan kontribusi penuh dalam pelaksanaan manajemen risiko, mengembangkan budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) ke seluruh proses Perseroan dengan menitikberatkan konsep risiko sebagai tanggung jawab setiap orang (*risk is your responsibility*) melalui sosialisasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO (*RISK MATURITY LEVEL*)

Risk Maturity Level mengacu pada sejauh mana Perseroan mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan mengintegrasikan praktik manajemen risiko ke dalam operasi dan budayanya. Berikut Tahapan *Risk Maturity Level* di Perseroan:

RISK CULTURE IMPROVEMENTS

To enhance effectiveness and achieve the objectives of risk management implementation, the Risk Management Department strives to elevate the commitment of the Company's leadership to provide full support and contribution in the implementation of risk management, develop a risk awareness culture throughout the Company's processes by emphasizing the concept of risk as your responsibility through socialization and continuous learning.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM (*RISK MATURITY LEVEL*)

Risk Maturity Level refers to the degree to which the Company identifies, understands, manages, and integrates risk management practices into its operations and culture. The following are stages of *Risk Maturity Level* in the Company:

Inisial (Ad-hoc): Pada tahap ini, manajemen risiko bersifat informal dan reaktif. Proses belum secara standar, dan respons terhadap risiko biasanya bersifat ad-hoc dan tidak terkoordinasi.

Berkembang: Perseroan mulai menyadari pentingnya manajemen risiko. Beberapa proses dikembangkan, namun belum secara konsisten diterapkan di seluruh organisasi.

Didefinisikan: Proses manajemen risiko secara formal ditetapkan dan didokumentasikan. Ada pendekatan yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, tetapi integrasi ke dalam perencanaan strategis namun masih terbatas.

Dikelola: Manajemen risiko diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Perseroan secara proaktif mengelola risiko dan mengambil pendekatan yang lebih strategis terhadap manajemen risiko.

Dioptimalkan: Pada tingkat tertinggi ini, manajemen risiko tertanam dalam budaya Perseroan dan proses perencanaan strategis. Perseroan terus meningkatkan praktik manajemen risiko dan menggunakan informasi risiko untuk mendapatkan keuntungan strategis dan mendorong kinerja.

Efektivitas Risk Maturity Level di Perseroan

Perseroan telah memahami dan menilai Tingkat Kematangan Risiko Perseroan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memandu pengembangan strategi manajemen risiko yang lebih canggih. Tingkat kematangan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Perseroan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan, membuatnya lebih tangguh dan mampu mencapai tujuannya.

Initial (Ad-hoc): At this stage, risk management is informal and reactive. Processes are not standardized, and responses to risks are typically ad-hoc and uncoordinated.

Developing: The Company begin to recognize the importance of risk management. Some processes are developed, but they may not be consistently applied across the organization.

Defined: Risk management processes are formally established and documented. There is a more systematic approach to identifying and assessing risks, but integration into strategic planning may still be limited.

Managed: Risk management is integrated into business processes and decision-making. The Company proactively manages risks and takes a more strategic approach to risk management.

Optimized: At this highest level, risk management is deeply embedded in the Company's culture and strategic planning processes. The Company continuously improves its risk management practices and uses risk information to gain strategic advantage and drive performance.

Effectiveness of Risk Maturity Level in the Company

The Company has understood and assessed the Company's Risk Maturity Level to identify areas for improvement and guide the development of more sophisticated risk management strategies. A higher maturity level indicates that the Company is better prepared to address uncertainties and challenges, making it more resilient and capable of achieving its objectives

PERMASALAHAN HUKUM

LITIGATION

Tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Perseroan, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025.

There were no legal cases with a material impact faced by the Company, members of the Board of Directors, or members of the Company's Board of Commissioners during 2025.

SANKSI ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material bagi Perseroan, yang dikenakan oleh pihak regulator atau otoritas (OJK, Bank Indonesia, BEI, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi selama tahun 2025.

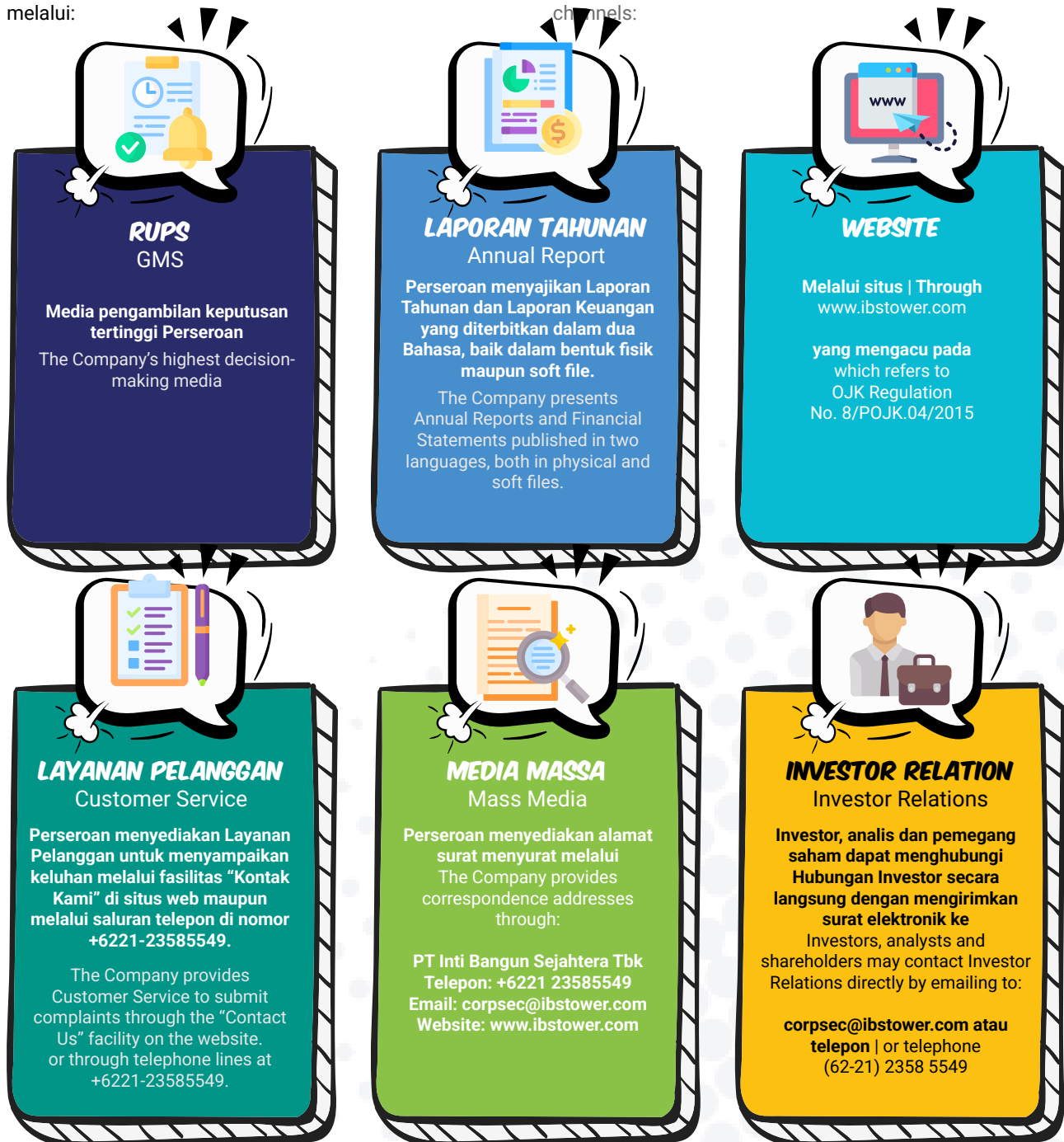
There were no material administrative sanctions imposed on the Company by regulators or authorities (OJK, Bank Indonesia, IDX, and other authorities) on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors during 2025.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Sebagai bagian integral dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Perseroan senantiasa memastikan kemudahan akses bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap informasi Perseroan yang lengkap, relevan, dan terkini. Pengungkapan informasi dilakukan oleh pejabat atau unit kerja yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Informasi terkait Perseroan disampaikan melalui:

As an integral part of the implementation of good corporate governance principles aimed at enhancing transparency and accountability, the Company consistently ensures easy access for shareholders and other stakeholders to complete, relevant, and up-to-date Company information. Information disclosure is carried out by authorised officers or units in accordance with their respective duties and responsibilities. Company-related information is disseminated through the following channels:



KEBIJAKAN PRIVASI DATA DAN INFORMASI

DATA AND INFORMATION PRIVACY POLICY

Kebijakan Teknologi Informasi (Kebijakan TI) secara umum bertujuan untuk memastikan proses bisnis berjalan efisien sehingga Perseroan dapat melayani pelanggannya dengan baik, termasuk untuk menyajikan kondisi bisnis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

Secara lebih rinci Kebijakan TI Grup memuat antara lain hal-hal berikut:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perseroan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk menciptakan kesadaran bagi pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perseroan, serta berupaya meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perseroan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna untuk melindungi data rahasia Perseroan dengan melakukan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga dan menjaga keamanan data rahasia Perseroan, melindungi perangkat yang mereka gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dll.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
5. Klasifikasi data dan penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia dan data non-rahasia. Ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang harus disimpan dengan kerahasiaan yang paling ketat, dimana akses terhadap data tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol domain Perseroan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk lebih mengamankan infrastruktur Perseroan, aplikasi bisnis dan data serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk malware, virus, dan pelaku ancaman lainnya. Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada firewall, VPN, anti virus, teknologi web-filter, email security serta *Security Operations Center* ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perseroan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, dan jejak audit dari akses tersebut.

The Information Technology Policy (IT Policy) is generally aimed at ensuring business processes run efficiently so that the Company can serve its customers effectively, including providing accurate business conditions as a basis for management decision-making.

More specifically, the Group IT Policy includes the following aspects:

1. General IT security implementation to protect the Company's confidential data, business applications, and other IT infrastructure from cybersecurity threats.
2. Routine communication efforts to raise awareness among IT users about the importance of IT security for the Company's business operations, as well as to enhance the role and contribution of users in protecting the Company from cybersecurity threats.
3. User responsibilities in protecting the Company's confidential data by conducting work activities responsibly, including adhering to IT security guidelines, maintaining the confidentiality of Company data, and securing the devices they use in daily work operations.
4. Procedures and management of data storage.
5. Data classification and explanation, covering personal data, highly confidential data, and non-confidential data. Provisions regarding the storage of personal and highly confidential data require the strictest confidentiality measures, with access granted on a need-to-know basis and managed within the Company's domain control system. Any new or modified access requests must be submitted to the IT administrator with approval from the respective division head.
6. Security measures to protect the Company's IT infrastructure, business applications, data, and end-user devices from potential cybersecurity threats, including malware, viruses, and other cyber threats. Implemented measures include firewalls, VPNs, antivirus software, web filtering technology, email security, and the establishment of a Security Operations Center (SOC) for cybersecurity threat monitoring.
7. Provisions regarding the Company's business applications and IT Infrastructure equipped with password-protected access, and audit trails of such access.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Perseroan mengelola rantai pasok melalui Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur standar kualitas, ketepatan waktu pengadaan, serta kesesuaian sumber pengadaan. Kebijakan ini diterapkan melalui perencanaan yang terstruktur, proses pengadaan, dan pengendalian yang efektif, dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan tersebut berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan terkait proses pengadaan.

Untuk mendukung praktik pengadaan yang berkelanjutan dan profesional, Perseroan menerapkan proses seleksi pemasok yang terstruktur melalui Pedoman Proses Operasional Pengadaan dan Manajemen Vendor. Pedoman ini mengatur mekanisme pengadaan dan pengelolaan mitra usaha, termasuk metode pengadaan, tata cara pelaksanaan, strategi efisiensi biaya, serta sistem evaluasi kinerja pemasok berdasarkan parameter yang terukur, sehingga memastikan transparansi, ketepatan, dan konsistensi dalam setiap kegiatan pengadaan.

Untuk menyeleksi pemasok, pada tahap awal Perseroan memiliki persyaratan tertentu yang harus diinformasikan oleh calon pemasok, diantaranya informasi mengenai:

1. Perusahaan calon pemasok, termasuk lingkup kerjanya;
2. Kinerja keuangan pemasok;
3. Peralatan kerja yang dimiliki pemasok;
4. Untuk pemasok yang mengerjakan project tertentu, pengalaman kerja pada project sejenis sebelumnya;
5. Kemampuan dan kapasitas kerja pemasok;
6. Kompetensi pemasok; dan
7. Pekerja dan tim yang dimiliki, termasuk tenaga ahli.

Setelah penunjukan pemasok, Perseroan mewajibkan pemasok untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas. Melalui pernyataan tersebut, pemasok diwajibkan untuk berkomitmen menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip keberlanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Praktik tanggung jawab sosial yang mencakup aspek bisnis yang beretika, termasuk kepatuhan pemasok dalam ketentuan anti korupsi, pencucian uang maupun penyuapan dan gratifikasi,
2. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja,
3. Pengembangan sumber daya manusia,

The Company manages its supply chain through the Procurement of Goods and Services Policy, which governs quality standards, timely delivery, and appropriate sourcing. The policy is implemented through structured planning, procurement processes, and effective controls, while ensuring compliance with applicable laws and regulations in Indonesia. It is grounded in the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, and serves as a key guideline for decision-making related to procurement activities.

To support sustainable and professional procurement practices, the Company applies a structured supplier selection process through the Procurement Operational Process and Vendor Management Guidelines. These guidelines regulate procurement mechanisms and business partner management, including procurement methods, implementation procedures, cost-efficiency strategies, and supplier performance evaluation based on measurable parameters, thereby ensuring transparency, accuracy, and consistency in every procurement activity.

To select suppliers, the Company requires specific initial criteria that must be provided by prospective suppliers, including:

1. Information about the supplier company, including its scope of work;
2. Financial performance of the supplier;
3. Work equipment owned by the supplier;
4. Experience in similar projects, specifically for suppliers working on certain projects;
5. Work capability and capacity of the supplier;
6. Competency of the supplier;
7. Workforce and team members, including experts and specialists.

Following the appointment of suppliers, the Company requires them to sign a statement of compliance and integrity. Through this declaration, suppliers are required to commit to conducting their operations in accordance with sustainability principles, including but not limited to:

1. Ethical business practices, including compliance with anti-corruption, anti-money laundering, anti-bribery, and gratuity regulations,
2. Occupational safety and health management,
3. Human resource development,

4. Menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan menghindari diskriminasi terhadap pekerja dan eksploitasi tenaga kerja serta mematuhi larangan penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan
5. Melakukan pekerjaan dengan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan hidup maupun perubahan iklim.

Dalam menjalankan pengadaan, Perseroan mengutamakan penggunaan pemasok lokal untuk memberikan manfaat lebih terhadap perekonomian secara tidak langsung.

Penilaian Pemasok

Untuk menjamin produk dan/atau jasa yang berkualitas, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi kinerja mitra kerja yang aktif pada periode evaluasi tersebut. Tujuan evaluasi diantaranya untuk memastikan bahwa pemasok bekerja sesuai dengan *Key Performance Indicators* dan *Service Level Agreement* yang telah disepakati. Pengukuran kinerja pemasok dilakukan berdasarkan parameter penilaian yang terdiri dari ketepatan waktu, kualitas, kepatuhan administratif, penganggaran dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan.

Untuk meningkatkan keterlibatan pemasok/vendor engagement, Perseroan juga memberikan penghargaan, performance improvement program, maupun punishment kepada pemasok sesuai dengan hasil evaluasi kinerjanya.

4. Respecting workers' rights and avoiding discrimination, labor exploitation, and child labor violations, and
5. Performing work while considering environmental and climate change factors.

In the procurement process, the Company prioritizes local suppliers to indirectly contribute to the economy.

Supplier Evaluation

To ensure high-quality products and/or services, the Company periodically evaluates the performance of active business partners during the evaluation period. The purpose of this evaluation is to ensure that suppliers operate in accordance with the agreed Key Performance Indicators (KPIs) and Service Level Agreements (SLAs). Supplier performance is measured based on evaluation parameters, which include timeliness, quality, administrative compliance, budgeting, and the support provided to the Company.

To enhance supplier/vendor engagement, the Company also implements reward programs, performance improvement programs, and penalties for suppliers based on the results of their performance evaluations.

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Kode Etik merupakan pilar utama dalam mendukung keberlanjutan jangka panjang Perseroan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka peraturan internal perusahaan, yang memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan berintegritas, termasuk dalam berinteraksi dengan rekan kerja, pelanggan, mitra usaha, pemegang saham, regulator, instansi pemerintah, serta masyarakat luas. Sebagai pedoman yang dinamis dan adaptif, Kode Etik ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan operasional dan tantangan industri, sehingga memastikan keselarasan dengan standar etika dan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta memperkuat budaya perusahaan yang berlandaskan integritas dan profesionalisme.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK

Pokok-pokok kode etik Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja
2. Pedoman Perilaku
3. Perilaku Integritas
4. Patuh Hukum
5. Benturan Kepentingan Dalam Internal Perseroan
6. Hadiah, Jamuan, dan Hiburan

PERNYATAAN KODE ETIK

Kode Etik berlaku di lingkungan Perseroan, termasuk kantor-kantor operasionalnya di seluruh Indonesia. Setiap Individu Perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi serta Mitra Kerja wajib untuk membaca, memahami, mematuhi, dan mentaati serta melaksanakan dengan benar dan sebaik-baiknya terhadap segala ketentuan yang ditetapkan.

SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Sosialisasi

Sosialisasi Kode Etik dilaksanakan secara berkesinambungan hingga menjangkau seluruh karyawan, manajemen, Direksi dan Dewan Komisaris untuk dipahami, dipelajari, dipatuhi dan dilaksanakan. Perseroan juga menginformasikan mengenai Kode Etik kepada para mitra kerja/pihak eksternal yang mempunyai hubungan kerja dengan Perseroan sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama dengan Perseroan, baik melalui situs web Perseroan dan laporan tahunan Perseroan.

The Code of Conduct is a fundamental pillar of the Company's long-term sustainability and an integral part of its corporate regulatory framework, providing clear guidance for all employees to conduct business with professionalism and integrity in interactions with colleagues, customers, business partners, shareholders, regulators, government institutions, and the wider community. As a dynamic and adaptive guideline, the Code of Conduct is reviewed and updated regularly to remain relevant to operational developments and industry challenges, ensuring alignment with ethical standards and good corporate governance practices while strengthening a corporate culture grounded in integrity and professionalism.

PRINCIPLES OF CODE OF CONDUCT

The main points of the Company's code of conduct are as follows:

1. Principles of Business Ethics and Work Ethics
2. Code of Conduct
3. Behavioral Integrity
4. Legal Compliance
5. Internal Conflict of Interest
6. Gifts, Reception, and Entertainment

STATEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

THE Code of Conduct applies within all the Company's premises including its operational offices throughout Indonesia. Every Company Personnel, including Commissioners and Directors and Business Partner must read, understand, comply with, follow and implement all provisions contained herein properly.

SOCIALIZATION, APPLICATION, AND ENFORCEMENT OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

Socialization

Socialization of the Code of Conduct is conducted continuously to reach all employees, management, BoD, and BoC for them to understood, studied, followed, and implemented. The Company also informs its business partners/external parties who have a working relationship with the Company about the Company's Code of Conduct as a guideline when they are collaborating with the Company, which available on the Company's website and the Company's annual report.

Penerapan

Penerapan Kode etik merupakan tugas dan kewajiban seluruh Individu Perseroan.

1. Dewan Komisaris dan Direksi
Menempatkan diri sebagai contoh yang baik dalam melaksanakan nilai-nilai etika dan perilaku Perseroan.
2. Pimpinan
 - a. Meyakini bahwa seluruh jajarannya telah mendapatkan Kode Etik dan Peraturan Perseroan serta mengerti dan memahami juga secara berkesinambungan, mengkomunikasikan pentingnya pelaksanaan Kode Etik tersebut dan memantau penerapannya.
 - b. Memastikan setiap Karyawan dalam unit kerjanya menjalankan Kode Etik.
 - c. Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada Karyawan dalam unit kerjanya.
 - d. Melaporkan dan melakukan eskalasi suatu kecurigaan, indikasi, dan/atau kejadian pelanggaran kepada pihak terkait atau melalui media pelaporan.
3. Karyawan
 - d. Membaca, memahami dan menerapkan Kode Etik.
 - e. Melaporkan kepada atasan atau melalui media pelaporan apabila mencurigai terjadinya pelanggaran maupun percobaan pelanggaran etika bisnis dan etika kerja.

Penegakan

Setiap Individu Perseroan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib, baik yang diatur dalam Kode Etik maupun Peraturan Perseroan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan norma-norma kesusilaan umum dapat dikenakan sanksi indisipliner dengan memperhatikan sifat dan kadar/bobot pelanggaran yang dilakukan, antara lain macam pelanggaran, frekuensi pelanggaran, besar kecil atau berat ringannya pelanggaran dan unsur kesengajaan. Sanksi indisipliner yang dikenakan dapat berakibat kepada pemberian teguran baik lisan maupun tulisan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Sanksi indisipliner mengacu kepada Peraturan Perseroan yang berlaku, seperti: Teguran Lisan dan Teguran Tulisan (Surat Peringatan 1,2,3) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Application

The application of the Code of Conduct is the duty and obligation of all the Company Personnel.

1. The Board of Commissioners and Directors
The Commissioners and Directors should serve as a role model in the application of the Company's ethical values and corporate behavior.
2. Managers
 - a. Ensuring that all personnel have received the Code of Ethics and Company Regulations, understand and comprehend them, and continuously communicate the importance of their implementation while monitoring compliance.
 - b. Ensuring that all Employees in their work units implement the Code of Conduct.
 - c. Disseminating Code of Conduct for employees within their respective work units.
 - d. Reporting and escalating any suspicions, indications, and/or violations to the relevant parties or through designated reporting channels.
3. Employees
 - d. Reading, understanding, and implementing the Code of Ethics.
 - e. Reporting any suspected violations or attempts of business and work ethics violations to a superior or through designated reporting channels.

Enforcement

Every personnel who violates the code of conduct, both in the Company's Code of Conduct and regulations, applicable labor laws, and common norms of general decency, may be subject to disciplinary sanctions based on nature and extent/weight of the violation among others, types of violations, frequency of violations, size or severity of violations and the element of intent. The sanctions may be in the form of verbal and written warnings or termination of employment.

SANCTION FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

The sanctions are given based on the applicable Company Regulations, such as: Oral and Written Reprimands (Warning Letters 1,2,3) and Termination of Employment (PHK) in accordance with the applicable laws and regulations.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Perseroan menerapkan pemberian sanksi bagi setiap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi atas pelanggaran kode etik.

TOTAL VIOLATION OF CODE OF CONDUCT AND SANCTION GIVEN

The Company imposes sanctions on any employee who violates the applicable provisions. Throughout 2025, there were no sanctions for violations of the code of conduct.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR

COMPANY'S POLICY ON CREDITOR'S RIGHTS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK 21/2015, Perseroan telah memiliki Kebijakan untuk Memenuhi Hak Kreditur ("Kebijakan"). Perseroan berharap Kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Perseroan dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga dan pemenuhan atas hak-hak kreditur.

Perseroan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga, antara lain:

1. Mematuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk mempertahankan izin-izin yang diperlukan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti persetujuan dari para pemegang saham;
3. Memperhatikan hak-hak kreditur dalam perjanjian pinjaman yang telah ada; dan
4. Memastikan kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi yang sehat dengan memelihara Rasio atas Utang Bersih terhadap EBITDA yang Berjalan dan *Debt Services Coverage Ratio*.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan para kreditur, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

In reference with the implementation of good corporate governance as required by OJK Regulation 21/2015, the Company has established a Policy for Fulfilling Creditors' Rights ("Policy"). This Policy serves as a guideline for the Company in obtaining loans from third parties and ensuring the fulfillment of creditors' rights.

The Company shall consider the following factors prior to obtaining a loan facility from a third party, among others:

1. Complying with applicable laws and regulations as well as maintaining necessary licenses which are required by the Company to conduct their business activities;
2. Complying with the provisions on the Articles of Association, such as to obtain approval from the shareholders when required;
3. Respecting the rights of the creditors on loans; and
4. Ensuring the financial conditions is in a healthy condition by maintaining the Ratio on Net Debt to Running EBITDA and the Debt Services Coverage Ratio.

This Policy is intended to maintain trust from our creditors, investors and stakeholders and to address their rights.

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI

ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY

Dalam menjalankan kegiatan usaha secara transparan, jujur, dan berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan, serta sebagai bagian dari Grup SMN, Perseroan menerapkan kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi ("**Kebijakan**") sebagai landasan dalam operasional bisnis dan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan usaha. Komitmen ini diperkuat dengan diperolehnya Sertifikasi ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management System*, yang mencerminkan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan pencegahan korupsi secara terstruktur dan berkelanjutan di seluruh lini operasional.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, serta mengikat mitra usaha Perseroan. Perseroan mewajibkan seluruh pihak terkait untuk mematuhi peraturan yang berlaku, menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk penyuapan, gratifikasi, dan praktik tidak etis lainnya. Perseroan juga melarang pemberian maupun penerimaan hadiah atau fasilitas yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, kecuali dalam batas kewajaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Perseroan memastikan bahwa penggunaan aset Perseroan dilakukan secara bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga, termasuk melalui proses identifikasi dan mitigasi risiko, seperti risiko pencucian uang. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini wajib dilaporkan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan, serta meminta pernyataan pengakuan dan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk memahami dan mematuhi kebijakan ini, ketentuan internal, dan peraturan yang berlaku.

In conducting its business in a transparent, honest, and integrity-driven manner in accordance with applicable laws and regulations, and as part of the SMN Group, the Company implements an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy ("**Policy**") as a foundation for its business operations and relationships with all stakeholders to support business sustainability. This commitment is further reinforced by the attainment of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification, reflecting the structured and ongoing implementation of anti-bribery and corruption prevention practices across all operational lines.

This Policy applies to all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees, and is also binding on the Company's business partners. The Company requires all related parties to comply with the applicable regulations, avoid conflicts of interest, and reject all forms of bribery, gratuities, and other unethical practices. The Company also prohibits the giving or receiving of gifts or facilities that may influence decision-making, except within reasonable limits and in accordance with the applicable provisions.

In addition, the Company ensures that the use of the Company's assets is carried out responsibly, and applies the prudential principle in establishing business relationships with third parties, including through risk identification and mitigation processes, such as money laundering risk. Any violation of this Policy must be reported and will be followed up in accordance with the applicable provisions.

The Company periodically conducts socialization and training, and requires statements of acknowledgment and commitment from all related parties to understand and comply with this Policy, internal provisions, and the applicable regulations.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI

POLICY ON THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR INFORMATION TRANSPARENCY

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK 21/2015, Perseroan menyusun Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Keterbukaan Informasi ("**Kebijakan**"). Perseroan berharap dengan Kebijakan tersebut dapat memperluas pemberian informasi kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial sehubungan dengan kinerja dan kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai perusahaan publik yang tercatat, Perseroan wajib menyampaikan informasi material Perseroan sesuai dengan hukum pasar modal yang berlaku di Indonesia, antara lain, menyediakan informasi tersebut pada situs web Perseroan. Selain dengan situs web Perseroan, Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial setiap kali Perseroan merilis laporan keuangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat elektronik sehubungan dengan kondisi dan rencana kegiatan Perseroan; dan
2. Mengadakan pertemuan investor baik dalam bentuk tatap muka maupun konferensi telepon (bila diperlukan).

Perseroan berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

In implementing good corporate governance as required under OJK Regulation 21/2015, the Company has established an Information Technology Utilization Policy for Information Disclosure ("**Policy**"). Through this Policy, the Company aims to broaden the dissemination of information to shareholders, stakeholders, and potential investors regarding the Company's performance and business activities.

As a publicly listed company, the Company must disclose its material information in accordance with the prevailing capital market laws in Indonesia, among others, by publishing its information to public on the Company's website. Other than the Company's website, the Company is optimizing the use of information technology to spread information to shareholders and stakeholders as well as potential investors each time the Company release its financial report, by using the following methods:

1. Sending electronic mail regarding the Company's condition and business plan; and
2. Holding investor gatherings in the form of real meetings or conference calls (if needed).

The Company believes that this Policy will maintain the trust from our shareholders, investors and stakeholders towards the Company and to fulfill their rights.

KEBIJAKAN TRANSAKSI EFEK BAGI ORANG DALAM

INSIDER TRADING TRANSACTION POLICY

Perseroan telah memiliki kebijakan transaksi efek bagi orang dalam, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta memperkuat penerapan prinsip GCG. Kebijakan ini mengatur tata cara dan batasan transaksi efek bagi pihak yang memiliki akses terhadap informasi material yang belum tersedia untuk publik, guna mencegah praktik insider trading yang dapat merugikan integritas pasar dan Perseroan.

Berikut adalah ketentuan utama yang mengatur transaksi efek bagi orang dalam:

1. Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang untuk: (i) melakukan pembelian atau penjualan; (ii) memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan; atau (iii) memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan; atas efek Perusahaan atau atas efek perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Perseroan (dengan memperhatikan pengecualian berdasarkan POJK No. 78/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam).
2. Perseroan memisahkan secara tegas informasi dan/ atau data Perusahaan yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik. Kebutuhan permintaan atas informasi dan/ atau data Perseroan yang bersifat rahasia wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan, sedangkan untuk informasi dan/atau data Perseroan yang bersifat publik telah disajikan dalam situs web Perseroan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.
3. Setiap individu dalam Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secepatnya pada kesempatan pertama kepada Direksi apabila mengetahui adanya kebocoran kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan kepada pihak luar.

Kebijakan ini telah disusun dan disahkan oleh Direksi pada tanggal 29 Agustus 2017 dan telah dimutakhirkan dan disahkan terakhir oleh Direksi pada tanggal 2 Januari 2024.

Perseroan memastikan bahwa informasi dirilis ke pasar secara seimbang, adil dan tepat waktu sehingga aktivitas atau pihak orang dalam sehubungan dengan perdagangan sekuritas Perseroan dilakukan hanya berdasarkan keseimbangan informasi tersedia untuk orang dalam (Perseroan) dan masyarakat umum.

The Company has established an insider trading policy to ensure compliance with applicable regulations and reinforce the implementation of GCG principles. This policy outlines the guidelines and restrictions for securities transactions conducted by individuals with access to material, non-public information, aiming to prevent any practices that could compromise market integrity and the Company's reputation.

The key provisions governing insider trading transactions are as follows:

1. An Insider of the Company that has Inside Information is prohibited to: (i) buy or sell; (ii) influence other parties to buy or sell; or (iii) provide inside information to other parties whom based on the insider's reasonable judgment, would use the inside information to buy or sell, securities issued by the company or other company that has dealings with the Company (subject to applicable exemption under OJK Regulation No. 78/POJK.04/2017 dated 21 Desember 2017 regarding Securities Transactions Not Prohibited for Insiders).
2. The Company clearly separates between confidential and public information and/or data of the Company. Request for confidential information and/or data are subject to the BoD approval, and for public information and/or data related to the Company are available in the Company's website to easily accessed by the party who may need it.
3. Any personnel of the Company are mandatory to report to the BoD at the first opportunity, in case, there is any disclosure of the Company's confidential information and/ or data to external party.

This policy has been drafted and approved by the Board of Directors on August 29, 2017, and has been last updated and reapproved by the Board of Directors on January 2, 2024.

The Company ensures that information is released to the market in a balanced, fair and timely manner, so that the activity of a so- called of an insider, in relation to the trading of securities of the Company, is done only on the basis of a balance of information available to both (Company) insiders and the general public.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARES OPTION PROGRAMS

Selama tahun buku 2025, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi dalam hal pemberian program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

During fiscal year 2025, the Company did not conduct any corporate action related to the employee and/or management shares option programs.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah menetapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pelaporan bagi pihak yang ingin menyampaikan dugaan pelanggaran di lingkungan Perseroan. WBS dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memastikan setiap laporan ditangani secara independen dan profesional, sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjaga integritas usaha dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik tidak etis di seluruh area operasional.

Tindakan pelanggaran dalam konteks WBS tersebut, antara lain:

1. Penipuan/kecurangan/penggelapan;
2. Pelanggaran hukum dan peraturan; dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perseroan, perjanjian kerja, Kode Etik, dan kebijakan tertulis lainnya dari Perseroan.

As part of its commitment to good corporate governance, the Company has established a Whistleblowing System (WBS) as a reporting mechanism that enables whistleblowers to report suspected violations within the Company. The WBS is designed to strengthen transparency and accountability while ensuring that every report is handled independently and professionally, reflecting the Company's commitment to maintaining business integrity and a work environment free from unethical practices across all operational areas.

The following are some of the violations within the WBS contexts:

1. Fraud/cheating/embezzlement;
2. Violation of laws and regulations; and Violation of Company Regulations, agreements work, Code of Ethics, and other written policies of the Company.

TATA CARA PENYAMPAIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WBS menyediakan sarana komunikasi yang aman bagi karyawan, mitra usaha, dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran, pelanggaran peraturan, ketidakpatuhan terhadap kebijakan Perseroan, atau perilaku tidak etis. Seluruh laporan yang disampaikan melalui WBS diproses melalui mekanisme verifikasi dan investigasi yang terstruktur, dengan hasilnya dilaporkan kepada pihak berwenang di lingkungan Perseroan. Laporan dapat disampaikan melalui saluran berikut:

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

The WBS provides a secure communication channel for employees, business partners, and external parties to report suspected misconduct, regulatory violations, breaches of Company policies, or unethical behaviour. All reports submitted through the WBS are processed through a structured verification and investigation mechanism, with the results reported to the relevant authorities within the Company. Reports may be submitted through the following channels:



Email : whistleblower.protelindogroup@protelindo.co.id
WhatsApp : 08174922964/087844530366
Anonymous link: <https://www.ptsmn.co.id/contact-us/whistleblowing-system/form>

Selain itu, Perseroan juga dapat menggunakan berbagai sumber dalam menerima dan menindaklanjuti laporan.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLE BLOWER

Perseroan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan dari segala bentuk tindakan pembalasan, termasuk intimidasi atau tekanan. Setiap pihak yang menyampaikan laporan berhak memperoleh perlindungan hukum dari Perseroan, dengan seluruh laporan ditangani secara aman dan bertanggung jawab. Melalui komitmen ini, Perseroan mendorong budaya pelaporan yang terbuka dan bertanggung jawab serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan praktik usaha yang beretika.

PENANGANAN PENGADUAN

Pengelolaan laporan yang disampaikan melalui WBS dilakukan oleh Komite *Whistleblower System* Grup SMN guna memastikan bahwa seluruh laporan ditangani secara independen, transparan, dan profesional. Seluruh informasi yang disampaikan oleh pelapor dijaga kerahasiaannya secara ketat, dan setiap laporan dievaluasi dari aspek administratif, operasional, dan hukum. Apabila informasi awal dinilai memadai, investigasi lanjutan akan dilakukan untuk menilai kebenaran laporan, sedangkan laporan yang berada di luar ruang lingkup WBS akan diteruskan kepada unit atau departemen terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite WBS meliputi:

1. Menerima dan mendokumentasikan laporan yang masuk;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pelanggaran;
3. Melakukan investigasi;
4. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
5. Memberikan perlindungan kepada Pelapor; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

HASIL PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pada tahun 2025, tidak terdapat laporan yang diterima melalui *Whistle Blowing System*.

In addition, the Company may use various sources in receiving and following up on reports.

PROTECTION OF WHISTLE BLOWERS

The Company is committed to safeguarding the confidentiality of whistleblowers' identities and ensuring protection from any form of retaliation, including intimidation or reprisal. Individuals who submit reports are entitled to legal protection from the Company, and all reports are handled in a secure and responsible manner. Through this commitment, the Company fosters a culture of open reporting while reinforcing transparency, accountability, and ethical business practices.

WHISTLEBLOWING SYSTEM HANDLING

The management of reports submitted through the WBS is carried out by the SMN Group Whistleblower System Committee to ensure that all reports are handled independently, transparently, and professionally. All information provided by whistleblowers is treated with the highest level of confidentiality, and each report is evaluated across administrative, operational, and legal aspects. Where the initial information is deemed sufficient, further investigation is conducted to assess the validity of the report, while reports that fall outside the scope of the WBS are forwarded to the relevant unit or department for appropriate follow-up.

The detailed roles and responsibilities of the WBS Committee include:

1. Receive and document incoming reports;
2. Identifying and classifying the type of violation;
3. Performing investigations;
4. Maintaining the confidentiality of whistleblower's identity;
5. Protecting the whistleblower; and
6. Prepare and submit reports to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

RESULTS OF HANDLING AND FOLLOW-UP

In 2025, there is no report was received through the Whistle Blowing System.

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

CONFORMITY OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE TOWARDS THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.	Hak dan Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	
A.1.1	Apakah perusahaan membayarkan dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, di mana semua pemegang saham diperlakukan secara setara dan menerima pembayaran dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan menawarkan dividen dalam bentuk Scrip, apakah perusahaan membayarkan dividen tersebut dalam waktu 60 hari? Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	102
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta harus diberitahu mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	149
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan adanya agenda dalam rapat, untuk menyetujui remunerasi (honorarium, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang, dan emolumen lainnya) atau peningkatan remunerasi bagi direksi/komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	141
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat bagi dewan direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	141
A.2.3	Apakah perusahaan mengizinkan pemegang saham untuk memilih direksi/komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	141
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	144-145
A.2.5	Apakah risalah RUPS Tahunan (RUPST) terbaru mencatat bahwa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, serta mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	143-144
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/setiap agenda dalam RUPST terbaru? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	148-150
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPST terbaru? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	N/A
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan dan CEO (jika bukan anggota dewan) menghadiri RUPST terbaru? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	N/A

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara secara absensi? Does the company allow voting in absentia?	144
A.2.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan sistem <i>polling</i> (bukan dengan angkat tangan) untuk semua resolusi dalam RUPST terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	144
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa telah menunjuk pihak independen (<i>scrutineers/inspektur</i>) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPS? Does the company disclose that it has appointed an independent party (<i>scrutineers/inspectors</i>) to count and/or validate the votes at the AGM?	144
A.2.12	Apakah perusahaan membuat hasil pemungutan suara untuk semua resolusi dalam RUPST/RUPSLB terbaru tersedia untuk publik pada hari kerja berikutnya? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	147
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelum pelaksanaan RUPST dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days' notice for all AGMs and EGMs?	146
A.2.14	Apakah perusahaan menyediakan rasional dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPS/sirkular dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	146
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengusulkan agenda dalam rapat umum dan/atau meminta penyelenggaraan rapat umum dengan persyaratan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	141
A.3	Pasar untuk pengendalian korporasi harus diizinkan berfungsi secara efisien dan transparan. Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.	
A.3.1	Dalam kasus merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/ dewan komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	103
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya dalam mendorong pemegang saham untuk berinteraksi dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	142
A.5	Saham dan hak suara Shares and voting rights	
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan, laporan, bursa saham, atau situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.6	Pemberitahuan RUPS Tahunan Notice of AGM	
A.6.1	Apakah setiap resolusi yang diajukan dalam RUPS Tahunan terbaru hanya membahas satu agenda, yaitu tidak ada penggabungan beberapa agenda dalam satu resolusi? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	147-150
A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS Tahunan terbaru/sirkular perusahaan diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan pada tanggal yang sama dengan versi dalam bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	146
	<i>Apakah pemberitahuan RUPS Tahunan/sirkular mencantumkan detail berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details:</i>	
A.6.3	Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pertama kali diangkat, pengalaman, dan jabatan direksi di perusahaan tercatat lainnya) yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali/pengangkatan kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	58, 62
A.6.4	Apakah auditor yang mengajukan diri untuk pengangkatan kembali/pengangkatan baru diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	150
A.6.5	Apakah dokumen kuasa (proxy) tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	Website Perusahaan
A.7	Perdagangan orang dalam dan transaksi pribadi yang merugikan harus dilarang Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited	
A.7.1	Apakah direksi/komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	171, 184
A.8	Transaksi Afiliasi oleh Direksi dan Eksekutif Utama Related party transactions by directors and key executives	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite direksi/komisaris independen untuk meninjau transaksi afiliasi material guna menentukan apakah transaksi tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	103, 173
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika terdapat konflik kepentingan? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	218, 221
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan terkait pemberian pinjaman kepada direksi dan komisaris, baik dengan melarang praktik tersebut maupun memastikan bahwa pinjaman dilakukan secara wajar (<i>arm's length</i>) dan dengan suku bunga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	173, 186
A.9	Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Merugikan Protecting minority shareholders from abusive actions	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi afiliasi dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan dan sesuai dengan prinsip transaksi wajar (<i>arm's length</i>)? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	103

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.9.2	Dalam kasus transaksi afiliasi yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan (<i>disinterested shareholders</i>)? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	103
B.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
B.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan andal, serta mencakup informasi material baik retrospektif maupun prospektif yang dianggap penting oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi atau pemungutan suara Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision	
	<i>Informasi material terkait keberlanjutan harus ditentukan secara spesifik</i> <i>Material Sustainability-related information should be specified</i>	
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Sustainability Report
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai isu yang relevan? Does the company identify climate change as an issue?	Sustainability Report
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (seperti GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Sustainability Report
	Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal dilaporkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form	
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan dalam bentuk kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Sustainability Report
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Sustainability Report
B.1.6	Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutan telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Sustainability Report
B.2	Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai isu keberlanjutan Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters	
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan masukan terkait isu keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Sustainability Report
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan masukan terkait isu keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Sustainability Report

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
B.3	Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material dalam menjalankan fungsi utamanya, termasuk dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal, termasuk yang terkait dengan risiko fisik dan transisi akibat perubahan iklim The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks	
	<i>Dewan harus menilai apakah struktur permodalan perusahaan sejalan dengan tujuan strategis dan tingkat toleransi risikonya untuk memastikan ketahanan terhadap berbagai skenario.</i> Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios	
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau secara tahunan bahwa struktur modal dan utang perusahaan sejalan dengan tujuan strategis dan tingkat toleransi risikonya? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	101
B.4	Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama serta mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises	
	<i>Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang mencakup:</i> Does the company disclose a policy and practices that address:	
B.4.1	Keberadaan dan cakupan upaya perusahaan dalam menjaga kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Sustainability Report
B.4.2	Prosedur seleksi pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	216, Sustainability Report
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Sustainability Report
B.4.4	Upaya perusahaan dalam berinteraksi dengan komunitas di wilayah operasionalnya? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Sustainability Report
B.4.5	Program dan prosedur anti-korupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	221, Sustainability Report
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	220
B.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan atau bagian terpisah yang membahas upaya terkait isu lingkungan, ekonomi, dan sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Sustainability Report
B.5	Dalam hal kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak mereka Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights	
B.5.1	Apakah perusahaan menyediakan detail kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyampaikan kekhawatiran dan/atau keluhan terkait kemungkinan pelanggaran hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	39, 77

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
B.6	Mekanisme partisipasi karyawan harus diperbolehkan untuk berkembang Mechanisms for employee participation should be permitted to develop	
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik terkait kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	41, 113, Sustainability Report
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik terkait program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	108-109
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang mempertimbangkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	224
B.7	Pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan, dan hak mereka tidak boleh dikompromikan karena melakukannya Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this	
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta menyediakan detail kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan? Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report?	224
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/individu yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan balasan atau pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	225
C.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
C.1	Struktur kepemilikan yang transparan Transparent ownership structure	
C.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkap identitas pemilik manfaat (<i>beneficial owners</i>) yang memiliki %5 atau lebih saham? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding %5 shareholding or more?	38, 68
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkap kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (<i>deemed</i>) dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham signifikan? Does the company disclose the direct and indirect (<i>deemed</i>) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	38, 68
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkap kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (<i>deemed</i>) dari direksi dan komisaris? Does the company disclose the direct and indirect (<i>deemed</i>) shareholdings of directors (commissioners)?	69, 171, 184
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkap kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (<i>deemed</i>) dari manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (<i>deemed</i>) shareholdings of senior management?	68
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkap detail tentang perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, <i>joint ventures</i> , serta <i>special purpose enterprises/vehicles</i> (SPEs/SPVs)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	38, 68
C.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
	<i>Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:</i>	
C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	41
C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	4
C.2.3	Indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators	135
C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	102
C.2.5	Data biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pertama kali diangkat, pengalaman yang relevan, dan jabatan direksi di perusahaan tercatat lainnya) dari seluruh direksi/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners	58, 62
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement	
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan, dan jika terdapat ketidakpatuhan, apakah laporan tersebut mengidentifikasi serta menjelaskan alasan untuk setiap ketidaksesuaian tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	135
C.3.	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama Remuneration of Members of the Board and Key Executives	
C.3.1	Apakah terdapat pengungkapan mengenai struktur honorarium untuk direksi/komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	171, 183
C.3.2	Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan (melalui laporan tahunan atau dokumen publik lainnya) rincian remunerasi masing-masing direksi/komisaris non-eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	171, 183
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan atau praktik remunerasi (termasuk honorarium, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang, dan emolumen lainnya) bagi direksi eksekutif dan CEO, termasuk penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	171, 183, 224
C.3.4	Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan (melalui laporan tahunan atau dokumen publik lainnya) rincian remunerasi masing-masing direksi eksekutif dan CEO (jika bukan anggota dewan)? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	171. 183
C.4.	Pengungkapan Transaksi Afiliasi (RPT) / Transaksi Pihak Berelasi Disclosure of related party transactions (RPT)	
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan yang mengatur proses peninjauan dan persetujuan untuk transaksi afiliasi / transaksi berelasi yang material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	103
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap transaksi afiliasi/ transaksi berelasi yang material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	N/A
C.5	Pengelolaan saham perusahaan oleh direksi dan komisaris Directors and commissioners' dealings in shares of the company	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	223
C.6	Auditor eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report	
	Jika perusahaan menggunakan firma audit yang sama untuk layanan audit dan non-audit: Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services	
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	75, 205
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	75, 205
C.7	Media komunikasi Medium of communications	
	Apakah perusahaan menggunakan media komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?	
C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	N/A
C.7.2	Situs web perusahaan Company website	77
C.7.3	<i>Briefing</i> analis Analyst's briefing	N/A
C.7.4	<i>Briefing</i> media/konferensi pers Media briefings /press conferences	200
C.8	Penyampaian/Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan Secara Tepat Waktu Timely filing/release of annual/financial reports	
C.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah akhir tahun buku? Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Website
C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah akhir tahun buku? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Website
C.8.3	Apakah direksi/ dewan komisaris dan/atau pejabat terkait perusahaan menegaskan bahwa laporan keuangan tahunan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan wajar? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Website
C.9	Situs web perusahaan Company website	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal-hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:	
C.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulan terakhir) Financial statements/reports (latest quarterly)	Website
C.9.2	Materi yang diberikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Website
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Website
C.9.4	Panggilan RUPST dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Website
C.9.5	Risalah RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Website
C.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Website
C.10	Hubungan investor Investor relations	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan detail kontak (seperti telepon, faks, dan email) dari pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	214
D.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Board Duties and Responsibilities	
	<i>Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas</i> <i>Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy</i>	
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan atau piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	162
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	19, 49, 103, 121, 141, 181, 223
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	162, 177
	Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission	
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	40
D.1.5	Apakah direksi berperan utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	28-29
D.1.6	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi implementasi strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	28-29
D.2	Struktur Dewan Board Structure	
	Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct	
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau kode perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	218
D.2.2	Apakah semua direksi/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode tersebut? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	218
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk mengimplementasikan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau kode perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	218
	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition	
D.2.4	Apakah struktur direksi/komisaris independen mencapai setidaknya %50 dari direksi/dewan komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least %50 of the board of directors/commissioners?	57, 61

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang, atau dua periode masing-masing lima tahun* untuk direksi/komisaris independen? *)Batas masa jabatan lima tahun harus merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> pada tahun 2011. Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years* each for its independent directors/ commissioners? *) The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	159, 174
D.2.6	Apakah perusahaan menetapkan batas maksimal lima kursi dewan yang dapat dipegang secara bersamaan oleh seorang direksi/komisaris independen atau non-eksekutif? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	160, 175
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direksi eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	N/A
Komite Nominasi Nominating Committee		
D.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	196
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	197
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	197
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan <i>terms of reference</i>, struktur tata kelola, atau piagam dari Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	196
D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Nominasi mengadakan setidaknya dua kali pertemuan dalam setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	197
Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee		
D.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	196
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi terdiri sepenuhnya dari direksi/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direksi/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	197
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direksi/komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	197
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan <i>terms of reference</i>, struktur tata kelola, atau piagam dari Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Remuneration Committee?	196
D.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Remunerasi mengadakan setidaknya dua kali pertemuan dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	197
Komite Audit Audit Committee		
D.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	187

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.2.19	Apakah Komite Audit terdiri sepenuhnya dari direksi/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direksi/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	187
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direksi/komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	187
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan <i>terms of reference</i> , struktur tata kelola, atau piagam dari Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	
D.2.22	Apakah setidaknya satu dari direksi/komisaris independen dalam komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman di bidang akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	191
D.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Audit mengadakan setidaknya empat kali pertemuan dalam setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	193
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	191
D.3	Proses Dewan Board Processes	
	Rapat Dewan dan Kehadiran Board meetings and attendance	
D.3.1	Apakah jadwal rapat direksi ditetapkan sebelum dimulainya tahun fiskal? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	178
D.3.2	Apakah direksi/dewan komisaris mengadakan setidaknya enam kali pertemuan dalam setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	166
D.3.3	Apakah setiap direksi/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	166, 179
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimum setidaknya 3/2 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 3/2 for board decisions?	166, 179
D.3.5	Apakah direksi non-eksekutif/komisaris mengadakan pertemuan terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	165
	Akses terhadap Informasi Access to information	
D.3.6	Apakah materi rapat direksi/dewan komisaris disediakan untuk dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners' meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	165, 178
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memiliki peran signifikan dalam mendukung dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	199
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan memiliki pelatihan di bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan serta terus mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	199
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Board Appointments and Re-Election	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direksi/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	161, 175
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam pengangkatan direksi/komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	161, 176
D.3.11	Apakah semua direksi/komisaris menjalani pemilihan ulang setiap 3 tahun, atau 5 tahun bagi perusahaan tercatat di negara yang peraturannya menetapkan masa jabatan 5* tahun? *)Masa jabatan 5 tahun harus merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5* years each? *)The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	58, 62
	Remunerasi Remuneration Matters	
D.3.12	Apakah pemegang saham atau dewan direksi menyetujui remunerasi bagi direksi eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	170, 183
D.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direksi eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>clawback</i> dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	170, 183
	Audit Internal Internal Audit	
D.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	201
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi, atau jika dialihdayakan, apakah nama firma eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	201
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	191, 201
	Pengawasan Risiko Risk Oversight	
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang kuat/kerangka manajemen risiko dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	208
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tata Kelola Tahunan mengungkap bahwa direksi/dewan komisaris telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	211
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkap risiko utama yang secara material dihadapi oleh perusahaan (misalnya keuangan, operasional termasuk IT, lingkungan, sosial, dan ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	209

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tata Kelola Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/komisaris atau Komite Audit yang memberikan komentar mengenai kecukupan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	206
D.4	Anggota Dewan People on the Board	
	Ketua Dewan Board Chairman	
D.4.1	Apakah peran ketua dewan dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	57, 61
D.4.2	Apakah ketua dewan merupakan direksi/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	57
D.4.3	Apakah ada anggota dewan yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	58
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua dewan diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	162
	Direktur Independen Utama Lead Independent Director	
D.4.5	Jika ketua dewan bukan direksi/komisaris independen, apakah dewan telah menunjuk Direktur Independen Utama/Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	61
	Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies	
D.4.6	Apakah setidaknya satu direksi non-eksekutif/komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama di mana perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	
D.5	Kinerja Dewan Board Performance	
	Pengembangan Direksi Directors Development	
D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi bagi direksi/komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	167, 179
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan, praktik, dan program yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	167, 180
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance	
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana direksi/dewan komisaris merencanakan suksesi bagi CEO/Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	180
D.5.4	Apakah direksi/dewan komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	17, 181
	Penilaian Dewan Board Appraisal	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/dewan komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang digunakan dalam penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	17, 181
	Penilaian Direktur Director Appraisal	
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang digunakan dalam penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	17, 181
	Penilaian Komite Committee Appraisal	
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang digunakan dalam penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	169
LEVEL 2 BONUS ITEMS		
LEVEL 2 BONUS ITEMS		
(B)A.	Hak dan Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of shareholders	
(B) A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta harus diberitahu mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting	
(B) A.1.1	Apakah perusahaan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan real-time secara absensi dalam rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	142
(B)A.2	Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham Equitable treatment of shareholders	
(B)A.2	Pemberitahuan RUPS Tahunan Notice of AGM	
(B)A.2.1	Apakah perusahaan mengumumkan pemberitahuan RUPS Tahunan (dengan agenda rinci dan surat edaran penjelasan) sebagaimana diumumkan ke Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	146
(B).B.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
(B).B.1		
(B).B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	211, Sustainability Report
(B).B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan atau Pelaporan Keberlanjutannya telah mendapat penjaminan eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report/ Sustainability Reporting is externally assured?	Sustainability Report
(B).B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan merespons kekhawatiran pemangku kepentingan terkait ESG? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Sustainability Report

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(B).B.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit, divisi, atau komite yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola isu keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Sustainability Report
(B).B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan direksi/dewan komisaris terhadap risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Sustainability Report
(B).B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan keterkaitan antara remunerasi direksi eksekutif dan manajemen senior dengan kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Sustainability Report
(B).B.1.7	Apakah Sistem <i>Whistle Blowing</i> perusahaan dikelola oleh pihak atau institusi independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	224
(B).C.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency	
(B).C.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
(B).C.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari setelah akhir tahun buku? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	263
(B).D.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(B).D.1	Kompetensi dan Keragaman Dewan Board Competencies and Diversity	
(B).D.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direksi/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	57, 61
(B).D.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman di dewan serta melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	173
(B).D.2	Struktur Dewan Board Structure	
(B).D.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari direksi/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	197
(B).D.2.2	Apakah Komite Nominasi menjalankan proses untuk mengidentifikasi kualitas direksi yang selaras dengan arah strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	176, 196
(B).D.3	Pengangkatan Dewan dan Seleksi Ulang Board Appointments and Re-Election	
(B).D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencarian profesional atau sumber eksternal lainnya (seperti basis data direksi yang disediakan oleh organisasi direksi atau pemegang saham) dalam mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	176, 196
(B).D.4	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition	
(B).D.4.1	Apakah direksi non-eksekutif/komisaris independen membentuk lebih dari %50 dari dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua dewan independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than %50 of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	57, 61
(B).D.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(B).D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan telah mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi, termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	117
(B).D.6	Kinerja Dewan Board Performance	
(B).D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko di tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	192
LEVEL 2 - PENALTY		
(P)A.	Hak dan Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of shareholders	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic shareholder rights	
(P) A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai untuk menawarkan perlakuan yang setara kepada semua pemegang saham dalam pembelian kembali saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	N/A
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	141
(P)A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang mencegah pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	N/A
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta harus diberitahu mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan menambahkan agenda tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya ke dalam pemberitahuan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	N/A
(P)A.3.2	Apakah Ketua Dewan, Ketua semua Komite Dewan, dan Direktur Utama tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham terbaru? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	N/A
(P)A.4	Struktur permodalan dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kontrol yang tidak sebanding dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
	<i>Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan:</i> <i>Did the company fail to disclose the existence of:</i>	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham? Shareholders agreement?	140
(P)A.4.2	Batasan Hak Suara (Voting cap)? Voting cap?	140
(P)A.4.3	Hak Suara ganda (multiple voting rights)? Multiple voting rights?	140

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(P)A.5	Struktur permodalan dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kontrol yang tidak sebanding dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Apakah terdapat struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang yang terlihat? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	N/A
(P)A.6	Perdagangan orang dalam dan transaksi pribadi yang merugikan harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
(P)A.6.1	Apakah terdapat kasus hukum yang berujung pada vonis terkait perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen, atau karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	213
(P)A.7	Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Merugikan Protecting minority shareholders from abusive action	
(P)A.7.1	Apakah terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	N/A
(P)A.7.2	Apakah terdapat transaksi afiliasi yang dapat dikategorikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar atau <i>arm's length</i>) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	N/A
(P)B.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	
(P)B.1.1	Apakah terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, perdagangan, persaingan usaha, atau isu lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/ insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	N/A
(P)B.2	Dalam hal pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai, dan andal secara tepat waktu dan berkala. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	
(P)B.2.1	Apakah perusahaan pernah menerima sanksi dari regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	N/A
(P)B.2.2	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas <i>greenwashing</i> ? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	N/A
(P)C.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and transparency	
(P)C.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan Sanctions from regulator on financial reports	
(P)C.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	151, 206
(P)C.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat merugikan" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	151, 206
(P)C.1.3	Apakah perusahaan menerima " <i>disclaimer opinion</i> " dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	151, 206

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(P)C.1.4	Apakah perusahaan dalam setahun terakhir merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	N/A
(P)D.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(P)D.1	Kepatuhan terhadap Peraturan Pencatatan, Regulasi, dan Hukum yang Berlaku Compliance with listing rules, regulations and applicable laws	
(P)D.1.1	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan pencatatan dan regulasi selain peraturan pengungkapan dalam setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	N/A
(P)D.1.2	Apakah terdapat kasus di mana direksi non-eksekutif/komisaris mengundurkan diri dan mengangkat isu terkait tata kelola perusahaan? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	N/A
(P)D.2	Struktur Dewan Board structure	
(P)E.2.1	Apakah perusahaan memiliki direksi/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun* dalam kapasitas yang sama? *) Masa jabatan lima tahun harus merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years* each (whichever is higher) in the same capacity? *)The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	57, 61
(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi secara tepat status semua direksi mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	58, 62
(P)D.2.3	Apakah perusahaan memiliki direksi/komisaris independen atau non-eksekutif yang menjabat di lebih dari lima dewan perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	58, 62
(P)D.3	Audit Eksternal External Audit	
(P)D.3.1	Apakah ada direksi atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra dari auditor eksternal saat ini dalam dua tahun terakhir? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	58, 62
(P)D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board structure and composition	
(P)D.4.1	Apakah ketua dewan pernah menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	58
(P)D.4.2	Apakah direksi non-eksekutif/komisaris menerima opsi saham, saham kinerja, atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	224

REFERENSI SEOJK NO. 16/POJK.04/2021 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO OJK CIRCULAR LETTER NO. 16/POJK.04/2021 REGARDING THE FORM AND
CONTENT OF REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights		
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: The summary of important financial data contained financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company had been running its business activities for less than 3 (three) years.		
1.	Pendapatan/penjualan Revenue/sales	7
2.	Laba bruto Gross profit	7
3.	Laba (rugi) Profit (loss)	7
4.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests	7
5.	Total laba (rugi) komprehensif Total comprehensive profit (loss)	7
6.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests	7
7.	Laba (rugi) per saham Earnings (loss) per share	7
8.	Jumlah aset Total assets	7
9.	Jumlah liabilitas Total liabilities	7
10.	Jumlah ekuitas Total equity	7
11.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Ratio of profit (loss) to total assets	7
12.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Ratio of profit (loss) to equity	7
13.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Ratio of profit (loss) to income/sales	8
14.	Rasio lancar Current ratio	8
15.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Ratio of liabilities to equity	8
16.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Ratio of liabilities to total assets	8
17.	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya Information and other financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry	8
Informasi Saham Stock Highlights		
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company should at least contain:		
1.	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek.	9

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing: - Number of outstanding shares; - Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed; - The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and - Trading volume on the stock exchange where the shares are listed. Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange.	
2.	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal, saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan, pengurangan modal, informasi saham sebagaimana, dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: - tanggal pelaksanaan aksi korporasi; - rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; - jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; - jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan - harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding: - The date of implementation of the corporate action; - The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; - Number of outstanding shares before and after the corporate action; - Number of conversion effects executed (if any); and - Share prices before and after corporate actions.	10
3.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. In the event of a temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained.	10
4.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (<i>delisting</i>).	N/A

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:

The Board of Commissioners' report should at least contain a brief description of:

1.	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	17-19
2.	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	20-21
3.	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	21

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
Laporan Direksi Board of Directors Report		
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:		
Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.		
1. Performance of Issuers or Public Companies, at least containing: a) Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies; b) The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies; c) The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; d) Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and e) Constraints faced by Issuers or Public Companies;		28-31
2. Gambaran tentang prospek usaha emiten atau Perusahaan Publik. Overview of the business prospects of the issuer or Public Company.		31
3. Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Implementation of the governance of the Issuer or Public Company.		31-32
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembar tersendiri; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (UUPT). Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners It described: a) The signature is poured on a separate sheet; b) A statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report; c) Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors stating their names and positions; and d) A written explanation in a separate letter from the person concerned in the event that there is a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors who does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned. The annual report shall be signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners serving during the relevant financial year and shall be made available at the company's office from the date of the GMS invitation for inspection by shareholders (Company Law).		34-35
Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of Issuer or Public Company		
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company shall at least contain the following information:		
1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku. Name of the Issuer or Public Company, including any change of name, the reason for the change, and the effective date of the name change during the financial year.		38-39
2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) alamat surat elektronik; dan d) alamat situs web. Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including: a) Address; b) Telephone number; c) Electronic mail address; and d) Website address.		38-39

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3.	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Mencakup antara lain: riwayat singkat, tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan serta alasan perubahannya. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Brief history of the Issuer or Public Company; It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name. Note: if the company had never changed its name, it should be disclosed.	47-48
4.	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan atau nilai-nilai perusahaan; Vision and mission of Issuer or Public Company and its corporate culture or values; Visi dan Penjelasan Visi. Vision and explanation of the Vision. Misi dan Penjelasan Misi. Mission and explanation of the Mission. Budaya Perusahaan. Corporate Culture.	40-41
5.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Business activities according to the latest article of association, business activities conducted within the financial year, and type of goods and/or services.	49
6.	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of Issuer or Public Company; operational area is an area or region for carrying out operational activities or the range of operational activities.	52-53
7.	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	54-55
8.	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	56
9.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - nama dan jabatan; - foto terbaru; - usia; - kewarganegaraan; - riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; - riwayat jabatan, meliputi informasi: - dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; - dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. - hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; - pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan - perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	58-60

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Profile of the Board of Commissioners, at least contained: - Name and position; - Recent photos; - Age; - Citizenship; - Educational history and/or certification; - Position history, including information on: - Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners; - The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned; - Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed; - Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; - Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; - Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and - Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed.	
Profil Direksi, paling sedikit memuat: - nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; - foto terbaru; - usia; - kewarganegaraan; - riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; - riwayat jabatan, meliputi informasi: - dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. - hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan - perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 10. Profile of the Board of Directors, at least contained: - Name and position in accordance with the duties and responsibilities; - Recent photos; - Age; - Citizenship; - Educational history and/or certification; - Position history, including information on: - The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; - Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and - Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; - Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and - Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed.	62-65
11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya. In the event there is a change in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners occurring after the financial year-end until the deadline for submission of the Annual Report, the composition presented in the Annual Report shall reflect both the latest and the previous composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	57, 61

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
12.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Disclosure of information could be presented in tabular form.	66-67
13.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding: a) Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b) Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed; c) Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; The above information could be presented in tabular form.	68-70
14.	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.	72-73
15.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing. Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification: a) ownership of local institutions; b) ownership of foreign institutions; c) local individual ownership; and d) foreign individual ownership;	72-73
16.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan. Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;	71
17.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.	74
18.	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada). Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	74

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
19.	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada). Information on other listed securities in addition to the securities referred to in item 18), which have not matured during the financial year, shall at least include the name of the security, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and credit rating (if any).	75
20.	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: - nama dan alamat; - periode penugasan; - informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; - biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan - dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan - Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/ allies included: - name and address; - assignment period; - information on audit and/or non-audit services provided; - audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and - in the event that AP and KAP and their networks/ associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed. - disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies could be presented in tabular form.	75
21.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	75

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:

Management discussion and analysis includes analysis and discussion of financial reports and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the financial year, which at least contains:

1.	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: - produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; - pendapatan/penjualan; dan - profitabilitas. Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: - production, which includes the process, capacity, and development; - revenue/sales; and - profitability	92-93
2.	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: - aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; - liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; - ekuitas; - pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan - arus kas. Comprehensive financial performance, including a comparison of financial performance over the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of changes and their impacts, shall at least cover: - current assets, non-current assets, and total assets; - short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; - equity; - income/ sales, beban, profit (loss), other comprehensive income, and Total comprehensive profit (loss); and - cash flow;	94-99
3.	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. The ability to meet debt or other obligations by presenting relevant ratio calculations.	99-100
4.	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. The collectability level of receivables of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculations.	100

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
5.	Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud. Capital structure and management policy over such capital structure, including the basis for determining the policy.	101
6.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Discussion of material commitments for capital expenditure investments, at a minimum including: a) the purpose of the bond; b) the expected source of funds to fulfill these commitments; c) currency to be denominated; and d) measures planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position.	102
7.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan. Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year, at least containing: a) the purpose of the bond; b) the purpose of investment in capital goods; and c) the investment value of capital goods issued	102
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada). Material information and facts occurring after the date of the accountant's report (if any).	102
9.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	104
10.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (<i>capital structure</i>); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding: a) revenue/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	104
11.	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (<i>capital structure</i>); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, about: a) revenue/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) dividend Policy; or e) other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	104
12.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	90
13.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	102-103

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least: a) Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income; b) Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c) Total dividends per share (cash and/or non-cash); d) the amount of dividends per year paid. Disclosure of information may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company did not distribute dividends in the last two (2) years, such fact shall be disclosed.	
14.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut. Realization of the use of proceeds from public offerings, provided that: a) if during the financial year the Issuer is required to submit a report on the realization of use of proceeds, the cumulative realization of use of proceeds up to the end of the financial year shall be disclosed; and b) if there are changes in the use of proceeds as regulated under the Financial Services Authority Regulation concerning reports on the realization of use of proceeds from public offerings, the Issuer shall explain such changes.	103
15.	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: · pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); dan · peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	103

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
15.	Material information (if any), including but not limited to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions occurring during the financial year, shall at least include: a) transaction date, value, and object; b) name of the party conducting the transaction; c) the nature of the affiliation relationship (if any); d) explanation regarding the fairness of the transaction; e) compliance with the relevant provisions; f) in the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number a) to number e), the Issuer or Public Company also disclosed information: · Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and · The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arms-length principle; g) for affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added. h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; i) in the event that there was no affiliated transaction and/ or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.	
16.	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in laws and regulations that have a significant impact on the Issuer or Public Company and their impact on the financial statements (if any); and	105
17.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Changes in accounting policies, Reasons for changes in accounting policies (if any).	105
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik The Governance of the Issuer or Public Company		
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Governance of the Issuer or Public Company shall at least include a brief description of:		
1.	RUPS, paling sedikit memuat: a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: 1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. RUPS, at least contained: a) information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included: 1) resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and 2) resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them; b) in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.	140-158

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
Direksi, paling sedikit memuat: - tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. - pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi; - kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: - kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); - penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: - prosedur penilaian kinerja; dan - kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan - dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		174-186
2.	The Board of Directors, at least contained: - duties and responsibilities of each member of the Board of Directors information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form. - a statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors; - policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form. - training and/or competency improvement of members of the Board of Directors: - policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and - training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any); - the Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain: - performance appraisal procedures; and - the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and - in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.	
3.	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; - pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; - kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: - kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada). - penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; - kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan - pihak yang melakukan penilaian; dan - penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: - prosedur penilaian kinerja; dan - kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	159-173

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
The Board of Commissioners, at least contained: - duties and responsibilities of the Board of Commissioners; - a statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners; - policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS; - information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form. - training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners; - policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and - performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing: - performance appraisal implementation procedures; - the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and - the party conducting the assessment; and - The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes: - performance appraisal procedures; and - the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan - prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: - prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; - struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan - besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. 4. Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least it contained: - the nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and - Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including: - procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners; - the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and - the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	161, 170, 176, 183
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: - nama; - dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; - periode penugasan dewan pengawas syariah; - tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan - frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. 5. The Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies conducting business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, which shall at least include: - name; - legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board; - term of office of the Sharia Supervisory Board; - duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board; and - frequency and manner of providing advice and supervision over compliance with sharia principles in the capital market by the Issuer or Public Company.	N/A

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Komite audit, paling sedikit memuat: - nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; - usia; - kewarganegaraan; - riwayat pendidikan; - riwayat jabatan, meliputi informasi: - dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; - periode dan masa jabatan anggota komite audit; - pernyataan independensi komite audit; - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); - kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan - pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit. 6. Audit committee, at least it contained: - name and position in committee membership; - age; - nationality; - educational history; - legal basis for appointment as committee member; - concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and - Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; - period and term of office of audit committee members; - Statement of independence of the audit committee; - training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any); - policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and - implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	187-195
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; - usia; - kewarganegaraan; - riwayat pendidikan; - riwayat jabatan, meliputi informasi: - dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; - periode dan masa jabatan anggota komite; - pernyataan independensi komite; - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); - uraian tugas dan tanggung jawab; - pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>); - kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; - uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan - dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: - alasan tidak dibentuknya komite; dan - pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. 7. Committee or function of nomination and remuneration Issuers or Public Companies, at least it contained: - name and position in committee membership; - age; - nationality; - educational history; - position history, including information on: - legal basis for appointment as committee member; - concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and - Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; - the period and term of office of the committee members; - committee independence statement; - training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any); - description of duties and responsibilities; - a statement of having a guideline or charter (charter);	196-197

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	k) policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting; l) brief description of the implementation of activities in the financial year; and m) in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose: 1) reasons for not forming the committee; and 2) the party carrying out the nomination and remuneration function;	
8.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite; k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku. Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that supported the functions and duties of the Board of Commissioners, at least it contained: a) name and position in committee membership; b) age; c) nationality; d) educational history; e) position history, including information on: 1) legal basis for appointment as committee member; 2) Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and 3) work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; f) the period and term of office of the committee members; g) committee independence statement; h) training and/or competency improvement followed in the financial year (if any); and i) description of duties and responsibilities; j) a statement that the committee has had guidelines or charters; k) Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and l) Brief description of the committee's activities for the financial year;	N/A
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Company secretary, at least it contained: a) name and position in committee membership; b) domicile; c) position history, including: 1) legal basis for appointment as company secretary; and 2) work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; d) educational history; e) training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and f) a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;	198-200

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat: - nama kepala unit audit internal; - riwayat jabatan, meliputi: - dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. - kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; - struktur dan kedudukan unit audit internal; - uraian tugas dan tanggung jawab; - pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan - uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. Internal Audit, at least it contained: - name of the head of the internal audit; - position history, including: - legal basis for appointment as head of internal audit; and - work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; - qualification or certification as an internal audit profession (if any); - training and/or competency improvement that was followed in the financial year; - the structure and position of the internal audit; - description of duties and responsibilities; - a statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and - a brief description of the implementation of the internal audit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/ or audit committee;	201-204
11.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; - tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan - pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal. A description of the internal control system implemented by the issuer or public company, at least it contained: - financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; - review of the effectiveness of the internal control system; and - statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	206-207
12.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; - jenis risiko dan cara pengelolaannya; - tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan - pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko. The risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least it contained: - general description of the risk management system of the Issuer or Public Company; - types of risks and how to manage them; - overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and - statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	208-212
13.	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: - pokok perkara/gugatan; - status penyelesaian perkara/gugatan; dan - pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau Perusahaan Publik. Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any), at least it contained: - Principal case/lawsuit; - Status of settlement of cases/claims; and - The effect on the condition of the issuer or public company;	213
14.	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada). Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)	213

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
15.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company: a) the points of the code of ethics; b) form of code of conduct dissemination and enforcement efforts; and c) statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company.	218-220
16.	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP); In the case of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), Information disclosed should, at least contain: a) Number of shares and/or options; b) Implementation period; c) Requirements for eligible employees and/or management; and d) Execution price or determination of exercise price.	224
17.	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. Brief description of Information disclosure policy : a) Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and b) Implementation of the policy;	174, 184
18.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan 2) tindak lanjut pengaduan. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least contain: How to submit a violation report; a) Protection for whistleblowers; b) Handling of complaints; c) The party managing the complaint; and d) The results of the handling of complaints, at least: e) Number of complaints received and processed in the financial year; and 1) Follow-up on complaints; 2) In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed. If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, such condition shall be disclosed.	224-225
19.	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	221

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy, at least contain: - Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and - Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies; In the event that the Issuer or Public Company did not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.	
20.	Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: - pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau - penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada) Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including: - Statement of recommendations that had been implemented; and/or - Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). disclosure of information can be presented in tabular form.	134-137

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company

1.	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - penjelasan strategi keberlanjutan; - ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); - profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; - penjelasan Direksi; - tata kelola keberlanjutan; - kinerja keberlanjutan; - verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; - lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan - tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. Information disclosed in the social and environmental responsibility section constitutes the Sustainability Report as referred to in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which shall at least include: - explanation of sustainability strategy; - overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); - brief profile of the Issuer or Public Company; - statement from the Board of Directors; - sustainability governance; - sustainability performance; - written verification from an independent party, if any; - feedback sheet for readers, if any; and - response of the Issuer or Public Company to feedback from the previous year's report.	Rincian mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini. Details of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs are presented in the Sustainability Report, which is published separately but remains an integral part of this Annual Report.
2.	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. The Sustainability Report as referred to in item 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	
3.	Informasi Laporan Keberlanjutan pada angka 1) dapat: - diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/ atau - merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; The Sustainability Report information referred to in item 1) may: - be disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Board of Directors' explanation related to the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Board of Directors' Report; and/or - refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company.	

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
4.	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan. The Sustainability Report as referred to in item 1) constitutes an integral part of the Annual Report but may be presented separately from the Annual Report.	Rincian mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini. Details of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs are presented in the Sustainability Report, which is published separately but remains an integral part of this Annual Report.
5.	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; If the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in such Sustainability Report must: a) contain all information as referred to in item 1); and b) be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	
6.	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. If the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the social and environmental responsibility section shall state that the information on social and environmental responsibility has been disclosed in a Sustainability Report presented separately from the Annual Report.	
7.	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report presented separately from the Annual Report must be made simultaneously with the submission of the Annual Report.	
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Statements		
1.	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan perusahaan efek. The annual financial statements presented in the Annual Report are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority (OJK). The financial statements include a statement of responsibility for the financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the responsibility of the Board of Directors for financial statements, or in the prevailing laws and regulations in the capital market sector governing periodic reports of securities companies, in the event that the Issuer is a securities company.	264
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners on Responsibility for the Annual Report		
1.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. The statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report shall be prepared in accordance with the format set out in Appendix I, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	34-35





Laporan Keuangan

Laporan Keuangan



**PT INTI BANGUN
SEJAHTERA Tbk**

**Laporan Keuangan
Dengan Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

***PT INTI BANGUN
SEJAHTERA Tbk***

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2025 and
For The Year
Then Ended
(Indonesian Rupiah Currency)***

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)**

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(INDONESIAN RUPIAH CURRENCY)**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ <u>Page</u>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	273 - 274	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	275	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	276	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	277 - 278	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	279 - 372	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP/Domicile as state in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position
2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP/Domicile as state in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned:

- : Ramadhan Kurnia Nusa
: Jalan Tanjung Karang nomor 11, RT/RW 004/003, Desa Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah 59347
: Jl. H. Ilang No. 88, RT/RW 013/002, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
: 021 - 435984
: Direktur Utama / President Director
- : Doni Wilaga Kusuma
: Jalan Tanjung Karang nomor 11, RT/RW 004/003, Desa Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah 59347
: Jl. Menara Air V No.23, RT/RW 006/011, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan
: 021 - 435984
: Direktur / Director

state that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("the Company");
2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the financial statements of the Company is complete and correct;
b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 16 Maret 2026 / March 16, 2026



Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur Utama / President Director

Doni Wilaga Kusuma
Direktur / Director

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00083/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00083/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/III/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants as applicable to audits of financial statements of public interest entities in Indonesia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Evaluasi penurunan nilai piutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mencatat saldo piutang usaha sebesar Rp 119 miliar yang merupakan 3% dari total aset Perusahaan. Seperti dibahas pada Catatan 2f, 2h, 3 dan 6 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian ("KKE") piutang usaha, dengan menetapkan matriks penyisihan yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historisnya, analisa umur piutang usaha, dan disesuaikan dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi terkait.

Evaluasi penurunan nilai piutang usaha ini merupakan hal signifikan dalam audit kami karena melibatkan penerapan pertimbangan manajemen yang signifikan dan nilainya yang material seperti disebutkan di atas.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami memperoleh pemahaman atas proses penilaian penurunan nilai piutang usaha Perusahaan, termasuk pengendalian-pengendalian dalam proses review asumsi-asumsi signifikan yang dijabarkan di atas.
- Kami menguji evaluasi penurunan nilai piutang usaha Perusahaan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang terutama meliputi penelaahan atas dasar yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan KKE yang mencakup metode, asumsi, dan data yang digunakan, pengujian variabel makroekonomi termasuk informasi masa depan yang digunakan oleh manajemen dengan melakukan verifikasi ke sumber data terkait dan memastikan hubungannya dengan kerugian historis piutang usaha.
- Kami melakukan pengujian keakuratan laporan umur piutang usaha dengan melakukan penelusuran ke dokumen pendukung dan catatan keuangan yang relevan serta menguji akurasi matematis atas laporan umur piutang usaha tersebut.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan atas evaluasi penurunan nilai piutang usaha pada laporan keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Impairment assessment of trade receivables

As of December 31, 2025, the Company recognized trade receivables of Rp 119 billion, which represents 3% of the Company's total assets. As discussed in Notes 2f, 2h, 3 and 6 to the accompanying financial statements, the Company applies the simplified approach in calculating expected credit losses ("ECL") on trade receivables, whereby the Company established a provision matrix based on its historical credit losses experience, aging analysis of trade receivables, and adjusted for forward-looking information specific to the debtors and the economic environment.

The impairment assessment of trade receivables is significant to our audit as it involves the exercise of significant management judgment and significant amount as described above.

How our audit addressed the key audit matter

- We obtained an understanding of the Company's trade receivables impairment assessment process which includes control over management's review of the significant assumptions described above.
- We tested the Company's impairment assessment of trade receivables by performing audit procedures that primarily comprised of reviewing management's basis in determining ECL, which included method, assumptions and data used, testing the macroeconomic variables and forward-looking information used by management through verification to the source of data and corroboration of their relationship with historical losses of trade receivables.
- We tested the accuracy of the trade receivable aging schedule report by tracing to the relevant supporting document financial records and testing the mathematical accuracy of the trade receivables aging schedule report.
- We also assessed the adequacy of the impairment assessment of trade receivables disclosures in the financial statements.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Other Information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



The original report included herein is in the Indonesian language

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA



Riani

**Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264
Public Accountant Registration No. AP. 0264**

16 Maret 2026/March 16, 2026

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		
		2025	2024	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas di bank	2c,2e,2f,4,35			Cash in banks
Pihak ketiga		534	9.121	Third parties
Pihak berelasi	2d,32	569	9.017	Related party
Aset keuangan lancar lainnya	2e,2f,5,35	516	527	Other current financial asset
Piutang usaha - neto	2f,2h,6,35	118.797	302.868	Trade receivables - net
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	2f,2p,7,35	86.214	133.288	Accrued income - net
Investasi neto dalam sewa - jangka pendek	2f,2l,2u,8,35	175.604	168.639	Net investment in lease - current
Piutang lain-lain	2f,2h,35			Other receivables
Pihak ketiga		3.757	4.052	Third parties
Pihak berelasi	2d,32	11	-	Related party
Persediaan - neto	2i,9	250	1.192	Inventories - net
Pajak dibayar di muka	2q,16a	1.365	1.054	Prepaid taxes
Uang muka dan beban dibayar di muka - jangka pendek	2j,2u,10	12.986	31.595	Advances and prepaid expenses - current
JUMLAH ASET LANCAR		400.603	661.353	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi neto dalam sewa - jangka panjang	2f,2l,2u,8,35	452.834	685.858	Net investment in lease - non-current
Uang muka dan beban dibayar di muka - jangka panjang	2j,2u,10	23.994	14.432	Advances and prepaid expenses - non-current
Aset tetap - neto	2k,2n,11	2.809.156	2.788.742	Fixed assets - net
Aset hak-guna - neto	2l,2n,12a	257.880	267.975	Right-of-use assets - net
Aset tidak lancar lainnya	2f,2m,2n,13,35	1.101	1.141	Other non-current assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		3.544.965	3.758.148	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		3.945.568	4.419.501	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN POSISI
KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31, 2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank	2f,14,35	567.300	1.340.000	Bank loans
Utang usaha	2f,15,35			Trade payables
Pihak ketiga		98.554	107.753	Third parties
Pihak berelasi	2d,32	2.858	-	Related parties
Utang lain-lain	2f,35			Other payables
Pihak ketiga		87.607	40.606	Third parties
Pihak berelasi	2d,32	2.348	85	Related parties
Utang pajak	2q,16c	13.033	4.753	Taxes payable
Beban akrual	2f,17,35	40.818	59.203	Accrued expenses
Bagian jangka pendek atas utang jangka panjang:				Current portion of long-term debts:
Pendapatan ditangguhkan	2p,18	25.557	30.343	Unearned revenues
Liabilitas sewa	2f,2l,12b,35	134.748	119.670	Lease liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		972.823	1.702.413	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				Long-term debts - net of current portion:
Pendapatan ditangguhkan	2p,18	8.163	7.851	Unearned revenues
Liabilitas sewa	2f,2l,12b,35	340.412	495.562	Lease liabilities
Provisi jangka panjang	2k,2w,19	6.068	5.664	Long-term provision
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2q,16e	38.274	31.336	Deferred tax liability - net
Liabilitas imbalan pasca kerja	2o,2u,20	-	8.288	Post-employment benefits liability
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		392.917	548.701	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		1.365.740	2.251.114	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp 500 (full amount) per share
Modal dasar - 3.000.000.000 saham				Authorized - 3,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.350.904.927 saham	1b,21	675.452	675.452	Issued and fully paid - 1,350,904,927 shares
Tambahan modal disetor	2r,22	601.957	601.957	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	2o,23	-	21.925	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	24	13.200	13.200	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		1.289.219	855.853	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		2.579.828	2.168.387	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.945.568	4.419.501	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
		2025	2024	
PENDAPATAN	2p,25	871.892	862.466	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2p,26			COST OF REVENUES
Penyusutan dan amortisasi		(181.249)	(375.162)	Depreciation and amortization
Beban pokok pendapatan lainnya		(61.697)	(122.502)	Other cost of revenues
Jumlah beban pokok pendapatan		(242.946)	(497.664)	Total cost of revenues
LABA BRUTO		628.946	364.802	GROSS INCOME
Beban penjualan dan pemasaran	2p,27	(2.928)	(3.849)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	2p,28	(16.055)	(156.900)	General and administrative expenses
LABA USAHA		609.963	204.053	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	2l,2p,4	121	16.364	Finance income
Biaya keuangan	2p,29	(118.717)	(237.172)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	2p,30	31.839	(1.772.216)	Other income (expenses) - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		523.206	(1.788.971)	INCOME (LOSS) BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
PAJAK FINAL	2q,16d	(74.669)	(56.197)	FINAL TAX
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		448.537	(1.845.168)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	2q,16e	(37.096)	(5.668)	INCOME TAX
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		411.441	(1.850.836)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali program imbalan pasti	2o,20	-	5.004	Remeasurement of defined benefit plans
Pajak penghasilan terkait	2q,16e	-	951	Related income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain - neto		-	5.955	Total other comprehensive income - net
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		411.441	(1.844.881)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	2t,31	305	(1.370)	BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity
				Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2024	675.452	601.957	15.970	12.200	2.707.689	4.013.268
Pencadangan saldo laba	-	-	-	1.000	(1.000)	-
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	5.955	-	(1.850.836)	(1.844.881)
Saldo 31 Desember 2024	675.452	601.957	21.925	13.200	855.853	2.168.387
Reklasifikasi saldo akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sehubungan dengan penghentian program	-	-	(21.925)	-	21.925	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	411.441	411.441
Saldo 31 Desember 2025	675.452	601.957	-	13.200	1.289.219	2.579.828

Reclassification of accumulated post-employment benefits liability to retained earnings due to plan termination

Total comprehensive income for the year

Balance, December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
Catatan/ Notes		2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		1.454.067	1.114.050	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(242.415)	(241.306)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(16.220)	(155.401)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi		1.195.432	717.343	Cash generated from operations
Penerimaan bunga		121	16.364	Interest received
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya		11	94.473	Release of restricted cash
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya		(30.664)	(69.906)	Payments of income tax and other taxes
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1.164.900	758.274	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	11	5.183	84.333	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	11	(113.997)	(132.384)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran utang atas perolehan aset tetap		(7.155)	-	Payment of payable for acquisition of fixed assets
Pencairan investasi terikat		-	200.000	Release of restricted investment
Hasil penjualan investasi dalam bentuk saham		-	10.822	Proceeds from sale of investment in shares of stock
Penempatan investasi terikat		-	(100.000)	Placement in restricted investment
Perolehan aset tidak lancar lainnya		-	(9.492)	Acquisition of other non-current assets
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(115.969)	53.279	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank:				Receipt of bank loan:
Jangka pendek	14,37	6.445.916	2.895.000	Short-term
Pembayaran utang bank:				Payments of bank loan:
Jangka pendek	14,37	(7.218.616)	(1.655.000)	Short-term
Jangka panjang	14,37	-	(2.387.243)	Long-term
Pembayaran liabilitas sewa	12b,37	(235.297)	(266.875)	Payments of lease liabilities
Pembayaran biaya keuangan		(57.969)	(160.920)	Payments of finance costs
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.065.966)	(1.575.038)	Net Cash Used in Financing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For The Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
		2025	2024	
PENURUNAN NETO KAS DI BANK		(17.035)	(763.485)	NET DECREASE IN CASH IN BANKS
DAMPAK NETO PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS DI BANK		-	(13)	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN		18.138	781.636	CASH IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	4	1.103	18.138	CASH IN BANKS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H. No. 7 tanggal 28 April 2006. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W7-00873.HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2007, Tambahan No. 1337. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yulia, S.H. No. 43 tanggal 15 Agustus 2024 antara lain mengenai perubahan domisili Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, perdagangan besar peralatan komunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (Nap), jasa konten SMS premium, jasa multimedia lainnya, aktivitas pengolahan data, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan mulai beroperasi sejak tahun 2007 dan fokus dalam bidang jasa penguatan sinyal telekomunikasi dan penyewaan serta jasa pemeliharaan menara telekomunikasi.

Perusahaan berdomisili di Kabupaten Kudus dengan alamat di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, Lantai 49, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia

Entitas induk Perusahaan adalah PT Iforte Solusi Infotek.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 7 of Yulia, S.H. dated April 28, 2006. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-00873.HT.01.01-TH.2006 dated September 22, 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12 dated February 9, 2007, Supplement No. 1337. The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest of which is covered by Notarial Deed No. 43 of Yulia, S.H. dated August 15, 2024 among others concerning change in the Company's domicile. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0051050.AH.01.02.TAHUN 2024 dated August 16, 2024.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its business activities, among others, is to engage in central telecommunication construction, telecommunication installation, large trading business of telecommunication equipment, telecommunication activities with cables, internet service provider, internet interconnection services (Nap), premium SMS content services, other multimedia services, data processing activities, real estate property owned or rented, and other consulting management activities. The Company started its commercial operations in 2007 and focused in telecommunications signal strengthening services and also lease and maintenance service of telecommunication tower.

The Company is domiciled in Kudus Regency with the address at Jalan Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon Village, Jati District, Kudus, Central Java, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 49th floors, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

The Company's parent entity is PT Iforte Solusi Infotek.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 15 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-10134/BL/2012 untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 154.247.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan telah mencatatkan sejumlah 1.028.313.400 saham (terdiri dari 154.247.000 saham baru dan 874.066.400 saham milik pemegang saham lama) pada Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Konversi Utang Obligasi

Pada tahun 2011, Perusahaan menerbitkan Obligasi Konversi ("OK") senilai Rp 690,38 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2013, nilai OK diubah menjadi sebesar Rp 57,38 miliar dan sisanya sebesar Rp 633 miliar disepakati menjadi utang pihak ketiga.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 31 Mei 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penerbitan saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi OK kepada pemegang OK.

Berdasarkan Surat BEI No. S-01953/BEI.PPJ/09-2013 tanggal 4 September 2013, BEI menyetujui pencatatan 114.760.000 saham baru Perusahaan dengan nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham sehubungan dengan pelaksanaan konversi OK kepada pemegang OK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 500 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares

Initial Public Offering

On August 15, 2012, the Company obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its Letter No. S-10134/BL/2012 to conduct initial public offering of 154,247,000 new shares with par value of Rp 500 (full amount) per share and with offering price of Rp 1,000 (full amount) per share. On August 31, 2012, the Company listed its 1,028,313,400 shares (consisting of 154,247,000 new shares and 874,066,400 current shares already owned by existing shareholders) in the Indonesia Stock Exchange ("IDX").

Conversion of Bonds Payable

In 2011, the Company issued Convertible Bonds ("CB") with total value of Rp 690.38 billion. Furthermore, in 2013, the value of CB was changed to become Rp 57.38 billion and the remaining value of Rp 633 billion was agreed to become third party payable.

Based on the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 31, 2013, the Company's shareholders approved the issuance of new shares in connection with the exercise of its CB to the CB holder.

Based on IDX Letter No. S-01953/BEI.PPJ/09-2013 dated September 4, 2013, BEI approved the listing of 114,760,000 new shares of the Company with par value of Rp 500 (full amount) per share in connection with the exercise of its CB to the CB holder with exercise price of Rp 500 (full amount) per share.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas I

Pada tanggal 21 April 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-211/D-04/2014 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sejumlah 207.831.527 saham baru dengan nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 3.176 (nilai penuh) per saham.

Jumlah saham Perusahaan yang dicatat sejak penawaran umum perdana saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham/ Number of Shares	Description
Penawaran umum perdana saham	154.247.000	Initial public offering
Pencatatan saham pendiri	874.066.400	Listing of founder shares
Pelaksanaan konversi obligasi konversi menjadi saham baru	114.760.000	Exercise of convertible bonds to new shares
Penawaran Umum Terbatas I	207.831.527	Limited Public Offering I
Jumlah	1.350.904.927	Total

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 42 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Adam Gifari
Komisaris	:	Haryo Dewanto
Komisaris Independen	:	Rinaldy Santosa

Direksi:

Direktur Utama	:	Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur	:	Doni Wilaga Kusuma
Direktur	:	Catherine Sembiring Pelawi
Direktur	:	Suciratin

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (continued)

Limited Public Offering I

On April 21, 2014, the Company obtained an effective statement from the Board of Commissioners of Financial Services Authority ("OJK") through its Letter No. S-211/D-04/2014 to conduct Limited Public Offering I to its shareholders with Pre-emptive Rights ("HMETD") of 207,831,527 new shares with par value of Rp 500 (full amount) per share and with offering price of Rp 3,176 (full amount) per share.

The Company's number shares listed since the initial public offering until December 31, 2025 is as follows:

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees

Based on Deed of Statement of Resolution of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 42 dated August 15, 2024, which is covered by Yulia, S.H., Notary in Jakarta, composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner	:	Adam Gifari
Commissioner	:	Haryo Dewanto
Independent Commissioner	:	Rinaldy Santosa

Board of Directors:

President Director	:	Ramadhan Kurnia Nusa
Director	:	Doni Wilaga Kusuma
Director	:	Catherine Sembiring Pelawi
Director	:	Suciratin

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Rinaldy Santosa
Anggota	:	Jacobus Sindu Adisuwono
Anggota	:	Patricia Marina Sugondo

Kepala Unit Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Nico Hansen Pardede.

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Suciratin.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 1 dan 107 karyawan (tidak diaudit).

d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 16 Maret 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued)

Composition of the Company's audit committee as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Chairman	:	Rinaldy Santosa
Member	:	Jacobus Sindu Adisuwono
Member	:	Patricia Marina Sugondo

The Company's Head of Internal Audit as of December 31, 2025 and 2024 is Nico Hansen Pardede, respectively.

The Company's Corporate Secretary as of December 31, 2025 and 2024 is Suciratin, respectively.

The number of employees of the Company as of December 31, 2025 and 2024 are 1 and 107 employees, respectively (unaudited).

d. Completion of the Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 16, 2026.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of Compliance and Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consists of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("OJK").

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan memilih untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan Perusahaan adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan, kecuali untuk standar akuntansi keuangan baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi;
- Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi dan tahun yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of Compliance and Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statement". The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows is prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The Company has elected to present the statements of profit or loss and other comprehensive income in one linked statement.

The accounting policies adopted by the Company are consistently applied for the years covered by the financial statements, except for new and revised financial accounting standards as disclosed in Note 2b.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern entity.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of judgments, estimates and assumptions that affects:

- The application of accounting policies;
- The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at financial statements date;
- The reported amounts of revenues and expenses during the reporting year.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revision to accounting estimates are recognized in the year which the estimate is revised and in any future year affected of those estimate revised.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan
Laporan Keuangan (lanjutan)

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
(lanjutan)

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 3.

Tahun buku Perusahaan adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rupiah") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan

Penerapan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi" dan
- Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; dan
- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

a. Statement of Compliance and Basis of
Preparation of the Financial Statements
(continued)

Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)

Significant accounting estimates, underlying assumptions and judgments applied in the preparation of the Company's financial statements are disclosed in Note 3.

The Company's financial reporting year is from January 1 to December 31.

The accounts included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (functional currency). The financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rupiah") which is the functional currency of the Company.

All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated.

b. Changes to the Financial Accounting
Standards

The adoption of the following new financial accounting standards and amendments which are effective on or after January 1, 2025, did not result in changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior financial years:

- PSAK 117: "Insurance Contract" and
- Amendment to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

New financial accounting standards and amendments that have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on January 1, 2025, and for which early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure"; and
- PSAK 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan
(lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari penerapan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah pada tanggal transaksi perbankan terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16.782 dan Rp 16.162 untuk setiap 1 Dolar Amerika Serikat.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak ketiga.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

b. Changes to the Financial Accounting
Standards (continued)

As of the completion date of the financial statements, management is presently evaluating and has not yet determined the effects of these new and amended financial accounting standards on its financial statements.

c. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah currency at the exchange rates prevailing at the time of transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Indonesian Rupiah using the middle exchange rates at the last bank transaction date as published by Bank Indonesia. Exchange rate gains or losses arising from the foreign currency transactions and from the translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities are recognized in the current year operations.

As of December 31, 2025 and 2024, the rates of exchange used were Rp 16,782 and Rp 16,162 for 1 United States Dollar, respectively.

d. Transactions with Related Parties

The Company has transactions with related parties as defined in PSAK 224, "Related Party Disclosures".

The transactions with related parties are made based on terms agreed upon by the both parties, which terms may not be the same as those of the transactions between third parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements herein.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the financial statements are third parties.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

e. Kas di Bank

Kas di bank terdiri dari saldo rekening bank yang tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank yang dijamin atau dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Aset keuangan lancar lainnya".

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Cash in Banks

Cash in banks represents bank accounts balance that is not used as collateral and is not restricted in use.

Cash in bank which is pledged and restricted for use is presented as "Other current financial asset".

f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Aset keuangan pada NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

i. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas di bank, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, investasi neto dalam sewa, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya - setoran jaminan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Financial assets at FVTPL.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

i. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets measured at amortized cost includes cash in banks, other current financial asset, trade receivables, accrued income, net investment in lease, other receivables and other non-current assets - refundable deposits.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Subsequent Measurement (continued)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

- ii. Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

- ii. Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di penghasilan komprehensif lain ("PKL"). Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income ("OCI"). Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is reclassified to profit or loss.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang).

The Company has no financial assets which classified as financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

- iii. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas)

- iii. Financial assets at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tak terbatalan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established.

Perusahaan memiliki aset tidak lancar lainnya-investasi dalam bentuk saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas).

The Company has other non-current assets-investment in shares of stock which classified as financial assets at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

iv. Aset keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan pada NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

iv. Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in profit or loss.

The Company has no financial assets designated at FVTPL.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Impairment

The Company recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan utang jangka panjang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Because its trade receivables, accrued income, other receivables and other non-current assets do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the customers and the economic environment.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written-off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities are classified as loans and borrowings, are recognized at fair value, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and long-term debts.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Financial Instruments (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities (continued)

Pengukuran Selanjutnya

Subsequent Measurement

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

i. Liabilitas keuangan pada NWLR

i. Financial liabilities at FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Financial liabilities are classified as held for trading if these financial liabilities are acquired for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered by the Company in which those derivative financial instruments that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

ii. Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowing principal within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for trade payables, other payables and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract discharged or cancelled or expired.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset keuangan dan menyelesaikan liabilitas keuangan secara bersamaan.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan, pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Perusahaan juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada NWPKL.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts of financial liability is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts of its financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the financial assets and settle the financial liabilities simultaneously.

g. Fair Value Measurement

The Company measures financial assets and financial liabilities at fair value at each reporting date. The Company also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. The Company also measures certain recoverable amounts of the Cash Generating Units ("CGU") using fair value less cost of disposal and certain financial assets at FVOCI.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- ii) Tingkat 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) Tingkat 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

g. Fair Value Measurement (continued)

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participants that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, by maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1 - Quoted (unadjusted) market price in active markets for identical assets or liabilities.*
- ii) *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- iii) *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

h. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian. Piutang dihapusbukukan pada tahun saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

h. Trade and Other Receivables

Trade and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except where the effect of discounting is immaterial, less allowance for expected credit losses. Receivables are written-off during the year in which they are determined to be not collectible.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined by the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada tahun penurunan nilai atau kerugian terjadi.

Provision for impairment losses of inventories due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at end of the year. Provision for declining in market value of inventories and all losses of inventories are recognized as an expense in the year the impair or loss occurs.

j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

k. Aset Tetap

Seluruh aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

k. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its acquisition price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap serta disajikan sebagai provisi jangka panjang pada bagian liabilitas.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located and its presented under long-term provision as part of liabilities.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Subsequent to initial recognition, fixed assets, except landrights, are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

k. Aset Tetap (lanjutan)

k. Fixed Assets (continued)

Aset tetap terdiri dari aset kepemilikan langsung dan aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih ("BOT").

Fixed assets consists of direct ownership fixed assets and fixed assets under build, operate and transfer ("BOT").

Penyusutan aset tetap kepemilikan langsung, kecuali hak atas tanah, dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of direct ownership fixed assets, except for landrights, is started when such asset is ready for its intended use which is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ Years	
Menara telekomunikasi	40	Telecommunication tower
Bangunan	5 - 20	Buildings
Peralatan dan mesin	5 - 15	Tools and machineries
Peralatan jaringan	25 - 30	Network equipment
Peralatan kantor	4	Office equipment
Kendaraan bermotor	4 - 8	Motor vehicles

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Landrights is stated at cost and not depreciated because management believes it is probable that the landrights can be renewed/extended on maturity.

Aset tetap dalam rangka BOT adalah aset yang pembangunannya didanai oleh Perusahaan sampai dengan siap dioperasikan, yang kemudian dikelola oleh Perusahaan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang akan menerima aset tersebut pada akhir periode perjanjian BOT (Catatan 33b).

Fixed assets under BOT is assets which its construction was funded by the Company until ready for its intended use, then managed by the Company and subsequently will be transferred to the designated party in which will receive those assets at the end of BOT agreement period (Note 33b).

Aset tetap dalam rangka BOT disusutkan sepanjang masa perjanjian BOT dengan pihak yang akan menerima aset tersebut.

Fixed assets under BOT is depreciated over the terms of BOT agreement with the designated party in which will receive those assets.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Perusahaan dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Company would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya. Biaya lain yang terjadi setelah pengakuan awal untuk menambah, mengganti sebagian atau memperbaiki aset, diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang berkenaan dengan aset akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add, to replace part of or service an item of other fixed assets, are recognized as asset if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the asset can be measured reliably.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

l. Sewa

Perusahaan Sebagai Penyewa

Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal awal kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan semua pengaturan sewa dalam hal sebagai penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dengan durasi 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

k. Fixed Assets (continued)

Carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial year. Changes in the expected useful life of assets are considered to modify the depreciation period and are treated as changes in accounting estimates.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell and value in use.

Constructions in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs until the date when the asset is completed and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been completed and ready for use.

l. Leases

The Company as a Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases with a duration of 12 months or less and leases of low value assets.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Perusahaan Sebagai Penyewa (lanjutan)

The Company as a Lessee (continued)

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk penyewaan jangka pendek (yaitu sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa pada sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah diakui sebagai biaya atas dasar garis lurus selama masa sewa.

The Company applies the short-term leases recognition exemption to its short-term leases (i.e. those leases that have a lease terms of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases and leases of low value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease terms.

Aset hak-guna

Right-of-use assets

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu pada tanggal aset pendasarnya tersedia untuk digunakan atas tanah, atap dan serat optik yang disewa untuk digunakan dalam operasi menara telekomunikasi). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi setiap akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima serta jumlah provisi diakui, jika Perusahaan secara kontraktual diwajibkan membongkar, memindahkan, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e. the date the underlying asset is available for use for land, rooftop and fiber optic for use in the operation of telecommunications tower). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received and the amount of any provision recognized, if the Company is contractually required to dismantle, remove or restore the site on which it is located or restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai akun tersendiri dalam laporan posisi keuangan (Catatan 12).

Right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position (Note 12).

Aset hak-guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat dari aset pendasar berkisar antara 3 sampai 30 tahun. Jika sewa mentransfer kepemilikan aset pendasar atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan bahwa Perusahaan mengharapkan untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna terkait disusutkan selama masa manfaat dari aset pendasar. Penyusutan dimulai sejak tanggal dimulainya sewa.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease terms and useful life of the underlying asset, its ranging from 3 to 30 years. If a lease transfers ownership of the underlying asset or the cost of the right-of-use asset reflects that the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying asset. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Perusahaan Sebagai Penyewa (lanjutan)

The Company as a Lessee (continued)

Aset hak-guna (lanjutan)

Right-of-use assets (continued)

Aset hak-guna juga dapat mengalami penurunan nilai. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 2n.

Right-of-use assets are also subject to impairment. The accounting policy for impairment is disclosed in Note 2n.

Liabilitas sewa

Lease liabilities

Pada awalnya liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses its incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran sewa tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi dengan piutang insentif sewa; pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan; jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual; harga eksekusi opsi beli, jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable; variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date; the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees; the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and payments of penalties for terminating the lease, if the lease terms reflects the exercise of an option to terminate the lease.

Liabilitas sewa disajikan sebagai akun tersendiri dalam laporan posisi keuangan (Catatan 12).

Lease liabilities are presented as a separate line in the statement of financial position (Note 12).

Perusahaan Sebagai Pesewa

The Company as a Lessor

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

When the Company acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

1. Sewa (lanjutan)

Perusahaan Sebagai Pesewa (lanjutan)

Untuk sewa operasi, Perusahaan mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Untuk sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui aset berupa investasi neto dalam sewa di laporan posisi keuangan. Pembayaran sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan keuangan. Pengakuan penghasilan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Perjanjian subsewa

Subsewa merupakan transaksi dimana aset pendasar disewakan kembali oleh penyewa ("pesewa-antara") kepada pihak ketiga, dan sewa ("sewa utama") antara pesewa utama dan penyewa tetap berlaku. Entitas menerapkan PSAK 116 untuk semua sewa aset hak-guna atas subsewa. Pesewa antara memperhitungkan sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang berbeda.

Perusahaan menyewa menara telekomunikasi dari penyedia menara telekomunikasi (sewa utama) dan Perusahaan sebagai pesewa antara menyewakan kembali menara telekomunikasi tersebut kepada pihak ketiga (subsewa). Sesuai PSAK 116, pesewa antara mengklasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sebagai berikut:

- Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek dan entitas, sebagai penyewa, telah menerapkan pengecualian pengakuan jangka pendek, subsewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi; atau
- Sebaliknya, subsewa diklasifikasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama, bukan dengan mengacu pada aset yang mendasari (menara telekomunikasi).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

1. Leases (continued)

The Company as a Lessor (continued)

Under operating lease, the Company presents an asset subject to operating leases in its statement of financial position according to the nature of the asset. Lease income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease terms.

Under finance lease, the Company recognizes an asset held under a net investment in lease in its statement of financial position. Lease payment is treated as repayment of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company's net investment in the finance lease.

Sublease contract

Sublease is a transaction for which an underlying asset is re-leased by a lessee ("intermediate lessor") to a third party, and the lease ("head lease") between the head lessor and the lessee remains in effect. An entity applies PSAK 116 to all leases of right-of-use assets in a sublease. The intermediate lessor accounts for the head lease and the sublease as two different contracts.

The Company leases telecommunication tower from several tower providers (head lease) and the Company as intermediate lessor re-leased these tower to a third party (sublease). Based on PSAK 116, the intermediate lessor classifies the sublease as a finance lease or an operating lease as follows:

- If the head lease is a short-term lease and the entity, as a lessee, has applied the short-term recognition exemption, the sublease is classified as an operating lease; or
- Otherwise, the sublease is classified by reference to the right-of-use asset arising from the head lease, rather than by reference to the underlying asset (telecommunication tower).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Perjanjian subsewa (lanjutan)

Berdasarkan penilaian manajemen, kontrak subsewa merupakan sewa pembiayaan. Oleh karena itu, Perusahaan menghentikan pengakuan aset hak-guna atas sewa utama pada tanggal dimulainya subsewa dan memperhitungkan liabilitas sewa utama sesuai dengan model akuntansi penyewa. Perusahaan mengakui investasi neto dalam sewa dan mengevaluasi penurunan nilai. Selisih antara aset hak-guna dan investasi neto dalam sewa diakui sebagai keuntungan atas pengakuan investasi neto dalam sewa dalam laba rugi.

Selain itu, dalam kontrak subsewa, jika tingkat bunga tersirat dalam subsewa tidak dapat ditentukan, pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan untuk sewa utama (d disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa) untuk mengukur investasi neto pada subsewa. Perusahaan menggunakan suku bunga inkremental pinjaman untuk sewa utama untuk mengukur investasi neto dalam sewa.

m. Aset Tidak Lancar Lainnya

Biaya untuk Memperoleh Kontrak

Biaya untuk memperoleh kontrak merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak eksklusif sebagai penyedia menara telekomunikasi tambahan yang diperlukan oleh pelanggan dari operator telekomunikasi. Biaya untuk memperoleh kontrak diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode jasa diberikan ke pelanggan dan disajikan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Perangkat Lunak Komputer

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

l. Leases (continued)

Sublease contract (continued)

Based on the management assessment, the sublease contract is finance lease. Therefore, the Company derecognizes the right-of-use asset on the head lease at the sublease commencement date and continues to account for the head lease liability in accordance with the lessee accounting model. The Company recognizes a net investment in lease and evaluates it for impairment. Any difference between the right-of-use asset and the net investment in lease is recognized as gains in recognition of net investment in lease in profit or loss.

Moreover, in a sublease, if the interest rate implicit in the sublease cannot be readily determined, an intermediate lessor may use the discount rate used for the head lease (adjusted for any initial direct costs associated with the sublease) to measure the net investment in the sublease. The Company used the incremental borrowing rate used for its head lease to measure the net investment in lease.

m. Other Non-Current Assets

Cost of Obtaining Contract

Cost of obtaining contract represents cost to obtain exclusive rights as a provider for additional telecommunication tower required by the customer of the telecommunication operator. These costs are amortized using the straight-line method over the period of services are rendered to the customer and presented at cost less accumulated amortization and impairment losses, if any.

Computer Software

Software which is not an integral part of a related hardware is stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

m. Aset Tidak Lancar Lainnya (lanjutan)

Perangkat Lunak Komputer (lanjutan)

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak dengan umur manfaat terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset selama 2 (dua) hingga 7 (tujuh) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

Masa manfaat ekonomis dan metode amortisasi ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan.

Aset tidak lancar lainnya juga dapat mengalami penurunan nilai. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 2n.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

m. Other Non-Current Assets (continued)

Computer Software (continued)

The cost of software consists of all expenses in which directly attributable to the preparation of such software cost, until it is ready to be used for its intended purpose. Subsequent expenditure on software is capitalized as part of software cost only when it increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than the originally expected performance standards of those software. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as an expense when incurred.

Software with a finite useful life is amortized using the straight-line method over its estimated useful life, which is 2 (two) until 7 (seven) years.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income from the date that is available for use until the economic benefits of software is ended.

Estimated useful life and amortization method are reviewed at the end of each reporting year.

Other non-current assets are also subject to impairment. The accounting policy for impairment is disclosed in Note 2n.

n. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each of reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

o. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pasca kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") dan Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ("UU-CK") yang menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU-CK dan PP 35/2021 adalah program manfaat pasti.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

n. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses from continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets.

These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

o. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees. Short-term employee benefits include wages, salaries, bonuses and incentive.

Post-employment benefits

The Company provides post-employment benefits in accordance with the Government Regulation No. 35 Year 2021 ("PP 35/2021") and Law No. 6/2023 concerning Job Creation ("UU-CK") which determined certain formula to calculate the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under UU-CK and PP 35/2021 represent defined benefit plans.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan. Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba atau rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam tahun terjadinya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

o. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

The defined benefit liability recognized in the statement of financial position in respect of defined pension benefits plan is the present value of the defined benefits obligation at reporting date. The present value of defined benefits obligation is calculated by independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefits obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Past service costs are recognized immediately in profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognized in other comprehensive income in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

A curtailment occurs when an entity either:

- i. Demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
- ii. Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when the Company enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

p. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian barang atau jasa diterima oleh pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya.

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are being received by to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Company has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada pertimbangan yang diterima Perusahaan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang diterima oleh pelanggan, setelah dikurangi potongan pendapatan dan disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan serta penyesuaian harga.

The amount of revenue recognized is based on the consideration that the Company received in exchange for transferring goods or services in which received by the customers, net of the revenue discount and adjusted for expected returns and price adjustments.

Untuk potongan harga, pengembalian dan penyesuaian harga, Perusahaan menggunakan metode yang paling mungkin dalam memperkirakan jumlah tersebut. Manajemen mempertimbangkan pengalaman historisnya untuk mengembangkan estimasi.

For sales discount, returns and price adjustment, the Company uses most likely method in estimating the amount. Management considers its historical experience to develop an estimate.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perusahaan telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

If a customer pays consideration before the Company transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Company fulfill the requirements under the contract.

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognized when incurred using the accrual basis.

Penghasilan atau beban bunga

Interest income or expenses

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Perpajakan

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 212, pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK tersebut. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan sewa menara telekomunikasi sebagai bagian akun tersendiri.

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa.

Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final pada laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Perusahaan menyajikan beban pajak final sebagai pos tersendiri.

Selisih nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak final dengan dasar pengenaan pajaknya, tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

q. Taxation

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to PSAK 212, final tax is no longer governed by these PSAK. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from telecommunication tower lease income as separate line item.

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No. 34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with those regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged of final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

In accordance with Article 5 paragraph 1, income from lease which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of lease period in accordance with the lease agreement. Management believes that telecommunication tower lease income is charged by non-final income tax until the end of lease period.

The difference between the final tax paid and the amount charged as final tax expenses in profit or loss is recognized as prepaid tax or tax payable. The Company presents final tax expense as separate line item.

The differences between the carrying amounts of assets and liabilities related to final tax and their respective tax bases, are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban lain-lain pada laba rugi.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui berdasarkan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan atas aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan basis pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

q. Taxation (continued)

Current tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the tax rates and tax regulation that has been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Company, when the result of the appeal is determined.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of Current Income Tax Expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of other expenses in profit or loss.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future periods against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang berkaitan dengan transaksi dengan PPN disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

r. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat dan penawaran umum terbatas dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

q. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax assets to be utilized. At each reporting date, the Company reassessed unrecognized deferred tax assets and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Value Added Tax ("VAT")

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- VAT incurred from a purchase of assets or services which not recoverable from the tax office, is recognized as part of the acquisition cost of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- Receivables and payables relating to transactions with VAT are presented including the amount of VAT.

The net amount of VAT which recoverable from, or payable to, the tax office is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

r. Share Issuance Costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of new share to the public and limited shares offering or rights issues were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statement of financial position.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

s. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada tahun ketika dividen tersebut disetujui atau dideklarasikan oleh para pemegang saham.

t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

u. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) Kas di bank kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

s. Dividend

Dividend to the shareholders is recognized as a liability in the statement of financial position in the year in which the dividends are approved or declared by the shareholders.

t. Earnings per Share

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid of shares during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025 and 2024, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

u. Current and Non-current Classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

- i) *Expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) *Held primarily for the purpose of trading,*
- iii) *Expected to be realized within 12 months after the reporting date, or*
- iv) *Cash in banks unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date.*

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) *Expected to be settled in the normal operating cycle,*
- ii) *Held primarily for the purpose of trading,*
- iii) *Due to be settled within twelve months after the reporting date, or*
- iv) *There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.*

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax liabilities are classified as non-current liabilities.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

v. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari entitas yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Rincian informasi segmen tersebut diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan.

w. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling akhir. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dipulihkan.

x. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomis.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

v. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment element reported is the measure that is reported to the chief operating decision maker for the purpose of making decisions to allocate resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The financial information reported is based on information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. Details of the segment information are disclosed in Note 34 to the financial statements.

w. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each of end reporting year and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

y. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f atas laporan keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

y. Events After the Reporting Period

Post reporting date events that provide additional information about the Company's financial position of as of the statement of financial position date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post reporting date events which are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at end of reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future year.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2f to the financial statements.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sewa

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai penyewa atau pesewa untuk beberapa aset tetap tertentu. Berdasarkan PSAK 116, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewa yang di transfer kepada penyewa atau tetap berada pada Perusahaan, jangka waktu sewa dan suku bunga pinjaman inkremental, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi.

Perusahaan telah menandatangani perjanjian subsewa dengan pelanggan untuk menara telekomunikasi yang disewa dari beberapa pihak ketiga (sewa utama), dengan tetap mempertahankan kewajiban utama di bawah sewa utama. Berdasarkan PSAK 116, Perusahaan, sebagai pesewa antara, harus mengevaluasi subsewa dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama dan bukan dengan mengacu pada aset yang mendasarinya.

Sejak subsewa merupakan sisa jangka waktu sewa utama, Perusahaan menilai bahwa perjanjian subsewa merupakan sewa pembiayaan karena Perusahaan pada dasarnya telah mengalihkan semua haknya untuk menggunakan aset dari sewa utama untuk semua masa sewa.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Uncertain Tax Exposure

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Leases

The Company has various lease agreements whereby the Company acts as either a lessee or lessor in respect of certain assets. Based on PSAK 116, the Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee or retained by the Company, lease terms and incremental borrowing rates, which requires the Company to make judgments and estimates.

The Company has entered into sublease contract with its customer for the telecommunication tower which leased from several third parties (original lease/head lease), while retaining the primary obligations under the head lease. Based on PSAK 116, the Company, as an intermediate lessor, should evaluate the sublease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease and not by reference to the underlying asset.

Since the sublease is for the remaining term of the head lease, the Company has assessed that the sublease agreement is a finance lease because the Company in effect has transferred all its right to use the asset from the head lease for all of its lease terms.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi Pembaruan dan Penghentian dalam Kontrak - Perusahaan sebagai Lessee

Perusahaan menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan memengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Sebagai penyewa, Perusahaan melakukan kontrak sewa tanah dengan fitur opsi perpanjangan. Pada setiap akhir tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah cukup pasti dalam mengeksekusi opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa. Berdasarkan analisis pembaruan sewa tanah di masa lalu, Perusahaan menetapkan bahwa opsi tersebut tidak cukup pasti untuk dieksekusi. Perubahan penilaian tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sejak tanggal 30 Juni 2024. Akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut, aset hak-guna neto dan liabilitas sewa masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 150.940 dan Rp 38.171 (Catatan 12).

Dampak dari perubahan estimasi jangka waktu sewa kontrak sewa tanah dan beban bunga untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

	Penurunan dalam amortisasi (tidak diaudit)/ Decrease in amortization (unaudited)
2024 (Juli - Desember)	(9.689)
2025 - 2029	(61.081)
2030 - selesai	(5.079)

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Renewal and Termination Options in the Contract - Company as Lessee

The Company determines the lease terms as the non-cancellable terms of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease terms if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

As a lessee, the Company entered into ground lease contracts with renewal option features. At the end of each reporting date, the Company assessed whether it is reasonably certain to exercise the option to extend the term of leases. Based on an analysis of historical renewal of ground leases, the Company determined that it is not reasonably certain to exercise the option. The change in assessment is accounted for as a change in accounting estimate commencing from June 30, 2024. As a result of the change in accounting estimate, the net right-of-use assets and lease liabilities decreased by Rp 150,940 and Rp 38,171, respectively (Note 12).

The impact of changes in the estimated lease term of the ground leases contracts and interest expenses for the current and subsequent years is as follows:

	Penurunan dalam beban bunga (tidak diaudit)/ Decrease in interest expenses (unaudited)	
2024 (Juli - Desember)	(1.249)	2024 (July - December)
2025 - 2029	(9.765)	2025 - 2029
2030 - end	(5.257)	2030 - end

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir tahun pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif gagal bayar yang diamati Perusahaan secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor usaha Perusahaan, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 6.

Nilai tercatat piutang usaha Perusahaan sebelum cadangan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 119.674 dan Rp 309.384. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 6.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at end of reporting year that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for Expected Credit Losses of Trade Receivables

The Company uses a provision matrix to calculate Expected Credit Losses ("ECL") for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast for economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Company's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about ECLs on the Company's trade receivables is disclosed in Note 6.

The carrying amount of the Company's trade receivables before allowance for expected credit losses as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 119,674 and Rp 309,384, respectively. Further details are disclosed in Note 6.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perusahaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 2.145 dan Rp 3.087. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 9.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

Perusahaan juga menentukan nilai residu menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan penerimaan neto yang akan diperoleh dari pelepasan aset di pasar jual beli atau pasar barang bekas, fluktuasi harga barang bekas dan praktek yang berlaku di industri.

Estimasi masa manfaat dan nilai residu setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, kinerja operasi di masa datang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Perubahan estimasi masa manfaat dan nilai residu setiap item aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui serta nilai tercatat aset tetap.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment Losses of Inventories

Allowance for impairment losses of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Company's inventories before allowance for impairment losses as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 2,145 and Rp 3,087, respectively. Further details are disclosed in Note 9.

Estimated Useful Life of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The Company also determines telecommunication tower by considers the net proceeds that would be obtained from the disposal of the assets in the resale or scrap markets, fluctuations in scrap prices and industry practice.

The estimated useful life and residual value of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A change in the estimated useful life and residual values of any item of assets would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of fixed assets.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Nilai Residu Aset Tetap (lanjutan)

Nilai buku neto aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 2.809.156 dan Rp 2.788.742. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 11.

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara Telekomunikasi

Perusahaan melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara telekomunikasi yang disajikan sebagai provisi jangka panjang pada liabilitas di akhir tahun pelaporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya pembongkaran menara telekomunikasi tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran menara telekomunikasi, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir tahun pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 19.

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan ("IBR") untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi (seperti untuk entitas-entitas anak yang tidak mengadakan transaksi pembiayaan) atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa.

Perusahaan menetapkan estimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik jika diperlukan.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Useful Life of Fixed Assets and Residual Value of Fixed Assets (continued)

The net book value of the Company's fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 2,809,156 and Rp 2,788,742, respectively. Further details are disclosed in Note 11.

Estimated Cost of Dismantling of Telecommunication Tower

The Company assesses its estimated cost of dismantling of telecommunication tower in which presented under long-term provision in liabilities at end of reporting year. In determining the estimated cost of dismantling telecommunication towers, significant estimates and assumptions are required due to the numerous factors that may affect the ultimate amount of the liability. These factors include estimates of the timing and amount of costs for telecommunication tower dismantling activities, changes in technology, changes in regulations, increases in costs due to inflation, and changes in discount rates. Such uncertainties may result in actual future expenditures differing from the amounts currently provided. The estimated cost at the end of the reporting period represents management's best estimate of the present value of future restoration costs required. Further details are disclosed in Note 19.

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the Company uses its incremental borrowing rate ("IBR") to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Company 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease (for example, the subsidiaries that do not enter into financing transactions).

The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and make certain specific estimates as necessary.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial dan menggunakan asumsi termasuk tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang diharapkan. Perubahan asumsi ini akan memengaruhi nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun pelaporan dengan menggunakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi-asumsi penting lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp 8.288. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 20.

Estimasi Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 16e.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Post-employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions including the discount rate and expected salary increment rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits liability.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting year using interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflow expected to be required to settle the pension obligations.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries of its employees and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions are in part based on the current market conditions

The carrying amount of the Company's post-employment benefits liability as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp Nil and Rp 8,288, respectively. Further details are disclosed in Note 20.

Estimated Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 16e.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DI BANK

Kas di bank terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Kas di bank - pihak ketiga		
Rupiah Indonesia		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	384	7.943
PT Bank Sinarmas Tbk	105	912
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50)	45	266
Jumlah kas di bank - pihak ketiga	534	9.121
Kas di bank - pihak berelasi		
(Catatan 32)		
Rupiah Indonesia		
PT Bank Central Asia Tbk	569	9.017
Jumlah	1.103	18.138

Pendapatan bunga yang berasal dari saldo penempatan di bank disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

4. CASH IN BANKS

Cash in banks consists of:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Cash in banks - third parties		
Indonesian Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.943	9.121
PT Bank Sinarmas Tbk	912	266
Others (each below Rp 50)	266	
Total cash in banks - third parties	9.121	9.121
Cash in bank - related party		
(Note 32)		
Indonesian Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	9.017	9.017
Total	18.138	18.138

Interest income from cash in banks is presented as part of "Finance Income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Rincian aset keuangan lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Kas yang dibatasi penggunaannya		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	516	527

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan bank garansi atas jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

5. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSET

Details of other current financial asset is as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Restricted cash		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	527	516

Restricted cash represents bank guarantee for services provided by the Company to the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) and PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember/ December 31,	
	2025	2024
Pihak ketiga		
PT XLSMART Telecom		
Sejahtera Tbk (sebelumnya		
PT XL Axiata Tbk)*	110.806	2.029
PT Indosat Tbk	2.744	64.628
PT Telekomunikasi Selular	1.778	3.134
PT Smart Telecom*	-	230.752
Lain-lain (masing-masing di		
bawah Rp 3.000)	4.346	8.841
Jumlah	119.674	309.384
Dikurangi cadangan kerugian		
kredit ekspektasian	(877)	(6.516)
Neto	118.797	302.868

*) Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/ On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

b. Berdasarkan umur

	31 Desember/ December 31,	
	2025	2024
Pihak ketiga		
Belum jatuh tempo	86.696	3.285
Telah jatuh tempo:		
1 - 30 hari	22.819	262.921
31 - 60 hari	7.461	39.536
61 - 90 hari	86	905
Lebih dari 90 hari	2.612	2.737
Jumlah	119.674	309.384
Dikurangi cadangan kerugian		
kredit ekspektasian	(877)	(6.516)
Neto	118.797	302.868

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan pinjaman.

6. TRADE RECEIVABLES

Details of trade receivables are as follows:

a. By customers

Third parties
PT XLSMART Telecom
Sejahtera Tbk (formerly
PT XL Axiata Tbk)*
PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular
PT Smart Telecom*
Others (each below
Rp 3,000)
Total
Less allowance for
expected credit losses
Net

b. By aging

Third parties
Not yet due
Past due:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total
Less allowance for
expected credit losses
Net

All trade receivables are denominated in Indonesian Rupiah.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no trade receivables which is pledged as collateral loans.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

Movements of allowance for expected credit losses of trade receivables are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal tahun	6.516	34.760	Balance at beginning of year
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	(5.639)	-	Recovery during the year (Note 30)
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	-	4.430	Provision during the year (Note 30)
Reklasifikasi (Catatan 13)	-	(32.088)	Reclassification (Note 13)
Penghapusan selama tahun berjalan	-	(586)	Written-off during the year
Saldo akhir tahun	877	6.516	Balance at end of year

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen mereklasifikasi penyajian piutang usaha dan cadangan kerugian kredit ekspektasian dari PT Net Satu Indonesia sebesar Rp 32.088 sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya (Catatan 13).

As of December 31, 2024, management reclassified the presentation of trade receivables and its allowance for expected credit losses from PT Net Satu Indonesia which amounting to Rp 32,088 as part of other non-current assets (Note 13).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that allowance for expected credit losses of trade receivables is adequate to cover possible losses that may arise from uncollected of trade receivables.

7. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan lainnya yang belum ditagih karena proses transaksi dan kelengkapan dokumen penagihan sedang dalam verifikasi persetujuan oleh pelanggan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

7. ACCRUED INCOME

Accrued income represents unbilled rental income of telecommunication towers and others due to the transaction process and completeness of administration of billing documents under approval verification process by its customers as of December 31, 2025 and 2024.

Rincian pendapatan yang masih akan diterima berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of accrued income by customers is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk)*	50.901	-	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk)*
PT Telekomunikasi Selular	16.675	8.991	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	11.739	34.839	PT Indosat Tbk
PT Eka Mas Republik	2.230	1.615	PT Eka Mas Republik
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.061	567	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Smart Telecom*	-	130.165	PT Smart Telecom*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2.000)	6.805	1.120	Others (each below Rp 2,000)
Jumlah	90.411	177.297	Total
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(4.197)	(44.009)	Less allowance for expected credit losses
Neto	86.214	133.288	Net

* Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/ On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA
(lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Saldo awal tahun	44.009	-
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	(39.812)	-
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	-	44.009
Saldo akhir tahun	4.197	44.009

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian atas pendapatan yang masih akan diterima adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pendapatan yang masih akan diterima.

7. ACCRUED INCOME (continued)

Movements of allowance for expected credit losses of accrued income are as follows:

	2025	2024	
	44.009	-	Balance at beginning of year
	(39.812)	-	Recovery during the year (Note 30)
	-	44.009	Provision during the year (Note 30)
Saldo akhir tahun	4.197	44.009	Balance at end of year

Management believes that allowance for expected credit losses of accrued income is adequate to cover possible losses that may arise from uncollected of accrued income.

8. INVESTASI NETO DALAM SEWA

Rincian investasi neto dalam sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Pembayaran piutang sewa pembiayaan		
Dalam 1 tahun	248.594	254.674
Dalam 2 - 5 tahun	425.036	719.613
Lebih dari 5 tahun	116.940	127.248
Jumlah	790.570	1.101.535
Dikurangi penghasilan keuangan belum diterima	(162.132)	(247.038)
Nilai kini dari pembayaran piutang sewa minimum	628.438	854.497
Dikurangi bagian jangka pendek	(175.604)	(168.639)
Bagian jangka panjang	452.834	685.858

Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental per tahun berkisar antara 9% sampai 10,25% untuk menentukan nilai kini dari piutang pembayaran sewa minimum.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen tidak membentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian atas investasi neto dalam sewa karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh investasi neto dalam sewa tersebut dapat tertagih seluruhnya.

8. NET INVESTMENT IN LEASE

Details of net investment in lease is as follows:

	2025	2024	
			Payments of finance lease receivables
	248.594	254.674	Within 1 year
	425.036	719.613	Within 2 - 5 years
	116.940	127.248	More than 5 years
Jumlah	790.570	1.101.535	Total
Dikurangi penghasilan keuangan belum diterima	(162.132)	(247.038)	Less unearned finance income
Nilai kini dari pembayaran piutang sewa minimum	628.438	854.497	Present value of minimum payments of lease receivables
Dikurangi bagian jangka pendek	(175.604)	(168.639)	Less current portion
Bagian jangka panjang	452.834	685.858	Non-current portion

The Company used incremental borrowing rates per annum ranging from 9% to 10.25% to determine the present value of the minimum lease payments receivables.

As of December 31, 2025 and 2024, management did not provide allowance for expected credit losses of net investment in lease because management believes that the entire net investment in lease are fully collectible.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Material menara telekomunikasi	1.751	2.891
Material peralatan jaringan	394	196
Sub jumlah	2.145	3.087
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.895)	(1.895)
Neto	250	1.192

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Saldo awal tahun	1.895	484
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	-	1.411
Saldo akhir tahun	1.895	1.895

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah persediaan yang direklasifikasi sebagai aset tetap masing-masing sebesar Rp 2.143 dan Rp 39.566 (Catatan 11).

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, pencurian, kerusakan dan risiko lainnya kepada perusahaan asuransi pihak ketiga dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 308 dan Rp 273 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persediaan tidak dijaminkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai realisasi neto dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul.

9. INVENTORIES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Telecommunication tower materials	1.751	2.891
Network equipment materials	394	196
Sub total	2.145	3.087
Less allowance for impairment losses	(1.895)	(1.895)
Net	250	1.192

Movements of allowance for impairment losses of inventories are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Balance at beginning of the year	1.895	484
Provision during the year (Note 30)	-	1.411
Balance at end of year	1.895	1.895

For the years ended December 31, 2025 and 2024, total inventories reclassified to fixed assets amounted to Rp 2,143 and Rp 39,566, respectively (Note 11).

Inventories have been insured against fire, earthquake, thieves, damages and other risks to the third parties insurance companies with total coverage amounted to Rp 308 and Rp 273 as of December 31, 2025 and 2024, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from the insured risks.

As of December 31, 2025 and 2024, the inventories are not pledged as collateral.

Based on the review result of physical condition and net realizable of inventories as of December 31, 2025 and 2024, management believes that allowance for impairment losses of inventories is adequate to cover possible impairment losses that may arise.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

10. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rincian uang muka dan beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Uang muka		
Proyek	3.137	5.434
Sewa	2.034	9.609
Jumlah uang muka	5.171	15.043
Beban dibayar di muka		
Perijinan	17.710	16.375
Pemeliharaan	13.790	14.553
Asuransi	267	-
Sewa	42	56
Jumlah beban dibayar di muka	31.809	30.984
Jumlah	36.980	46.027
Dikurangi bagian lancar	(12.986)	(31.595)
Bagian tidak lancar	23.994	14.432

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Details of advances and prepaid expenses are as follows:

Advances
Project
Rental
Total advances
Prepaid expenses
Permits
Maintenance
Insurance
Rental
Total prepaid expenses
Total
Less current portion
Non-current portion

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah uang muka yang direklasifikasi sebagai aset tetap masing-masing sebesar Rp 6.851 dan Rp 119.265 (Catatan 11).

For the years ended December 31, 2025 and 2024, total advances reclassified to fixed asset amounted to Rp 16,851 and Rp 119,265, respectively (Note 11).

Uang muka proyek akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Advances for project will be settled within a year.

Bagian tidak lancar merupakan beban dibayar di muka atas pemeliharaan dan perijinan.

Non-current portion represents prepaid expenses for maintenance and permits.

11. ASET TETAP

Rincian mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS

Details of fixed assets movement are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/Year Ended December 31, 2025					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	71.617	2.650	-	480	74.747	Landrights
Menara telekomunikasi	2.151.561	2.369	26.889	52.982	2.180.023	Telecommunication tower
Bangunan	28.087	-	-	-	28.087	Buildings
Peralatan dan mesin	1.711.790	1.151	10.661	1.032	1.703.312	Tools and machineries
Peralatan jaringan	1.241.789	1.094	342	71.314	1.313.855	Network equipment
Peralatan kantor	8.112	50	2.559	(10)	5.593	Office equipment
Kendaraan bermotor	8.549	-	2.589	-	5.960	Motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	1.170	136.683	3.801	(125.798)	8.254	Construction in progress
Sub jumlah	5.222.675	143.997	46.841	-	5.319.831	Sub total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

Rincian mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

Details of fixed assets movement are as follows:
(continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/Year Ended December 31, 2025						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan (lanjutan)						Acquisition cost (continued)
<u>Aset tetap dalam</u>						<u>Fixed assets under</u>
<u> rangka bangun,</u>						<u> build, operate and</u>
<u> kelola dan alih</u>						<u> transfer</u>
Menara						Telecommunication
telekomunikasi	29.096	-	-	-	29.096	tower
Bangunan	1.753	-	-	-	1.753	Buildings
Peralatan dan mesin	332	-	-	-	332	Tools and machineries
Peralatan jaringan	5.716	-	-	-	5.716	Network equipment
Sub jumlah	36.897	-	-	-	36.897	Sub total
Jumlah harga perolehan	5.259.572	143.997	46.841	-	5.356.728	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Menara						Telecommunication
telekomunikasi	424.267	35.385	5.215	(33)	454.404	tower
Bangunan	16.126	1.163	-	-	17.289	Buildings
Peralatan dan mesin	726.498	26.797	5.559	33	747.769	Tools and machineries
Peralatan jaringan	205.547	49.681	-	-	255.228	Network equipment
Peralatan kantor	6.684	840	2.655	-	4.869	Office equipment
Kendaraan bermotor	7.072	204	2.589	-	4.687	Motor vehicles
Sub jumlah	1.386.194	114.070	16.018	-	1.484.246	Sub total
<u>Aset tetap dalam</u>						<u>Fixed asset under</u>
<u> rangka bangun,</u>						<u> build, operate and</u>
<u> kelola dan alih</u>						<u> transfer</u>
Menara						Telecommunication
telekomunikasi	12.100	3.590	-	-	15.690	tower
Bangunan	554	266	-	-	820	Buildings
Peralatan dan mesin	110	49	-	-	159	Tools and machineries
Peralatan jaringan	2.206	780	-	-	2.986	Network equipment
Sub jumlah	14.970	4.685	-	-	19.655	Sub total
Jumlah akumulasi penyusutan	1.401.164	118.755	16.018	-	1.503.901	Total accumulated depreciation
Rugi penurunan nilai						Impairment losses
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	8.889	-	-	-	8.889	Landrights
Menara						Telecommunication
telekomunikasi	149.868	-	22.366	-	127.502	tower
Peralatan dan mesin	910.909	-	3.629	-	907.280	Tools and machineries
Jumlah rugi penurunan nilai	1.069.666	-	25.995	-	1.043.671	Total impairment losses
Nilai buku neto	2.788.742				2.809.156	Net book value

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

Rincian mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

Details of fixed assets movement are as follows:
(continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/Year Ended December 31, 2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	59.427	27.378	15.188	-	71.617	Landrights
Menara telekomunikasi	2.108.430	38.835	4.444	8.740	2.151.561	Telecommunication tower
Bangunan	68.328	-	40.611	370	28.087	Buildings
Peralatan dan mesin	1.679.737	1.429	15.420	46.044	1.711.790	Tools and machineries
Peralatan jaringan	1.020.989	247.933	52.620	25.487	1.241.789	Network equipment
Peralatan kantor	21.559	591	14.653	615	8.112	Office equipment
Kendaraan bermotor	10.609	1.626	3.686	-	8.549	Motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	167.429	46.925	126.327	(86.857)	1.170	Construction in progress
Sub jumlah	5.136.508	364.717	272.949	(5.601)	5.222.675	Sub total
<u>Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih</u>						<u>Fixed assets under build, operate and transfer</u>
Menara telekomunikasi	11.803	1.158	-	16.135	29.096	Telecommunication tower
Bangunan	2.803	-	1.050	-	1.753	Buildings
Peralatan dan mesin	332	-	-	-	332	Tools and machineries
Peralatan jaringan	15.754	496	-	(10.534)	5.716	Network equipment
Sub jumlah	30.692	1.654	1.050	5.601	36.897	Sub total
Jumlah harga perolehan	5.167.200	366.371	273.999	-	5.259.572	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Menara telekomunikasi	397.170	35.799	205	(8.497)	424.267	Telecommunication tower
Bangunan	36.672	1.991	22.904	367	16.126	Buildings
Peralatan dan mesin	597.811	130.850	11.378	9.215	726.498	Tools and machineries
Peralatan jaringan	155.612	67.699	14.268	(3.496)	205.547	Network equipment
Peralatan kantor	18.773	1.836	14.538	613	6.684	Office equipment
Kendaraan bermotor	10.570	93	3.591	-	7.072	Motor vehicles
Sub jumlah	1.216.608	238.268	66.884	(1.798)	1.386.194	Sub total
<u>Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih</u>						<u>Fixed asset under build, operate and transfer</u>
Menara telekomunikasi	5.783	2.527	-	3.790	12.100	Telecommunication tower
Bangunan	461	266	173	-	554	Buildings
Peralatan dan mesin	61	49	-	-	110	Tools and machineries
Peralatan jaringan	2.536	1.662	-	(1.992)	2.206	Network equipment
Sub jumlah	8.841	4.504	173	1.798	14.970	Sub total
Jumlah akumulasi penyusutan	1.225.449	242.772	67.057	-	1.401.164	Total accumulated depreciation
Rugi penurunan nilai						Impairment losses
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	-	8.889	-	-	8.889	Landrights
Menara telekomunikasi	-	149.868	-	-	149.868	Telecommunication tower
Peralatan dan mesin	-	910.909	-	-	910.909	Tools and machineries
Jumlah rugi penurunan nilai	-	1.069.666	-	-	1.069.666	Total impairment losses
Nilai buku neto	3.941.751				2.788.742	Net book value

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

Penambahan aset tetap selama tahun berjalan terdiri dari:

Addition of fixed assets during the year consists of:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2025	2024	
Transaksi kas	113.997	Cash transactions
Transaksi non-kas (Catatan 37)		Non-cash transactions (Note 37)
Penambahan melalui		Addition through trade payables
utang usaha (Catatan 15)	21.006	(Note 15)
Reklasifikasi dari uang muka		Reclassification of advances
(Catatan 10)	6.851	(Note 10)
Reklasifikasi dari persediaan		Reclassification of inventories
(Catatan 9)	2.143	(Note 9)
Penambahan melalui provisi		Addition of long-term provision
jangka panjang (Catatan 19)	-	(Note 19)
Reklasifikasi dari beban		Reclassification of
dibayar di muka	-	prepaid expenses
Jumlah	143.997	Total

Penyusutan aset tetap dibebankan seluruhnya pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp 118.755 dan Rp 242.772 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 26).

Depreciation of fixed assets was fully charged to cost of revenues which amounting to Rp 118,755 and Rp 242,772 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively (Note 26).

Rincian laba (rugi) pembongkaran/penghapusan/pelepasan aset tetap - neto adalah sebagai berikut:

Details of gain (loss) on dismantling/written-off/disposal of fixed assets - net are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2025	2024	
Harga perolehan	46.841	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(16.018)	Accumulated depreciation
Rugi penurunan nilai	(25.995)	Impairment losses
Nilai buku neto aset tetap	4.828	Net book value of fixed assets
Penjualan aset tetap:		Sale of fixed assets:
Penerimaan kas	5.183	Cash receipt
Penjualan aset tetap		Sale of fixed assets through
melalui penyelesaian		settlement of trade payables
utang usaha	1.665	Net investment in lease
Investasi neto dalam sewa		(Note 33a)
(Catatan 33a)	-	Total sale of fixed assets
Jumlah penjualan aset tetap	6.848	
Laba (rugi) pembongkaran/ penghapusan/pelepasan aset tetap - neto (Catatan 30)	2.020	Gain (loss) on dismantling/ written-off/disposal of fixed assets - net (Note 30)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tetap Perusahaan dengan menentukan jumlah terpulihkan melalui perhitungan atas nilai yang dihasilkan dari penggunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp 1.069.666 yang dibebankan pada pendapatan (beban) lain-lain (Catatan 30).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Seluruh aset tetap (kecuali hak atas tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.247.575 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 1.988.401 pada tanggal 31 Desember 2024. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 214.491 dan Rp 197.110.

Perusahaan memiliki beberapa bidang hak atas tanah di berbagai kota besar di Indonesia dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu antara 20 hingga 30 tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2027 dan 2053.

Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap milik Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

11. FIXED ASSETS (continued)

The Company performed impairment testing on its fixed assets by determining the recoverable amount by calculating the value in use of fixed assets owned by the Company and provided allowance for impairment losses as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp Nil and Rp 1,069,666, respectively, which was charged to other income (expenses) (Note 30).

Management believes that allowance for impairment losses of fixed assets is adequate to cover possible losses.

All of fixed assets (except for landrights and construction in progress) are insured with third parties insurance companies against fire, theft and other risks with total coverage of Rp 1,247,575 as of December 31, 2025 and Rp 1,988,401 as of December 31, 2024, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Total cost of fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilized as of December 31, 2025 and 2024, which is amounted to Rp 214,491 and Rp 197,110, respectively.

The Company owns parcels of landrights in various big cities in Indonesia with certificate of Building Usage Rights (HGB) for a period from 20 until 30 years and will due between 2027 and 2053.

Management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all of the landrights were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no fixed assets own by the Company used as collaterals for loans.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian dengan persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak serta estimasi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
31 Desember 2025				December 31, 2025
Peralatan jaringan	25% - 75%	6.314	2026	Network equipment
Menara telekomunikasi	25% - 75%	1.940	2026	Telecommunication tower
Jumlah		8.254		Total
31 Desember 2024				December 31, 2024
Peralatan jaringan	6% - 92%	409	2025	Network equipment
Menara telekomunikasi	72%	761	2025	Telecommunication tower
Jumlah		1.170		Total

11. FIXED ASSETS (continued)

Details of construction in progress with percentage completion of the contract value and estimated of completion are as follows:

12. SEWA

a. Aset hak-guna

Akun ini merupakan aset hak-guna atas sewa tanah, atap dan serat optik. Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama masa sewa.

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:

12. LEASES

a. Right-of-use assets

This account represents right-of-use assets of land, rooftop and fiber optic. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease period.

Details of right-of-use assets are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/Year Ended December 31, 2025						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	244.633	50.892	20.928	9.609 ¹⁾	284.206	Land
Atap	64.781	8.140	467	-	72.454	Rooftop
Jumlah	309.414	59.032	21.395	9.609¹⁾	356.660	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah	21.301	41.320	480	-	62.141	Land
Atap	8.334	16.534	271	-	24.597	Rooftop
Jumlah	29.635	57.854	751	-	86.738	Total
Rugi penurunan nilai						Impairment losses
Tanah	10.683	238	-	-	10.921	Land
Atap	1.121	-	-	-	1.121	Rooftop
Jumlah	11.804	238	-	-	12.042	Total
Nilai buku neto	267.975				257.880	Net book value

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

12. SEWA (lanjutan)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

12. LEASES (continued)

a. Right-of-use assets (continued)

Details of right-of-use assets are as follows:
(continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/Year Ended December 31, 2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Perubahan Estimasi Akuntansi (Catatan 3)/ Change in Accounting Estimate (Note 3)	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan							Acquisition cost
Tanah	548.018	145.507	65.679	(186.591)	(196.622)	244.633	Land
Atap	116.106	2.846	9.610	(44.561)	-	64.781	Rooftop
Serat optik	226.548	614	-	(227.162) ¹⁾	-	-	Fiber optic
Jumlah	890.672	148.967	75.289	(231.152) (227.162) ¹⁾	(196.622)	309.414	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Tanah	190.018	45.484	-	(168.519)	(45.682)	21.301	Land
Atap	46.481	17.387	-	(55.534)	-	8.334	Rooftop
Serat optik	162.034	50.990	-	(213.024) ¹⁾	-	-	Fiber optic
Jumlah	398.533	113.861	-	(224.053) (213.024) ¹⁾	(45.682)	29.635	Total
Rugi penurunan nilai							Impairment losses
Tanah	-	10.683	-	-	-	10.683	Land
Atap	-	1.121	-	-	-	1.121	Rooftop
Jumlah	-	11.804	-	-	-	11.804	Total
Nilai buku neto	492.139					267.975	Net book value

Catatan/Note:

¹⁾ Reklasifikasi ke beban dibayar di muka/ Reclassification to prepaid expenses.

Penyusutan aset hak-guna dibebankan seluruhnya pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp 57.854 dan Rp 113.861 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset hak-guna Perusahaan dengan menentukan jumlah terpulihkan melalui perhitungan atas nilai yang dihasilkan dari penggunaan aset hak-guna yang dimiliki Perusahaan dan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset hak-guna tanah dan atap masing-masing sejumlah Rp 238 dan Rp 11.804 yang dibebankan pada pendapatan (beban) lain-lain (Catatan 30).

Depreciation of right-of-use assets was fully charged to cost of revenues which amounting to Rp 57,854 and Rp 113,861 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively (Note 26).

As of December 31, 2025 and 2024, the Company performed impairment testing on right-of-use assets by determining the recoverable amount by calculating the value in use of right-of-use assets owned by the Company and provided provision for impairment losses for right-of-use asset of land and rooftop which totally of Rp 238 and Rp 11,804, respectively, and was charged to other income (expenses) (Note 30).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

12. SEWA (lanjutan)

12. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

Berikut adalah nilai tercatat neto dari liabilitas sewa dan mutasinya selama tahun berjalan:

The following are the carrying amount of lease liabilities and its movements during the year:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal	615.232	754.391	Beginning balance
Penambahan	59.032	148.967	Addition
Penambahan bunga (Catatan 29)	60.494	74.354	Additional of interest (Note 29)
Perubahan estimasi akuntansi (Catatan 3)	-	(38.171)	Change in accounting estimate (Note 3)
Pengurangan	(24.301)	(57.434)	Deduction
Pembayaran	(235.297)	(266.875)	Lease payments
Saldo akhir	475.160	615.232	Ending balance
Dikurangi bagian jangka pendek	(134.748)	(119.670)	Less current portion
Bagian jangka panjang	340.412	495.562	Non-current portion

Berikut adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sehubungan dengan sewa Perusahaan:

The following are the amounts recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2025 and 2024 in connection with leases of the Company:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Penyusutan (Catatan 26)	57.854	113.861	Depreciation (Note 26)
Beban bunga (Catatan 29)	60.494	74.354	Interest expense (Note 29)
Jumlah	118.348	188.215	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan sebesar Rp 176.505 dalam 1 tahun, Rp 464.350 dalam 5 tahun dan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar Rp 17.606.

As of December 31, 2025, the total estimated future minimum lease payments are Rp 176,505 within 1 year, Rp 464,350 within 5 years and Rp 17,606 thereafter.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Setoran jaminan	1.101	1.141
Biaya untuk memperoleh kontrak		
Biaya perolehan		
awal tahun	385.000	385.000
Akumulasi amortisasi	(12.508)	(12.508)
Rugi penurunan nilai		
(Catatan 30)	(372.492)	(372.492)
Sub jumlah	-	-
Piutang usaha tidak lancar:		
PT Net Satu Indonesia	32.088	32.088
Dikurangi cadangan kerugian		
kredit ekspektasian (Catatan 6)	(32.088)	(32.088)
Sub jumlah	-	-
Perangkat lunak komputer		
Biaya perolehan		
awal tahun	25.135	15.689
Penambahan selama tahun		
berjalan	-	9.446
Akumulasi amortisasi	(13.285)	(13.285)
Rugi penurunan nilai		
(Catatan 30)	(11.850)	(11.850)
Sub jumlah	-	-
Jumlah	1.101	1.141

Setoran jaminan

Setoran jaminan merupakan jaminan sewa gedung yang akan dikembalikan pada akhir masa sewa.

Biaya untuk memperoleh kontrak

Pada tanggal 7 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perubahan dan penegasan kembali atas perjanjian induk No. 021/IBS-SF/PKS-T/VI/2021 dengan PT Smart Telecom ("ST") yang menyepakati bahwa Perusahaan akan melakukan pembayaran biaya insentif kepada ST sebesar Rp 245.000 dan Perusahaan akan mendapatkan hak prioritas awal atas penyediaan 1.500 menara telekomunikasi terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021.

13. OTHER NON-CURRENT ASSETS

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Setoran jaminan	1.101	1.141	Security deposits
Biaya untuk memperoleh kontrak			Cost of obtaining contract
Biaya perolehan			Acquisition cost at
awal tahun	385.000	385.000	beginning year
Akumulasi amortisasi	(12.508)	(12.508)	Accumulated amortization
Rugi penurunan nilai			Impairment losses (Note 30)
(Catatan 30)	(372.492)	(372.492)	
Sub jumlah	-	-	Sub total
Piutang usaha tidak lancar:			Non-current trade receivable:
PT Net Satu Indonesia	32.088	32.088	PT Net Satu Indonesia
Dikurangi cadangan kerugian			Less allowance for
kredit ekspektasian (Catatan 6)	(32.088)	(32.088)	expected credit losses
Sub jumlah	-	-	(Note 6)
Sub jumlah	-	-	Sub total
Perangkat lunak komputer			Computer software
Biaya perolehan			Acquisition cost at
awal tahun	25.135	15.689	beginning year
Penambahan selama tahun			Addition during the
berjalan	-	9.446	year
Akumulasi amortisasi	(13.285)	(13.285)	Accumulated amortization
Rugi penurunan nilai			Impairment losses (Note 30)
(Catatan 30)	(11.850)	(11.850)	
Sub jumlah	-	-	Sub total
Jumlah	1.101	1.141	Total

Security deposits

Security deposits represent deposit for lease of building which will be refunded at the end of leasing period.

Cost of obtaining contract

On June 7, 2021, the Company signed an amendment and reaffirmation of the master agreement No. 021/IBS-SF/PKS-T/VI/2021 with PT Smart Telecom ("ST") which agreed that the Company will pay an incentive fee to ST amounted to Rp 245,000 and the Company will obtain initial priority rights to provide 1,500 telecommunication towers starting from July 1, 2021.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Biaya untuk memperoleh kontrak (lanjutan)

Pada tanggal 2 Oktober 2023, perjanjian ini diubah sehubungan dengan penambahan penyediaan menara telekomunikasi menjadi 2.357 lokasi dan Perusahaan akan membayar tambahan biaya insentif kepada ST sebesar Rp 140.000.

Amortisasi biaya untuk memperoleh kontrak dibebankan seluruhnya pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp 1.958 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen melakukan uji penurunan nilai atas biaya untuk memperoleh kontrak dan memutuskan untuk membebaskan rugi penurunan nilai dan penghapusan atas biaya untuk memperoleh kontrak tersebut sebesar Rp 372.492 pada pendapatan (beban) lain-lain pada tahun 2024 (Catatan 30).

Perangkat lunak komputer

Amortisasi perangkat lunak komputer dibebankan seluruhnya pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp 2.417 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen melakukan uji penurunan nilai atas perangkat lunak komputer dan memutuskan untuk membebaskan rugi penurunan nilai dan penghapusan atas sisa nilai buku perangkat lunak komputer tersebut sebesar Rp 11.850 pada pendapatan (beban) lain-lain tahun 2024 (Catatan 30).

14. UTANG BANK

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Rupiah Indonesia		
PT Bank Mizuho Indonesia	550.000	-
JP Morgan Chase Bank, N.A.	17.300	-
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-	700.800
MUFG Bank Ltd	-	639.200
Jumlah	567.300	1.340.000

13. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Cost of obtaining contract (continued)

On October 2, 2023, this agreement was amended in relation to the additional of telecommunication tower to 2,357 locations and the Company will pay additional incentive fee to ST amounted to Rp 140,000.

Amortization of cost of obtaining contract was fully charged to cost of revenues which amounted to Rp Nil and Rp 1,958 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively (Note 26).

As of December 31, 2024, management performed impairment test for cost of obtaining contract and has decided to charge an impairment loss and written-off of such cost of obtaining contract of Rp 372,492 to other income (expenses) for 2024 (Note 30).

Computer software

Amortization of computer software was fully charged to cost of revenues amounted to Rp Nil and Rp 2,417 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively (Note 26).

As of December 31, 2024, management performed impairment test for cost of computer software and has decided to charge an impairment loss and written-off of net book value of computer software of Rp 11,850 to other income (expenses) for 2024 (Note 30).

14. BANK LOANS

Details of short-term bank loans are as follows:

Indonesian Rupiah
PT Bank Mizuho Indonesia
JP Morgan Chase Bank, N.A.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
MUFG Bank Ltd
Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek

PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")

Pada tanggal 20 Desember 2024, Perusahaan, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"), PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"), PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") dan PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") telah menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1259/ARA/MZH/1222 dengan Mizuho sehubungan dengan penambahan Perusahaan sebagai peminjam baru dengan jumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp 1.500.000 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025. Selanjutnya, perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 11 Juli 2025 sehubungan perubahan beberapa klausa dan perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 11 Juli 2026. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan STP dan Para Peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini serta dikenakan suku bunga tahunan sesuai dengan tingkat suku bunga yang disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 550.000 dan Rp Nihil.

JP Morgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta ("JPM")

Pada tanggal 8 April 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte, STP, PT Komet Infra Nusantara ("KIN") dan BIT telah menandatangani Surat Perubahan Kesebelas atas Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen dengan JPM terkait dengan penambahan Perusahaan sebagai para peminjam yang secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman dari JPM sebesar Rp 700.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2026 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar IndONIA ditambah tarif tertentu atau suku bunga sebagaimana diberitahukan oleh JPM dari waktu ke waktu yang disetujui oleh peminjam. Perusahaan, Protelindo, Iforte, STP, KIN dan BIT bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 17.300.

14. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans

PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")

On December 20, 2024, the Company, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"), PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"), PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") and PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") have signed an Amendment and Restatement Agreement of the Revolving Loan No. 1259/ARA/MZH/1222 with Mizuho in connection with the addition of the Company as a new debtor with total loan facility available for the Company amounting to Rp 1,500,000 which valid until July 11, 2025. Subsequently, this agreement has been amended on July 11, 2025 connection with the changes of several clauses and the extension of the facility period until July 11, 2026. This loan is secured by corporate guarantees from Protelindo and STP and the Borrowers shall be jointly and severally liable for all obligations under the Facility and bears annual interest rate at as agreed date.

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 550,000 and Rp Nil, respectively.

JP Morgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPM")

On April 8, 2025, the Company, Protelindo, Iforte, STP, PT Komet Infra Nusantara ("KIN") and BIT signed the Eleventh Amendment Letter to the Uncommitted Banking Facilities with JPM in connection with the additional of the Company as borrowers which jointly obtaining the loan facility from JPM amounting to Rp 700,000. The loan facility will due on April 14, 2026 and bears annual interest rate of IndONIA plus certain margin or certain rate as notified by JPM from time to time and should be agreed by the borrowers. The Company, Protelindo, Iforte, STP, KIN and BIT are jointly and severally liable for the repayment of this loan facility.

As of December 31, 2025, the outstanding balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 17,300.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC")

Pada tanggal 7 Agustus 2024, Perusahaan, Iforte, Protelindo, STP, BIT dan PT Varnion Technology Semesta ("VTS") telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0122 tanggal 8 Desember 2021 dengan SMBC ("Perjanjian Fasilitas SMBC") sehubungan dengan penambahan Perusahaan sebagai peminjam baru dengan jumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.

Selanjutnya, Perjanjian Fasilitas SMBC telah diubah beberapa kali sehubungan dengan penambahan PT Iforte Payment Infrastructure ("IPI") sebagai peminjam baru dan perpanjangan jangka waktu fasilitas berlaku hingga 30 April 2026. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar biaya pendanaan SMBC ditambah margin tertentu.

Perusahaan, Iforte, Protelindo, STP, BIT, VTS dan IPI bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp 700.800.

MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta ("MUFG")

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan STP dengan MUFG telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman ("Perjanjian Perubahan MUFG") sehubungan dengan peningkatan fasilitas pinjaman dari Rp 1.350.000 menjadi Rp 2.500.000 dan penambahan Perusahaan sebagai peminjam baru. Selanjutnya, perjanjian perubahan telah diubah sehubungan dengan perubahan beberapa syarat dan ketentuan serta perubahan tanggal jatuh tempo menjadi sampai dengan 31 Desember 2026. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar biaya pendanaan MUFG ditambah margin tertentu. Perjanjian Perubahan MUFG ini dijamin oleh Protelindo melalui penandatanganan Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi pada tanggal 12 Agustus 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan.

14. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC")

On August 7, 2024, the Company, Iforte, Protelindo, STP, BIT and PT Varnion Technology Semesta ("VTS") have signed an Amendment and Restatement of the Facility Agreement No. BTPN/NS/0122 dated December 8, 2021 with SMBC ("SMBC Facility Agreement") in connection with the addition of the Company as a new debtor with total loan facility available for the Company amounting to Rp 1,000,000.

Subsequently, the SMBC Facility Agreement was amended several times in connection with the inclusion of PT Iforte Payment Infrastructure ("IPI") as a new borrower and the extension of the facility is valid until April 30, 2026. This facility bears annual interest rate of SMBC's cost of fund plus certain margin.

The Company, Iforte, Protelindo, STP, BIT, VTS and IPI are jointly and severally liable for settlement of those loan facilities.

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp Nil and Rp 700,800, respectively.

MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("MUFG")

On August 12, 2024, the Company, Protelindo, Iforte and STP with MUFG have signed an Amendment and Restatement to the Loan Facility Agreement ("MUFG Amendment Agreement") in connection with the increase of loan facility from Rp 1,350,000 to become Rp 2,500,000 and to include of the Company as a new debtor. Furthermore, MUFG Amendment Agreement has amended in relation to the changes to certain terms and conditions and maturity date to December 31, 2026. The loan facility bears annual interest rate of MUFG's cost of fund plus certain margin. The MUFG Amendment Agreement is guaranteed by Protelindo through the signed document of a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement on August 12, 2024.

As of December 31, 2025 and 2024, this loan facility has not been used by the Company.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta ("MUFG") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp 639.200.

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas jangka pendek dari Permata sebesar Rp 600.000 yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2025. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman Permata. Selanjutnya, fasilitas tersebut telah ditutup dan tidak lagi tersedia bagi Perusahaan.

Pada tanggal 17 November 2025, Perusahaan, Iforte, BIT, STP, Protelindo, IPI, VTS dan IEN memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari Permata dengan nilai fasilitas sebesar Rp2.000.000, dimana Perusahaan dapat menggunakan fasilitas tersebut hingga sebesar Rp 600.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 17 Desember 2028 dan dijamin dengan jaminan perusahaan yang diberikan oleh Protelindo.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan (Catatan 39).

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 17 Oktober 2024, Perusahaan, Protelindo, Iforte, STP, BIT, PT Quattro International ("QTR"), PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK"), KIN, IPI, VTS, dan IEN ("Para Peminjam") dan BCA telah menandatangani Surat Perubahan Perjanjian Ketujuhbelas sehubungan dengan penambahan Perusahaan dan IPI sebagai pihak peminjam pada Fasilitas Pinjaman *Money Market* ("Perjanjian Fasilitas BCA") dengan nilai keseluruhan fasilitas sebesar Rp 9.400.000. Perusahaan, Protelindo, Iforte, STP, BIT, QTR, GIK, KIN, IPI, VTS, IEN dan IGPU bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan.

Perjanjian Fasilitas BCA telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Perjanjian Perubahan Kesembilanbelas tanggal 18 Desember 2025 terkait dengan pelepasan dan pembebasan Perusahaan, STP dan IPI sebagai para peminjam.

14. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("MUFG") (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp Nil and Rp 639,200, respectively.

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On December 9, 2024, the Company obtained short-term loan facility from Permata amounting to Rp 600,000 which valid until October 10, 2025. This loan is secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate based on Permata's loan interest rate. Furthermore, the facility has been closed and is no longer available to the Company.

On 17 November 2025, the Company, Iforte, BIT, STP, Protelindo, IPI, VTS and IEN obtained a revolving loan facility from Permata with a total facility amount of Rp 2,000,000, of which up to Rp 600,000 may be utilized by the Company. The facility is available until 17 December 2028 and is secured by a corporate guarantee provided by Protelindo.

As of December 31, 2025 and 2024, the loan facility has not been used by the Company (Note 39).

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

On October 17, 2024, the Company, Protelindo, Iforte, STP, BIT, PT Quattro International ("QTR"), PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK"), KIN, IPI, VTS and IEN ("The Borrowers") and BCA have signed the Seventeenth Amendment Letter in relation to the addition of the Company and IPI as borrowers under the Money Market Loan Facility Agreement ("BCA Facility Agreement") with a total facility amount of Rp 9,400,000. The Company, Protelindo, Iforte, STP, BIT, QTR, GIK, KIN, IPI, VTS, IEN and IGPU are jointly and severally liable for settlement of those loan facilities.

As of December 31, 2024, the loan facility has not been used by the Company.

BCA Facility Agreement has been amended several times, the most recent through the Nineteenth Amendment Agreement dated December 18, 2025 in connection with the release and discharge of the Company, STP and IPI as borrowers.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 9 Desember 2024, yang selanjutnya telah diperpanjang berdasarkan Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan STP sebagai para peminjam secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari Niaga sebesar Rp 2.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2026. Perusahaan, Protelindo, Iforte dan STP bertanggung jawab secara tanggung renteng atas fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan.

Utang bank jangka panjang

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

a. Kredit Investasi 3 - *Tranche 2*

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi 3 No. CRO.KP/181/KI/2018 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 8 tanggal 25 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* dari Mandiri untuk pembiayaan menara telekomunikasi serta peralatan pendukungnya dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 450.000 untuk 72 bulan dan dibagi menjadi *Tranche 1* sebesar Rp 200.000 dan *Tranche 2* sebesar Rp 250.000. Pinjaman ini dijamin dengan 768 menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 692.736 (Catatan 11) dan pinjaman ini akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo. Perjanjian pinjaman telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amendemen Keenam Perjanjian Kredit Investasi 3 tanggal 14 Desember 2022 mengenai perubahan jaminan menjadi 420 menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 391.795.

14. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga")

Based on Credit Agreement Deed No. 07 dated December 9, 2024, which was subsequently extended based on the Amendment to the Credit Agreement dated October 30, 2025, the Company, Protelindo, Iforte and STP, as joint borrowers, obtained short-term loan facility from Niaga amounting to Rp 2,000,000, which will due on October 31, 2026. The Company, Protelindo, Iforte and STP are jointly and severally liable for this loan facility.

As of December 31, 2025 and 2024, the loan facility has not been used by the Company.

Long-term bank loans

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

a. Investment Credit 3 - *Tranche 2*

Based on Investment Credit 3 Agreement No. CRO.KP/181/KI/2018 as covered by Notarial Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 8 dated June 25, 2018, the Company obtained non-revolving investment credit facility from Mandiri for financing of telecommunication towers and their supporting equipments with total facility of Rp 450,000 for 72 months and divided into *Tranche 1* of Rp 200,000 and *Tranche 2* of Rp 250,000. This loan is secured by 768 the Company's telecommunications tower which amounted to Rp 692,736 (Note 11) and this loan will be repaid through periodic installments until the maturity date. The loan agreement has been amended several times, the latest of which based on Sixth Amendment to Investment Credit 3 Agreement dated December 14, 2022 concerning change in the collateral to 420 the Company's telecommunication towers which amounted to Rp 391,795.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

b. Kredit Investasi 4

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi 4 No. CRO.KP/141/KI/2019 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 27 tanggal 9 Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* dari Mandiri untuk pembiayaan menara telekomunikasi serta peralatan pendukungnya dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 250.000 untuk 72 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan 274 menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 385.244 (Catatan 11) dan pinjaman ini akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Perjanjian pinjaman telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen Keenam Perjanjian Kredit Investasi 4 tanggal 14 Desember 2022 mengenai perubahan jaminan menjadi 364 menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 380.103.

c. Term Loan

Berdasarkan Perjanjian Kredit *Term Loan* No. CRO.KP/0469/TLN/2019 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 30 tanggal 19 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* dari Mandiri untuk pembiayaan menara telekomunikasi serta peralatan pendukungnya dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 550.000 untuk 72 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 846.154 (Catatan 11) dan pinjaman ini akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Perjanjian pinjaman telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen Kelima Perjanjian Kredit *Term Loan* tanggal 14 Desember 2022 mengenai perubahan jaminan menjadi 878 menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 836.162.

14. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

b. Investment Credit 4

Based on Investment Credit 4 Agreement No. CRO.KP/141/KI/2019 as covered by Notarial Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 27 dated May 9, 2019, the Company obtained non-revolving investment credit facility from Mandiri for financing of telecommunication towers and their supporting equipments with total facility of Rp 250,000 for 72 months. This loan is secured by 274 the Company's telecommunications towers which amounted to Rp 385,244 (Note 11) and this loan will be repaid through periodic installments until the maturity date.

The loan agreement has been amended several times, the latest of which based on Sixth Amendment to Investment Credit 4 Agreement dated December 14, 2022 concerning change in the collateral to 364 the Company's telecommunication towers which amounted to Rp 380,103.

c. Term Loan

Based on Term Loan Credit Agreement No. CRO.KP/0469/TLN/2019 as covered by Notarial Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 30 dated November 19, 2019, the Company obtained non-revolving investment credit facility from Mandiri for financing of telecommunication towers and their supporting equipments with total facility of Rp 550,000 for 72 months. This loan is secured by the Company's telecommunications towers which amounted to Rp 846,154 (Note 11) and this loan will be repaid through periodic installments until the maturity date.

The loan agreement has been amended several times, the latest of which based on Fifth Amendment to Term Loan Credit Agreement dated December 14, 2022 concerning change in the collateral to 878 the Company's telecommunication towers which amounted to Rp 836,162.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

d. Term Loan 2

Berdasarkan Perjanjian Kredit *Term Loan 2* No. WCO.KP/204/TLN/2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 40 tanggal 25 September 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* dari Mandiri untuk pembiayaan menara telekomunikasi serta peralatan pendukungnya dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 400.000 untuk 72 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 500.000 (Catatan 11) dan pinjaman ini akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Perjanjian pinjaman telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen Kelima Perjanjian Kredit *Term Loan 2* tanggal 14 Desember 2022 mengenai perubahan jaminan menjadi 501 menara telekomunikasi Perusahaan senilai Rp 506.260.

e. Term Loan 3

Berdasarkan Perjanjian Kredit *Term Loan 3* No. WCO.KP/0197/TL/2022 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 44 tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas *term loan non-revolving* dari Mandiri untuk pembiayaan pengeluaran modal Perusahaan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 500 miliar untuk 72 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan menara telekomunikasi dan serat optik Perusahaan beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya (Catatan 11) dan pinjaman ini akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo. Atas jaminan yang diserahkan dilakukan *joint collateral* dan *cross default* untuk menjamin seluruh fasilitas kredit Perusahaan.

Pada tahun 2024, fasilitas Kredit Investasi dan *Term Loan* dari Mandiri dikenakan tingkat bunga sebesar 9% per tahun.

Pada tanggal 14 Agustus 2024, seluruh fasilitas pinjaman jangka panjang ini telah dilunasi oleh Perusahaan dan telah memperoleh Surat Keterangan Pelunasan dari Mandiri No. CBG.CB1/1804/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

14. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

d. Term Loan 2

Based on *Term Loan 2 Credit Agreement* No. WCO.KP/204/TLN/2020 as covered by *Notarial Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 40 dated September 25, 2020*, the Company obtained *non-revolving investment credit facility* from Mandiri for financing of telecommunication towers and their supporting equipments with total facility of Rp 400,000 for 72 months. This loan is secured by the Company's telecommunication towers which amounted to Rp 500,000 (Note 11) and this loan will be repaid through periodic installments until the maturity date.

The loan agreement has been amended several times, the latest of which based on *Fifth Amendment to Term Loan 2 Credit Agreement dated December 14, 2022 concerning change in the collateral to 501 the Company's telecommunication towers which amounted to Rp 506,260*.

e. Term Loan 3

Based on *Term Loan 3 Credit Agreement* No. WCO.KP/0197/TL/2022 as covered by *Notarial Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 44 dated March 31, 2022*, the Company obtained *non-revolving term loan facility* from Mandiri for financing the Company's capital expenditure with total facility of Rp 500 billion for 72 months. This loan is secured by the Company's telecommunication towers and fiber optics with all of supporting equipment and supplies (Note 11) and this loan will be repaid through periodic installments until the maturity date. For the collateral submitted, it will be jointly collateralized and cross default to fully secure the Company's credit facilities.

In 2024, *Investment Credit and Term Loan facilities* from Mandiri bear interest rate of 9% per annum.

On August 14, 2024, the entire long-term loan facilities has been fully paid by the Company and has obtained the *Loan Settlement Letter* from Mandiri No. CBG.CB1/1804/2024 dated August 15, 2024.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta No. 19 dan No. 20 tanggal 13 Maret 2023, keduanya dibuat di hadapan Notaris yang sama, Perusahaan memperoleh Fasilitas *Line* Musyarakah Mutanaqisah dari BSI dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas 1 untuk pembiayaan kembali menara telekomunikasi, serat optik dan infrastruktur pendukungnya yang sudah ada sebesar Rp 1.035.000; dan
- Fasilitas 2 untuk pembangunan menara telekomunikasi, serat optik dan infrastruktur pendukung dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar Rp 265.000.

Fasilitas *Line* tersebut di atas akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai masing-masing penarikan pinjaman.

Pada tahun 2024, fasilitas 1 dari BSI dikenakan nisbah sebesar 8,5% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menara telekomunikasi, serat optik dan infrastruktur pendukung Perusahaan masing-masing sebesar Rp 1.491.723 untuk fasilitas 1 dan Rp 378.572 untuk fasilitas 2, tanah dan bangunan milik Perusahaan yang berlokasi di Jakarta Pusat (Catatan 11) dan piutang usaha sebesar Rp 230.000 (Catatan 6).

Pada berbagai tanggal pada tahun 2024, seluruh fasilitas pinjaman jangka panjang ini telah dilunasi oleh Perusahaan dan telah memperoleh Surat Keterangan Pelunasan dari BSI No. 04/1164-3/CB1 tanggal 13 Desember 2024.

Pada tanggal 25 November 2024, Perusahaan, Protelindo, lforte dan STP ("Para Peminjam") memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari BSI sebesar Rp 1.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi dan dikenakan nisbah bagi hasil yang dihitung berdasarkan parameter tertentu. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan Para Peminjam akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan (Catatan 39).

14. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Based on Deed No. 17 dated December 23, 2021 as covered by Efran Yuniarto, S.H., Notary in Jakarta, which subsequently amended by Deed No. 19 and No. 20 dated March 13, 2023, both covered by the same Notary, the Company obtained Line Facility of Musyarakah Mutanaqisah from BSI with details as follows:

- Facility 1 for refinancing of telecommunication towers, fiber optics and their existing supporting infrastructure amounted to Rp 1,035,000; and
- Facility 2 for the construction of telecommunications towers, fiber optics and supporting infrastructure from 2021 to 2022 amounted to Rp 265,000.

The Line Facility above will be repaid through periodic installments until the maturity date according to each loan withdrawal.

In 2024, facility 1 from BSI bears profit sharing of 8.5% per annum.

The loan facilities are secured by the Company's telecommunication towers, fiber optic and existing supporting infrastructure which amounted to Rp 1,491,723 for facility 1 and Rp 378,572 for facility 2, the Company's land and building located at Central Jakarta (Note 11) and trade receivables amounted to Rp 230,000 (Note 6).

On several dates in 2024, the entire long-term loan facilities has been fully paid by the Company and has obtained the Loan Settlement Letter from BSI No. 04/1164-3/CB1 dated December 13, 2024.

On November 25, 2024, the Company, Protelindo, lforte and STP ("Borrowers") obtained long-term loan facility from BSI amounting to Rp 1,000,000. This facility is valid until 60 (sixty) months after the realisation date and subject to a profit-sharing ratio calculated based on certain parameters. This facility is secured by corporate guarantee from Protelindo and the Borrowers are jointly and severally liable for this facility.

As of December 31, 2025 and 2024, this loan facility has not been used by the Company (Note 39).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Rita Nitriana, S.H., Notaris pengganti dari Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta, dan selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas Term Financing ("TF") - Musyarakah Mutanaqisah dari Permata - Unit Usaha Syariah untuk pembiayaan kembali (refinancing) menara telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas TF 1 sebesar Rp 163.929 selama 72 bulan sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
- Fasilitas TF 2 sebesar Rp 277.000 selama 72 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman.

Pada tahun 2024, fasilitas TF 1 dan 2 dikenakan nisbah sebesar 8,75% per tahun.

Fasilitas TF 1 dan 2 dijamin dengan tanah milik Perusahaan, piutang usaha dan menara telekomunikasi yang disewakan kepada Grup Smartfren dan Perusahaan diwajibkan menempatkan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar 1 kali cicilan dan pinjaman ini akan dilunasi melalui cicilan periodik sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai masing-masing penarikan pinjaman.

Pada tanggal 2 Agustus 2024, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pinjaman dari Permata dan telah memperoleh Surat Keterangan Pelunasan dari Permata No. 165/CRC-ADM/SPF/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Sisa saldo amortisasi atas biaya transaksi pinjaman dari Permata telah dibebankan seluruhnya sebagai bagian "Biaya Keuangan" untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.673 (Catatan 29).

14. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Based on Deed No. 5 dated May 13, 2019 as covered by Rita Nitriana, S.H., substitute Notary of Efran Yuniarto, S.H., Notary in Jakarta, and subsequently has amended based on Deed No. 2 dated October 8, 2021 as covered by Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company obtained Term Financing ("TF") facility of Musyarakah Mutanaqisah from Permata - Sharia Business Unit for refinancing of telecommunication towers with details as follows:

- TF 1 facility of Rp 163,929 for 72 months until May 1, 2025.
- TF 2 facility of Rp 277,000 for 72 months from the date of loan withdrawal.

In 2024, TF 1 and 2 facilities bear profit sharing of 8.75% per annum.

TF 1 and 2 facilities are secured by the Company's land, trade receivables and telecommunication tower which are leased to Smartfren Group and the Company is required to place restricted cash of 1 installment and these loans will be repaid through periodic installments until the maturity date according to each loan withdrawal.

On August 2, 2024, the Company has fully settled the whole loan from Permata and has obtained the Loan Settlement Letter from Permata No. 165/CRC-ADM/SPF/VIII/2024 dated August 8, 2024.

The balance of amortization of transaction costs of borrowing from Permata has been fully charged as part of "Finance Costs" for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp 6,673 (Note 29).

15. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang usaha dari:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Perolehan aset tetap	93.786	81.319	Acquisition of fixed assets
Jasa pemeliharaan	880	45	Maintenance services
Lain-lain	3.888	26.389	Others
Jumlah - pihak ketiga	98.554	107.753	Total - third parties
Pihak berelasi (Catatan 32)			Related parties (Note 32)
Jasa pemeliharaan	2.858	-	Maintenance services
Jumlah	101.412	107.753	Total

15. TRADE PAYABLES

This account represents trade payables from:

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (lanjutan)

Utang usaha terutama merupakan utang atas pembangunan menara telekomunikasi dan jasa pemeliharaannya. Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada jaminan yang diberikan Perusahaan atas utang usaha tersebut di atas.

15. TRADE PAYABLES (continued)

Trade payables mainly represent payables in connection with telecommunication tower construction and its maintenance services. All trade payables are denominated in Indonesian Rupiah.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no guarantee provided by the Company on the trade payables above.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Pajak penghasilan pasal 21	1.365	912	Income tax article 21
Pajak pertambahan nilai	-	142	Value added tax
Jumlah	1.365	1.054	Total

16. TAXATION

a. Prepaid Taxes

This account consists of:

b. Taksiran Tagihan Restitusi Pajak

Pajak Penghasilan ("PPh") Badan tahun 2017

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2017 yang menyesuaikan tagihan restitusi PPh Badan dari Rp 4.234 menjadi Rp 1.258. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 2019, Perusahaan mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atas selisih tagihan restitusi PPh Badan sebesar Rp 2.976.

Pada tanggal 22 April 2020, Perusahaan menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPLB tersebut. Atas penolakan keberatan tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Juli 2020. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, keputusan banding belum diterima oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memutuskan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara penuh atas tagihan restitusi PPh Badan sebesar Rp 2.976 yang dibebankan pada laba rugi tahun 2024 dan disajikan sebagai bagian dari beban lain-lain (Catatan 30).

b. Estimated Claim for Tax Refund

Corporate Income Tax ("CIT") year 2017

On April 24, 2019, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") of CIT for 2017 which adjusting the claim for CIT refund from Rp 4,234 to Rp 1,258. Furthermore, on May 14, 2019, the Company submitted its objection to the Directorate General of Tax ("DGT") on the difference of claim for CIT refund of Rp 2,976.

On April 22, 2020, the Company received letter from the DGT which rejected the objection on those SKPLB. Due to the rejection of the objection, the Company has submitted the request for appealing process to the Tax Court on July 15, 2020. Until the completion date of these financial statements, the result of tax appeal is not yet received by the Company.

On December 31, 2024, management decided to provide fully provision for impairment losses on claim for CIT refund of Rp 2,976 which charged to profit or loss for 2024 and presented as part of other expenses (Note 30).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Pajak penghasilan badan (Catatan 16e)	6.670	1.810
Pajak penghasilan lainnya Pasal 4 (2)	1.746	2.884
Pasal 23	-	59
Pasal 25	4.577	-
Pajak pertambahan nilai	40	-
Jumlah	13.033	4.753

d. Pajak Final

Perhitungan pajak final terkait dengan pendapatan sewa menara telekomunikasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Pendapatan yang dikenakan pajak final	746.693	561.972
Tarif pajak final	10%	10%
Pajak final	74.669	56.197

e. Pajak Penghasilan

Beban (manfaat) pajak penghasilan terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Pajak kini	30.158	12.379
Pajak tangguhan	6.938	(6.711)
Jumlah	37.096	5.668

16. TAXATION (continued)

c. Taxes Payable

This account represents taxes payable as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Pajak penghasilan badan (Note 16e)	6.670	1.810
Other income tax Article 4 (2)	1.746	2.884
Article 23	-	59
Article 25	4.577	-
Value added tax	40	-
Total	13.033	4.753

d. Final Tax

The computation of final tax on the Company's telecommunication tower lease revenue is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Pendapatan yang dikenakan pajak final	746.693	561.972
Tarif pajak final	10%	10%
Final tax	74.669	56.197

e. Income Tax

Income tax expenses (benefit) consists of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Pajak kini	30.158	12.379
Pajak tangguhan	6.938	(6.711)
Total	37.096	5.668

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Income Tax (continued)

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan, seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income (loss) before final tax and income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Laba (rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	523.206	(1.788.971)	Income (loss) before final tax and income tax as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyusutan aset tetap	(31.094)	35.953	Depreciation of fixed assets
Imbalan pasca kerja	(675)	(5.449)	Post-employment benefits
Sub jumlah	(31.769)	30.504	Sub total
Beda temporer tanpa pajak tangguhan:			Temporary difference with no deferred tax:
Penyusutan aset tetap	31.215	87.959	Depreciation of fixed assets
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	4.608	(18.334)	Right-of-use assets and lease liabilities
Imbalan pasca kerja	3.690	17.868	Post-employment benefits
Beban bunga atas liabilitas sewa	(21.414)	74.354	Interest expense on lease liabilities
Sub jumlah	18.099	161.847	Sub total
Beda tetap:			Permanent differences:
Pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final	(746.693)	(561.972)	Income subjected to final tax
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	317.131	243.910	Expenses related to income subjected to final tax
Lain-lain	57.104	1.970.949	Others
Sub jumlah	(372.458)	1.652.887	Sub total
Taksiran laba kena pajak tahun berjalan	137.078	56.267	Estimated taxable income for current year
Beban pajak penghasilan kini	30.158	12.379	Current income tax expense
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			Less prepaid income tax:
Pasal 23	(6.086)	(10.556)	Article 23
Pasal 25	(17.402)	(13)	Article 25
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	(23.488)	(10.569)	Total prepaid income taxes
Utang pajak penghasilan badan (Catatan 16c)	6.670	1.810	Corporate income tax payable (Note 16c)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Perhitungan laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2024 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan yang telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2025	2024
Laba (rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	523.206	(1.788.971)
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif efektif	(115.105)	393.574
Pengaruh pajak penghasilan dari beda tetap	81.941	(363.635)
Pengaruh pajak penghasilan dari beda temporer tanpa pajak tangguhan	(3.983)	(35.607)
Beban pajak penghasilan	(37.147)	(5.668)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian liabilitas pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2025	Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2025	
Penyusutan aset tetap	(31.433)	(6.841)	-	(38.274)	Depreciation of fixed assets
Imbalan pasca kerja	97	(97)	-	-	Post-employment benefits
Liabilitas pajak tangguhan - neto	(31.336)	(6.938)	-	(38.274)	Deferred tax liability - net

16. TAXATION (continued)

e. Income Tax (continued)

Current tax (continued)

The calculation of taxable income resulting from the reconciliation for 2025 will be used as tax reporting basis in the preparation of the Company's Annual Corporate Income Tax Return (CITR).

The taxable income resulting from the reconciliation for 2024 becomes a tax reporting basis in the preparation of the Company's Annual CITR which has been reported to the Tax Office.

Reconciliation between income tax expense as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense calculated using prevailing tax rate on the income (loss) before final tax and income tax are as follows:

Income (loss) before final tax and income tax as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income

Income tax expense at effective tax rate
Effect of income tax from permanent differences
Effect of income tax from temporary differences with no deferred tax

Income tax expense

Deferred tax

Deferred tax is computed based on effect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities in the financial statements with the tax bases of assets and liabilities.

Details of deferred tax liability of the Company as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian liabilitas pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari/ January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2024	
Imbalan pasca kerja	345	(1.199)	951	97	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	(39.343)	7.910	-	(31.433)	Depreciation of fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan - neto	(38.998)	6.711	951	(31.336)	Deferred tax liability - net

Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

16. TAXATION (continued)

e. *Income Tax (continued)*

Deferred tax (continued)

Details of deferred tax liability of the Company as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, the Directorate General of Tax may assess and amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

17. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan akrual untuk:

17. ACCRUED EXPENSES

This account represents accruals for:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Pemeliharaan menara	14.908	26.124	Tower maintenance
Sewa	8.358	7.396	Rental
Perijinan dan lisensi	4.675	13.075	Permit and license
Bagi hasil	3.244	3.939	Revenue sharing
Honorarium tenaga ahli	2.941	1.387	Professional fees
Bunga	232	492	Interest
Lain-lain	6.460	6.790	Others
Jumlah	40.818	59.203	Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Sewa menara telekomunikasi	28.070	28.733	Telecommunication tower lease
Sewa peralatan jaringan	3.908	2.657	Network equipment lease
Lain-lain	1.742	6.804	Others
Jumlah	33.720	38.194	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	(25.557)	(30.343)	Less current portion
Bagian jangka panjang	8.163	7.851	Non-current portion

18. UNEARNED REVENUES

This account represents cash received from customers related to lease agreement and recognized as revenues upon delivery of service to its customers with details as follows:

19. PROVISI JANGKA PANJANG

Perusahaan mengakui liabilitas diestimasi atas biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara pada saat berakhirnya periode sewa atas tanah dan bangunan, dimana menara tersebut berada. Estimasi biaya pembongkaran menara dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Mutasi provisi jangka panjang selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal	5.664	-	Beginning balance
Provisi tahun berjalan (Catatan 11)	-	5.201	Provision during the year (Note 11)
Beban bunga (Catatan 29)	484	467	Interest expense (Note 29)
Realisasi tahun berjalan	(80)	(4)	Realization during the year
Saldo akhir	6.068	5.664	Ending balance

19. LONG-TERM PROVISION

The Company recognized the estimated liability for dismantling, removing and site restoration costs of towers at the end of lease period of the land and building, where these towers are located. The estimated cost of dismantling of towers are capitalized as part of the cost of its related fixed assets. Movements of long-term provision during the year are as follows:

Provisi estimasi biaya pembongkaran menara masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp 5.201 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap (Catatan 11).

Provision of estimated cost of dismantling of towers amounting to Rp Nil and Rp 5,201 as of December 31, 2025 and 2024 are capitalized as part of cost of fixed assets, respectively (Note 11).

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari tingkat diskonto masing-masing sebesar 8,14% dan 9% dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan masing-masing yaitu 33,05 tahun dan 33,13 tahun.

The significant assumptions as of December 31, 205 and 2024 consists of discount rate of 8.14% and 9%, respectively and remaining period before dismantling of 33.05 years and 33.13 years, respectively.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

Long-term provision will be realized when the related towers have been dismantled.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan membukukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai peraturan yang berlaku.

Pada akhir bulan Juni 2025, Perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan seluruh karyawannya dan sekaligus menghentikan program imbalan pasca kerja yang sebelumnya berlaku di Perusahaan.

Tabel berikut ini merangkum beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 22 Juli 2025 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, setelah tanggal ini tidak terdapat karyawan tetap Perusahaan dan 22 Januari 2025 untuk tahun 2024, dengan metode *projected unit credit*.

Beban (manfaat) imbalan pasca kerja

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,			
	2025	2024	
Biaya (manfaat) jasa kini	(5.877)	2.605	Current service cost (benefit)
Manfaat jasa lalu	-	(4.074)	Past service benefit
Biaya bunga	-	2.068	Interest cost
Biaya terminasi	-	11.820	Termination cost
Jumlah	(5.877)	12.419	Total

Liabilitas imbalan pasca kerja

Post-employment benefits expense (benefit)

31 Desember/December 31,		
	2025	2024
Nilai kini kewajiban	-	8.288

Post-employment benefits liability

Present value of obligation

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movements of the present value of obligation for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal tahun	8.288	36.607	Balance at beginning of year
Biaya (manfaat) jasa kini	(5.877)	2.605	Current service cost (benefit)
Manfaat jasa lalu	-	(4.074)	Past service benefit
Biaya bunga	-	2.068	Interest cost
Biaya terminasi	-	11.820	Termination cost
Pembayaran manfaat	(2.411)	(35.734)	Benefits payment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:			Remeasurement of net defined benefits obligation:
Penyesuaian pengalaman	-	(4.707)	Experience adjustment
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	267	Actuarial loss (gain) arising from change in demographics assumption
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-	(564)	Actuarial gain arising from change in financial assumption
Saldo akhir tahun	-	8.288	Balance at end of year

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movements of post-employment benefits liability for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal tahun	8.288	36.607	Balance at beginning of year
Beban (manfaat) tahun berjalan (Catatan 28)	(5.877)	12.419	Current year expense (benefit) (Note 28)
Pembayaran manfaat	(2.411)	(35.734)	Benefits payment
Pengukuran kembali program imbalan pasti	-	(5.004)	Remeasurement of defined benefits program
Saldo akhir tahun	-	8.288	Balance at end of year

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Keuntungan aktuarial kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The accumulated actuarial gain which are recognized in other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal tahun	22.183	17.179	Balance at beginning of year
Keuntungan aktuarial tahun berjalan	-	5.004	Actuarial gain for current year
Reklasifikasi ke saldo laba sehubungan dengan penghentian program	(22.183)	-	Reclassification to retained earnings due to plan termination
Saldo akhir tahun	-	22.183	Balance at end of year

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining post-employment benefits liability as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Tingkat diskonto	-	7% - 7,1%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	-	6%	Annual rate of salary increase
Usia pensiun normal	-	55 Tahun/Years	Normal pension age
Tingkat mortalita	-	TMI IV 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	-	10% TMI IV 2019	Disability rate

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari kewajiban imbalan pasti (tidak didiskontokan) adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of the defined benefits obligation (undiscounted) is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Kurang dari satu tahun	-	2.851	Less than one year
Antara satu dan lima tahun	-	1.717	Between one and five years
Antara lima dan sepuluh tahun	-	5.928	Between five and ten years
Lebih dari sepuluh tahun	-	24.498	More than ten years
Jumlah	-	34.994	Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table illustrates the sensitivity of a possible change in market interest rate, with other variables considered as constant, of present value of obligation as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Kenaikan 1%	-	(476)	Increase 1%
Penurunan 1%	-	539	Decrease 1%

Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Company has reviewed the assumptions used and believes that these assumptions are adequate. Management believes that the post-employment benefits liability is sufficient to cover the Company's post-employment benefits liability in accordance with the prevailing regulations.

21. MODAL SAHAM

21. SHARE CAPITAL

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Raya Saham Registra), susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

In accordance with the list of shareholders issued by the Share Administrator Bureau of the Company (PT Raya Saham Registra), the Company's shareholders and its ownership composition as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember/ December 31, 2025				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/Number of Shares	Persentase Kepemilikan/Percentage of Ownership	Jumlah/Total	Shareholders
PT Iforte Solusi Infotek	1.350.254.095	99,95%	675.127	PT Iforte Solusi Infotek
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	650.832	0,05%	325	Public (each below 5%)
Jumlah	1.350.904.927	100,00%	675.452	Total

31 Desember/ December 31, 2024				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/Number of Shares	Persentase Kepemilikan/Percentage of Ownership	Jumlah/Total	Shareholders
PT Iforte Solusi Infotek	1.350.586.095	99,98%	675.293	PT Iforte Solusi Infotek
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	318.832	0,02%	159	Public (each below 5%)
Jumlah	1.350.904.927	100,00%	675.452	Total

Berdasarkan pencatatan Biro Administrasi Efek, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki saham Perusahaan yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the Share Administrator Bureau's records, there are no member of the Boards of Commissioners and Directors whose own the Company's shares of stock as of December 31, 2025 and 2024.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Agio saham	602.897	602.897	Share premium
Dampak penerapan PSAK 338 (Revisi 2012)	(940)	(940)	Effect of adoption of PSAK 338 (Revised 2012)
Jumlah	601.957	601.957	Total
<u>Agio Saham</u>			<u>Share Premium</u>

Rincian agio saham adalah sebagai berikut:

This account consists of:

Details of share premium are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Penawaran umum saham perdana tahun 2012, setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp 4.812	72.311	72.311	Initial public offering in 2012, net of share issuance costs of Rp 4,812
Penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu tahun 2014, setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp 25.571	530.586	530.586	Issuance of new shares with pre-emptive rights in 2014, net of share issuance costs of Rp 25,571
Jumlah	602.897	602.897	Total

23. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Rincian penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

23. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Details of other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Saldo awal tahun	21.925	15.970	Balance at beginning of year
Penambahan tahun berjalan	-	5.955	Addition during the year
Reklasifikasi ke saldo laba	(21.925)	-	Reclassification to retained earnings
Saldo akhir tahun	-	21.925	Balance at end of year

Sehubungan dengan penghentian program imbalan pasca kerja pada tahun 2025, saldo akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 21.976 yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba.

In connection with the termination of the post-employment benefits program in 2025, the accumulated remeasurement balance of post-employment benefit liability of Rp 21,976 which previously recognized in other comprehensive income was reclassified to retained earnings.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 31 Mei 2024 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Yulia, S.H. No. 72 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk menyetujui pencadangan saldo laba sebesar Rp 1.000 sebagai dana cadangan.

24. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on the Resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated May 31, 2024 as covered by Notarial Deed No. 72 of Yulia, S.H. on the same date, the Company's shareholders resolved to approve the appropriation of retained earnings amounting to Rp 1,000 as reserve fund.

25. PENDAPATAN

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

25. REVENUES

Details of revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Sewa menara telekomunikasi	662.171	593.412	Telecommunication tower lease
Sewa peralatan jaringan dan bandwidth	209.721	269.054	Network equipment and bandwidth lease
Jumlah	871.892	862.466	Total

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent revenue value more than 10% of total revenues are as follows:

	Pendapatan/Revenues		Persentase dari jumlah pendapatan/Percentage of total revenues		
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	2025	2024	
<u>Pelanggan</u>					<u>Customers</u>
PT XLSMART Telecom					PT XLSMART Telecom
Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk)	682.832	-	78,32%	-	Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk)
PT Indosat Tbk	110.126	112.301	12,63%	13,02%	PT Indosat Tbk
PT Smart Telecom	-	650.841	-	75,46%	PT Smart Telecom
Jumlah	792.958	763.142	90,95%	88,48%	Total

*) Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/ On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

26. COST OF REVENUES

Detail of cost of revenues are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2025	2024	
Penyusutan dan amortisasi:		Depreciation and amortization:
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	118.755	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	57.854	Depreciation of right-of-use assets (Note 12)
Amortisasi perangkat lunak komputer (Catatan 13)	-	Amortization of computer software (Note 13)
Amortisasi biaya untuk memperoleh kontrak (Catatan 13)	-	Amortization of cost of obtaining contract (Note 13)
Amortisasi lain-lain	4.640	Other amortization
Sub jumlah	181.249	Sub total
Beban pokok pendapatan lainnya:		Other cost of revenues:
Pemeliharaan dan perbaikan	48.746	Repair and maintenance
Pajak dan perijinan	3.907	Tax and licenses
Listrik	1.760	Electricity
Lain-lain	7.284	Others
Sub jumlah	61.697	Sub total
Jumlah	242.946	Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the revenues.

27. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Rincian beban penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut:

27. SELLING AND MARKETING EXPENSES

Details of selling and marketing expenses are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2025	2024	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	152	Salaries and employee welfare
Lain-lain	2.776	Others
Jumlah	2.928	Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Details of general and administrative expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	14.840	111.364	Salaries and employee welfare
Honorarium tenaga ahli	2.028	11.842	Professional fees
Perbaikan dan pemeliharaan	234	965	Repair and maintenance
Sewa	81	5.862	Rental
Imbalan pasca kerja (Catatan 20)	(5.877)	12.419	Post-employment benefits (Note 20)
Transportasi dan perjalanan dinas	-	8.942	Transportation and business trip
Lain-lain	4.749	5.506	Others
Jumlah	16.055	156.900	Total

29. BIAYA KEUANGAN

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

29. FINANCE COSTS

Details of finance costs are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 12)	60.494	74.354	Interest expense on lease liabilities (Note 12)
Beban bunga pinjaman bank Pihak ketiga	53.302	154.002	Interest expense on bank loans Third parties
Pihak berelasi	4.407	-	Related party
Beban bunga provisi jangka panjang (Catatan 19)	484	467	Interest expense on long-term provision (Note 19)
Administrasi bank	30	1.676	Bank administration
Amortisasi biaya transaksi (Catatan 14)	-	6.673	Amortization of transaction costs (Note 14)
Jumlah	118.717	237.172	Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO

Rincian pendapatan (beban) lain-lain - neto adalah sebagai berikut:

30. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

Details of other income (expenses) - net are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2025	2024	
Pemulihan (penyisihan) kerugian kredit ekspektasian pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 7)	39.812	(44.009)	Recovery (provision) for expected credit losses of accrued income (Note 7)
Pemulihan (penyisihan) kerugian kredit ekspektasian piutang usaha (Catatan 6)	5.639	(4.430)	Recovery (provision) for expected credit losses of trade receivables (Note 6)
Laba (rugi) pembongkaran/ penghapusan/pelepasan aset tetap - neto (Catatan 11)	2.020	(113.564)	Gain (loss) on dismantling/ written-off/disposal of fixed assets - net (Note 11)
Pendapatan sewa	1.254	1.402	Rental income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset hak-guna (Catatan 12)	(238)	(11.804)	Provision for impairment losses of right-of-use assets (Note 12)
Laba penjualan investasi dalam bentuk saham	-	10.602	Gain on sale of investment in shares of stock
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset tetap (Catatan 11)	-	(1.069.666)	Provision for impairment losses of fixed assets (Note 11)
Penyisihan kerugian penurunan nilai dan penghapusan biaya memperoleh kontrak (Catatan 13)	-	(372.492)	Provision for impairment loss and written-off of cost of obtaining contract (Note 13)
Kerugian dari perubahan estimasi akuntansi - sewa tanah (Catatan 3)	-	(112.769)	Loss on changes in accounting estimates - land leases (Note 3)
Jasa konsultan atas akuisisi	-	(60.096)	Consultant fees on acquisition
Penyisihan kerugian penurunan nilai dan penghapusan perangkat lunak komputer (Catatan 13)	-	(11.850)	Provision for impairment loss and written-off of computer software (Note 13)
Penyisihan kerugian penurunan nilai taksiran tagihan restitusi pajak (Catatan 16b)	-	(2.976)	Provision for impairment loss of estimated claim for tax refund (Note 16b)
Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 9)	-	(1.411)	Provision for impairment losses of inventories (Note 9)
Lain-lain - neto	(16.648)	20.847	Others - net
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	31.839	(1.772.216)	Other income (expenses) - net

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

31. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2025	2024	
Laba (rugi) tahun berjalan	411.441	(1.850.836)
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	1.350.904.927	1.350.904.927
Laba (rugi) per saham dasar	305	(1.370)

31. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

The computation of basic earnings (loss) per share are as follows:

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

- PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") adalah pemegang saham Perusahaan (sejak 1 Juli 2024).
- PT Bach Multi Global dan PT Bach Multi Infrastruktur adalah entitas asosiasi dari Iforte.
- PT Bakti Taruna Sejati adalah pemegang saham Perusahaan (sampai dengan 30 Juni 2024).
- PT Bank Central Asia Tbk adalah entitas di bawah hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
- PT BIT Teknologi Nusantara adalah entitas dalam pengendalian yang sama.
- PT Integra Putra Mandiri dan PT Teknovatus Solusi Sejahtera memiliki pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Perusahaan (sampai dengan 30 Juni 2024).
- Manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

32. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into transactions with related parties in view of their common ownership and management. All transactions with related parties are conducted based on policies and terms agreed upon by both parties.

Nature of relationship with related parties

- PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") is the Company's shareholders (since July 1, 2024).
- PT Bach Multi Global and PT Bach Multi Infrastruktur is a subsidiary of associate entity of Iforte.
- PT Bakti Taruna Sejati is the Company's shareholders (until June 30, 2024).
- PT Bank Central Asia Tbk is an entity under family relationship with ultimate shareholders.
- PT BIT Teknologi Nusantara is entity under common control.
- PT Integra Putra Mandiri and PT Teknovatus Solusi Sejahtera have the same shareholders and management with the Company (until June 30, 2024).
- Key management includes the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Balances and transactions with related parties

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
<u>Kas dan bank (Catatan 4)</u>			<u>Cash on hand and in banks (Note 4)</u>
PT Bank Central Asia Tbk	569	9.017	PT Bank Central Asia Tbk
Persentase dari jumlah aset	0,01%	0,20%	Percentage to total assets
<u>Piutang lain-lain</u>			<u>Other receivable</u>
PT BIT Teknologi Nusantara	11	-	PT BIT Teknologi Nusantara
Persentase dari jumlah aset	0,00%	-	Percentage to total assets
<u>Utang usaha (Catatan 15)</u>			<u>Trade payables (Note 15)</u>
PT Bach Multi Global	2.499	-	PT Bach Multi Global
PT Bach Multi Infrastruktur	359	-	PT Bach Multi Infrastruktur
Jumlah	2.858	-	Total
Persentase dari jumlah liabilitas	0,21%	-	Percentage to total liabilities
<u>Utang lain-lain</u>			<u>Other payables</u>
PT Bach Multi Global	2.161	-	PT Bach Multi Global
PT Bach Multi Infrastruktur	152	85	PT Bach Multi Infrastruktur
PT Iforte Solusi Infotek	35	-	PT Iforte Solusi Infotek
Jumlah	2.348	85	Total
Persentase dari jumlah liabilitas	0,17%	0,00%	Percentage to total liabilities

Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2025	2024	
<u>Perolehan perangkat lunak komputer (Catatan 13)</u>			<u>Acquisition of computer software (Note 13)</u>
PT Integra Putra Mandiri	-	8.700	PT Integra Putra Mandiri
PT Teknovatus Solusi Sejahtera	-	746	PT Teknovatus Solusi Sejahtera
Jumlah	-	9.446	Total
Persentase dari jumlah perolehan perangkat lunak komputer	-	100%	Percentage to total acquisition of computer software
<u>Biaya keuangan (Catatan 29)</u>			<u>Finance costs (Note 29)</u>
PT Bank Central Asia Tbk	4.407	-	PT Bank Central Asia Tbk
Persentase dari jumlah biaya keuangan	3,71%	-	Percentage to total finance costs
<u>Kompensasi kepada manajemen kunci</u>			<u>Compensation to key management</u>
Imbalan kerja jangka pendek Dewan Komisaris	2.266	4.767	Short-term employee benefits Board of Commissioners
Direksi	-	7.198	Board of Directors
Jumlah	2.266	11.965	Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pasca kerja, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada personel manajemen kunci.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

32. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

There are no compensation of other long-term benefits other than post-employment benefits, termination benefits and share-based payment to the key management.

All transactions with related parties have been disclosed in the financial statements.

33. PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Sewa

Menara Telekomunikasi

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan beberapa operator telekomunikasi pihak ketiga, diantaranya, PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Selular dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom) ("XLSmart"), untuk penyewaan menara telekomunikasi, baik yang merupakan milik Perusahaan maupun milik pihak lain yang disewa oleh Perusahaan, dengan jangka waktu sewa berkisar antara 5 (lima) sampai 13 (tiga belas) tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, PT Indosat Tbk, PT Balcom Indonesia, PT Centratama Menara Indonesia dan PT Persada Sokka Tama sehubungan dengan penyewaan menara telekomunikasi milik pihak-pihak tersebut kepada Perusahaan dan kemudian disewakan kembali oleh Perusahaan kepada operator telekomunikasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Jaringan Serat Optik

Perusahaan menandatangani kesepakatan perjanjian sewa jaringan serat optik dengan beberapa operator telekomunikasi pihak ketiga, diantaranya, PT Indosat Tbk dan XLSmart, untuk penyewaan jaringan serat optik, baik yang merupakan milik Perusahaan maupun milik pihak lain yang disewa oleh Perusahaan, dengan jangka waktu sewa berkisar antara 5 (lima) sampai 14 (empat belas) tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Lease Agreements

Telecommunication Tower

The Company has entered into telecommunication tower lease agreements with several third parties telecommunication operators, among others, PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Selular and PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom) ("XLSmart"), for the lease of telecommunication tower, whether owned by the Company or other parties in which leased by the Company, with lease period ranging from 5 (five) to 13 (thirteen) years and can be extended with the terms and conditions as agreed by the parties.

The Company has agreements with PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, PT Indosat Tbk, PT Balcom Indonesia, PT Centratama Menara Indonesia and PT Persada Sokka Tama in connection with the leasing of telecommunication towers which is owned by these parties to the Company and then subsequently leased back by the Company to telecommunications operators for a period of 10 (ten) years and can be extended with the terms and conditions as agreed by the parties.

Fiber Optic Network

The Company has entered into fiber optic network lease agreements with several third parties telecommunication operators, among others, PT Indosat Tbk and XLSmart, for the lease of fiber optic network, whether owned by the Company or other parties which leased by the Company, with lease period ranging from 5 (five) to 14 (fourteen) years and can be extended with the terms and conditions as agreed by the parties.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

a. Perjanjian Sewa (lanjutan)

Jaringan Serat Optik (lanjutan)

Pada tanggal 9 Januari 2024, Perusahaan dan XLSmart menandatangani amandemen perjanjian sewa atas jaringan serat optik yang berlokasi di 13 kota di Indonesia yang sebelumnya akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 menjadi diperpanjang selama 1 tahun sampai 31 Maret 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp 9.000 yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2025 dan Perusahaan menyetujui untuk mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada XLSmart dengan harga pengalihan sebesar Rp 1.000 pada akhir masa sewa. Sehubungan dengan transaksi tersebut, Perusahaan telah membukukan investasi neto dalam sewa sebesar Rp 9.045 (Catatan 11) dan rugi atas pelepasan aset tetap sebesar Rp 12.108.

Pada tanggal 25 September 2023, Perusahaan dan XLSmart menandatangani amandemen perjanjian sewa atas 140 segmen jaringan serat optik yang berlokasi di berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut, masa sewa diperpanjang selama 3 (tiga) tahun dari 1 November 2023 sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan nilai sewa per bulan sebesar Rp 1.500. Pada akhir masa sewa, Perusahaan menyetujui untuk mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada XLSmart dengan harga pengalihan sebesar Rp 66.000. Sehubungan dengan transaksi tersebut, Perusahaan telah membukukan investasi neto dalam sewa sebesar Rp 97.604 dan laba atas pelepasan aset tetap sebesar Rp 75.527 pada tahun 2023.

Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Alita Praya Mitra, PT Sokka Tama Fiber dan PT Trans Indonesia Superkoridor sehubungan dengan penyewaan jaringan serat optik milik pihak-pihak tersebut kepada Perusahaan untuk kemudian disewakan kembali oleh Perusahaan kepada operator telekomunikasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Lain-lain

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Induk tanggal 26 Juni 2024 antara Perusahaan dan XLSmart, setelah berakhirnya masa sewa menara yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2034, Perusahaan akan mengalihkan perangkat sarana telekomunikasi selular Long Term Evolution ("LTE") yang terpasang di menara yang disewa oleh XLSmart dengan harga per unit sebesar Rp 1.000.000.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Lease Agreements (continued)

Fiber Optic Network (continued)

On January 9, 2024, the Company and XLSmart has signed amendment of the lease agreement for fiber optic network which located in 13 cities in Indonesia which previously will due on March 31, 2025 to be extended for 1 year until March 31, 2026 with a lease value of Rp 9,000 which will be paid on April 1, 2025 and the Company agreed to transfer the fiber optic network to XLSmart with transfer price of Rp 1,000 at end of lease period. In connection with this transaction, the Company has recorded net investment in lease amounting to Rp 9,045 (Note 11) and loss on disposal of fixed assets amounting to Rp 12,108.

On September 25, 2023, the Company and XLSmart has signed amendment to the lease agreement for 140 segment fiber optic network which located in various cities in Indonesia. Based on this agreement, the lease period has been extended for 3 (three) years from November 1, 2023 to October 31, 2026 with monthly lease value of Rp 1,500. At the end of the lease period, the Company agreed to transfer the fiber optic network to XLSmart with transfer price of Rp 66,000. In connection with this transaction, the Company has recorded net investment in lease amounting to Rp 97,604 and gain on disposal of fixed assets amounting to Rp 75,527 in 2023.

The Company has agreements with PT Alita Praya Mitra, PT Sokka Tama Fiber and PT Trans Indonesia Superkoridor in connection with the leasing of fiber optic network belonging to these parties to the Company to be subsequently leased back by the Company to telecommunications operators for 10 (ten) years and can be extended with the terms and conditions as agreed by the parties.

Others

Based on the Amendment and Restatement of the Master Lease Agreement dated June 26, 2024 between the Company and XLSmart, upon the expiration of the tower lease term on June 26, 2034, the Company will transfer the Long Term Evolution ("LTE") cellular telecommunications equipment installed on the towers leased by XLSmart with unit price of Rp 1,000,000.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

a. Perjanjian Sewa (lanjutan)

Sehubungan dengan perjanjian sewa operasi, Perusahaan sebagai *lessor* memiliki komitmen sewa operasi sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
Sampai dengan satu tahun	947.309	856.889
Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun	3.625.665	3.494.718
Lebih dari lima tahun	5.450.108	2.748.185
Jumlah	10.023.082	7.099.792

Within one year
More than one year to five years
More than five years

Total

b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jaringan Infrastruktur dan Layanan Berbasis Fiber Optik dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("PJA")

Pada tanggal 9 Mei 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan jaringan infrastruktur dan layanan berbasis fiber optik dengan PJA, dimana Perusahaan telah ditunjuk oleh PJA sebagai pihak yang memiliki hak penuh untuk membangun dan menempatkan infrastruktur telekomunikasi di kawasan Ancol serta mengelola, mengoperasikan, memelihara, menyewakan dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga manapun atas infrastruktur telekomunikasi tersebut sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir di bulan Juli 2029.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, PJA akan mendapatkan *Minimum Revenue Guarantee* dan *Revenue Sharing* per tahun sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian dan pada akhir masa perjanjian, Perusahaan akan menyerahkan seluruh kepemilikan infrastruktur telekomunikasi tersebut kepada PJA.

Investasi aset ini disajikan sebagai aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih ("BOT") (Catatan 2k dan 11)

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Lease Agreements (continued)

In relation to the operating lease agreements, the Company as lessor had operating lease commitments as follows:

b. Cooperation Agreement for Infrastructure Network Management and Fiber Optic Based Services with PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("PJA")

On May 9, 2018, the Company signed a cooperation agreement for the management of fiber optic-based infrastructure networks and services with PJA, whereby the Company has been appointed by PJA as the party that has full rights to build and construct telecommunications infrastructure in the Ancol area and also manage, operate, maintain, lease and/or collaborate with any third party on those telecommunications infrastructure until the end of this agreement in July 2029.

In connection with the agreement, PJA will receive Minimum Revenue Guarantee and Revenue Sharing per annum according to the amount as agreed in the agreement and at the end of this agreement, the Company will hand over all ownership of the telecommunications infrastructure to PJA.

The investment of this assets is presented as fixed assets under build, operate and transfer ("BOT") (Notes 2k and 11).

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan memiliki dua segmen yaitu penyewaan menara telekomunikasi dan jasa lainnya. Tidak ada segmen operasi yang digabung untuk membentuk segmen operasi yang dilaporkan di atas.

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

Informasi segmen operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

34. SEGMENT INFORMATION

The Company has two segment those are telecommunication tower lease and other services. No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segment.

Management as the operating decision maker monitors the operating results of business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are accounted at market value.

The Company's operating segment information is as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/ Year Ended December 31, 2025				
	Sewa Menara Telekomunikasi/ Telecommunication Tower Lease	Sewa Peralatan Jaringan dan Bandwidth/ Network Equipment and Bandwidth Lease	Jumlah/ Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan	662.171	209.721	871.892	Revenues
Laba bruto	502.646	126.300	628.946	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(848)	(2.080)	(2.928)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(7.319)	(8.736)	(16.055)	General and administrative expenses
Laba usaha	494.479	115.484	609.963	Income from operations
Penghasilan keuangan	30	91	121	Finance income
Biaya keuangan	(111.951)	(6.766)	(118.717)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	33.733	(1.894)	31.839	Other income (expenses) - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	416.291	106.915	523.206	Income before final tax and income tax
Pajak final	(74.669)	-	(74.669)	Final tax
Laba sebelum pajak penghasilan	341.622	106.915	448.537	Income before income tax
Pajak penghasilan	(182)	(36.914)	(37.096)	Income tax
Laba tahun berjalan	341.440	70.001	411.441	Income for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Jumlah aset segmen	2.507.282	1.438.286	3.945.568	Total segment assets
Jumlah liabilitas segmen	1.276.629	89.111	1.365.740	Total segment liabilities

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi segmen operasi Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

The Company's operating segment information is as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/ Year Ended December 31, 2024				
	Sewa Menara Telekomunikasi/ Telecommunication Tower Lease	Sewa Peralatan Jaringan dan Bandwidth/ Network Equipment and Bandwidth Lease	Jumlah/ Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan	593.412	269.054	862.466	Revenues
Laba bruto	296.938	67.864	364.802	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(2.648)	(1.201)	(3.849)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(107.954)	(48.946)	(156.900)	General and administrative expenses
Laba usaha	186.336	17.717	204.053	Income from operations
Penghasilan keuangan	11.259	5.105	16.364	Finance income
Biaya keuangan	(163.184)	(73.988)	(237.172)	Finance costs
Beban lain-lain - neto	(1.219.357)	(552.859)	(1.772.216)	Other expenses - net
Rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan	(1.184.946)	(604.025)	(1.788.971)	Loss before final tax and income tax
Pajak final	(56.197)	-	(56.197)	Final tax
Rugi sebelum pajak penghasilan	(1.241.143)	(604.025)	(1.845.168)	Loss before income tax
Pajak penghasilan	(3.900)	(1.768)	(5.668)	Income tax
Rugi tahun berjalan	(1.245.043)	(605.793)	(1.850.836)	Loss for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Jumlah aset segmen	3.040.798	1.378.703	4.419.501	Total segment assets
Jumlah liabilitas segmen	1.548.860	702.254	2.251.114	Total segment liabilities

35. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair values, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Kas dan bank, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, investasi neto dalam sewa, piutang lain-lain, utang bank, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual mendekati estimasi nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Aset keuangan tidak lancar dan liabilitas keuangan jangka panjang

- Nilai wajar setoran jaminan diasumsikan sama dengan nilai terutanganya karena tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tahun pelaporan.
- Nilai wajar investasi neto dalam sewa - jangka panjang dan liabilitas sewa dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Desember/December 31,	
	2025	2024
<u>Aset Keuangan</u>		
Aset keuangan lancar		
Kas di bank	1.103	18.138
Aset keuangan lancar lainnya	516	527
Piutang usaha - neto	118.797	302.868
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	86.214	133.288
Investasi neto dalam sewa - jangka pendek	175.604	168.639
Piutang lain-lain	3.768	4.052
Jumlah aset keuangan lancar (saldo dipindahkan)	386.002	627.512

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Company's financial instruments:

Current financial assets and current financial liabilities

Cash on hand and in banks, other current financial asset, trade receivables, accrued income, net investment in lease - current, other receivables, bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying values due to their short-term nature.

Non current financial assets and non-current financial liabilities

- The fair value of security deposits are assumed to be the same as their original principal amounts because they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting year.
- The fair value of net investment in lease - non-current and lease liabilities are calculated using discounted cash flows at market interest rate.

The following table sets forth the fair values, which approximate their carrying amounts, of the Company's financial assets and financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

<u>Financial Assets</u>
Current financial assets
Cash in banks
Other current financial asset
Trade receivables - net
Accrued income - net
Net investment in lease - current
Other receivables
Total current financial assets (balance carry forward)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

The following table sets forth the fair values, which approximate their carrying amounts, of the Company's financial assets and financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2025	2024	
Jumlah aset keuangan lancar (saldo pindahan)	386.002	627.512	Total current financial assets (balance carried forward)
Aset keuangan tidak lancar			Non-current financial assets
Investasi neto dalam sewa - jangka panjang	452.834	685.858	Net investment in lease - non-current
Aset tidak lancar lainnya: Setoran jaminan	1.101	1.141	Other non-current assets: Security deposits
Jumlah aset keuangan tidak lancar	453.935	686.999	Total non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	839.937	1.314.511	Total financial assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Liabilitas keuangan jangka pendek			Current financial liabilities
Utang bank	567.300	1.340.000	Bank loans
Utang usaha	101.412	107.753	Trade payables
Utang lain-lain	89.955	40.691	Other payables
Beban akrual	40.818	59.203	Accrued expenses
Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa	134.748	119.670	Current portion of lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	934.233	1.667.317	Total current financial liabilities
Liabilitas keuangan jangka panjang			Non-current financial liability
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian jangka pendek	340.412	495.562	Lease liabilities - net of current portion
Jumlah liabilitas keuangan	1.274.645	2.162.879	Total financial liabilities

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Perusahaan terdiri dari utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas sewa. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk keperluan operasi Perusahaan. Perusahaan memiliki kas di bank, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, investasi neto dalam sewa dan piutang lain-lain yang timbul dari kegiatan usahanya.

Perusahaan terpengaruh terhadap risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perusahaan mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut untuk memastikan aktivitas keuangan Perusahaan dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan profil risiko Perusahaan. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif, jika diperlukan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum pajak penghasilan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/Increase/ decrease in basis point
31 Desember 2025	
Rupiah Indonesia	+100
Rupiah Indonesia	-100
31 Desember 2024	
Rupiah Indonesia	+100
Rupiah Indonesia	-100

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risk Management

The main financial liabilities of the Company includes bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and lease liabilities. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the Company operations. The Company also has cash in banks, other current financial asset, trade receivables, accrued income, net investment in lease and other receivables that raise directly from its operations.

The Company is exposed to interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks to ensure the Company's financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk profile. The Company's Board of Directors reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below.

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to bank loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis and entering into agreements for derivatives transactions, if needed.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the income before income tax is affected by the impact on floating rate loans as follows:

	Dampak terhadap laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on income before income tax
December 31, 2025	
Indonesian Rupiah	(5.673)
Indonesian Rupiah	5.673
December 31, 2024	
Indonesian Rupiah	(13.400)
Indonesian Rupiah	13.400

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara telekomunikasi dan jasa lainnya. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Perusahaan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima dan investasi neto dalam sewa dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan sebesar nilai tercatat neto dari aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, investasi neto dalam sewa dan piutang lain-lain sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7 dan 8.

Risiko kredit atas penempatan rekening koran bank dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh Direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

b. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from their operating activities related to telecommunication tower lease and other services. Customer credit risk is managed by a Credit Committee subject to the Company's established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer trade receivables, accrued income and net investment in lease are regularly monitored.

The Company's maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of other current financial asset, trade receivables, accrued income, net investment in lease and other receivables as disclosed in Notes 5, 6, 7 and 8.

Credit risk arising from placements of bank current accounts is managed in accordance with the Company's policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the Board of Directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

The following table presents the credit quality and aging analysis of financial assets of the Company as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/December 31, 2025						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Sub jumlah/ Sub total	Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ Allowance for expected credit losses	Jumlah - neto/ Total - net	
Kas di bank	1.103	-	-	1.103	-	1.103	Cash in banks
Aset keuangan lancar lainnya	516	-	-	516	-	516	Other current financial assets
Piutang usaha - neto	86.696	32.101	877	119.674	(877)	118.797	Trade receivables - net
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	86.214	-	4.197	90.411	(4.197)	86.214	Accrued income - net
Investasi neto dalam sewa	628.438	-	-	628.438	-	628.438	Net investment in lease
Piutang lain-lain	3.768	-	-	3.768	-	3.768	Other receivables
Jumlah	806.735	32.101	5.074	843.910	(5.074)	838.836	Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2024							
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub jumlah/ <i>Sub total</i>	Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ <i>Allowance for expected credit losses</i>	Jumlah - neto/ <i>Total - net</i>		
Kas di bank	18.138	-	-	18.138	-	18.138	Cash in banks
Aset keuangan lancar lainnya	527	-	-	527	-	527	Other current financial assets
Piutang usaha - neto	3.285	299.583	6.516	309.384	(6.516)	302.868	Trade receivables - net
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	133.288	-	44.009	177.297	(44.009)	133.288	Accrued income - net
Investasi neto dalam sewa	854.497	-	-	854.497	-	854.497	Net investment in lease
Piutang lain-lain	4.052	-	-	4.052	-	4.052	Other receivables
Jumlah	1.013.787	299.583	50.525	1.363.895	(50.525)	1.313.370	Total

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas di bank yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perusahaan menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang usaha serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perusahaan berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

b. Credit risk (continued)

The following table presents the credit quality and aging analysis of financial assets of the Company as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

c. Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Company have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash in banks to support business activities on a timely basis. The Company maintain a balance between continuity of trade receivables collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

The following table summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

31 Desember/December 31, 2025						
Jatuh tempo/Maturity period					Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Jumlah/Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1 - 3 tahun/ 1 - 3 years	3 - 5 tahun/ 3 - 5 years			
Utang bank	567.300	567.300	-	-	-	Bank loans
Utang usaha	101.412	101.412	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	89.955	89.955	-	-	-	Other payables
Beban akrual	40.818	40.818	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	475.160	134.748	199.804	114.580	26.028	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	1.274.645	934.233	199.804	114.580	26.028	Total financial liabilities

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2024						
Jatuh tempo/Maturity period						
	Jumlah/Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1 - 3 tahun/ 1 - 3 years	3 - 5 tahun/ 3 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang bank	1.340.000	1.340.000	-	-	-	Bank loans
Utang usaha	107.753	107.753	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	40.691	40.691	-	-	-	Other payables
Beban akrual	59.203	59.203	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	615.232	119.670	230.525	180.236	84.801	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2.162.879	1.667.317	230.525	180.236	84.801	Total financial liabilities

Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Selain itu, Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk berkontribusi sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran deviden kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun berjalan.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize the shareholders value.

In addition, the Company is also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute and to maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. These externally imposed capital requirements are considered by the Company at the Annual Shareholders' General Meeting.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for current year.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. TRANSAKSI NON-KAS

Rincian transaksi non-kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

37. NON-CASH TRANSACTIONS

Details of non-cash transactions of the Company are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2025	2024	
Aset tetap:		Fixed assets:
Penambahan aset tetap melalui utang usaha (Catatan 11 dan 15)	21.006	Addition of fixed assets through trade payables (Notes 11 and 15)
Reklasifikasi uang muka ke aset tetap (Catatan 10 dan 11)	6.851	Reclassification of advances to fixed assets (Notes 10 and 11)
Reklasifikasi persediaan ke aset tetap (Catatan 9 dan 11)	2.143	Reclassification of inventories to fixed assets (Notes 9 and 11)
Penambahan aset tetap melalui provisi jangka Panjang (Catatan 11 dan 19)	-	Addition of fixed assets through long-term provision (Notes 11 and 19)
Reklasifikasi beban dibayar di muka ke aset tetap	-	Reclassification of prepaid expenses to fixed assets
Utang bank:		Bank loans:
Kenaikan utang bank atas amortisasi biaya transaksi (Catatan 14 dan 29)	-	Increase in bank loans on amortization of transaction costs (Notes 14 and 29)
Liabilitas sewa:		Lease liabilities:
Penambahan liabilitas sewa melalui biaya keuangan (Catatan 12 dan 29)	60.494	Addition of lease liabilities through finance costs (Notes 12 and 29)
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa (Catatan 12)	59.032	Addition of right-of-use assets through lease liabilities (Note 12)
Penurunan liabilitas sewa karena terminasi kontrak (Catatan 12b)	(24.301)	Decrease in lease liability due to termination contract (Note 12b)
Perubahan estimasi akuntansi (Catatan 12b)	-	Change in accounting estimate (Note 12b)

38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

38. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/Year Ended December 31, 2025					
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/Cash flows		Perubahan lain/Other changes	Saldo akhir/ Ending balance
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment		
Utang bank	1.340.000	6.445.916	(7.218.616)	-	567.300
Liabilitas sewa	615.232	-	(235.297)	95.225	475.160
Jumlah	1.955.232	6.445.916	(7.453.913)	95.225	1.042.460

Bank loans
Lease liabilities

Total

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

38. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

Changes in liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/Year Ended December 31, 2024

	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/Cash flows		Perubahan lain/Other changes	Saldo akhir/ Ending balance	
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Utang bank jangka pendek	100.000	2.895.000	(1.655.000)	-	1.340.000	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	2.380.570	-	(2.387.243)	6.673	-	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	754.391	-	(266.875)	127.716	615.232	Lease liabilities
Jumlah	3.234.961	2.895.000	(4.309.118)	134.389	1.955.232	Total

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Utang Bank

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Pada tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan, Protelindo, Iforte, STP dan BSI telah menandatangani Adendum Perjanjian Bersama Pembiayaan No. 14 tanggal 25 November 2024 dengan nilai fasilitas sebesar Rp 1.000.000 (Catatan 14) sehubungan dengan pelepasan Perusahaan dan STP sebagai peminjam serta pelepasan tanggung renteng dalam Perjanjian Pinjaman.

- PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN dan STP sebagai penerima pinjaman serta Permata, sebagai kreditur telah menandatangani Adendum Perjanjian Fasilitas (Adendum Ketentuan Khusus) atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 17 November 2025 (Catatan 14) sehubungan dengan konversi fasilitas Pinjaman Berulang menjadi Fasilitas Omnibus Pinjaman Berulang termasuk di dalamnya terdapat Fasilitas Bank Garansi/Fasilitas Counter Guarantee sesuai limit yang ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas. Fasilitas Omnibus Pinjaman Berulang tersebut berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2028.

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Bank Loans

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

On March 9, 2026, the Company, Protelindo, Iforte, STP and BSI have signed an Addendum of Joint Financing Agreement No. 14 dated November 25, 2024 with facility amount of Rp 1,000,000 (Note 14) in connection with the release of the Company and STP as borrowers and the release from joint and several liability under the Loan Agreement.

- PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On March 9, 2026, the Company, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN and STP as the borrowers and Permata as the creditor have signed an Addendum to the Facility Agreement (Addendum on Specific Provisions) to the Amendment and Restatement of the Facility Agreement dated November 17, 2025 (Note 14) in relation to the conversion of the Revolving Loan Facility into an Omnibus Revolving Loan Facility, which also includes the Bank Guarantee Facility and/or Counter Guarantee Facility in accordance with the limits stipulated in the Facility Agreement. The Omnibus Revolving Loan Facility will remain effective until November 17, 2028.

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Utang Bank (lanjutan)

- PT Bank Permata Tbk ("Permata") (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2026, Perusahaan, PTI, Iforte, BIT, STP, IPI, VTS dan IEN selaku para Peminjam, bersama dengan Permata selaku Pemberi Pinjaman, menandatangani Surat Konfirmasi Perubahan Syarat dan Ketentuan Perjanjian atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang dan Pinjaman Berjangka tanggal 17 November 2025, yang antara lain mengatur penambahan sub-limit sementara untuk IPI yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026.

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Bank Loans (continued)

- PT Bank Permata Tbk ("Permata") (continued)

On March 13, 2026, the Company, PTI, Iforte, BIT, STP, IPI, VTS and IEN as Borrowers, together with Permata as the Lender, signed a Confirmation Letter on the Amendment of Terms and Conditions in relation to the Amendment and Restatement of the Revolving Loan and Term Loan Facility Agreement dated November 17, 2025, which among others, provides for the addition of a temporary sub-limit for IPI effective from March 17, 2026 until March 25, 2026.



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Jalan Tanjung Karang No. 11,
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati Kudus,
Jawa Tengah - Indonesia
Tel. | Phone: +62291 435984

☎ Phone : +62291 435984